

**GUBERNUR JAMBI**

## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

*GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025–2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
  - b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana baik kuantitas, kualitas maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, disebutkan pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025–2050.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050 yang selanjutnya disebut GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
14. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
20. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN STRATEGI

#### Bagian Kesatu

#### Arah Kebijakan

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- (2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan.
- (3) Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
- (4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- (5) Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:
  - a. penduduk tumbuh seimbang;
  - b. manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
  - c. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
  - d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
  - e. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya.

#### Bagian Ketiga

#### Strategi

#### Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui lima pilar meliputi:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

BAB III  
PENETAPAN GDPK

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan GDPK Provinsi Jambi Tahun 2025–2050.
- (2) GDPK Provinsi Jambi Tahun 2025-2050 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
BAB III	: PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN
BAB IV	: VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
BAB V	: KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
BAB VI	: PETA JALAN ( <i>ROAD MAP</i> )
BAB VII	: PENUTUP

- (3) GDPK Provinsi Jambi Tahun 2025–2050 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN GDPK

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan GDPK Provinsi Jambi Tahun 2025–2050 didukung oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK bertugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan GDPK di Daerah.
- (3) Tugas Tim Koordinasi Pelaksanan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk melaksanakan monitoring pelaksanaan GDPK lima pilar di Daerah secara berkala.
- (4) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK memperhatikan kebijakan dan program percepatan pembangunan kependudukan nasional dan arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK, terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari perangkat daerah terkait dan lembaga non Pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

- (3) Pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja Tim Koordinasi GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali per tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan GDPK di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) kali per tahun.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program GDPK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 21 Desember 2024

**GUBERNUR JAMBI**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 21 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

**ttd**

**H.SUDIRMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR:  
(13-256/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
*GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2025 – 2050

I. UMUM

Pembangunan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk kuantitas penduduk, kualitas penduduk, kualitas keluarga, bahkan persebaran penduduk dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, penduduk mempunyai peran yang sangat penting karena penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik, dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya.

Pengejawantahan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara tersebut dalam aspek kependudukan perlu dilakukan upaya pembangunan kependudukan dengan sasaran terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk serta peningkatan kualitas keluarga sejahtera dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Jumlah penduduk yang besar namun tidak diimbangi dengan keserasian, keselarasan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pembangunan kependudukan maka diperlukan kebijakan yang mampu memberikan arahan untuk menyinergikan pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diharapkan dapat mengintegrasikan pilar-pilar pembangunan kependudukan.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui consensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting. Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi 5 (lima) pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2050 ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang memuat materi arah kebijakan, tujuan dan strategi pembangunan kependudukan Provinsi Jambi, pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dengan rentang tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2050 akan dilaporkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri sebagai instrumen monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2050 akan membutuhkan pendanaan yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

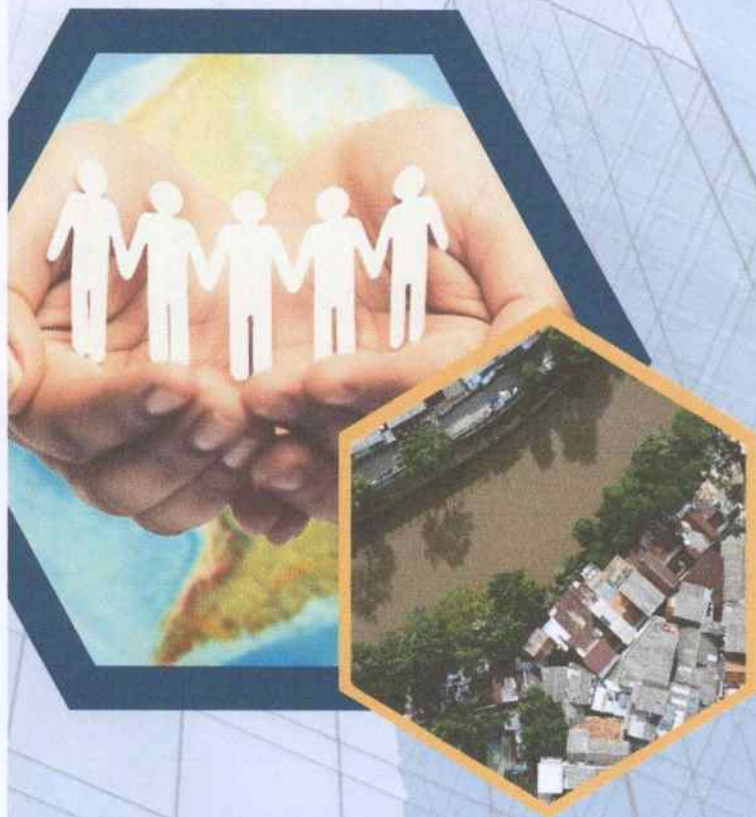
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 51

LAMPIRAN :  
PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG GRAND DESIGN  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
PROVINSI JAMBI, TAHUN 2025 - 2050

# GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 - 2050

**PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK, PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK,  
PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK, PEMBANGUNAN KELUARGA  
BERKUALITAS, DAN PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2024**





**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 66 /KEP.GUB/DP3AP2-1.1/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS GRAND DESIGN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2050**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan kependudukan melalui program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia, dipandang perlu Membentuk Tim Perumus *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perumus *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Tim Pengarah, bertugas memastikan seluruh kebijakan pembangunan kependudukan dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sejalan dengan visi dan misi Gubernur Jambi serta agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- B. Tim Perumusan dan Penyusunan, bertugas:
1. Tim Perumus dan Penyusunan Pilar I mempunyai tugas melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pengaturan mobilitas agar penduduk tumbuh seimbang;
  2. Tim Perumus dan Penyusunan Pilar II (Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk) mempunyai tugas melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk melalui peningkatan fasilitas dan aksesibilitas kesehatan, Pendidikan, pembangunan karakter bangsa, peningkatan nilai agama, peningkatan perekonomian, dan peningkatan sosial budaya agar penduduk mempunyai kualitas tinggi, berdaya saing dan berkarakter;
  3. Tim Perumus dan Penyusunan Pilar III mempunyai tugas melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dan pembinaan kesejahteraan keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas, sejahtera lahir dan batin;
  4. Tim Perumus dan Pilar IV mempunyai tugas melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk melalui perencanaan dan pembangunan wilayah, perencanaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian daerah, perluasan lapangan kerja, penerapan IPTEK dalam teknologi tepat guna agar mobilitas dan persebaran penduduk seimbang dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai kearifan lokal; dan

5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perumus *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Tim Pengarah, bertugas memastikan seluruh kebijakan pembangunan kependudukan dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sejalan dengan visi dan misi Gubernur Jambi serta agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- B. Tim Perumusan dan Penyusunan, bertugas:
1. Tim Perumus dan Penyusunan Pilar I mempunyai tugas melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pengaturan mobilitas agar penduduk tumbuh seimbang;
  2. Tim Perumus dan Penyusunan Pilar II (Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk) mempunyai tugas melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk melalui peningkatan fasilitas dan aksesibilitas kesehatan, Pendidikan, pembangunan karakter bangsa, peningkatan nilai agama, peningkatan perekonomian, dan peningkatan sosial budaya agar penduduk mempunyai kualitas tinggi, berdaya saing dan berkarakter;
  3. Tim Perumus dan Penyusunan Pilar III mempunyai tugas melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dan pembinaan kesejahteraan keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas, sejahtera lahir dan batin;
  4. Tim Perumus dan Pilar IV mempunyai tugas melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk melalui perencanaan dan pembangunan wilayah, perencanaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian daerah, perluasan lapangan kerja, penerapan IPTEK dalam teknologi tepat guna agar mobilitas dan persebaran penduduk seimbang dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai kearifan lokal; dan

5. Tim Perumus dan Penyusunan Pilar V mempunyai tugas melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang *Database*, Informasi dan Administrasi Kependudukan melalui revitalisasi registrasi kelahiran, kematian dan pindah-datang agar diperoleh sistem data base kependudukan yang akurat dan terpercaya.

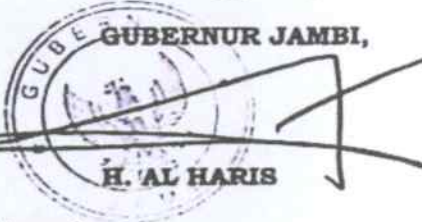
C. Tim Ahli, bertugas:

1. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050;
2. melakukan kajian dan menyusun instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050; dan
3. memberikan substansi dan pertimbangan teknis kepada Pengarah untuk pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050.

D. Penyusun Naskah Akademik, bertugas melakukan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 951/KEP.GUB/DP3AP2-1.1/2023 tentang Pembentukan Tim Perumus *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2024-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 01 Januari 2024

GUBERNUR JAMBI,  
  
H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Jambi;

4. Wakil Gubernur Jambi;
5. Inspektur Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 66 /KEP.GUB/DP3AP2-1.1/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS *GRAND  
DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2050

SUSUNAN TIM PERUMUS *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2050

- A. TIM PENGARAH : 1. Gubernur Jambi  
2. Wakil Gubernur Jambi
- B. TIM PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN
1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
  2. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
  3. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
  4. Anggota :
    - a. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
    - b. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
    - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
    - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
    - e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
    - f. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
    - g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
    - h. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
    - i. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
5. Kelompok Kerja
1. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk (Pilar I):
    - a. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
    - b. Anggota :
      - 1) Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

- 2) Dr. Risma Mulia, S.Psi., M.Si (Penata KKB Ahli Madya/Ketua Tim Pokja Rumah Data Kependudukan dan Pemanfaatan isu di Kampung KB dan Pendidikan Kependudukan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi)
- 3) Rita Rifa'ati, M.Si (Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi)
- 4) Ade Sutriawan, S.K.M., M.K.M. (Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda/Sub Koordinator KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi)
- 5) Dian Noviana Rusti, S.K.M., M.P.H. (Analisis Alat Reproduksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi)

2. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk (Pilar II):

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
- b. Anggota :
  - 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
  - 2) Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
  - 3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
  - 4) Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Dinas Kominfo Provinsi Jambi
  - 5) Novriati, S.K.M. (Penyusun Mekanisme Operasional KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi)

3. Bidang Pembangunan Keluarga (Pilar III):

- a. Ketua : Ketua Tim Pokja 10, Tim Fasilitasi GDPK, Parameter Kependudukan dan Kelompok Bangsa Kencana yang efektif, Siperindu Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
- b. Anggota :
  - 1) Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
  - 2) Nurjanah, S.H., M.H. (Perancang Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)

- 3) Azazi Karim, S.Pd., M.M. (Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi)
  - 4) Suwardi, S.E., M.Pd (Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Pokja 10, Fasilitasi GDPK, Parameter Kependudukan dan Bangsa Kelompok Kencana yang efektif, Siperindu Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi)
  - 5) Dela Viska Popiyeni, S.Sos (Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda/Sub Koordinator Pengelola Kependudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi)
4. Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk (Pilar IV):
- a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jambi
  - b. Anggota :
    - 1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jambi
    - 2) Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
    - 3) Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
    - 4) Dyah Kartika Sari, S.K.M., M.K.M. (Analisis Sarana dan Prasarana KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi)
    - 5) Dessi Aldyana, ' Str.Keb (Pengadministrasi Kependudukan)
5. Bidang *Database*, Informasi dan Administrasi Kependudukan (Pilar V):
- a. Ketua : Sekretaris Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
  - b. Anggota :
    - 1) Kepala Bidang Urusan Agama Islam (URAI) Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Jambi
    - 2) Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
    - 3) Kepala Seksi Pencatatan Sipil Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

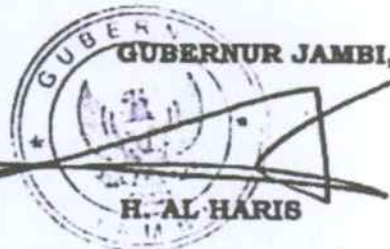
- 4) Nurhidayah, S.H., M.H. (Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
- 5) Anggiat SMG, S.H. (Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
- 6) Mardiyani, S.E. (Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda/Sub Koordinator Kesehatan Reproduksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi)

C. Tenaga Ahli

1. Ketua : Prof. DR. Ir, Suandi, M.Si, IPU
2. Anggota : a. Prof. DR. H. Junaidi, S.E., M.Si  
b. DR. Pantun Bukit, S.E., M.Si
3. Tenaga Teknis : a. DR. Ir. Endy Efran, S.P., M.Si  
b. Dwi Hastuti, S.E., M.Sc

D. Penyusun Naskah Akademik

1. Ketua : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi
2. Anggota : a. Budi Lesmana S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)  
b. Wahyudi, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)  
c. Pratiwi Thalib, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)



## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan bimbingan-Nya, kami berhasil menyelesaikan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis arah kebijakan yang terkandung dalam program lima Tahunan pembangunan kependudukan di Provinsi Jambi, sejalan dengan target pembangunan kependudukan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, kami diberi amanat untuk menyusun Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) guna mengelola dinamika kependudukan di wilayah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, Provinsi Jambi melakukan kajian terkait dengan dokumen Grand Design Kependudukan (GDPK) yang terdiri dari lima pilar. Tujuan utamanya adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan agar sesuai dengan perencanaan pembangunan kependudukan secara keseluruhan serta target-target dalam rencana strategis dan rencana kerja RPJMN.

Kunci keberhasilan dokumen ini adalah dengan memanfaatkan berbagai kesempatan serta membangun sumber daya manusia yang unggul hingga Tahun 2050. Oleh karena itu, diperlukan upaya kerjasama antara pemangku kepentingan baik dari pusat maupun daerah serta antar sektor. Kegiatan ini mempertimbangkan pembahasan dokumen GDPK melalui forum pokja serta melibatkan para pakar dalam penyempurnaan dokumen.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas-Dinas terkait yang telah memberikan kontribusi berharga dengan menyediakan informasi dan data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen ini hingga selesai. Semoga Dokumen ini dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek selama Periode 2025-2050, yang mencakup RPJPN, RPJMN, RPJPD, dan RPJMD.

Dengan terselesaikannya dokumen GDPK Provinsi Jambi dapat menjadidasar membuat kebijakan strategis dalam pembangunan daerah jangka panjang di bidang-bidang seperti: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengembangan database kependudukan. Kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini. Semoga Grand Design ini Pembangunan Kependudukan ini bermanfaat bagi pembangunan Provinsi Jambi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, 28 April 2024

Tim Penyusun

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**LAMPIRAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Sasaran
  - 1.2.1. Tujuan
  - 1.2.2. Sasaran
- 1.3. Pengertian Indikator GDPK
- 1.4. Permasalahan Kependudukan
- 1.5. Ruang Lingkup
- 1.6. Pengembangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar
- 1.7. Dasar Hukum

### **BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**

- 2.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk (Pilar 1)
  - 2.1.1. Fertilitas
    - A. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
    - B. Total Fertility Rate (TFR)
    - C. *Age Specific Fertility Rate* (ASFR)
    - D. Unmet Need (%)
    - E. Persentase WUS Kawin (15-49 Tahun)
    - F. Penggunaan Kontrasepsi
    - G. Median Usia Kawin Pertama (MUKP)
    - H. Persentase Penduduk Lansia (65+) Menurut Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal di Provinsi Jambi
    - I. Umur Harapan Hidup Provinsi Jambi
  - 2.1.2. Mortalitas
    - A. *Infant Mortality Rate* (IMR)
    - B. Angka Kematian Balita (AKB)
    - C. Angka Kematian Anak/ *Child Mortality Rate* (CMR)

## 2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk (Pilar II)

### 2.2.1. Kesehatan

2.2.1.2. Jaminan Kesehatan

2.2.1.3. Jenis Penyakit berdasarkan Kabupaten/Kota

2.2.1.4. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan (%)

2.2.1.5. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan (%)

2.2.1.6. Persentase Balita Gizi Buruk Provinsi Jambi

2.2.1.7. Prevalensi Stunting

2.2.1.8. Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan Imunisasi Dasar Lengkap

2.2.1.9. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak (%)

2.2.1.10. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi

### 2.2.2. Pendidikan

2.2.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

2.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jambi

2.2.2.3. Persentase APK SD/MI Kab/Kota Provinsi Jambi

2.2.2.4. Persentase APK SMP/MTS Kab/Kota Provinsi Jambi

2.2.2.5. Persentase APK SMA/MAN Kab/Kota Provinsi Jambi

2.2.2.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jambi, 2018-2022

2.2.2.7. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jambi, 2018-2022

2.2.2.8. Angka Harapan Lama Sekolah

2.2.2.9. Indeks Pendidikan dalam IPM

2.2.2.10. IPM menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi

### 2.2.3. Ekonomi

2.2.3.1. Tingkat Partisipasi Angka Kerja

2.2.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

2.2.3.3. Tingkat Kesempatan Kerja Kab/Kota Provinsi Jambi 2017-2023

2.2.3.4. Laju Pertumbuhan PDB

2.2.3.5. Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia Tahun

2.2.3.6. Persentase Penduduk Miskin

- 2.2.3.7. PDRB
- 2.2.2.8. Gini Ratio
- 2.2.2.9. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
- 2.3. Pembangunan Keluarga (Pilar III)
  - 2.3.1. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)
  - 2.3.2. Median Usia Perkawinan Pertama
  - 2.3.3. Angka Perceraian
  - 2.3.4. Indeks Pembangunan Gendr (IPG)
  - 2.3.5. Persentase Keluarga memiliki balita mengikuti kegiatan BKB
  - 2.3.6. Persentase Keluarga memiliki Remaja mengikuti BKR
  - 2.3.7. Persentase Keluarga yang punya Lansia Ikut BKL Provinsi Jambi
  - 2.3.8. Prevalensi Stunting
  - 2.3.9. Persentase Keluarga Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim
  - 2.3.10. Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Jambi
  - 2.3.11. Persentase Rumah Layak Huni
- 2.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk (Pilar IV)
  - 2.4.1. Persebaran Penduduk
  - 2.4.2. Kepadatan Penduduk
    - 2.4.2.1. Migrasi Seumur Hidup
    - 2.4.2.2. Migrasi Risen
    - 2.4.2.3. Komuter
  - 2.4.3. Komposisi Penduduk
- 2.5. Pembangunan Data dan Informasi kependudukan (Pilar V)
  - 2.5.1 Rasio Penduduk Ber KTP
  - 2.5.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran
  - 2.5.2. Penduduk Berakte Nikah
  - 2.5.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Base Kependudukan
- 2.6. Analisis SWOT

### **BAB III PROYEKSI DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN**

- 3.1. Proyeksi Jumlah dan Komposisi Umur Penduduk
- 3.2. Proyeksi Tingkat Fertilitas Penduduk
- 3.3. Proyeksi Tingkat Mortalitas
- 3.4. Proyeksi Migrasi
- 3.4. Proyeksi Indikator

## **BAB IV VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN<sup>191</sup>**

### **KEPENDUDUKAN DAERAH**

4.1. Visi Provinsi Jambi

4.2. Misi Provinsi Jambi

4.2.1. Misi Provinsi Jambi berdasarkan RPJPD Provinsi Jambi

4.2.2. Misi Provinsi Jambi Secara Khusus terkait GDPK

4.3. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah

## **BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

### **BAB VI PETA JALAN (ROAD MAP)**

6.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

6.1.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2025-2030

6.1.2. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2030-2035

6.1.3. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2035-2040

6.1.4. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2040-2045

6.1.5. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2045-2050

6.2. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

6.2.1. Peningkatan Kualitas Penduduk 2025-2030

6.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk 2030-2035

6.2.3. Peningkatan Kualitas Penduduk 2035-2040

6.2.4. Peningkatan Kualitas Penduduk 2040-2045

6.2.5. Peningkatan Kualitas Penduduk 2045-2050

6.3. Roadmap Pembangunan Keluarga

6.3.1. Roadmap Pembangunan Keluarga 2025-2030

6.3.2. Roadmap Pembangunan Keluarga 2030-2035

6.3.3. Roadmap Pembangunan Keluarga 2035-2040

6.3.4. Roadmap Pembangunan Keluarga 2040-2045

6.3.5. Roadmap Pembangunan Keluarga 2045-2050

6.4. Roadmap Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

6.4.1. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2025-2030

6.4.2. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2030-2035

6.4.3. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2035-2040.

6.4.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2040-2045

- 6.4.5. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2045-2050
- 6.5. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan
  - 6.5.1. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan 2025-2030
  - 6.5.2. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan 2030-2035
  - 6.5.3. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan 2035-2040
  - 6.5.4. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan 2040-2045
  - 6.5.5. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan 2045-2050

## **BAB VII PENUTUP**

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2. 1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) menurut kabupaten/kota<sup>26</sup>
- Tabel 2. 2. Angka *Age Spesific Fertility Rate*/ASFR) 15-19, menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2022-2023
- Tabel 2. 3. Persentase WUS Kawin (15-49 Tahun) Menurut Status Penggunaan Alat/Cara dan Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2020
- Tabel 2. 4. Median Usia Kawin Pertama menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022-2023
- Tabel 2. 5. Persentase Penduduk Lansia (65+) Tahun 2022
- Tabel 2. 6. Komposisi Umur Penduduk Provinsi Jambi, Tahun 2020-2022
- Tabel 2. 7. Angka kematian bayi menurut Kab/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020
- Tabel 2. 8. Akses Terhadap Sanitasi Layak, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2023
- Tabel 2. 9. Jaminan Kesehatan, Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi, 2021-2023
- Tabel 2.10. Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan (Persen), Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2022
- Tabel 2. 11. Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020 – 2023
- Tabel 2. 12. APS Menurut Kelompok Umur, Provinsi Jambi Tahun 2015-2022
- Tabel 2. 13. Angka Harapan Lama Sekolah
- Tabel 2. 14. Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Jambi, 2020-2023
- Tabel 2. 15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2017-2023
- Tabel 2. 16. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2023
- Tabel 2. 17. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi 2017-2023

- Tabel 2. 18. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi 2017-2023
- Tabel 2. 19. Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Jambi
- Tabel 2. 20. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi 2018-2023 (Milyar)
- Tabel 2. 21. Distribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi (Persen), 2018-2022
- Tabel 2. 22. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Milyar Rupiah)
- Tabel 2. 23. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi Jambi Maret 2022-Maret 2023
- Tabel 2. 24. Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin 10 Tahun ke Atas Menurut Tempat Tinggal, 2019
- Tabel 2. 25. Indikator Prevalensi Stunting Per Kab/Kota Provinsi Jambi, 2018-2022
- Tabel 2. 26. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim Kab/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2021 - 2022
- Tabel 2. 27. Persentase Rumah Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2023
- Tabel 2. 28. Program Generasi Berencana Jumlah Remaja Hadir Konseling Pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa Desember 2023
- Tabel 2. 29. Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Per Kab Kota Tahun 2015-2020 (Jiwa)
- Tabel 2. 30. Persentase Luas Daratan dengan Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Per Kabupaten/Kota Tahun 2015-2022
- Tabel 2. 31. Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2015-2022 (Jiwa/Km)
- Tabel 2. 32. Statistik Migrasi Provinsi Jambi Hasil LF Sensus Penduduk 2020
- Tabel 2. 33. Kebutuhan dan Ketersediaan ruang hidup layak (tidak waran bencana bagi penduduk Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota pada Tahun 2020
- Tabel 2. 34. Persentase penduduk memiliki e-KTP berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

Tabel 2. 35. Perkembangan jumlah Akte Nikah di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

Tabel 2. 36. Jumlah Penduduk Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

Tabel 3. 1. Proyeksi Jumlah, Jenis Kelamin dan Komposisi Umur Penduduk Periode Tahun 2020-2050

Tabel 3. 2. Proyeksi Parameter Jumlah Penduduk

Tabel 3.3. Proyeksi Tingkat Mortalitas

Tabel 3. 4. Program kesehatan dan keluarga berencana

Tabel 6. 1. Roadmap Total Penduduk, Dependency Rasio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Tabel 6. 2. Perkiraan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Tabel 6. 3. Perkiraan Harapan Lama Bersekolah (HLS)

Tabel 6. 4. Angka Harapan Hidup 2025-2050

Tabel 6. 5. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rp Juta ) Periode 2025-2050

Tabel 6. 6. Roadmap Pembangunan Keluarga

Tabel 6. 7. Proyeksi iBangga, IPG, Angka Percerian, dan Persentase Lansia

Tabel 6. 8. Perkiraan PDRB Perkapita

Tabel 6. 9. Perkiraan Tingkat kemiskinan

Tabel 6. 10. Perkiraan Tingkat pengangguran

Tabel 6. 11. Perkiraan Gini Ratio

Tabel 6. 12. Perkiraan Stunting

Tabel 6. 13. Perkiraan Angka Kematian Bayi

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. 1. Tujuan Pembangunan kependudukan Selama Periode 2025-2050
- Gambar 1. 2. Kerangka Pikir Perumusan (GDPK) Provinsi Jambi 2025-2050
- Gambar 2. 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi dan Indonesia
- Gambar 2. 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- Gambar 2. 3. Unmet Need (%) Provinsi Jambi Tahun 2022-2023
- Gambar 2. 4. Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi, Tahun 2022-2023
- Gambar 2. 5. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR, 2021 - 2023
- Gambar 2. 6. Prevalensi Pemakaian MKJP, Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2023
- Gambar 2. 7. Tingkat putus pakai kontrasepsi (DCR) 12 bulan, 2021 - 2023
- Gambar 2. 8. Median Umur Kawin Pertama, Provinsi Jambi dan Indonesia selama
- Gambar 2. 9. Umur Harapan Hidup Provinsi Jambi, Tahun 2006 - 2023
- Gambar 2. 10. Angka Kematian Bayi/AKB (Infant Mortality Rate/IMR) Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2020
- Gambar 2. 11. Angka kematian balita/*under five mortality rate* (U5MR) menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2020
- Gambar 2.12. Angka kematian anak/*child mortality rate* (CMR) Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2020
- Gambar 2. 13. Kasus Penyakit Malaria (Suspek), Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022
- Gambar 2. 14. Kasus TB Paru, Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi, 2019-2022
- Gambar 2. 15. Pneumonia
- Gambar 2. 16. Kasus Kusta Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi, 2019-2022
- Gambar 2. 17. Kasus Campak Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi, 2019-2022
- Gambar 2. 18. Kasus DBD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2019-2022
- Gambar 2.19. Penduduk mempunyai keluhan tidak punya biaya berobat, menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022
- Gambar 2. 20. Penduduk Mempunyai Keluhan Tidak Punya Biaya Transportasi, Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022
- Gambar 2. 21. Penduduk mempunyai keluhan tidak ada sarana transportasi, menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

- Gambar 2. 22. Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan karena Waktu Tunggu Pelayanan Lama, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022
- Gambar 2. 23. Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan karena Mengobati Sendiri, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022
- Gambar 2. 24. Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan karena Tidak Ada yang Mendampingi, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022
- Gambar 2. 25. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan karena Merasa Tidak Perlu, Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022
- Gambar 2. 26. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan karena Lainnya, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022
- Gambar 2. 27. Persentase Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023
- Gambar 2. 28. Indikator Prevalensi Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022
- Gambar 2. 29. Kondisi Kesehatan Masyarakat Provinsi Jambi, Tahun 2020 - 2023
- Gambar 2. 30. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2022
- Gambar 2. 31. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022
- Gambar 2. 32. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022
- Gambar 2. 33. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022
- Gambar 2. 34. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022
- Gambar 2. 35. Persentase APK SD/MI Kab/Kota Provinsi Jambi
- Gambar 2. 36. Persentase APK SMP/MTS Kab/Kota Provinsi Jambi
- Gambar 2. 37. Persentase APK SMA/MAN Kab/Kota Provinsi Jambi
- Gambar 2. 38. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jambi, 2018-2022
- Gambar 2. 39. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jambi, 2018-2022
- Gambar 2. 40. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022
- Gambar 2. 41. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022
- Gambar 2. 42. Angka Partisipasi Murni (APM) SM/ sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022
- Gambar 2. 43. Angka Partisipasi Murni (APM) PT Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi, 2022
- Gambar 2. 44. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi
- Gambar 2. 45. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

- Gambar 2. 46. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)
- Gambar 2. 48. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jambi, Maret 2017- Maret 2023
- Gambar 2. 48. Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) Provinsi Jambi
- Gambar 2. 49. Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)
- Gambar 2. 50. Persentase Data Nikah, Cerai Talak, dan Cerai Gugat, Provinsi Jambi
- Gambar 2. 51. Perkembangan Data Nikah, Cerai Talak, dan Cerai Gugat
- Gambar 2. 52. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2022
- Gambar 2. 53. Jumlah Keluarga Anggota BKB, di Provinsi Jambi
- Gambar 2. 54. Persentase Keluarga BKB, Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2023
- Gambar 2. 55. Jumlah Keluarga Punya Remaja Ikut BKR Provinsi Jambi
- Gambar 2. 57. Persentase Keluarga Yang Punya Remaja Ikut BKR Provinsi Jambi
- Gambar 2. 57. Jumlah keluarga anggota BKL, menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi
- Gambar 2. 58. Presentase keluarga anggota BKL, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022-2023
- Gambar 2. 59. Kampung KB di Provinsi Jambi Tahun 2021-2023
- Gambar 2. 60. Jumlah Migrasi Seumur Hidup di Provinsi Jambi berdasarkan jenis kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2020
- Gambar 2. 61. Trend jumlah penduduk Provinsi Jambi periode 2015-2020
- Gambar 2. 62. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten /Kota Provinsi Jambi 2020
- Gambar 2. 63. Perkembangan kepemilikan e-KTP di Provinsi Jambi/ 2015-2020
- Gambar 2. 64. Perkembangan Akta kelahiran yang tercatat pada dinas dukcapil provinsi Jambi tahun 2020
- Gambar 2. 65. Analisis Strategi Model SWOT Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Jambi 2025-2050
- Gambar 3. 1 . *Net Migration Rate*
- Gambar 4. 1. Keterkaitan Dokumen GDPK, dan Dokumen Daerah lainnya
- Gambar 4. 2. Tantangan GDPK Provinsi Jambi 2025-2050
- Gambar 6.1. Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar
- Gambar 6. 2. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Gambar 6. 3. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk
- Gambar 6. 4. Roadmap Pembangunan Keluarga Berkualitas
- Gambar 6. 5. Roadmap Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk
- Gambar 6. 6. Roadmap Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan



## LAMPIRAN

- Lampiran 1. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2020-2033 (X 1000)
- Lampiran 2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2034-2050 (X 1000)
- Lampiran 3. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2020-2033 (X 1000)
- Lampiran 4. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2034-2050 (X 1000)
- Lampiran 5. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2020-2033 (X 1000)
- Lampiran 6. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Laki-Laki Dan Perempuan Tahun 2034-2050 (X 1000)
- Lampiran 7. Prevalensi Stunting 2023 (%)
- Lampiran 8. Indikator Prevalensi Stunting Per Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi
- Lampiran 9. Parameter Indikator Kependudukan Provinsi Jambi
- Lampiran 10. Piramida Penduduk Indonesia
- Lampiran 11. Piramida Penduduk Provinsi Jambi
- Lampiran 12. Parameter Kependudukan Provinsi Jambi 2020-2050
- Lampiran 13. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin Provinsi Jambi, 2020
- Lampiran 14. Angka Kelahiran Hasil Long Form SP2020 Menurut Kelompok Umur Ibu (Age Specific Fertility Rate/ASFR) dan Provinsi/Kab/Kota, 2020
- Lampiran 15. Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Specific Fertility Rate/ASFR) dan Provinsi, 1971-2020
- Lampiran 16. Age Specific Fertility Rate/ASFR Usia 16-19 Tahun
- Lampiran 17. Dependency Ratio hasil proyeksi penduduk
- Lampiran 18. Prevalensi Pemakaian MKJP
- Lampiran 19. Angka Kematian Ibu/AKI (Maternal Mortality Rate/MMR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi, 2020
- Lampiran 20. Angka Kematian Balita (Under Five Mortality Rate/U5MR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020
- Lampiran 21. IMR Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi/Kab/Kota, 2020
- Lampiran 22. Angka Harapan Hidup
- Lampiran 23. DCR (Angka Putus Pakai KB)

- Lampiran 24. Median Usia Kawin Pertama Perempuan Sedang/Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota, 2023
- Lampiran 25. Unmet Need
- Lampiran 26. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Hasil Long Form (LF) SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020
- Lampiran 27. Angka Kematian Anak (Child Mortality Rate/CMR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi, 2020
- Lampiran 28. Angka Kematian Bayi/AKB (Infant Mortality Rate/IMR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020
- Lampiran 29. Jumlah Sekolah Dasar (SD)
- Lampiran 30. Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA)
- Lampiran 31. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Lampiran 32. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah 'Aliyah Negeri
- Lampiran 33. Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Lampiran 34. Murid Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Lampiran 35. Indikator Kesehatan (Persen)
- Lampiran 36. PDRB ADHK Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Milyar Rupiah)
- Lampiran 37. Tabel PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Milyar Rupiah)
- Lampiran 38. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (Milyar Rupiah)
- Lampiran 39. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)
- Lampiran 40. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi Tahun 2015-2023
- Lampiran 41. Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia
- Lampiran 42. Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, K4
- Lampiran 43. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi 2015-2020
- Lampiran 44. Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki, 2015-2020
- Lampiran 45. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Jambi 2015-2022
- Lampiran 46. Persentase APM SD/MI Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi
- Lampiran 47. Persentase APM SMP/MTs Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi
- Lampiran 48. Persentase APM SMA/SMK/MA Kab/Kota Provinsi Jambi
- Lampiran 49. Persentase APK SD/MI Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi
- Lampiran 50. Persentase APK SMP/MTs Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi

- Lampiran 51. Persentase APK SMA/SMK/MA Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi
- Lampiran 52. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi 2017-2023
- Lampiran 53. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Provinsi Jambi 2017-2023
- Lampiran 54. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi
- Lampiran 55. Data Nikah Cerai Talak Cerai Gugat
- Lampiran 56. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi
- Lampiran 57. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi
- Lampiran 58. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Tempat Tinggal (ribu orang)
- Lampiran 59. Persentase Penduduk Miskin (P0)
- Lampiran 60. Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah 2015-2023
- Lampiran 61. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2015-2023
- Lampiran 62. Program Generasi Berencana Jumlah PIK Remaja dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK Remaja) yang Melakukan Pertemuan dan Remaja Hadir Pertemuan Desember 2022
- Lampiran 63. Program Generasi Berencana Jumlah PIK Remaja dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK Remaja) yang Melakukan Pertemuan dan Remaja Hadir Pertemuan Desember 2023
- Lampiran 64. Program Generasi Berencana Jumlah Remaja Hadir Konseling Pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja Dan Mahasiswa (PIK Remaja) Desember 2022
- Lampiran 65. Program Generasi Berencana Jumlah Remaja Hadir Konseling Pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja Dan Mahasiswa (PIK Remaja) Desember 2023
- Lampiran 66. Jumlah Keluarga yang Punya Balita Ikut Bina Keluarga Balita (BKB) Hadir Pertemuan Penyuluhan Desember 2022324
- Lampiran 67. Jumlah Keluarga yang Punya Balita Ikut Bina Keluarga Balita (BKB) Hadir Pertemuan Penyuluhan Desember 2023325
- Lampiran 68. Jumlah Keluarga Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Hadir Pertemuan Penyuluhan Desember 2022
- Lampiran 69. Jumlah Keluarga Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Hadir Pertemuan Penyuluhan Desember 2023

- Lampiran 70. Jumlah Keluarga Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Hadir Dalam Pertemuan Penyuluhan
- Lampiran 71. Jumlah Keluarga Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Hadir Dalam Pertemuan Penyuluhan
- Lampiran 72. Indikator Akses Air Minum Layak Per Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2023
- Lampiran 73. Indikator Akses Sanitasi Layak Per Kab/Kota Se Provinsi Jambi
- Lampiran 74. Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Per Kab/Kota Se Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2023
- Lampiran 75. Kampung KB Per Kab/Kota Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2023
- Lampiran 76. Indikator Akses Rumah Layak Huni Per Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2023
- Lampiran 77. Jumlah Pelaku Berdasarkan Jenis Kerlamin
- Lampiran 78. Jumlah Pelaku Berdasarkan Kewarganegaraan
- Lampiran 79. Jumlah Pelaku Berdasarkan Kewarganegaraan
- Lampiran 80. Jumlah Jenis Layanan yang diberikan
- Lampiran 81. Jumlah Korban menurut banyaknya layanan
- Lampiran 82. Jumlah Jenis Kekerasan yang dialami Korban
- Lampiran 83. Jumlah Korban Menurut Banyaknya Kekerasan yang dialami
- Lampiran 84. Jumlah Kasus berdasarkan Tempat Kejadian
- Lampiran 85. Jumlah Korban berdasarkan Tempat Kejadian
- Lampiran 86. Jumlah Kasus berdasarkan Jenis Kelamin
- Lampiran 87. Korban Perempuan
- Lampiran 88. Rasio Bayi Berakta Kelahiran Per Kab/Kota Periode 2015-2017
- Lampiran 89. Rasio Bayi Berakta Kelahiran Per Kab/Kota Periode 2018-2020
- Lampiran 90. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Per Kab/Kota Provinsi Jambi Periode 2015-2017
- Lampiran 91. Rasio Bayi Berakta Kelahiran Per Kab/Kota Provinsi Jambi Periode 2018-2020
- Lampiran 92. Rasio Penduduk Berakta Nikah Menurut Kab/Kota Propinsi Jambi Periode 2015-2017
- Lampiran 93. Rasio Penduduk Berakta Nikah Menurut Kab/Kota Propinsi Jambi Periode 2018-2020

- Lampiran 94. Jumlah Penduduk Yang Meiliki EKTP Periode 2015-2016
- Lampiran 95. Jumlah Penduduk Yang Meiliki Ektp Periode 2017-2018
- Lampiran 96. Jumlah Penduduk Yang Meiliki EKTP Periode 2019-2020
- Lampiran 97. Arus Migrasi Seumur Hidup (Jiwa) Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tanjab Barat, Tebo
- Lampiran 98. Arus Migrasi Seumur Hidup (Jiwa) Kabupaten Bungo, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Lainnya
- Lampiran 99. Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
- Lampiran 100. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi
- Lampiran 101. Komposisi Penduduk dan Persentase Penduduk Lansia
- Lampiran 102. Umur Harapan Hidup
- Lampiran 103. Umur Harapan Hidup Provinsi Jambi
- Lampiran 104. Penduduk Menurut Kelompok Umur, Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Provinsi Jambi
- Lampiran 105. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi
- Lampiran 106. Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Menurut Kab/Kota, 2020
- Lampiran 107. Rasio Jenis Kelamin Provinsi Menurut Kabupaten/Kota
- Lampiran 108. Kepadatan Provinsi Jambi
- Lampiran 109. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jambi
- Lampiran 110. Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi
- Lampiran 111. Laju Pertumbuhan Pendudukan Menurut Kab/Kota
- Lampiran 112. Jumlah Penduduk di Pulau Sumatera Tahun 2020
- Lampiran 113. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Nasional
- Lampiran 114. Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Provinsi Jambi
- Lampiran 115. Indikator Angka Harapan Hidup
- Lampiran 116. Jumlah Pernikahan Islam di KUA Periode Tahun 2015 - 2023
- Lampiran 117. Persentase Penduduk Miskin

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Misalnya dalam konteks ini, kebijakan kependudukan Indonesia tidak hanya mencakup regulasi jumlah penduduk, tetapi juga berbagai aspek lain seperti administrasi kependudukan, pembangunan daerah, dan kesehatan masyarakat. Dalam implementasinya pemerintah daerah berperan penting dalam menjalankan kebijakan kependudukan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat (Sari & Frinaldi, 2022), (Fitriyani et al., 2022) misalnya program-program keluarga berencana desa (kampung KB) untuk mengatasi masalah kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sebagai salah satu daerah di Indonesia, Provinsi Jambi memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Selama Tahun 2010 - 2020, pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi mencapai 1,34 persen per tahun, relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 1,25 persen per tahun.

Faktor utama tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan masih relatif tingginya angka kelahiran di Provinsi Jambi. Pada Tahun 2023 angka kelahiran total (TFR) Provinsi Jambi sebesar 2.28 lebih tinggi jika dibandingkan dengan TFR Nasional 2,18. Mengiringi angka kelahiran ini, persoalan yang dihadapi antara lain masih relatif tingginya unmet need KB (9,18 persen pada Tahun 2023) serta masih rendahnya prevalensi penggunaan MKJP pada pasangan usia subur (17,92 persen pada Tahun 2023).

Pertumbuhan penduduk tinggi berpotensi menimbulkan tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur. Pengendalian kuantitas penduduk tidak hanya berfokus pada pengaturan laju pertumbuhan, tetapi juga memastikan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas daya dukung lingkungan dan perekonomian. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi peningkatan permintaan (*demand*) yang harus disediakan oleh pemerintah terkait penyediaan

sarana dan prasarana akan kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan dan papan yang meningkat (Drew et al., 2014).

Adapun indikator penting lainnya terkait dengan perkembangan kuantitas penduduk Provinsi Jambi adalah komposisi penduduk berdasarkan umur menunjukkan bahwa struktur usia Provinsi Jambi, yang didominasi oleh kelompok usia produktif, memiliki potensi besar sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dengan *dependency ratio* Tahun 2020 yang sebesar 44,61 persen, saat ini Provinsi Jambi berada pada tahap bonus demografi lanjut (SiPerindu, 2024). Dalam posisi yang menguntungkan ini Provinsi Jambi dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan penduduk usia produktifnya (Adriani & Yustini, 2021).

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa bonus demografi ini akan berakhir pada Tahun 2040. Oleh karenanya Provinsi Jambi perlu melakukan persiapan dan strategi yang matang untuk memanfaatkan periode bonus demografi ini secara optimal. Langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, peningkatan fasilitas kesehatan untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas melalui pengembangan industri dan sektor ekonomi kreatif.

Bersamaan dengan berakhirnya bonus demografi, pada tahun yang sama Provinsi Jambi menghadapi tantangan berikutnya yaitu proporsi lansia yang mencapai di atas 10%, yang menunjukkan struktur umur penduduk Provinsi Jambi memasuki kategori penduduk tua. Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam konteks ini mencakup peningkatan beban pada sistem kesehatan, kebutuhan akan peningkatan dukungan sosial dan keuangan untuk lansia, serta tantangan dalam mempertahankan produktivitas ekonomi. Dalam menghadapi transisi demografis ini, diperlukan strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk memitigasi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam konteks kualitas penduduk, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi sudah termasuk kategori tinggi yaitu sebesar 72,27, namun demikian masih belum mencapai

target RPJMN sebesar 80. Peningkatan IPM pada dasarnya terkait dengan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi dari penduduk. Dari dimensi kesehatan, isu yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum tercapainya secara merata target penurunan stunting dan masih relatif tingginya stunting pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Persoalan disparitas capaian antar Kabupaten/Kota ini juga terjadi juga dalam dimensi pendidikan. Dari sisi ekonomi, pada Tahun 2023, tingkat kemiskinan Provinsi Jambi masih relatif tinggi di atas target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 7,5 persen. Ini menunjukkan bahwa pendekatan dan upaya pembangunan yang lebih terfokus diperlukan untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Persoalan lainnya, terkait dengan kualitas penduduk ini adalah masih relatif tingginya ketimpangan gender di Provinsi Jambi, yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022 yang sebesar 88,95 persen yang masih lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 91,63.

Dalam konteks pembangunan keluarga, tantangan-tantangan yang dihadapi Provinsi Jambi adalah belum tercapainya target sanitasi dan rumah layak, masih rendahnya keterjangkauan air minum layak, masih rendahnya keterjangkauan jaminan kesehatan dan masih tinggi angka perceraian. Terkait dengan perceraian ini menunjukkan bahwa kasus perceraian Provinsi Jambi yang mencapai 5.465 kasus pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan sebesar 9% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat 5.000 kasus.

Tantangan di bidang kependudukan lainnya yang dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah terkait dengan sebaran penduduk yang tidak merata dengan tingkat kepadatan penduduk perkotaan yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh urbanisasi yang cepat serta migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Fenomena ini dipicu oleh pencarian kesempatan kerja yang lebih baik, akses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang lebih memadai di perkotaan, serta persepsi tentang kualitas hidup yang lebih tinggi di kota dibandingkan di pedesaan. Dampak dari sebaran penduduk yang tidak merata ini sangat luas, mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di Provinsi Jambi.

Dari segi sosial, ketidakmerataan sebaran penduduk ini berpotensi meningkatkan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di area perkotaan. Tingkat persaingan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan serta akses terbatas terhadap perumahan yang terjangkau dapat menimbulkan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di permukiman kumuh. Selain itu, tekanan terhadap fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi juga meningkat, sering kali melebihi kapasitas yang ada.

Dari perspektif ekonomi, ketidakseimbangan ini dapat memperlebar jurang antara perkotaan dan pedesaan, di mana daerah perkotaan menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini dapat mengakibatkan terabaikannya sektor-sektor ekonomi pedesaan seperti pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi beberapa daerah di Provinsi Jambi.

Dari sisi lingkungan, urbanisasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah seperti polusi udara dan air, pengelolaan sampah yang tidak adekuat, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Deforestasi dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur perkotaan juga berpotensi merusak ekosistem lokal dan mengurangi ruang hijau.

Dalam aspek tata kelola administrasi kependudukan, Provinsi Jambi menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu masalah utama adalah belum terintegrasinya sistem data kependudukan secara efektif. Hal ini berarti bahwa data kependudukan belum terkonsolidasi dalam satu platform yang memudahkan akses dan pembaruan informasi. Akibatnya, pengelolaan data kependudukan belum berjalan dengan optimal, menghambat pelayanan publik yang efisien dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah belum tercakupnya seluruh penduduk dalam administrasi kependudukan. Masalah ini mencerminkan adanya kelompok-kelompok penduduk yang belum terdaftar secara resmi, baik karena kendala geografis, ekonomi, maupun sosial. Akibatnya, mereka tidak memiliki dokumen

kependudukan yang sah, seperti kartu identitas, yang membatasi akses mereka terhadap berbagai layanan publik dan hak-hak sipil.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa Provinsi Jambi menghadapi tantangan kependudukan yang sangat kompleks, yang mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan seperti pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengembangan database kependudukan. Masalah-masalah ini saling terkait, sehingga intervensi dalam satu aspek kependudukan dapat mempengaruhi indikator-indikator lain. Pengelolaan kependudukan yang efektif sangat penting dan memegang peran strategis dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs) Tahun 2000.

Untuk mengatasi tantangan demografis yang dinamis ini, telah dikembangkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), sebuah pendekatan komprehensif yang dirancang oleh Janah et al. (2021). GDPK bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja strategis melalui integrasi lima pilar utama, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan database kependudukan. Masing-masing pilar memiliki tujuan khusus yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya alam dan infrastruktur, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, pengelolaan urbanisasi, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan ketersediaan data kependudukan yang akurat.

Dokumen GDPK, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 66/Kep.GUB/DP3AP2-1.1/2024, merupakan integrasi dari data dan kebijakan hasil kerja kelompok kerja. Penyusunan GDPK menjadi sangat penting untuk mengintegrasikan kependudukan dalam agenda pembangunan, menjawab kebutuhan untuk pembangunan yang harmonis antara populasi dan sumber daya, dan mendukung

pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Penyusunan GDPK untuk Provinsi Jambi diharapkan dapat mengukuhkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mengatasi isu kependudukan, meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan, dan mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang serta keluarga berkualitas. Dokumen ini diharapkan memastikan langkah-langkah strategis diambil untuk menghadapi tantangan demografis masa depan, dengan fokus pada sinergi dan harmonisasi antara berbagai pilar kependudukan.

Melalui GDPK, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat diharapkan menjadi lebih proaktif dalam mencegah dan mencari solusi terhadap permasalahan kependudukan. Dokumen ini juga diharapkan dapat menyediakan arahan kebijakan untuk perencanaan dan implementasi pembangunan kependudukan dari tahun 2025 hingga 2050, menanggapi kompleksitas isu kependudukan dan dinamika sosial ekonomi yang berubah.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran**

### **1.2.1. Tujuan**

Kegiatan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Provinsi Jambi memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Terwujudnya kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Menciptakan kerangka kebijakan yang jelas dan terarah dalam mengelola masalah kependudukan di Provinsi Jambi.
3. Mengintegrasikan variabel-variabel kependudukan, seperti pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, dan struktur usia penduduk, ke dalam proses perencanaan dan pembangunan di Provinsi Jambi
4. Meningkatkan kualitas hidup penduduk Provinsi Jambi melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperhatikan aspek-aspek demografi dalam perencanaan pembangunan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih

baik untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

5. Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan rencana pembangunan bidang kependudukan.
6. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar meningkatkan kualitas proses penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
7. Mendorong terwujudnya Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi secara efektif dalam peningkatan kualitas pembangunan kependudukan.
8. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk.
9. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (*valid*) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.
10. Menyediakan acuan yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan bagi pemangku kepentingan dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
11. komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan upaya yang relevan dengan isu tertentu dalam Pembangunan
12. Memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga provinsi, melalui internalisasi isi *Grand Design* ke dalam Rencana Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Instansi Pemerintah.

### **1.2.2.Sasaran**

Kegiatan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Provinsi Jambi memiliki beberapa sasaran, yaitu:

1. Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kematian dan kelahiran.
2. Meningkatkan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan. Pertama, sasaran tersebut dapat mencakup pengendalian pertumbuhan populasi dengan menetapkan target untuk tingkat kelahiran yang lebih rendah melalui promosi perencanaan keluarga dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi.
3. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan yang berkualitas, akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja lokal. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi.
4. Penataan persebaran dan pengarahan penduduk untuk mengelola pertumbuhan populasi secara lebih merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur yang merata, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang kurang berkembang, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
5. Mengembangkan kebijakan yang mendukung mobilitas yang berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh provinsi.
6. Membangun keluarga yang berkualitas melalui program-program pendukung seperti penyediaan layanan sosial dan dukungan bagi keluarga, promosi nilai-nilai keluarga yang sehat, dan pemberdayaan perempuan dalam keluarga dan Masyarakat.

### 1.3. Pengertian Indikator GDPK

Kegiatan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Provinsi Jambi memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Pengertian
1	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar	Berdasarkan Perpres No. 153 Tahun 2014 GDPK merupakan Arah kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)*	Persentase pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu tertentu, yang dapat berdampak pada tekanan terhadap sumber daya ekonomi dan pembangunan.
3	Total Jumlah Penduduk (000)	Jumlah total penduduk suatu wilayah dalam ribuan orang.
4	<i>SexRatio</i>	Rasio jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan dalam populasi tertentu, biasanya diukur dalam jumlah laki-laki per 100 perempuan.
5	<i>Dependency Ratio</i>	Rasio antara jumlah penduduk yang tidak produktif (biasanya anak-anak dan lanjut usia) dengan jumlah penduduk yang produktif (usia kerja), yang mencerminkan beban ketergantungan pada populasi yang produktif.
6	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )	Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, dengan angka kelahiran per 1.000 perempuan
7	Angka Kelahiran Kasar ( <i>Crude Birth Rate/CBR</i> )	Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
8	Angka Kematian Bayi/ <i>AKB (Infant Mortality Rate/IMR)</i>	Kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak
9	Angka Kelahiran Usia Remaja ( <i>ASFR 15-19 Tahun</i> )	Rata-rata jumlah kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 Tahun dalam kurun waktu tertentu.
10	Angka Kematian Ibu/ <i>AKI (Maternal Mortality Rate/MMR)</i>	Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni

		kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan,
11	Angka Kematian Balita ( <i>Under Five Mortality Rate/U5MR</i> )	Tingkat Kematian di Bawah Usia Lima Tahun, merupakan indikator penting dalam bidang kesehatan masyarakat untuk menilai jumlah kematian anak di bawah usia lima Tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam suatu populasi tertentu, biasanya dalam periode waktu tertentu, seringkali satu Tahun.
12	Angka Kematian Anak ( <i>Child Mortality Rate/CMR</i> )	Indikator penting dalam bidang kesehatan masyarakat yang mengukur jumlah kematian anak di bawah usia tertentu dalam suatu populasi, sering kali dinyatakan sebagai jumlah kematian anak di bawah usia lima Tahun per 1.000 kelahiran hidup. CMR memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan anak dan efektivitas sistem perawatan kesehatan dalam suatu negara atau wilayah.
13	Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi	persentase dari jumlah wanita usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi tertentu dalam suatu populasi.
14	<i>Contraceptive Prevalence Rate/(CPR)</i>	Persentase wanita usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi tertentu dalam suatu populasi.
15	Prevalensi Perempuan Pernah Kawin 15-19 Tahun	Persentase perempuan usia 15-19 Tahun yang pernah menikah dalam suatu populasi.
16	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Usia tengah di mana separuh dari populasi perempuan telah menikah untuk pertama kalinya.
17	<i>Unmet Need (%)</i>	Persentase wanita usia subur yang ingin menghindari kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi atau menggunakan metode kontrasepsi yang tidak efektif.
18	Angka Harapan Hidup	Rata-rata umur yang diharapkan seseorang hidup pada saat lahir, yang mencerminkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan suatu populasi.
19	Angka Kematian Bayi	Jumlah kematian bayi (usia 0-1 Tahun) per 1.000 kelahiran hidup dalam suatu populasi.
20	Angka Kematian Balita	Jumlah kematian anak di bawah usia lima Tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam suatu populasi.

21	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi	Indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan manusia di Provinsi Jambi, biasanya mencakup aspek-aspek seperti pendidikan (tingkat literasi, partisipasi sekolah), kesehatan (angka harapan hidup, tingkat kematian bayi), dan pendapatan per kapita.
22	Tingkat Pengangguran	Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi siap untuk bekerja dan aktif mencari pekerjaan.
23	Tingkat Inflasi	Persentase kenaikan umum dalam harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi dalam kurun waktu tertentu, yang dapat mempengaruhi daya beli penduduk dan kestabilan ekonomi.
24	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi	Indeks yang mengukur kesetaraan gender di Provinsi Jambi, biasanya mencakup aspek-aspek seperti tingkat pendidikan, partisipasi dalam angkatan kerja, dan akses terhadap layanan kesehatan antara gender laki-laki dan perempuan.
25	Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki di Provinsi Jambi	Rasio antara jumlah angka partisipasi murni (APM) perempuan dengan jumlah APM laki-laki di Provinsi Jambi. APM mengukur persentase populasi yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi atau tenaga kerja.
26	Indeks Kesehatan Masyarakat Provinsi Jambi	Indeks yang mengukur tingkat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi, termasuk angka kematian, angka kelahiran, prevalensi penyakit, dan akses terhadap layanan kesehatan.
27	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi:	Indeks yang sama seperti di atas, namun dipecahkan menurut tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi, sehingga memberikan gambaran lebih terperinci tentang kondisi kesehatan masyarakat di tingkat lokal.
28	Persentase Ibu Bersalin ditolong Tenaga Kesehatan Provinsi Jambi:	Persentase dari jumlah ibu yang melahirkan di Provinsi Jambi yang mendapatkan bantuan dari tenaga kesehatan terlatih saat proses persalinan.
29	Persentase Kunjungan K4 Provinsi Jambi:	Persentase dari jumlah wanita hamil di Provinsi Jambi yang mendapatkan setidaknya empat kali kunjungan ke bidan atau fasilitas kesehatan selama masa kehamilan untuk pemeriksaan prenatal yang lengkap.

30	Persentase Balita Gizi Buruk Provinsi Jambi:	Persentase dari jumlah balita di Provinsi Jambi yang mengalami kekurangan gizi berdasarkan kriteria tertentu seperti indeks berat badan menurut umur (BB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U).
31	Persentase Kejadian Stunting Pada Balita Provinsi Jambi:	Persentase dari jumlah balita di Provinsi Jambi yang mengalami stunting, yaitu kondisi gagal pertumbuhan linier anak yang mengakibatkan tinggi badan anak lebih pendek dari yang seharusnya dalam usia tertentu.
32	Persentase Stunting Pada Baduta Provinsi Jambi	Persentase dari jumlah bayi atau baduta (usia 0-23 bulan) di Provinsi Jambi yang mengalami stunting.
33	Kemiskinan ekstrem	Penduduk yang memiliki 1,9 US dollar PPP ( <i>purchasing power parity</i> ) per hari. Jika dikonversikan dengan rupiah 1,9 US dollar PPP pada tahun 2021 setara sekitar 11.941 rupiah. Artinya penduduk yang penghasilan sehari tidak mencapai 12.000 rupiah termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem.
34	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.
35	Angka Partisipasi Murni (APM)	Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

37	Rasio Gini	Sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi.
38	Penduduk miskin	Seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu mereka yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan layak, layanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi.
39	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.
40	Keluarga Pra Sejahtera (KPS)	Keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" ( <i>basic needs</i> ).
41	BKB atau Bina Keluarga Balita	Program yang dibentuk BKKBN dalam rangka membina keluarga dalam mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal melalui pola asuh yang benar. Sasaran dari BKB sendiri yaitu keluarga atau orang tua yang memiliki anak usia 0 - 5 Tahun.
42	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Suatu kelompok/wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10-24 Tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua dalam rangka pengasuhan tumbuh kembang remaja.
43	Bina Keluarga Lansia (BKL)	Kelompok Kegiatan (POKTAN) Keluarga yang mempunyai Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia, dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.
44	Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	Satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
45	Generasi Berencana (GenRe)	Generasi Berencana adalah program yang bertujuan mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja Indonesia agar menjadi generasi yang punya perencanaan kehidupan yang matang. Program ini membidik remaja dan

		generasi muda di bawah 40 Tahun (Perempuan 21 Tahun, Laki laki 25 Tahun)
46	Migrasi seumur hidup	Perpindahan permanen merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk selain fertilitas dan mortalitas.
47	Migran Risen ( <i>Recent Migrant</i> )	Seseorang yang pindah melewati batas provinsi dalam kurun waktu (Lima Tahun) terakhir sebelum pencacahan.
48	Migrasi Masuk ( <i>In Migration</i> )	Masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (area of destination)
49	Migrasi Keluar ( <i>Out Migration</i> )	Perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (area of origin).
50	Migrasi Netto	Selisih antara jumlah penduduk yang masuk Provinsi Jambi (migrasi masuk) dikurangi jumlah penduduk yang keluar dari Provinsi Jambi (migrasi keluar)

#### 1.4. Permasalahan Kependudukan

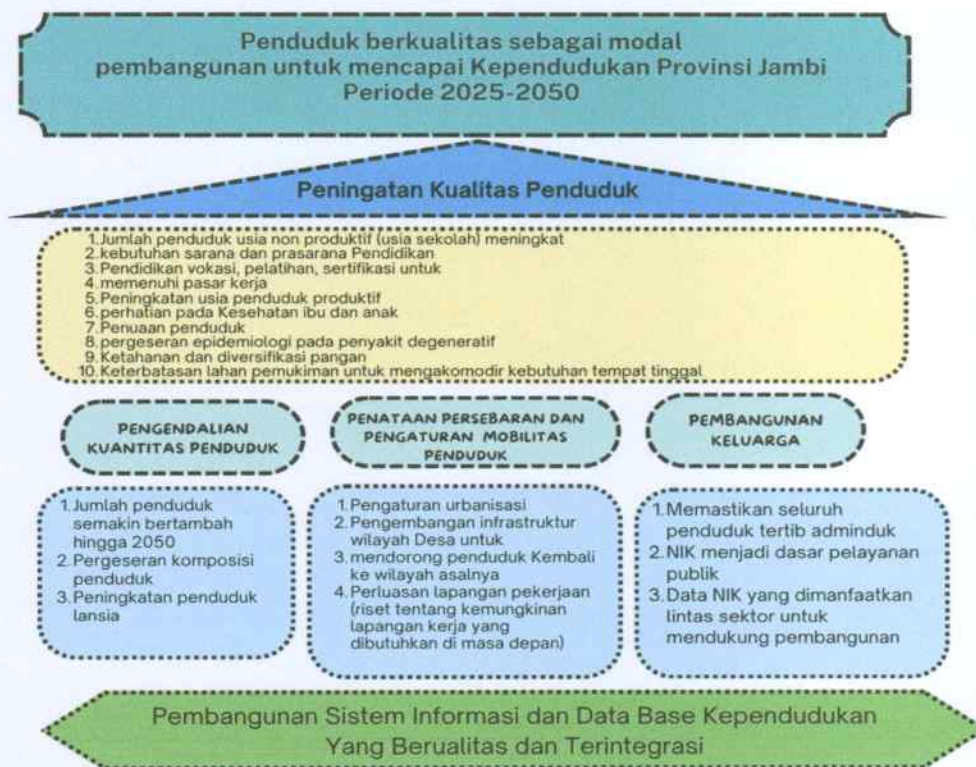
Permasalahan kependudukan yang dihadapi melibatkan lima pilar utama, menyoroti tantangan yang kompleks dan mendesak dalam pengendalian kuantitas penduduk. Salah satu hambatan utama dalam kuantitas penduduk adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara laju pertumbuhan populasi dengan ketersediaan dan kapasitas lingkungan serta sumber daya alam yang terbatas. Tantangan ini secara khusus berkaitan dengan akses yang terbatas terhadap layanan perencanaan keluarga dan kontrasepsi, yang merupakan faktor kunci dalam mengatur tingkat kelahiran. Selain itu, terdapat isu tingkat kekebalan kelompok (*herd immunity*) yang berkaitan erat dengan kesehatan publik, serta tingkat kelahiran yang masih tinggi di beberapa daerah, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan terpadu dalam layanan kesehatan reproduksi.

Dalam konteks peningkatan kualitas penduduk, tantangan mencakup akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas tinggi, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ketidakmerataan akses ini menimbulkan disparitas signifikan dalam tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan antar berbagai kelompok dalam

masyarakat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan penduduk.

Selain itu, penataan persebaran dan pengarahannya populasi menghadapi tantangan dari ketimpangan pembangunan antar wilayah dan urbanisasi yang berlangsung tanpa kontrol. Urbanisasi yang tidak terkendali seringkali berujung pada pembangunan permukiman tidak layak huni, peningkatan beban pada infrastruktur kota, dan meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di area perkotaan.

Mobilitas penduduk, sebagai pilar keempat, menghadapi tantangan dari migrasi internal dan internasional yang tidak teratur. Fenomena ini sering kali didorong oleh pencarian kesempatan kerja, konflik, atau perubahan iklim, yang menyebabkan urbanisasi cepat dan perpindahan penduduk dari daerah yang kurang berkembang ke daerah yang lebih maju. Hal ini memerlukan strategi komprehensif yang tidak hanya menangani masalah migrasi tetapi juga mendorong pembangunan yang merata dan inklusif di semua wilayah.



**Gambar 1. 1.** Tujuan Pembangunan kependudukan Selama Periode 2025-2050

Gambar 1.1 mengungkapkan perencanaan Pembangunan Kependudukan strategis yang ditempuh pemerintah Provinsi Jambi, yang sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Provinsi Jambi untuk menciptakan "Jambi yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan". Dokumen tersebut secara eksplisit menunjukkan komitmen pemerintah daerah Jambi untuk mendorong pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan penetapan indikator spesifik dan target yang diharapkan dicapai antara tahun 2025 hingga 2050.

Pengembangan keluarga berkualitas di Provinsi Jambi terkait erat dengan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar. Ini meliputi tantangan dalam menyediakan layanan yang merata dan berkualitas untuk semua keluarga dan mengelola data yang akurat dan terpercaya untuk perencanaan serta pengambilan keputusan yang efektif. Masalah seperti disparitas infrastruktur, akses terbatas terhadap layanan, serta kurangnya koordinasi dalam administrasi kependudukan merupakan hambatan yang harus diatasi.

Wolf dan Amirkhanyan (2010) menekankan pentingnya pemahaman pemerintah tentang demografi penduduk, populasi angkatan kerja, ketersediaan lapangan kerja, dan jumlah angka pensiun dalam merumuskan strategi pembangunan. Mereka menyarankan agar strategi pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan potensi penduduk serta daya dukung sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sutisna (2006) menambahkan dengan mengajukan enam tolok ukur pembangunan berkelanjutan, yaitu: pro lingkungan hidup, pro rakyat miskin, pro kesetaraan gender, pro penciptaan lapangan kerja, sesuai dengan bentuk negara kesatuan RI, dan harus anti korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang diintegrasikan dengan pertumbuhan penduduk yang seimbang adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebijakan yang mengintegrasikan dimensi kependudukan dalam perencanaan

pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, menjadi krusial. Peningkatan pendidikan, sebagai bagian dari upaya pengembangan kependudukan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), harus disinkronkan dengan kebijakan pengendalian penduduk untuk mencapai, mempertahankan, dan memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Dengan demikian, pendekatan yang holistik dan terpadu, yang mempertimbangkan aspek demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan, merupakan langkah penting menuju pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Jambi. Ini membutuhkan kerja sama antar sektor, penggunaan data yang akurat, dan keterlibatan masyarakat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua penduduk Provinsi Jambi.

Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi internasional. Kebijakan dan program yang dirancang harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, kesetaraan sosial, dan pembangunan ekonomi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh penduduk.

### **1.5. Ruang Lingkup**

Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi tantangan demografis yang dihadapi, mencakup dari tahapan penyusunan hingga pemantauan, pelaporan, dan pembiayaan strategi tersebut. Kerangka ini juga memfasilitasi pemanfaatan efektif GDPK, menawarkan panduan bagi masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan berbagai entitas terkait untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan implementasi.

Grand Design ini dirancang untuk memperkuat manajemen populasi melalui lima pilar utama, masing-masing dengan tujuan strategis yang jelas:

1. **Pengendalian Kuantitas Penduduk:** Fokus pada strategi perencanaan keluarga dan peningkatan akses terhadap layanan

kontrasepsi, pilar ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan populasi yang seimbang. Ini memperhitungkan kapasitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya, menargetkan pembangunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan kemampuan ekologis dan ekonomi.

2. **Peningkatan Kualitas Penduduk:** Melalui pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pelatihan keterampilan yang relevan, pilar ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi dalam sumber daya manusia merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta daya saing dan produktivitas ekonomi suatu wilayah.
3. **Pembangunan keluarga berkualitas:** Pilar ini menggarisbawahi pentingnya membangun keluarga berkualitas, sehingga lingkungan keluarga dapat mendukung secara esensial perkembangan anggota keluarga
4. **Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk:** Strategi ini berfokus pada manajemen distribusi geografis penduduk untuk mencapai pembangunan yang lebih merata. Mengembangkan infrastruktur di seluruh wilayah dan merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional merupakan langkah penting dalam pilar ini. Pengelolaan migrasi internal dan internasional secara efektif menjadi pusat perhatian pilar ini, dengan tujuan memfasilitasi mobilitas yang berkelanjutan dan konstruktif bagi pembangunan ekonomi dan sosial.
5. **Penataan Data, Informasi Kependudukan dan Administrasi Kependudukan:** Pilar ini fokus pada akurasi data kependudukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan yang efektif, dan administrasi kependudukan yang efisien vital untuk pelayanan publik yang responsif dan tata kelola yang baik.

Dokumen GDPK 5 Pilar ini mewujudkan visi pembangunan yang menyeluruh, menempatkan populasi dan kesejahteraan masyarakat sebagai inti dari pembangunan berkelanjutan. Dengan mendekati tantangan demografis secara strategis dan terpadu, Provinsi Jambi

menunjukkan komitmennya untuk menciptakan masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi semua penduduknya.

Dalam skema pembangunan nasional yang komprehensif, penajaman fokus pada pencapaian keseimbangan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup keluarga diwujudkan melalui Grand Design Pembangunan Kependudukan. Tujuan strategis ini mencakup penciptaan kondisi demografis yang berkelanjutan, di mana perhatian diberikan tidak hanya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga untuk secara signifikan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Strategi yang diterapkan dalam Grand Design ini mencakup sinergi antar sektoral yang kuat, mencakup pengendalian jumlah penduduk, distribusi penduduk yang merata dan adil, serta mobilitas penduduk yang terencana dengan baik. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pengelolaan kuantitas penduduk tetapi juga mengedepankan peningkatan kualitas, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang tangguh, sehat, dan sejahtera. Strategi ini juga menekankan pentingnya administrasi kependudukan yang efisien, memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan publik dan kebijakan sosial dengan mudah dan adil.

Pendekatan holistik ini bertujuan untuk menghasilkan masyarakat yang dinamis dan *resilien*, yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan masa depan tetapi juga berperan aktif dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, strategi pembangunan kependudukan diharapkan dapat mendukung realisasi masyarakat yang berdaya, di mana setiap keluarga dapat berkontribusi secara positif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, pendekatan ini mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan yang relevan, memberikan fondasi kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan menempatkan peningkatan kualitas keluarga sebagai salah satu pilar utama, Grand Design Pembangunan Kependudukan menargetkan untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan

menghasilkan peluang ekonomi yang merata untuk semua lapisan masyarakat.

Keseluruhan strategi dan tujuan yang dirancang dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan sosial ekonomi, memastikan bahwa perkembangan demografis berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

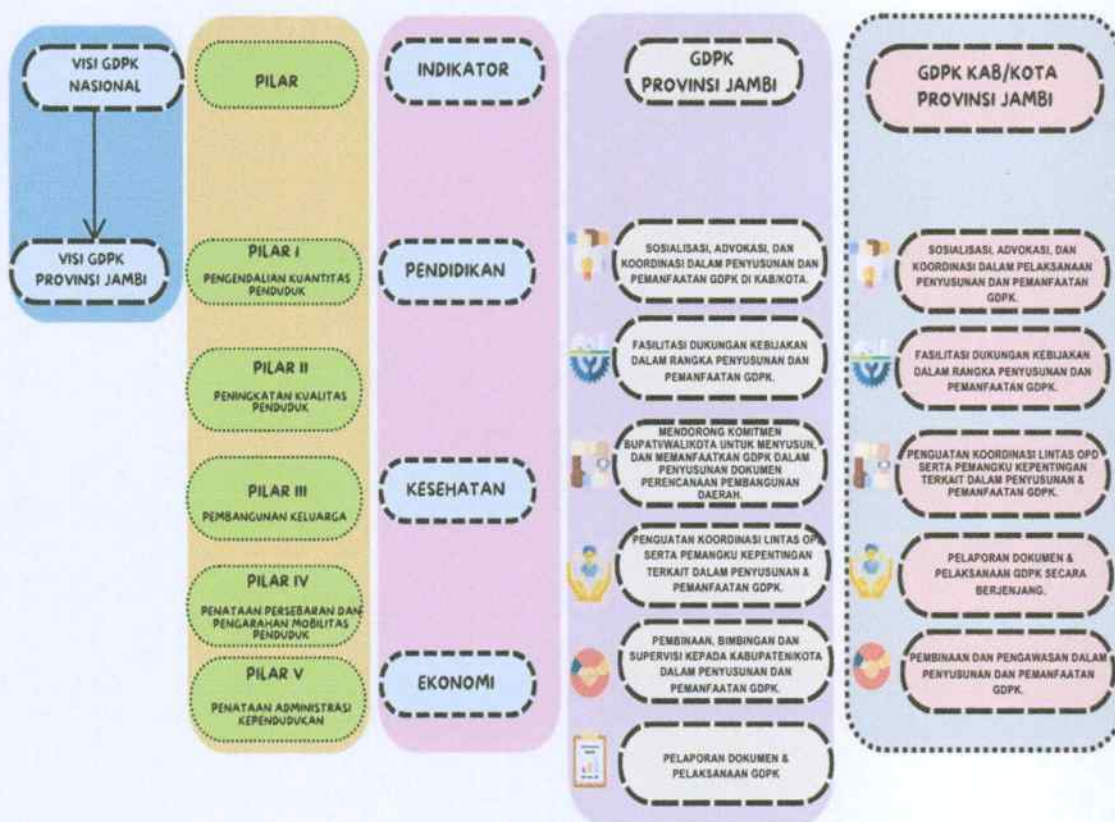
#### **1.6. Pengembangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar**

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Periode 2025-2050 dilakukan dengan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jambi, BAPPEDA, Dinas P3AP2, BKKBN, Instansi Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Kementerian Agama Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dukcapil, Dinas KOMINFO, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Hukum, Bidang Perlindungan Anak DP3AP2, Dinas Sosdukcapil Beberapa SKPD dan *stakeholder* dan Tim Universitas Jambi.

Hasil dari serangkaian FGD dan analisis teknokratis dari berbagai jalur kajian menghasilkan sebuah konsensus yang berfungsi sebagai dasar dari Grand Design Kependudukan. Ini mencerminkan pentingnya pendekatan terkoordinasi dan komprehensif dalam mengatasi tantangan demografis, dengan penekanan khusus pada keseimbangan antara kontrol pertumbuhan populasi dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

Dalam konteks pengendalian pertumbuhan populasi, perencanaan keluarga diberi peran kunci. Melalui penyediaan informasi dan layanan perencanaan keluarga yang lebih luas dan mudah diakses, individu dan keluarga diberdayakan untuk membuat keputusan bijaksana tentang rencana keluarga mereka. Ini tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga tapi juga pada keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan.

Pengembangan infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang berkualitas tinggi merupakan prioritas lain dalam GDPK. Ini termasuk penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan pendidikan yang memperkaya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Pembangunan ekonomi, melalui peningkatan akses ke pekerjaan yang layak dan pelatihan keterampilan, juga berperan penting dalam GDPK. Dengan mengurangi tekanan pada tingkat kelahiran dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, ini mendorong individu untuk merencanakan keluarga mereka dengan lebih bijaksana.



**Gambar 1. 2.** Kerangka Pikir Perumusan (GDPK) Provinsi Jambi 2025-2050

Berdasarkan Gambar 1.2 menjelaskan integrasi berbagai pendekatan dalam GDPK menciptakan landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki kualitas hidup seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, GDPK Provinsi Jambi menetapkan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengelola tantangan demografis, mendukung

pertumbuhan ekonomi yang merata, dan memastikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

### **1.7. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Provinsi Jambi dapat merujuk pada beberapa peraturan dan kebijakan yang relevan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan GDPK 5 Pilar Provinsi Jambi antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, Pasal 33 dan Pasal 34).
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
3. Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
4. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.
7. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
8. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
10. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang 24 Tahun 2013.
11. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN 2005 – 2025).
12. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
13. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
14. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

15. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
17. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
18. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan.
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Ke pendudukan.
20. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 66/Kep.Gub/DP3AP2-1.1/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengurus Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025-2050

Dengan mengacu pada dasar hukum yang kuat, penyusunan GDPK 5 Pilar Provinsi Jambi dapat dilakukan secara berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memperkuat legitimasi serta efektivitasnya sebagai panduan pembangunan kependudukan di tingkat provinsi Jambi Periode 2025-2050.

## **BAB II**

### **ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**

Analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan dilakukan untuk mengetahui situasi saat ini dan mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan kependudukan di wilayah tersebut. Hasil analisis ini akan digunakan untuk membuat rencana pembangunan kependudukan daerah Provinsi Jambi yang efektif dan efisien. Analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang jumlah penduduk, pertumbuhan demografis, dan kondisi pembangunan kependudukan di suatu wilayah. Ini meliputi aspek kuantitas penduduk, seperti jumlah penduduk dan laju pertumbuhan, serta aspek kualitas penduduk, seperti kesehatan, pendidikan, dan kewirausahaan.

#### **2.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk (Pilar 1)**

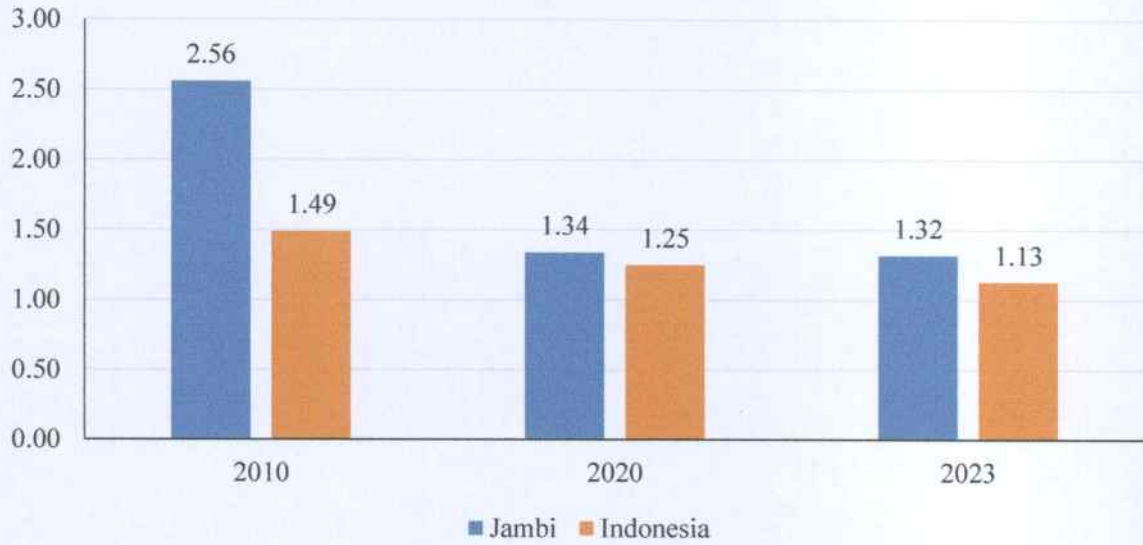
Struktur penduduk Indonesia menunjukkan ciri positif yang ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif (15-64 Tahun). Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi Provinsi Jambi untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, serta diperlukan Langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Untuk memenuhi hal tersebut, perlu dilakukan perumusan masalah serta arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif dan efisien. Situasi kependudukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi menjadi gambaran untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi sebelum mengambil keputusan dalam membuat rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2025-2050. Adapun indikatornya sebagai berikut:

### **2.1.1. Fertilitas**

#### **A.Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah metrik demografis yang menggambarkan tingkat perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya dihitung dalam persentase tahunan. LPP diperoleh dari pengaruh gabungan dari tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Fungsi utama dari LPP adalah untuk memberikan wawasan mengenai dinamika populasi yang penting bagi pembuat kebijakan dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi untuk berbagai kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. LPP yang seimbang menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan yang dapat mendukung kemajuan ekonomi sambil menjaga kualitas hidup penduduknya.

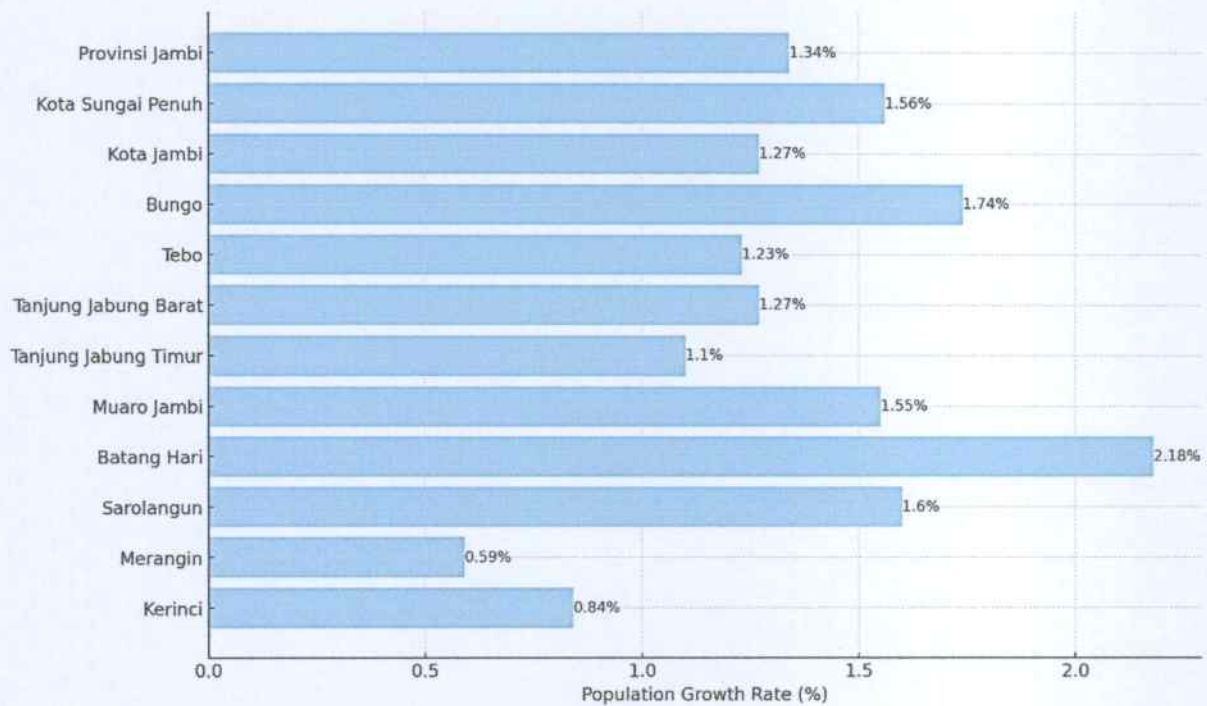
Berdasarkan Gambar 2.1 menunjukkan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi dan Indonesia pada Tahun 2010, 2020, dan 2023, dapat dilihat bahwa Provinsi Jambi mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang signifikan. Pada Tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi sebesar 2,56%, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 1,34% pada Tahun 2020 dan terus melandai menjadi 1,32 % pada Tahun 2023. Sementara itu, Indonesia secara keseluruhan juga menunjukkan penurunan laju pertumbuhan penduduk, meskipun tidak sebesar Provinsi Jambi. Pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 % pada Tahun 2010, turun menjadi 1,25% pada Tahun 2020, dan kemudian mengalami penurunan lebih lanjut menjadi 1,13% pada Tahun 2023.



**Gambar 2. 1.** Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi dan Indonesia, 2010 - 2023

Sumber: SiPerindu, 2024

Selanjutnya Gambar 2.2 menunjukkan laju pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020. Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Batang Hari menonjol dengan LPP tertinggi sebesar 2,18%. Sementara itu, Merangin memiliki LPP terendah, hanya 0,59%.



**Gambar 2. 2.** Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010- 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) meningkat atau menurun tergantung pada kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu wilayah. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat menguntungkan dalam hal ekspansi ekonomi dan pembangunan, karena populasi yang bertambah menyediakan lebih banyak tenaga kerja dan memperluas pasar konsumen. Ini sangat berguna bagi daerah-daerah dengan banyak sumber daya yang belum dieksplorasi atau industri yang sedang berkembang, di mana tenaga kerja yang banyak diperlukan untuk pertumbuhan dan ekspansi. Namun, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan investasi yang memadai dalam infrastruktur, layanan sosial, dan keberlanjutan lingkungan untuk memastikan bahwa tekanan terhadap sumber daya dan lingkungan tidak melebihi kapasitasnya.

Di sisi lain, penurunan LPP dapat menguntungkan bagi daerah dengan sumber daya terbatas, di mana populasi yang berlebihan dapat menyebabkan kemiskinan, degradasi lingkungan, dan penurunan kualitas hidup. Dengan populasi yang lebih stabil atau menurun, suatu daerah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih efisien, dan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerja dan pensiunan. Namun, penurunan LPP memerlukan perencanaan yang cermat untuk menghindari masalah yang mungkin muncul dari populasi yang menua dan kurangnya tenaga kerja muda, yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Seimbangny pertumbuhan penduduk memfasilitasi perencanaan dan alokasi sumber daya yang lebih efisien, mengurangi beban pada sistem kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya, serta membantu mengurangi tekanan pada lingkungan. Peningkatan kualitas keluarga, melalui akses ke pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, dan kesempatan ekonomi, juga mendukung pertumbuhan penduduk yang sehat. Keluarga yang lebih sadar akan pentingnya perencanaan keluarga cenderung memiliki anak dalam jumlah yang mereka mampu untuk didukung secara ekonomi dan sosial, yang selanjutnya mendukung tujuan SDGs terkait kualitas hidup dan kesetaraan gender (SDG 5). Oleh karena itu, menjaga laju pertumbuhan penduduk yang

seimbang adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan menyeluruh yang ditargetkan oleh SDGs.

Untuk mengatasi perlambatan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi, beberapa strategi dapat diimplementasikan. Pertama, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan informasi tentang perencanaan keluarga. Program-program inovatif dan kampanye kesadaran tentang manfaat keluarga berencana juga dapat diperkuat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Kedua, pembangunan ekonomi regional perlu diperkuat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak ada insentif besar untuk memiliki keluarga besar. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar juga perlu menjadi fokus untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keluarga berkualitas.

## **B. Total Fertility Rate (TFR)**

TFR memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan dalam suatu populasi dan sering digunakan untuk menilai apakah suatu populasi menggantikan dirinya dari generasi ke generasi. Secara umum, nilai TFR sekitar 2,1 dianggap sebagai tingkat penggantian yang diperlukan untuk menjaga populasi stabil dalam jangka panjang tanpa mempertimbangkan migrasi. Nilai di atas 2,1 menunjukkan pertumbuhan populasi, sementara nilai di bawah 2,1 menandakan bahwa populasi mungkin menurun dalam jangka panjang.

TFR menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2022-2023 diberikan pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2. 1.** Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) menurut kabupaten/kota diProvinsi Jambi Tahun 2022-2023

No	Wilayah	2022	2023
		SP2020 LF	PK2023
1.	Kerinci	2,20	2,18
2.	Merangin	2,18	2,18
3.	Sarolangun	2,64	2,59
4.	Batang Hari	2,27	2,25
5.	Muaro Jambi	2,19	2,15
6.	Tanjung Jabung Timur	2,39	2,35
7.	Tanjung Jabung Barat	2,36	2,34
8.	Tebo	2,23	2,21
9.	Bungo	2,45	2,41
10.	Kota Jambi	2,08	2,08
11.	Kota Sungai Penuh	2,19	2,18
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>2,28</b>	<b>2,26</b>
<b>Nasional</b>		<b>2,18</b>	<b>2,14</b>

Sumber: LF SP 2020 (BPS, 2023), SiPerindu, 2023

Berdasarkan Tabel 2.1 menunjukkan bahwa di beberapa wilayah terjadi penurunan TFR, sementara di beberapa wilayah lainnya nilai TFR stabil. Pada tahun 2022, TFR tertinggi tercatat di Kabupaten Sarolangun dengan nilai 2,64 dan terendah di Kota Jambi dengan nilai 2,08. Pada tahun 2023, Kabupaten Sarolangun masih mencatat TFR yang relatif tinggi meskipun mengalami penurunan menjadi 2,59. Di sisi lain, Kota Jambi tetap memiliki TFR terendah yang tidak berubah dari tahun sebelumnya yaitu 2,08. Kabupaten Kerinci menunjukkan TFR yang meurun dari 2,20 di tahun 2022 menjadi 2,18 di tahun 2023. Kabupaten Merangin unik karena TFR-nya tidak berubah sama sekali selama periode tersebut, tetap pada angka 2,18. Kabupaten-kabupaten lain seperti Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo, dan Tebo juga menunjukkan penurunan TFR yang konsisten, meskipun penurunannya tidak terlalu besar. Kota Sungai Penuh juga mengalami penurunan TFR dari 2,19 menjadi 2,18. Secara umum, data ini menunjukkan tren penurunan ringan dalam TFR di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dari tahun 2022 ke 2023. Di tingkat provinsi, TFR turun dari 2,28 menjadi 2,26, dan tingkat nasional menunjukkan penurunan dari 2,18 menjadi 2,14. Penurunan ini mencerminkan kemungkinan adanya perubahan dalam

pola kelahiran atau keberhasilan intervensi kebijakan populasi di beberapa wilayah.

### C. Age Specific Fertility Rate (ASFR)

Secara keseluruhan, Provinsi Jambi memiliki tingkat kelahiran remaja yang cenderung lebih tinggi daripada rata-rata nasional Indonesia. Tingkat kelahiran remaja yang tinggi ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam pendidikan seks dan kesehatan reproduksi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu dirancang program pendidikan dan intervensi kesehatan reproduksi yang cermat dan terarah guna mengurangi angka kelahiran remaja.

ASFR remaja (15-19 tahun) menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2022-2023 diberikan pada Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2. 2.** Angka Age Spesific Fertility Rate/ASFR) 15-19, menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2022-2023

No	Wilayah	2022	2023
		SP2020 LF	PK 2023
1.	Kerinci	47,20	46,50
2.	Merangin	40,60	32,90
3.	Sarolangun	62,10	38,20
4.	Batang Hari	50,10	30,60
5.	Muaro Jambi	21,70	13,50
6.	Tanjung Jabung Timur	50,80	21,20
7.	Tanjung Jabung Barat	63,00	25,20
8.	Tebo	38,60	37,00
9.	Bungo	46,80	34,80
10.	Kota Jambi	17,50	7,80
11.	Kota Sungai Penuh	17,40	26,50
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>50,47</b>	<b>26,80</b>
<b>Nasional</b>		26,64	19,70

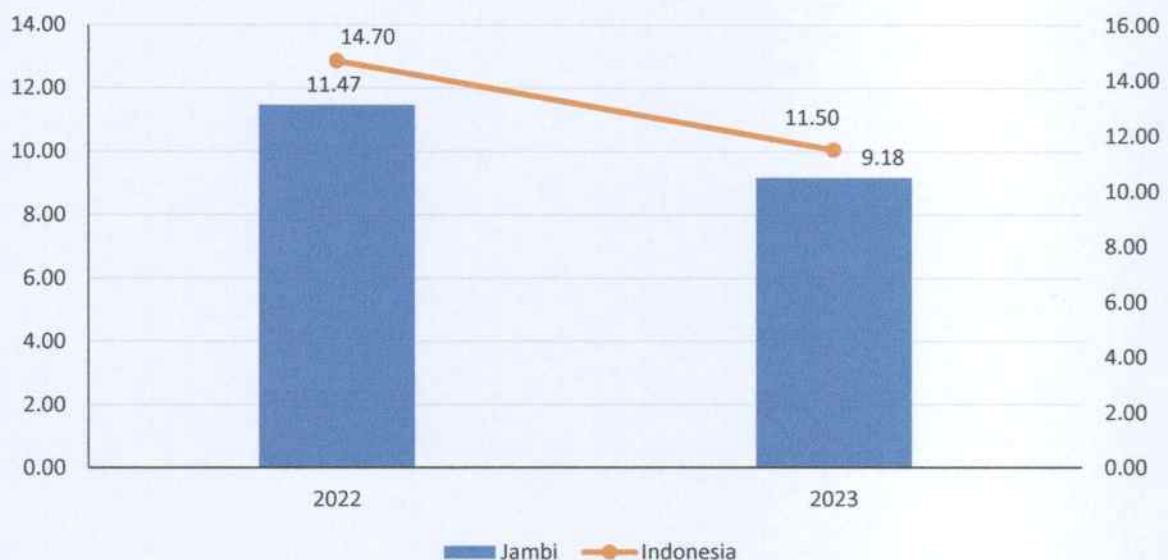
Sumber: SiPerindu dan SP 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 menunjukkan Age Specific Fertility Rate (ASFR) dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi antara tahun 2022 dan 2023 menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat kesuburan berdasarkan kelompok usia tertentu. Dari tahun 2022 ke 2023, beberapa daerah mencatat penurunan yang tajam dalam ASFR, dengan penurunan paling mencolok terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, dimana ASFR turun dari 50,80 menjadi 21,20 dan dari 63,00 menjadi 25,20, masing-masing. Kabupaten Sarolangun juga mengalami penurunan besar dari

62,10 menjadi 38,20. Sementara itu, Kota Jambi mencatat penurunan ASFR dari 17,50 menjadi hanya 7,80, menandakan penurunan drastis dalam kelahiran di kelompok usia tersebut. Namun, Kota Sungai Penuh menunjukkan peningkatan ASFR dari 17,40 menjadi 26,50. Keseluruhan, tingkat kesuburan di Provinsi Jambi juga turun secara signifikan dari 50,47 menjadi 26,80, serupa dengan tren penurunan pada tingkat nasional dari 26,64 menjadi 19,70. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam kebijakan, kondisi ekonomi, atau pendidikan kesehatan reproduksi. Variasi antar daerah dalam tingkat ASFR menunjukkan bahwa faktor lokal seperti ekonomi, ketersediaan layanan kesehatan, dan program pendidikan seksual memiliki dampak besar terhadap tingkat kesuburan.

#### D. Unmet Need (%)

Unmet Need (Kebutuhan Tak Terpenuhi) merujuk pada kondisi di mana individu yang secara fisik atau secara psikologis dapat mengandung, dan ingin menghindari atau menunda kehamilan, namun tidak menggunakan kontrasepsi atau metode perencanaan keluarga. Dalam konteks ini, "kebutuhan tak terpenuhi" mengindikasikan bahwa individu tersebut tidak dapat memperoleh atau menggunakan metode kontrasepsi yang sesuai dengan preferensi.



**Gambar 2. 3.** Unmet Need (%) Provinsi Jambi Tahun 2022-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Si Perindu, 2024

Berdasarkan Gambar 2.3 data Unmet Need (%), terlihat bahwa Provinsi Jambi mengalami penurunan signifikan dari 11,47% pada

Tahun 2022 menjadi 9,18% pada Tahun 2023. Sementara itu, secara nasional Indonesia juga mengalami penurunan dari 14,70% menjadi 11,50% pada periode yang sama. Walaupun unmet need di daerah ini sudah relatif rendah dibandingkan dengan tingkat nasional dan menunjukkan kecenderungan penurunan, namun angka tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 7,5. Penurunan Unmet Need menunjukkan adanya perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi di Provinsi Jambi dan secara nasional. Faktor-faktor seperti peningkatan aksesibilitas, kampanye edukasi, dan perluasan layanan kesehatan dapat menjadi kontributor positif terhadap penurunan Unmet Need. Meskipun demikian, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor spesifik yang berkontribusi pada perubahan ini. Kesimpulannya, penurunan Unmet Need adalah indikator positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perencanaan keluarga di Provinsi Jambi serta memperkuat dukungan kebijakan dan program kesehatan reproduksi di tingkat nasional.

Untuk meningkatkan pencapaian penurunan Unmet Need di Provinsi Jambi, diperlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan. Fokus strategi mencakup penguatan pelayanan kesehatan reproduksi dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan, kampanye edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan pelatihan tenaga kesehatan dalam bidang konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi. Program subsidi atau insentif dapat diimplementasikan untuk mengurangi hambatan ekonomi, sementara keterlibatan pemuka agama dan tokoh masyarakat mendukung penyebaran informasi positif dan pengurangan stigma. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci dalam mengukur efektivitas strategi dan menyesuaikan program sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi erat dengan pihak terkait, penguatan kebijakan, peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta kampanye anti-stigma akan mendukung upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan program perencanaan keluarga di Provinsi Jambi.

### E. Persentase WUS Kawin (15-49 Tahun)

Indikator Wanita Usia Subur (WUS) dalam kependudukan memainkan peran krusial dalam analisis demografi dan perencanaan kebijakan. Tingkat fertilitas, yang mengukur jumlah rata-rata kelahiran per wanita selama masa subur, adalah salah satu indikator utama. Ini berguna untuk mengukur potensi pertumbuhan populasi. Sementara itu, cakupan kontrasepsi menunjukkan proporsi wanita usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi, sangat penting dalam program perencanaan keluarga dan kontrol populasi. Angka Kelahiran Kasar (CBR) memberikan gambaran umum tentang tingkat kelahiran dalam suatu populasi dan sering dikaitkan dengan kelompok WUS.

**Tabel 2. 3.** Persentase WUS Kawin (15-49 Tahun) Menurut Status Penggunaan Alat/Cara dan Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2020

Wilayah	Prevalensi
Kerinci	68,08
Merangin	61,10
Sarolangun	68,79
Batang Hari	56,42
Muaro Jambi	63,74
Tanjung Jabung Timur	67,16
Tanjung Jabung Barat	62,94
Tebo	69,93
Bungo	62,78
Kota Jambi	47,85
Kota Sungai Penuh	69,46
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>62,12</b>

Sumber: Susenas, 2020

Tabel 2.3 menunjukkan persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang sudah menikah dalam rentang usia 15-49 tahun menurut status penggunaan alat atau cara kontrasepsi di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2020. Dari data tersebut, kita dapat melihat variasi signifikan dalam prevalensi penggunaan kontrasepsi di antara berbagai wilayah. Kerinci mencatat persentase yang cukup tinggi yaitu

68,08%, serupa dengan Sarolangun yang memiliki persentase 68,79% dan Tebo yang tertinggi dengan 69,93%. Sebaliknya, Kota Jambi menunjukkan persentase yang paling rendah yaitu 47,85%, menandakan bahwa penggunaan kontrasepsi di ibu kota provinsi lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Tanjab Timur dan Tanjab Barat juga menunjukkan angka yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 67,16% dan 62,94%,

Sementara Batang Hari berada di ujung bawah dengan 56,42%. Kota Sungai Penuh hampir menyamai Tebo dengan persentase 69,46%. Secara keseluruhan, Provinsi Jambi memiliki rata-rata 62,12%, menunjukkan bahwa mayoritas WUS yang sudah menikah di provinsi ini menggunakan kontrasepsi, namun dengan perbedaan yang cukup luas antar wilayah yang menandakan perlu adanya pendekatan yang lebih disesuaikan untuk meningkatkan cakupan penggunaan kontrasepsi. Data ini penting bagi pembuat kebijakan dalam merencanakan dan mengimplementasikan program kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga yang efektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

#### **F. Penggunaan Kontrasepsi**

Untuk meningkatkan Prevalensi Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Provinsi Jambi, diperlukan strategi yang holistik. Pertama, melalui kampanye edukasi yang menasar masyarakat, media massa, dan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat dan keamanan MKJP. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga menjadi kunci dalam merancang pesan yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pelatihan bagi tenaga kesehatan perlu ditingkatkan untuk memberikan informasi dan konseling yang komprehensif kepada calon pengguna.



**Gambar 2. 4.** Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2022-2023

Sumber: BKKBN, SiPerindu, 2023

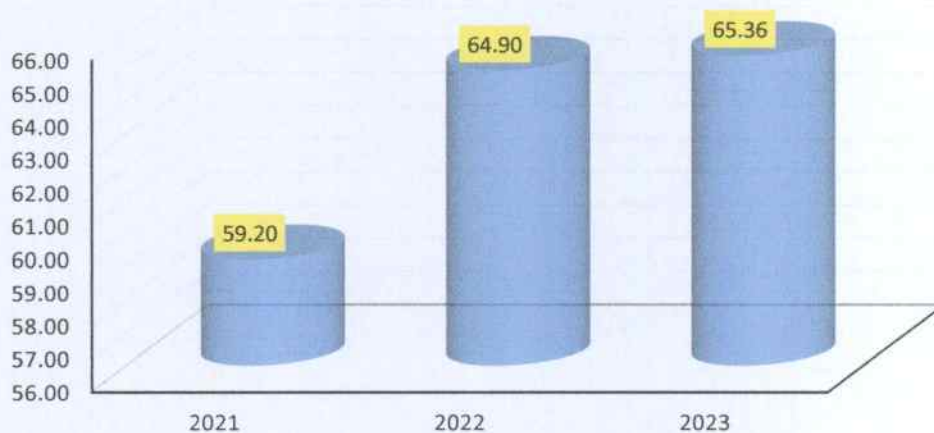
Berdasarkan Gambar 2.4 menunjukkan bahwa dari Tahun 2022 hingga 2023, terjadi peningkatan Prevalensi Pemakaian MKJP di Provinsi Jambi dari 16,80% menjadi 17,92%. Meskipun mengalami peningkatan, angka ini masih di bawah rata-rata nasional Indonesia yang mencapai 23,60% pada Tahun yang sama. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan penggunaan MKJP di Jambi, tingkat penggunaan masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan MKJP di tingkat lokal perlu dilakukan untuk merancang program-program yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap MKJP di Provinsi Jambi. Meskipun pemakaian alat kontrasepsi moderen di Jambi sudah cukup bagus, prevalensi pemakaian alat MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) masih rendah, yaitu 17,92, dibandingkan dengan tingkat nasional yang mencapai 23,60, padahal targetnya adalah di atas 29.

Perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang menyediakan MKJP serta insentif ekonomi dapat membantu mengatasi hambatan praktis. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi strategi juga perlu dilakukan guna menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dapat menciptakan sinergi yang kuat

untuk mencapai peningkatan signifikan dalam Prevalensi Pemakaian MKJP di Provinsi Jambi. Selain itu, untuk menjaga dan meningkatkan Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern (CPR) yang positif di Provinsi ini, strategi yang terencana dan berkelanjutan menjadi krusial. Upaya harus difokuskan pada kampanye edukasi berkelanjutan untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat kontrasepsi modern.

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah dua konsep yang berkaitan dalam konteks program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. CPR merupakan ukuran yang menunjukkan persentase wanita yang menggunakan metode kontrasepsi atau pasangan mereka yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi pada suatu waktu. Angka ini mencakup semua jenis metode kontrasepsi, termasuk kontrasepsi modern dan tradisional.

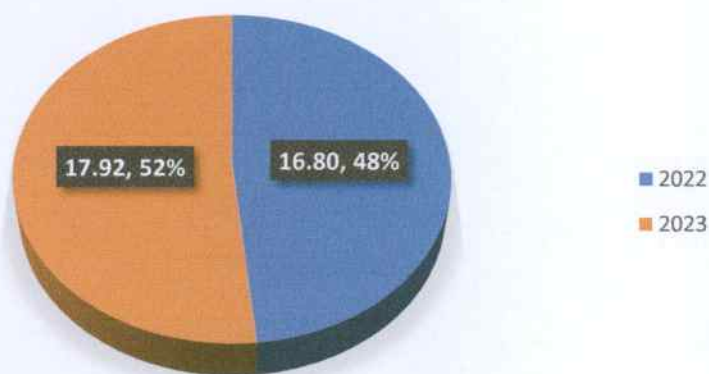
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), di sisi lain, merujuk khusus pada metode kontrasepsi yang memberikan perlindungan dari kehamilan untuk jangka waktu yang panjang setelah satu kali prosedur atau pemasangan. Contoh dari MKJP meliputi implan kontrasepsi, IUD (Intrauterine Device), dan sterilisasi. MKJP termasuk dalam kategori kontrasepsi modern karena mereka berbasis pada teknologi atau prosedur medis yang efektif dan telah melalui validasi ilmiah.



**Gambar 2. 5.** Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR, Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Si Perindu, 2024

Berdasarkan Gambar 2.5 menunjukkan Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern (CPR), terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari Tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, persentase pemakaian kontrasepsi modern adalah 59,20%. Tahun berikutnya, 2022, menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 64,90%. Ini mencerminkan peningkatan yang cukup besar dalam pengadopsian kontrasepsi modern oleh populasi yang ditinjau. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan lagi, meskipun lebih moderat, menjadi 65,36%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa terus ada peningkatan dalam pemakaian kontrasepsi modern, walaupun tingkat pertumbuhannya tidak sebesar sebelumnya dari tahun 2021 ke 2022. Secara keseluruhan, grafik menggambarkan tren positif terus menerus dalam penggunaan kontrasepsi modern selama tiga tahun berturut-turut.



**Gambar 2. 6.** Prevalensi Pemakaian MKJP, Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Si Perindu, 2023

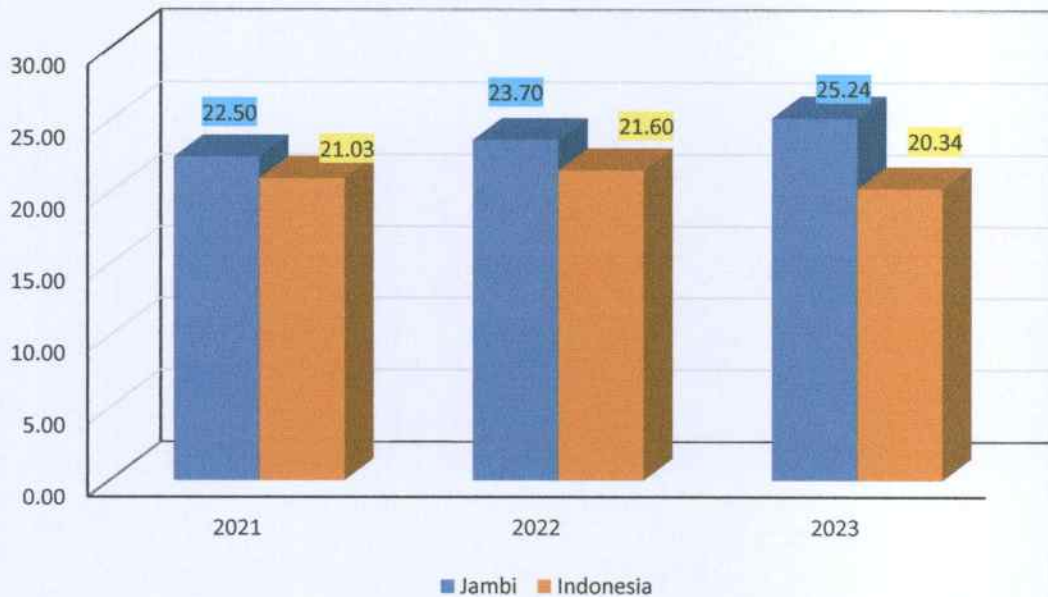
Berdasarkan Gambar 2.6 menunjukkan menunjukkan prevalensi pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) selama tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, prevalensi pemakaian MKJP adalah 16,80%. Tahun berikutnya, prevalensi meningkat menjadi 17,92%. Ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan sekitar 1,12 persentase poin dalam pemakaian MKJP dari tahun 2022 ke 2023. Kenaikan ini mungkin mencerminkan berbagai usaha dalam program kesehatan reproduksi, seperti peningkatan akses ke layanan kontrasepsi, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang metode kontrasepsi, atau perbaikan dalam layanan konseling keluarga berencana. Peningkatan ini juga bisa menandakan bahwa lebih banyak wanita dan pasangan memilih untuk menggunakan MKJP sebagai strategi

perencanaan keluarga mereka, yang bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (*Discontinuation Rates* - DCR) selama 12 bulan merupakan indikator krusial dalam penilaian efektivitas program keluarga berencana. DCR mengukur proporsi pengguna kontrasepsi yang menghentikan penggunaan metode mereka dalam jangka waktu satu tahun, tanpa beralih ke metode lain.

Angka DCR yang tinggi dapat menandakan berbagai isu, seperti kekecewaan dengan metode kontrasepsi, efek samping yang tidak dapat ditoleransi, atau kesulitan dalam mendapatkan suplai kontrasepsi yang berkelanjutan. Dalam konteks perencanaan kesehatan publik, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada tingkat DCR yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan keluarga berencana, mengurangi hambatan akses, dan memastikan bahwa pengguna kontrasepsi mendapat dukungan yang memadai dalam pemilihan dan penggunaan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan atau kemampuan yang dimiliki seseorang.

Peningkatan DCR di Jambi dan penurunan DCR secara nasional dapat mengindikasikan perubahan pola penggunaan kontrasepsi dalam masyarakat. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan ini. Kesimpulannya, pemantauan terus-menerus terhadap DCR dan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat membantu merancang strategi dan program yang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan penggunaan kontrasepsi dan perencanaan keluarga. Tingkat putus pakai kontrasepsi (DCR) 12 bulan, di Provinsi Jambi Tahun 2021-2023 ditunjukkan pada Gambar 2.7.



**Gambar 2. 7.** Tingkat putus pakai kontrasepsi (DCR) 12 bulan, Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Si Perindu, 2024

Berdasarkan Gambar 2.7 menunjukkan data Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi atau *discontinuation contraceptive rate* (DCR) selama 12 bulan, terlihat bahwa Provinsi Jambi mengalami peningkatan DCR dari 22,50% pada Tahun 2021 menjadi 25,24% pada Tahun 2023. Sementara secara nasional, Indonesia menunjukkan tren penurunan DCR dari 21,03% pada Tahun 2021 menjadi 20,34% pada Tahun 2023.

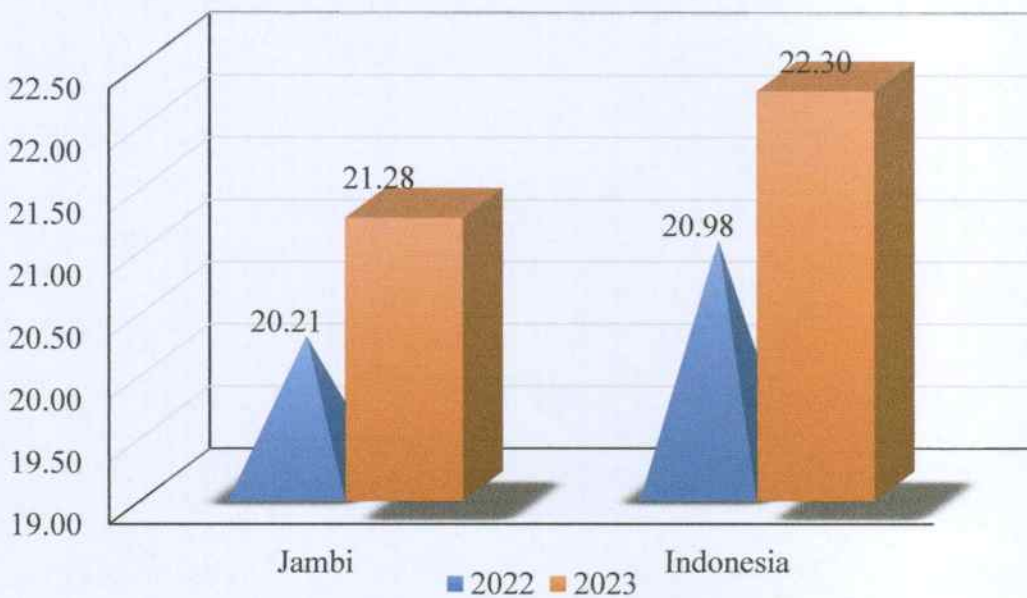
### **G. Median Usia Kawin Pertama (MUKP)**

Median Usia Kawin Pertama (MUKP) adalah sebuah statistik demografi yang mengukur usia di mana separuh dari populasi telah menikah untuk pertama kalinya. Angka ini diperoleh dengan menyusun semua individu yang telah menikah menurut usia dan menemukan usia tengahnya separuh dari individu tersebut menikah di bawah usia tersebut, dan separuhnya lagi menikah di atas usia tersebut. MUKP sering digunakan untuk mengamati tren sosial dan ekonomi dalam sebuah masyarakat, seperti tingkat pendidikan, keterlibatan dalam tenaga kerja, norma sosial, dan kebijakan publik yang berkaitan dengan usia perkawinan.

Misalnya, MUKP yang meningkat dapat menunjukkan bahwa orang cenderung menunda pernikahan untuk menyelesaikan pendidikan mereka, membangun karir, atau karena alasan ekonomi lainnya.

Sebaliknya, MUKP yang lebih rendah bisa mencerminkan norma sosial yang berbeda atau tekanan ekonomi yang mendorong perkawinan di usia yang lebih muda. MUKP adalah alat yang berguna bagi pembuat kebijakan dan peneliti untuk memahami dan merespons kebutuhan populasi, khususnya dalam perencanaan program kesehatan reproduksi dan sosial.

Berdasarkan Gambar 2.8 menunjukkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Jambi dan untuk seluruh Indonesia pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, MUKP di Jambi adalah 20,21 tahun, dan di seluruh Indonesia, angka tersebut sedikit lebih tinggi, yaitu 20,98 tahun. Pada tahun 2023, kedua wilayah mengalami peningkatan dalam MUKP: di Jambi menjadi 21,28 tahun dan di Indonesia menjadi 22,30 tahun.



**Gambar 2. 8.** Median Umur Kawin Pertama, Provinsi Jambi dan Indonesia selama Tahun 2022 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Si Perindu, 2024

Pada tahun 2023, peningkatan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Jambi menjadi 21,28 tahun dan di Indonesia menjadi 22,30 tahun berarti bahwa usia rata-rata di mana individu menikah untuk pertama kalinya telah naik. Di Jambi, separuh dari populasi yang menikah pertama kali berada di bawah usia 21,28 tahun, dan separuhnya lagi di atas usia tersebut. Sementara itu, di seluruh

Indonesia, separuh dari populasi yang menikah pertama kali berada di bawah usia 22,30 tahun, dan separuh lainnya di atasnya.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola sosial atau ekonomi yang mendorong individu di kedua wilayah untuk menunda pernikahan. Mungkin ada berbagai faktor, seperti peningkatan akses ke pendidikan, perubahan dalam prioritas karir dan kehidupan pribadi, serta faktor ekonomi yang membuat orang menunda pernikahan hingga mereka merasa siap dari segi keuangan atau kehidupan profesional. Angka ini juga bisa mencerminkan adanya kebijakan publik atau kampanye sosial yang bertujuan untuk mendorong pernikahan di usia yang lebih matang.

**Tabel 2. 4.** Median Usia Kawin Pertama menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022-2023

No	Wilayah	2022	2023
		PK 2022	PK 2023
1.	Kerinci	19,31	19,63
2.	Merangin	19,42	19,53
3.	Sarolangun	19,66	19,91
4.	Batang Hari	19,97	19,86
5.	Muaro Jambi	20,39	21,32
6.	Tanjung Jabung Timur	19,88	20,55
7.	Tanjung Jabung Barat	19,95	20,12
8.	Tebo	19,53	19,79
9.	Bungo	19,59	19,67
10.	Kota Jambi	23,68	23,66
11.	Kota Sungai Penuh	21,45	20,67
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>20,21</b>	<b>21,28</b>
<b>Nasional</b>		<b>20,98</b>	<b>22,30</b>

Sumber: BKKBN, SiPerindu, 2023

Berdasarkan Tabel 2.4 menunjukkan Pada Tahun 2022 dan 2023, data Median Umur Kawin Pertama (MUKP) di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi menunjukkan tren umum peningkatan umur saat menikah. Kebanyakan kabupaten, seperti Kerinci, Merangin, dan Sarolangun, mengalami kenaikan MUKP, dengan peningkatan yang cukup signifikan di Muaro Jambi dari 20,39 tahun menjadi 21,32 tahun. Ini mungkin mencerminkan pergeseran norma sosial atau

kebijakan lokal yang memengaruhi keputusan pernikahan, mendorong pendidikan atau stabilitas ekonomi sebelum berkeluarga. Kota Jambi, dengan MUKP tertinggi, menunjukkan sedikit penurunan, menyarankan variasi pola pernikahan urban. Kota Sungai Penuh juga mengalami penurunan, menandakan dinamika lokal yang berbeda. Secara keseluruhan, tingkat provinsi menunjukkan peningkatan MUKP, dari 20,21 tahun ke 21,28 tahun, selaras dengan tren nasional yang meningkat dari 20,98 tahun menjadi 22,30 tahun, mengindikasikan kecenderungan nasional untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Di sisi lain, kenaikan di tingkat nasional dapat mengindikasikan variasi dalam kebijakan dan dinamika sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor spesifik yang memengaruhi perubahan ini. Kesimpulannya, perubahan dalam Median Umur Kawin Pertama dapat memberikan wawasan penting terkait perkembangan sosial dan perubahan norma-norma perkawinan di Provinsi Jambi dan Indonesia secara keseluruhan. Perbedaan yang signifikan antara median usia kawin pertama di Kota Jambi dengan median usia kawin pertama di kabupaten-kabupaten lainnya menyoroti keberagaman dalam praktik perkawinan di Provinsi Jambi. Faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan mungkin memengaruhi usia kawin pertama perempuan di setiap wilayah, menekankan pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika demografi di tingkat lokal untuk merancang kebijakan yang sesuai dan efektif terkait dengan perkawinan dan kesejahteraan perempuan.

#### **H. Persentase Penduduk Lansia (65+) Menurut Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal di Provinsi Jambi**

Proporsi penduduk lansia perempuan sedikit lebih tinggi di daerah perkotaan, sementara di daerah perdesaan, persentase lansia laki-laki dan perempuan hampir sama. Secara keseluruhan, distribusi persentase lansia antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang ketika dihitung gabungan antara perkotaan dan perdesaan. Persentase ini mengungkapkan bahwa populasi lansia cenderung memiliki proporsi yang lebih tinggi di area perkotaan dibandingkan perdesaan untuk

lansia perempuan, sementara persentase lansia laki-laki hampir sama di kedua daerah baik perkotaan dan pedesaan tersebut. Pada Tahun 2022 dengan jumlah penduduk non produktif pada penduduk lansia (65+) Tahun 2022 berjumlah 188.578 jiwa atau sekitar 5,19 % usia tua yang meningkat jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar 4,91%. Untuk melihat secara rinci penduduk lansia yang berada di perkotaan dan pedesaan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2. 5.** Persentase Penduduk Lansia (65+) Tahun 2022

Penduduk Lansia (65+)	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah	32.087	34.429	62.442	59.620	94.529	94.049
%	2,61	2,80	2,60	2,48	2,60	2,59

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan Tabel 2.5 menunjukkan daerah perkotaan, persentase lansia laki-laki adalah 2,61% dari total populasi dengan jumlah absolut 32.087, sementara persentase lansia perempuan sedikit lebih tinggi yaitu 2,80%, dengan jumlah 34.429. Di pedesaan, tercatat jumlah lansia laki-laki yang lebih besar, yaitu 62.442, yang membentuk 2,60% dari populasi, berbanding dengan lansia perempuan yang jumlahnya 59.620 dan menyumbang 2,48% dari total populasi. Ketika dilihat secara keseluruhan, gabungan jumlah lansia laki-laki dan perempuan di perkotaan dan pedesaan hampir setara, yaitu 94.529 (2,60%) untuk laki-laki dan 94.049 (2,59%) untuk perempuan, mengindikasikan distribusi yang hampir merata antara lansia laki-laki dan perempuan di seluruh wilayah.

Kondisi ini mungkin mencerminkan karakteristik kesehatan, sosial, dan ekonomi yang serupa di antara lansia di daerah perkotaan dan pedesaan wilayah tersebut. Pada saat ini, proporsi penduduk lansia di Provinsi Jambi belum menjadi permasalahan yang krusial; namun, dengan perkiraan pertumbuhan jumlah lansia yang pesat, diperkirakan bahwa pada tahun 2040, ketika proporsi lansia diharapkan melebihi 10%, isu ini akan menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh provinsi tersebut.

**Tabel 2. 6.** Komposisi Umur Penduduk Provinsi Jambi, Tahun 2020-2022

Struktur Umur	2020		2021		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0-14 tahun	930.234	26,2 2	929.379	25,9 2	931.115	25,6 4
15-64 tahun	2.453.687	69,1 5	2.479.743	69,1 7	2.511.443	69,1 6
65+ tahun	164.307	4,63	175.997	4,91	188.578	5,19

Sumber: Sensus Penduduk 2010 dan 2020

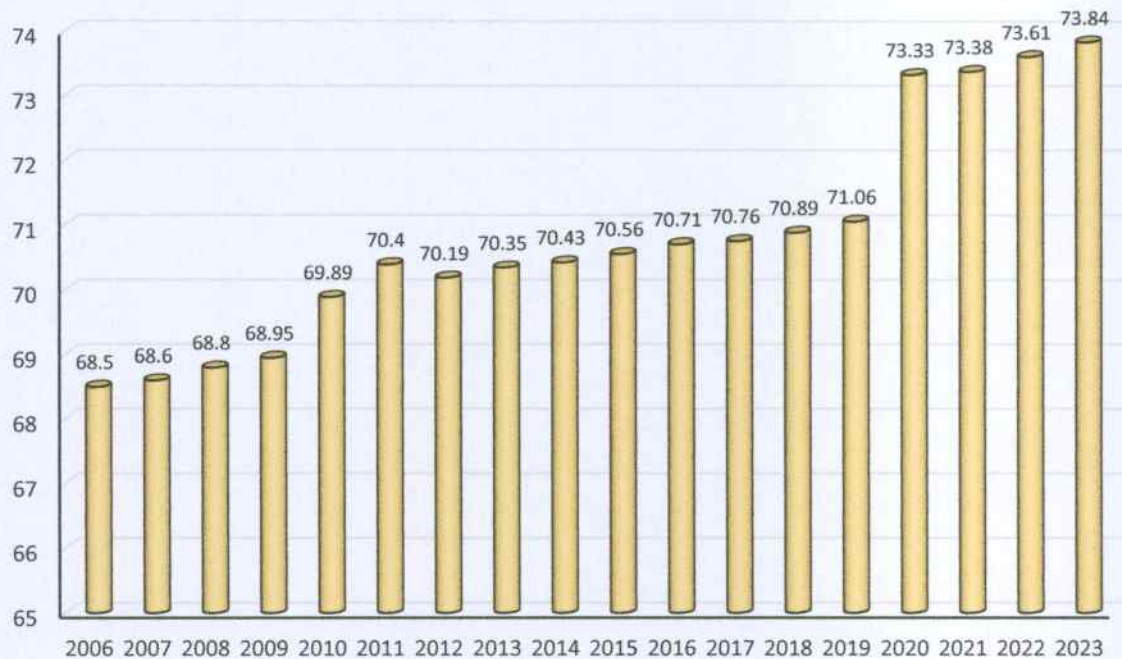
Berdasarkan Tabel 2.6 menunjukkan Pada tahun 2020, kelompok umur 0-14 tahun berjumlah 930.234 orang, yang merupakan 26,22% dari total populasi. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 929.379 orang atau 25,92%, dan pada tahun 2022 naik tipis menjadi 931.115 orang atau 25,64% dari populasi. Kelompok umur 15-64 tahun, yang mencakup mayoritas populasi produktif, tercatat berjumlah 2.453.687 orang atau 69,15% dari total penduduk pada tahun 2020. Jumlah ini meningkat ke 2.479.743 orang atau 69,17% pada tahun 2021, dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 2.511.443 orang atau 69,16%. Kelompok lansia, yaitu penduduk berumur 65 tahun ke atas, menunjukkan peningkatan jumlah dan persentase setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlahnya adalah 164.307 orang atau 4,63% dari total populasi. Pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi 175.997 orang atau 4,91%, dan pada tahun 2022, jumlahnya terus meningkat menjadi 188.578 orang atau 5,19%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi kelompok umur 0-14 tahun mengalami penurunan yang kecil, jumlah dan persentase penduduk lansia (65+ tahun) mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahun, menandakan penuaan populasi di Provinsi Jambi. Kelompok umur 15-64 tahun tetap stabil sebagai kelompok terbesar, menandakan basis penduduk yang masih cukup muda dan produktif.

### **I. Umur Harapan Hidup Provinsi Jambi**

Umur harapan hidup adalah ukuran rata-rata jumlah tahun yang diperkirakan akan dijalani oleh seseorang dari waktu kelahiran jika pola kematian saat ini tetap konstan di masa depan. Ini adalah indikator yang sangat penting dalam mengukur kesehatan umum dan

kualitas hidup dalam suatu populasi. Peningkatan UHH dapat mencerminkan berbagai faktor positif, seperti perbaikan dalam layanan kesehatan, penurunan angka kematian, peningkatan kualitas dan akses ke nutrisi, serta peningkatan kesadaran kesehatan di masyarakat.

Umur harapan hidup penduduk Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2023 diberikan pada Gambar 2.9 berikut:



**Gambar 2. 9.** Umur Harapan Hidup Provinsi Jambi, Tahun 2006 - 2023  
Sumber: BPS (IPM 2006-2023)

Berdasarkan Gambar 2.9 menunjukkan tren positif dalam Umur Harapan Hidup (UHH) selama periode 2006 hingga 2023. Di awal periode, UHH berada pada angka 65,5 tahun, dengan sedikit fluktuasi di beberapa tahun berikutnya. Sejak 2010, terdapat peningkatan yang lebih stabil dan signifikan, dimulai dari 70,4 tahun dan mencapai angka 71 tahun pada tahun 2016. Tren ini berlanjut dengan kenaikan yang konsisten, menandai peningkatan kualitas kesehatan dan kondisi hidup, hingga pada 2023, UHH mencapai puncaknya di 73,84 tahun. Kenaikan ini mencerminkan kemungkinan perbaikan dalam layanan kesehatan, pengurangan angka kematian, peningkatan kualitas nutrisi, dan kesadaran kesehatan yang lebih baik di kalangan populasi, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan harapan hidup di wilayah yang tidak disebutkan dalam grafik tersebut. Data ini penting sebagai indikator kemajuan sosial dan ekonomi dan menjadi dasar bagi

pembuat kebijakan untuk mengukur efektivitas program kesehatan masyarakat.

### **2.1.2. Mortalitas**

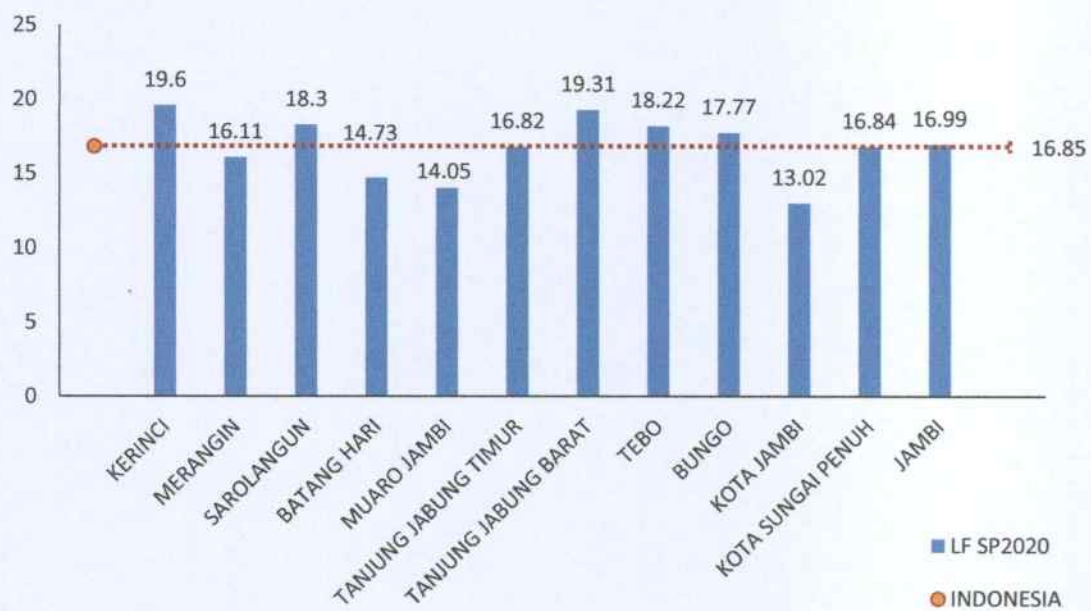
Mortalitas adalah ukuran rata-rata kematian penduduk dalam suatu wilayah atau daerah. Data mortalitas dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti demografi, asuransi, kesehatan, dan masih banyak lainnya. Data mortalitas dapat disajikan dalam bentuk tabel yang dinamakan tabel mortalitas, yang memberikan gambaran hidup kelompok penduduk yang dimulai dari kelahiran pada waktu yang sama dan perlahan-lahan akan berkurang karena kematian. Data mortalitas dapat digunakan untuk melakukan peramalan pada tingkat kematian penduduk atau wilayah. Indikator mortalitas yang umum digunakan meliputi: 1).Angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*), 2).Angka kematian semua penduduk dalam satu tahun angka kematian menurut umur (*Age Specific Mortality Rate*)/Angka kematian penduduk berdasarkan usia, 3).Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*)/Angka kematian bayi dalam satu tahun, 4).Angka kematian anak (*Child Mortality Rate*)/Angka kematian anak dalam usia 0-5 tahun.

#### **A. Infant Mortality Rate (IMR)**

*Infant Mortality Rate* (IMR) adalah indikator kesehatan yang mengukur jumlah kematian bayi yang terjadi dalam tahun pertama kehidupan mereka per 1.000 kelahiran hidup dalam suatu periode. IMR dianggap sebagai salah satu indikator paling penting untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat, karena mencerminkan status kesehatan, akses ke layanan medis, dan tingkat kemiskinan dalam sebuah masyarakat.

IMR meliputi kematian yang terjadi sejak bayi dilahirkan hingga mereka mencapai usia satu tahun. Indikator ini membantu menunjukkan masalah kesehatan utama yang mungkin dihadapi bayi, seperti komplikasi pada masa neonatal (28 hari pertama), masalah pernapasan, infeksi, lingkungan yang tidak sehat, dan akses yang terbatas atau tidak adanya perawatan prenatal dan postnatal yang memadai. Penurunan IMR sering menjadi fokus dari kebijakan kesehatan publik, karena menunjukkan perbaikan dalam faktor-faktor

seperti kebersihan, kesehatan ibu dan anak, akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas, serta intervensi medis yang efektif. Organisasi internasional dan pemerintah nasional bertujuan untuk mengurangi IMR sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan memastikan perkembangan yang sehat bagi semua anak.



**Gambar 2. 10.** Angka Kematian Bayi/AKB (Infant Mortality Rate/IMR) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2020  
Sumber: Badan Pusat Statistik, LF SP2020 dan Si Perindu, 2023

Berdasarkan Gambar 2.10 menunjukkan Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) dengan referensi Life Table Survival Probability (LF SP2020) di beberapa kabupaten, kota, dan Provinsi Jambi, dapat dilihat variasi dalam angka penurunan dan peningkatan IMR. Kabupaten Kerinci mencatatkan IMR tertinggi sebesar 19,6, sementara Kota Jambi memiliki angka yang lebih rendah, yaitu 13,02. Secara umum, terlihat tren penurunan IMR di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi, walaupun terdapat beberapa kabupaten dengan angka yang relatif tinggi. Kabupaten Batang Hari dan Kota Jambi mencatatkan IMR di bawah rata-rata Provinsi Jambi (16,99), menunjukkan potensi peningkatan kesehatan bayi di wilayah tersebut. Meskipun Indonesia memiliki IMR sebesar 16,85, Provinsi Jambi masih perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target penurunan IMR secara konsisten. Kesimpulannya, sementara terdapat progres positif dalam

menurunkan IMR di Provinsi Jambi, perlu adanya fokus strategis di kabupaten-kabupaten dengan IMR tinggi untuk mencapai peningkatan kesejahteraan bayi secara menyeluruh.

Untuk mengatasi variasi dalam Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) di Provinsi Jambi, diperlukan strategi yang holistik. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal menjadi prioritas utama, dengan fokus pada pemeriksaan prenatal, persalinan yang aman, dan perawatan pasca-kelahiran. Kampanye penyuluhan kesehatan ibu dan bayi akan diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan praktik kesehatan yang benar. Pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan, terutama di wilayah-wilayah dengan IMR tinggi, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam merawat bayi. Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif perlu diimplementasikan untuk memastikan kelancaran program-program kesehatan ibu dan bayi. Pemberdayaan masyarakat, melalui program dukungan keluarga dan penyuluhan di tingkat komunitas, juga dianggap kunci untuk mencapai penurunan IMR. Perbaikan infrastruktur kesehatan di daerah pedesaan dan kerja sama erat antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan masyarakat akan menjadi landasan strategi ini. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara terintegrasi, diharapkan dapat mencapai penurunan signifikan dalam angka kematian bayi di seluruh Provinsi Jambi

## **B. Angka Kematian Balita (AKB)**

Angka kematian bayi (AKB) atau *infant mortality rate* (IMR) adalah banyaknya kematian bayi usia di bawah 1 tahun (0–11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Dalam rentang 50 tahun (periode 1971–2022), penurunan AKB di Indonesia hampir 90 Persen (LFSP 2020). Untuk mengurangi angka kematian balita/*under-five mortality rate* (U5MR) di Provinsi Jambi, diperlukan implementasi strategi yang holistik. Langkah pertama adalah memperkuat akses pelayanan kesehatan dasar, seperti imunisasi dan perawatan anak, dengan peningkatan infrastruktur kesehatan.

Selanjutnya, pendidikan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi tentang praktik kesehatan yang baik.

Pentingnya pelatihan intensif untuk tenaga kesehatan di semua tingkatan juga tidak boleh diabaikan. Monitoring dan evaluasi program kesehatan balita menjadi kunci untuk memastikan efektivitasnya, sementara penyuluhan kepada ibu hamil dan pasangan serta perbaikan infrastruktur kesehatan menjadi fokus utama. Kerjasama antar instansi, pemberdayaan masyarakat, penggunaan teknologi informasi, dan advokasi kebijakan kesehatan.

Angka Kematian Balita menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2020 diberikan pada Gambar 2.11 berikut:



**Gambar 2. 11.** Angka kematian balita/*under five mortality rate* (U5MR) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2020  
Sumber: Long Form SP2020

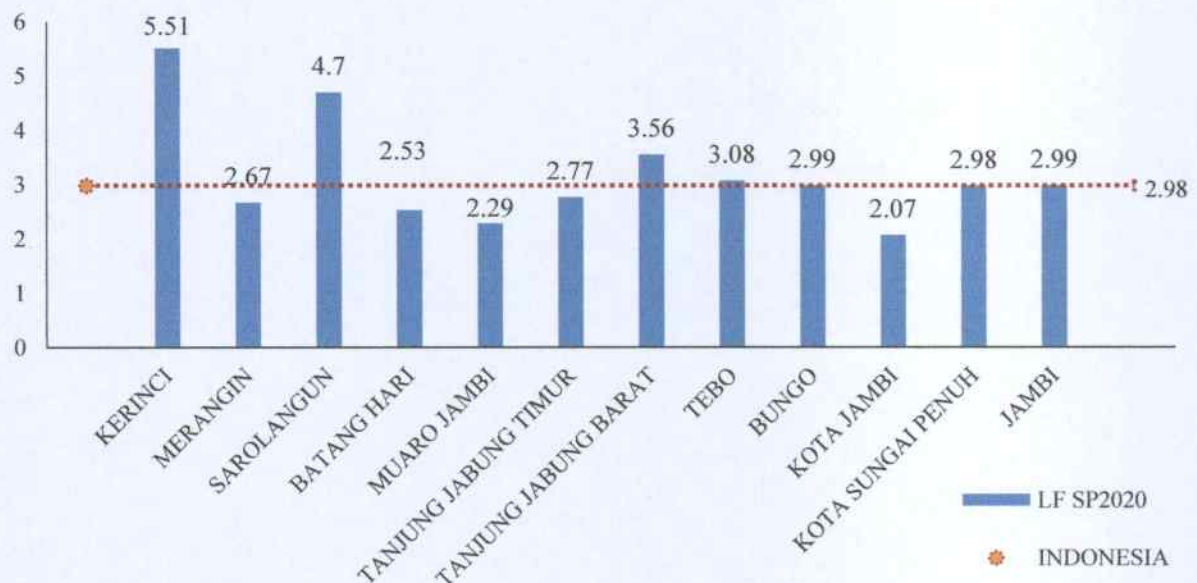
Berdasarkan Gambar 2.11 menunjukkan variasi signifikan dalam tingkat kematian balita antar kabupaten dan kota. Kabupaten Kerinci memiliki U5MR tertinggi dengan 25,11 kematian per 1.000 kelahiran hidup dari hasil Long Form SP2020, sedangkan Kota Jambi menunjukkan tingkat kematian balita yang relatif rendah sebesar 15,09 kematian per 1.000 kelahiran hidup dari hasil Long Form SP2020. Beberapa kabupaten, seperti Muaro Jambi dan Batang Hari, juga mencapai angka yang rendah, mencerminkan potensi peningkatan kesehatan anak-anak di wilayah tersebut. Variasi ini menunjukkan

perbedaan dalam upaya kesehatan masyarakat dan infrastruktur kesehatan di masing-masing wilayah Provinsi Jambi.

### C. Angka Kematian Anak/ *Child Mortality Rate* (CMR)

Angka kematian anak/*child mortality rate* (CMR) adalah indikator yang mengukur jumlah kematian anak di bawah usia lima tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu, biasanya per tahun. CMR sering digunakan sebagai salah satu indikator kesehatan masyarakat yang penting untuk menilai kondisi kesehatan anak-anak di suatu negara atau wilayah. CMR mencakup kematian yang terjadi dari saat lahir hingga sebelum anak tersebut mencapai usia lima tahun, termasuk neonatal (0-28 hari pertama kehidupan) dan kematian anak yang lebih tua (29 hari hingga sebelum ulang tahun kelima).

Penurunan CMR sering dianggap sebagai indikator kemajuan dalam akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas, nutrisi yang memadai, sanitasi yang baik, dan pencegahan penyakit. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi CMR meliputi akses ke layanan kesehatan maternal dan neonatal, tingkat imunisasi, status gizi anak, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.



**Gambar 2.12.** Angka kematian anak/*child mortality rate* (CMR) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2020

Sumber: LF SP2020

Berdasarkan Gambar 2.12 menunjukkan tersebut, terdapat variasi angka CMR antara kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci memiliki angka CMR tertinggi dengan 5.51, sedangkan Kota

Jambi memiliki angka CMR terendah dengan 2.07. Secara keseluruhan, rata-rata angka CMR di Provinsi Jambi adalah 2,99. Selain itu, tingkat kematian anak di Provinsi Jambi bervariasi antara wilayah-wilayahnya. Faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, infrastruktur, dan tingkat kemiskinan mungkin mempengaruhi angka CMR di setiap wilayah tersebut. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab variasi ini dan untuk mengembangkan strategi intervensi yang sesuai untuk mengurangi angka kematian anak di Provinsi Jambi.

Angka kematian bayi/*infant mortality rate* (IMR) mengukur jumlah kematian bayi yang terjadi dalam tahun pertama kehidupan per 1,000 kelahiran hidup, memberikan wawasan tentang kualitas perawatan kesehatan prenatal dan neonatal serta kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Angka kematian balita/*under-five mortality rate* (U5MR), yang mencakup semua kematian anak di bawah usia lima tahun per 1,000 kelahiran hidup, adalah indikator yang lebih luas, mencerminkan keberhasilan negara dalam mengatasi tantangan kesehatan selama masa kanak-kanak awal termasuk nutrisi dan pencegahan penyakit. Sedangkan angka kematian anak/*child mortality rate* (CMR) menilai kematian anak-anak di kelompok usia lebih lanjut, seperti antara usia lima hingga empat belas tahun, dan bisa memberikan data tentang risiko yang dihadapi anak-anak saat mereka tumbuh dan berkembang melampaui tahun-tahun awal yang sangat rentan. Ketiga metrik ini bersama-sama memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kesehatan anak di suatu negara, dari kelahiran hingga remaja, menyoroti area-area kritis untuk intervensi dan perbaikan dalam sistem kesehatan dan sosial.

Angka kematian menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2020 diberikan pada Tabel 2.7 berikut:

**Tabel 2. 7.** Angka kematian bayi menurut Kab/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Wilayah	AKB
1	Kerinci	19,60
2	Merangin	16,11
3	Sarolangun	18,30
4	Batang Hari	14,73
5	Muaro Jambi	14,05
6	Tanjung Jabung Timur	16,82
7	Tanjung Jabung Barat	19,31
8	Tebo	18,22
9	Bungo	17,77
10	Kota Jambi	13,02
11	Kota Sungai Penuh	16,84
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>19,60</b>

Sumber: LF SP 2020, BPS, (2023)

Berdasarkan Tabel 2.7 menunjukkan angka kematian bayi (AKB) di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Angka ini mengukur jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dalam setahun dan merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan ibu dan anak di suatu daerah. Kabupaten Kerinci memiliki AKB tertinggi di provinsi ini dengan nilai 19,60 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara Kota Jambi menunjukkan AKB terendah diantara semua daerah yang tercatat dengan nilai 13,02. Kemudian untuk Kabupaten lain seperti Merangin dan Muaro Jambi memiliki AKB yang relatif lebih rendah yaitu 16,11 dan 14,05, secara berurutan, yang menunjukkan kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jambi. Kabupaten Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Sungai Penuh juga menunjukkan AKB di bawah 17, dengan nilai masing-masing 14,73, 16,82, dan 16,84. Sementara itu, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Bungo memiliki AKB yang lebih tinggi, mencerminkan tantangan kesehatan yang mungkin lebih besar di daerah tersebut dengan nilai masing-masing 19,31, 18,22, dan 17,77. Secara keseluruhan, AKB di Provinsi Jambi menunjukkan variasi yang cukup lebar antara kabupaten/kota yang berbeda, yang dapat

mengindikasikan perbedaan dalam akses ke layanan kesehatan, kualitas perawatan prenatal dan neonatal, serta kondisi sosioekonomi dan lingkungan. AKB yang lebih tinggi di beberapa daerah menuntut perhatian khusus untuk meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan serta intervensi yang bertujuan untuk mengurangi mortalitas bayi

## **2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk (Pilar II)**

Peningkatan kualitas penduduk di Provinsi Jambi merupakan salah satu cara untuk menjadikan kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dengan mengembangkan kualitas penduduk, masyarakat dapat lebih efektif dalam membangun komunitas yang sehat, ramah lingkungan, dan berdaya saing ekonomi. Lingkungan, bisnis, pendidikan, dan kesehatan adalah beberapa bidang yang sedang diupayakan untuk meningkatkan standar kependudukan.

Dalam upaya peningkatan kualitas penduduk, indikator kesehatan memainkan peran krusial dalam menggambarkan keberhasilan sebuah negara dalam menyediakan layanan dasar bagi warganya. Angka Harapan Hidup (AHH) sering dijadikan tolak ukur umum kesehatan masyarakat, menandakan berapa lama rata-rata seorang diharapkan untuk hidup, yang secara langsung terkait dengan kualitas dan akses layanan kesehatan. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan mencerminkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, sedangkan prevalensi wasting dan stunting pada balita menunjukkan masalah gizi yang memerlukan perhatian khusus. Penting juga untuk mencatat bahwa imunisasi lengkap pada bayi dan akses ke air minum yang layak merupakan dasar penting untuk menghindari penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan. Sementara itu, Indeks Kesehatan dalam IPM memberikan gambaran lebih luas mengenai kesehatan dalam konteks pembangunan manusia secara keseluruhan.

Pada bidang pendidikan, partisipasi sekolah menjadi indikator penting dalam mengukur seberapa jauh suatu negara dapat mengedukasi generasi mudanya. Angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM) semuanya memberikan informasi mengenai sejauh mana anak-anak dan remaja mengakses pendidikan formal. Angka harapan lama Sekolah

menawarkan *insight* mengenai jumlah tahun pendidikan yang dapat diharapkan oleh anak-anak dalam sistem pendidikan saat ini, yang memiliki dampak langsung terhadap potensi sumber daya manusia di masa depan. Lebih lanjut, indeks pendidikan dalam IPM memasukkan pendidikan sebagai komponen utama dalam menghitung kualitas pembangunan manusia, menunjukkan pentingnya pendidikan yang berkualitas dalam memajukan masyarakat.

Sementara itu, indikator ekonomi memberikan gambaran tentang kinerja dan potensi sebuah ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Tingkat partisipasi angka kerja dan tingkat pengangguran terbuka memberi tahu kita tentang kondisi pasar tenaga kerja dan kemampuan ekonomi untuk menyerap angkatan kerja. Rasio ketergantungan melihat keseimbangan antara beban ekonomi penduduk produktif dengan mereka yang bergantung pada pendapatan tersebut. Laju pertumbuhan PDB adalah indikator vital yang mengukur seberapa cepat ekonomi sebuah negara berkembang, sementara PDB/PDRB per kapita mengukur kekayaan atau kemakmuran rata-rata per individu. Keseimbangan antara penciptaan peluang kerja dengan jumlah penduduk usia kerja serta persentase penduduk miskin juga memberikan informasi tentang keberhasilan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup.

### 2.2.1. Kesehatan

#### **2.2.1.1. Akses Terhadap Sanitasi Layak**

Akses terhadap sanitasi layak merujuk pada kemampuan individu atau komunitas untuk menggunakan fasilitas sanitasi yang bersih, aman, dan pribadi, yang secara efektif dapat memisahkan tinja dari kontak manusia. Ini termasuk memiliki toilet yang berfungsi dengan baik, fasilitas pembuangan limbah yang tepat, dan sarana untuk menjaga kebersihan pribadi seperti tempat cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Sanitasi layak sangat penting untuk mencegah penularan penyakit, meningkatkan kesehatan masyarakat, memastikan privasi dan keamanan, terutama bagi perempuan dan anak-anak, dan mempromosikan martabat serta kualitas hidup yang lebih baik.

**Tabel 2. 8.** Akses Terhadap Sanitasi Layak, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023
		Susenas 2020	Susenas 2021	Susenas 2022	Susenas 2023
1.	Kerinci	72,03	66,32	68,10	68,98
2.	Merangin	73,88	71,07	75,70	81,15
3.	Sarolangun	72,87	76,03	79,14	79,79
4.	Batang Hari	84,57	79,68	80,26	82,86
5.	Muaro Jambi	82,58	89,17	83,36	85,66
6.	Tanjung Timur Jabung	65,89	81,89	73,53	77,87
7.	Tanjung Barat Jabung	61,88	70,27	69,75	74,96
8.	Tebo	69,48	77,58	79,59	83,86
9.	Bungo	81,48	83,38	78,29	80,69
10.	Kota Jambi	95,03	93,22	92,82	98,08
11.	Kota Sungai Penuh	81,56	74,04	77,72	83,52
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>77,82</b>	<b>80,36</b>	<b>79,54</b>	<b>83,04</b>
<b>Nasiona;</b>		<b>79,53</b>	<b>80,29</b>	<b>80,92</b>	<b>82,36</b>

Sumber: SiPerindu, Susenas 2020, 2021, 2022, 2023

Berdasarkan Tabel 2.8 menggambarkan persentase akses terhadap sanitasi layak di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dari tahun 2020 hingga 2023, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dari tahun 2020 ke 2021, beberapa daerah seperti Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mengalami penurunan dalam akses ke sanitasi layak. Sebaliknya, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo menunjukkan peningkatan. Menuju tahun 2022, ada variasi dalam perubahan persentase: Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun terus menunjukkan peningkatan akses ke sanitasi layak, sementara daerah lain seperti Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, hampir semua kabupaten dan kota melaporkan peningkatan dalam akses terhadap

sanitasi layak, dengan Kabupaten Merangin mencatat peningkatan yang signifikan menjadi 81,15%, dan Kota Jambi mencapai 98,08%, menunjukkan tingkat akses yang sangat tinggi.

Secara keseluruhan, Provinsi Jambi mengalami peningkatan akses sanitasi layak dari 77,82% di tahun 2020 menjadi 83,04% di tahun 2023, menandakan peningkatan kondisi sanitasi. Pada tingkat nasional, terjadi peningkatan yang konsisten dari 79,53% di tahun 2020 menjadi 82,36% di tahun 2023. Sanitasi layak adalah komponen penting dalam menjamin kesehatan masyarakat. Akses ini mencakup fasilitas-fasilitas seperti toilet yang higienis, pengelolaan limbah yang aman, dan fasilitas cuci tangan dengan sabun. Peningkatan dalam indikator ini menunjukkan kemajuan dalam upaya publik dan kesehatan lingkungan, yang berkontribusi pada penurunan penyakit terkait sanitasi dan peningkatan kualitas hidup.

#### 2.2.1.2. Jaminan Kesehatan

Dalam konteks pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial, jaminan kesehatan berperan vital dalam menjamin kualitas hidup penduduk, mencegah kemiskinan akibat beban biaya kesehatan, dan menaikkan standar kesehatan masyarakat secara umum. Jaminan kesehatan yang inklusif dan efisien merupakan salah satu pilar utama sistem kesehatan yang baik.

**Tabel 2. 9.** Jaminan Kesehatan, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021-2023

No	Wlayah	2021	2022	2023
		Susenas 2021	Susenas 2022	Susenas 2023
1.	Kerinci	52,47	39,66	44,61
2.	Merangin	40,81	43,26	44,85
3.	Sarolangun	51,97	56,81	51,79
4.	Batang Hari	73,03	68,79	74,94
5.	Muaro Jambi	52,44	53,36	55,12
6.	Tanjung Jabung Timur	47,28	44,84	47,49
7.	Tanjung Jabung Barat	32,93	89,17	43,41
8.	Tebo	39,06	44,81	51,84
9.	Bungo	38,01	39,26	44,88
10.	Kota Jambi	71,07	74,56	76,63

No	Wlayah	2021	2022	2023
		Susenas 2021	Susenas 2022	Susenas 2023
11.	Kota Sungai Penuh	78,54	76,90	77,86
	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>51,98</b>	<b>55,91</b>	<b>55,86</b>
	<b>Nasional</b>	<b>68,36</b>	<b>69,62</b>	<b>72,38</b>

Sumber: SiPerindu, Susenas 2021, 2022, 2023

Berdasarkan Tabel 2.9 menggambarkan persentase cakupan jaminan kesehatan di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pada tahun 2021, cakupan jaminan kesehatan bervariasi antar daerah di Provinsi Jambi, dengan Kabupaten Batanghari memiliki persentase tertinggi 73,03% dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendah 32,93%. Melihat ke tahun 2022, ada perubahan yang signifikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan peningkatan drastis menjadi 89,17%, menandakan adanya potensi perbaikan besar dalam cakupan jaminan kesehatan atau mungkin kesalahan data. Sementara itu, kabupaten lainnya menunjukkan perubahan yang lebih moderat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi terus menunjukkan peningkatan cakupan dengan angka masing-masing menjadi 74,94% dan 76,63%, sementara daerah lain seperti Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin juga mengalami kenaikan tetapi tidak sebesar tahun sebelumnya. Kota dengan cakupan jaminan kesehatan tertinggi adalah Kota Sungai Penuh dengan 77,86%. Secara keseluruhan, Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan cakupan dari 51,98% di tahun 2021 menjadi 55,91% di tahun 2022, dan sedikit penurunan menjadi 55,86% di tahun 2023. Sementara itu, pada tingkat nasional, terjadi peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, dari 68,36% pada tahun 2021 menjadi 72,38% pada tahun 2023, yang mengindikasikan peningkatan akses ke jaminan kesehatan di seluruh Indonesia.

Sistem jaminan kesehatan dapat mencakup asuransi kesehatan, baik yang dijalankan oleh pemerintah (seperti Medicare, Medicaid, atau

BPJS Kesehatan di Indonesia) maupun asuransi kesehatan swasta dan skema lainnya yang memungkinkan individu untuk mengasuransikan diri mereka terhadap risiko kesehatan. Jaminan kesehatan biasanya mencakup biaya untuk layanan seperti konsultasi dokter, rawat inap, pemeriksaan, pengobatan, dan kadang-kadang layanan kesehatan preventif. Tujuan utama dari jaminan kesehatan adalah untuk memastikan bahwa semua orang, terlepas dari status ekonomi mereka, dapat memperoleh perawatan kesehatan yang diperlukan tanpa menghadapi kesulitan keuangan yang serius akibat biaya medis yang tinggi.

Cakupan jaminan kesehatan yang luas adalah indikator penting dari akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan merupakan komponen kunci dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Persentase cakupan ini dapat memberi wawasan tentang efektivitas kebijakan kesehatan publik dan inklusivitas sistem kesehatan di tingkat lokal maupun nasional.

### **2.2.1.3. Jenis Penyakit berdasarkan Kabupaten/Kota**

Untuk memberikan analisis tentang jenis penyakit berdasarkan kabupaten/kota, diperlukan data yang mencantumkan jenis penyakit yang terjadi di setiap daerah. Adapun data terkait dengan jenis penyakit yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi:

#### **A. Malaria (Suspek)**

Strategi untuk mengatasi kasus malaria (suspek) di Provinsi Jambi meliputi penguatan pencegahan melalui program penyemprotan insektisida dan edukasi masyarakat, peningkatan deteksi dini dengan distribusi tes cepat malaria, penyuluhan tentang gejala dan perawatan, monitoring kasus secara teratur, kerja sama antarinstansi, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan dapat mengurangi kasus malaria (suspek) secara signifikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat Provinsi Jambi secara keseluruhan.

Kasus malaria pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022 diberikan pada Gambar 2.13 berikut:



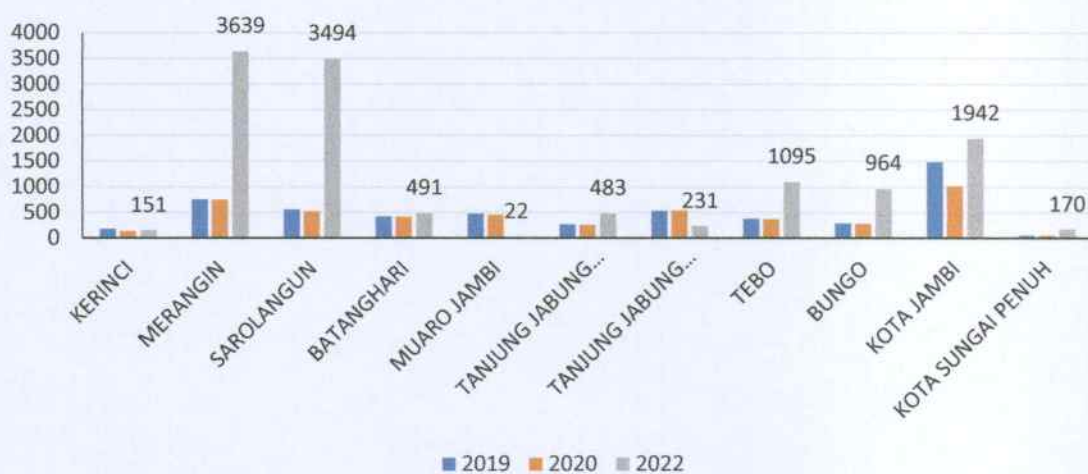
**Gambar 2. 13.** Kasus Penyakit Malaria (Suspek), Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022  
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.13 menunjukkan yang disajikan mengenai kasus malaria (suspek) di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama Tahun 2019, 2020, dan 2022 menunjukkan pola yang menarik. Secara keseluruhan, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah kasus malaria (suspek) di Provinsi Jambi dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2019, tercatat 26.806 kasus, meningkat menjadi 30.088 kasus pada Tahun 2020, namun kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 12.682 kasus pada Tahun 2022. Beberapa kabupaten/kota, seperti Merangin, Sarolangun, dan Tebo, menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam jumlah kasus malaria (suspek) selama periode tersebut, sementara kabupaten/kota lainnya seperti Kerinci, Batanghari, dan Kota Jambi mengalami fluktuasi yang signifikan. Muaro Jambi mencatat penurunan drastis dari 3.058 kasus pada Tahun 2019 menjadi hanya 22 kasus pada Tahun 2022. Kesimpulannya, meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah kasus malaria (suspek) dari Tahun ke Tahun, terlihat adanya upaya yang berhasil dalam pengendalian dan pencegahan penyakit ini di Provinsi Jambi. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan yang signifikan pada Tahun 2022 serta untuk menjaga tren penurunan yang berkelanjutan di masa depan.

## B. TB Paru

Untuk mengatasi kasus TB Paru di Provinsi Jambi, strategi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang gejala dan penularan TB Paru, penguatan deteksi dini melalui pelatihan tenaga kesehatan dan distribusi alat tes diagnostik, pemberian pengobatan yang tepat dan teratur, monitoring serta pengendalian penyebaran kasus, peningkatan fasilitas kesehatan, dan kerjasama antarinstansi.

Kasus TB Paru pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022 diberikan pada Gambar 2.14 berikut:



**Gambar 2. 14.** Kasus TB Paru, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

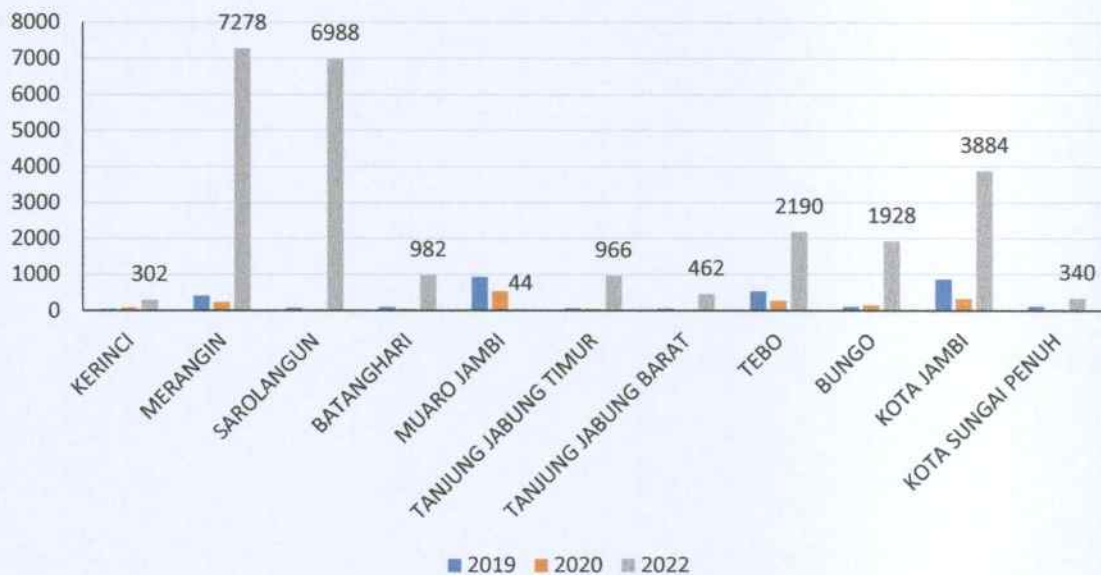
Berdasarkan Gambar 2.14 menunjukkan mengenai kasus TB Paru di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama Tahun 2019, 2020, dan 2022 menunjukkan pola yang menarik. Secara keseluruhan, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah kasus TB Paru di Provinsi Jambi dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2019, terdapat 5.444 kasus, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 4.838 kasus pada Tahun 2020, namun meningkat secara signifikan menjadi 12.682 kasus pada Tahun 2022. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan tren yang berbeda-beda dalam jumlah kasus TB Paru selama periode tersebut, dengan beberapa daerah mengalami penurunan, sedangkan yang lain mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai contoh, Kota Jambi mencatat penurunan yang signifikan dari 1.488 kasus pada Tahun 2019 menjadi 1.021 kasus pada Tahun 2020, sebelum kemudian

mengalami lonjakan menjadi 1.942 kasus pada Tahun 2022. Kesimpulannya, meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah kasus TB Paru dari Tahun ke Tahun, terlihat adanya kebutuhan untuk meningkatkan upaya pencegahan, deteksi, dan pengobatan penyakit ini di Provinsi Jambi. Dengan menerapkan strategi ini secara komprehensif, diharapkan dapat mengurangi angka kasus TB Paru di Provinsi Jambi dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan drastis pada Tahun 2022 serta untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah TB Paru di wilayah ini.

### **C. Pneumonia**

Untuk mengatasi peningkatan yang signifikan dalam kasus pneumonia di Provinsi Jambi, strategi yang dapat diambil termasuk penguatan pencegahan melalui kampanye penyuluhan, peningkatan deteksi dini dengan pelatihan tenaga medis dan distribusi alat diagnostik, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, monitoring dan evaluasi yang berkala, kerjasama antarinstansi, serta penelitian lebih lanjut untuk memahami penyebab dan faktor risiko yang terlibat.

Kasus pneumonia pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022 diberikan pada Gambar 2.15 yang menunjukkan mengenai kasus pneumonia di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama Tahun 2019, 2020, dan 2022 menunjukkan pola yang signifikan. Secara keseluruhan, terlihat adanya peningkatan yang drastis dalam jumlah kasus pneumonia di Provinsi Jambi dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2019, terdapat 3.329 kasus, yang kemudian meningkat menjadi 1.812 kasus pada Tahun 2020, sebelum melonjak secara signifikan menjadi 25.364 kasus pada Tahun 2022.



**Gambar 2. 15.** Pneumonia

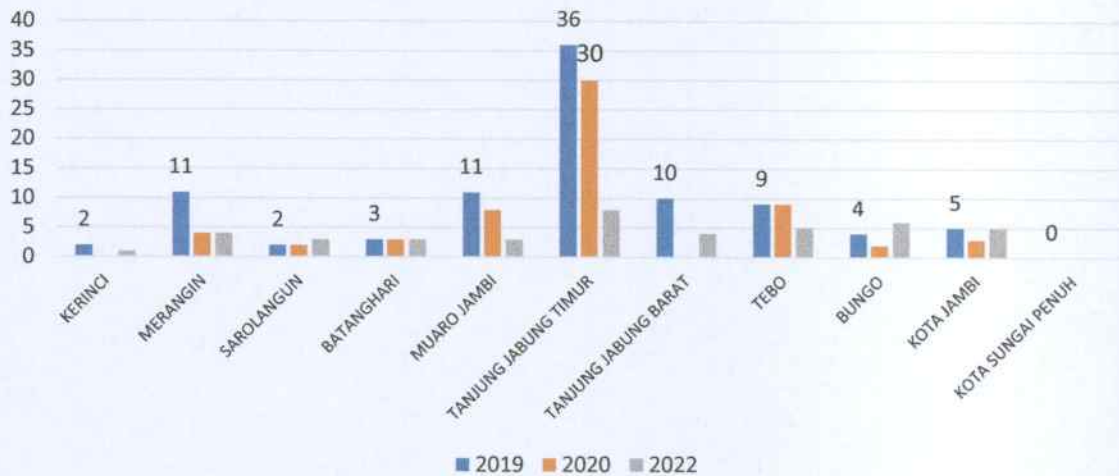
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Selain itu, pola peningkatan yang signifikan juga terlihat pada sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dengan peningkatan jumlah kasus yang mencolok terutama pada Tahun 2022. Beberapa daerah seperti Merangin, Sarolangun, dan Tebo bahkan mencatat peningkatan kasus pneumonia yang sangat besar selama periode tersebut. Kesimpulannya, terdapat urgensi untuk meningkatkan upaya pencegahan, deteksi, dan pengobatan pneumonia di Provinsi Jambi, serta perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan yang drastis pada Tahun 2022.

#### **D. Kusta**

Untuk mengatasi kasus kusta di Provinsi Jambi, strategi yang diperlukan meliputi kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kusta, peningkatan deteksi dini melalui program skrining kesehatan yang teratur, serta pemberian pengobatan yang tepat dan lengkap bagi pasien kusta. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan kasus dan tindakan pengendalian yang efektif, kerjasama antara berbagai pihak terkait, dan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

Kasus kusta pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022 diberikan pada Gambar 2.16.



**Gambar 2. 16.** Kasus Kusta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

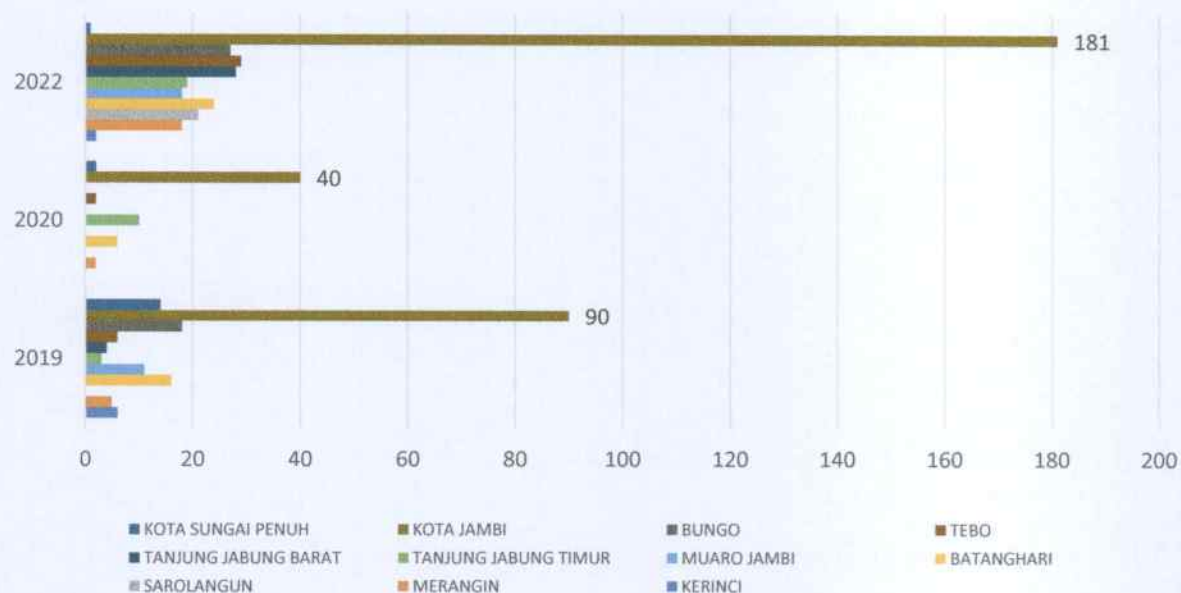
Berdasarkan Gambar 2.16 menunjukkan kasus kusta di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama Tahun 2019, 2020, dan 2022 menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah kasus. Secara keseluruhan, terjadi penurunan yang signifikan dari 93 kasus pada Tahun 2019 menjadi 42 kasus pada Tahun 2022. Sebagian besar kabupaten/kota mencatat penurunan jumlah kasus kusta dari Tahun ke Tahun, meskipun terdapat beberapa daerah yang mengalami fluktuasi atau peningkatan kecil. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, misalnya, mencatat penurunan yang cukup besar dari 36 kasus pada Tahun 2019 menjadi 8 kasus pada Tahun 2022. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa daerah yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti Kerinci yang mengalami peningkatan dari 2 kasus pada Tahun 2019 menjadi 1 kasus pada Tahun 2022.

### **E. Campak**

Kampanye edukasi perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan tanda-tanda campak, disertai dengan peningkatan pemantauan dan deteksi dini kasus. Akses terhadap layanan kesehatan juga harus diperluas, khususnya di daerah pedesaan, sementara penyuluhan khusus kepada kelompok rentan menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman

mereka tentang campak dan pentingnya vaksinasi. Dengan mengimplementasikan strategi ini secara holistik, diharapkan dapat mengurangi penyebaran campak dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyakit tersebut.

Kasus campak pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022 diberikan pada Gambar 2.17.



**Gambar 2. 17.** Kasus Campak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.17 menunjukkan kasus campak di Provinsi Jambi pada Tahun 2019, 2020, dan 2022, terlihat bahwa jumlah kasus mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada Tahun 2019, Provinsi Jambi melaporkan total 173 kasus, meningkat menjadi 62 kasus pada Tahun 2020, dan kemudian melonjak tajam menjadi 368 kasus pada Tahun 2022.

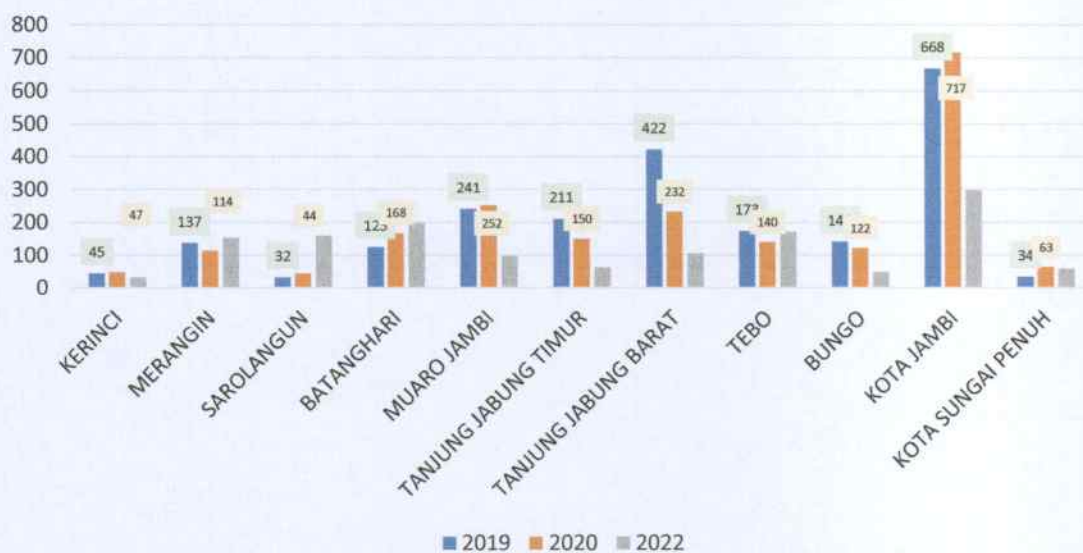
Beberapa Kabupaten/Kota juga mencatat peningkatan kasus yang cukup besar selama periode yang sama, seperti Kota Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Bungo. Namun, beberapa wilayah seperti Merangin, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Sungai Penuh mencatat penurunan atau stagnasi dalam jumlah kasus campak. Kesimpulannya, meskipun terdapat variasi dalam jumlah kasus di tiap wilayah, penting untuk meningkatkan upaya pencegahan dan vaksinasi guna mengendalikan penyebaran penyakit ini, terutama di wilayah-wilayah yang melaporkan peningkatan kasus yang signifikan. Untuk

menanggulangi peningkatan kasus campak di Provinsi Jambi, strategi yang diperlukan meliputi pelaksanaan program vaksinasi massal dengan fokus pada peningkatan cakupan vaksinasi, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak.

#### F. DBD

Untuk mengatasi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Jambi, strategi pencegahan yang holistik dan berkelanjutan perlu diterapkan. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberantasan sarang nyamuk secara intensif, penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan DBD, penguatan sistem kesehatan untuk deteksi dini dan penanganan kasus, kerja sama antar sektor dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat, serta peningkatan *surveillance* dan monitoring.

Kasus DBD pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022 diberikan pada Gambar 2.18 berikut:



**Gambar 2. 18.** Kasus DBD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.18 menunjukkan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Jambi dari Tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan variasi yang signifikan. Pada Tahun 2019, Provinsi Jambi melaporkan Total 2.229 kasus DBD, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 2.049 kasus pada Tahun 2020, dan penurunan

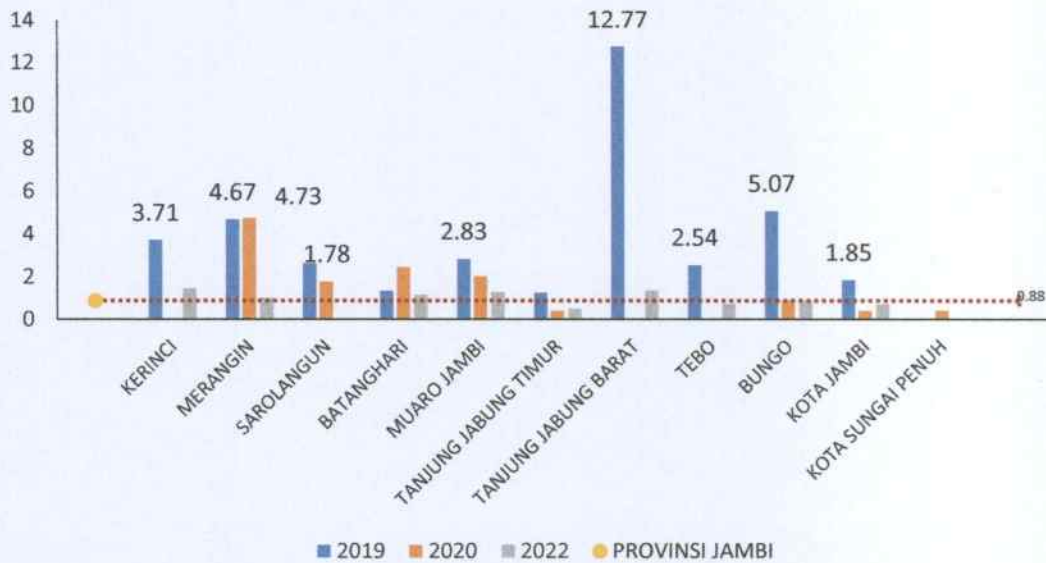
lebih lanjut menjadi 1.381 kasus pada Tahun 2022. Analisis data menunjukkan pola yang beragam di berbagai kabupaten/kota. Misalnya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat penurunan tajam dari 422 kasus pada Tahun 2019 menjadi 105 kasus pada Tahun 2022. Namun, beberapa wilayah seperti Sarolangun mengalami peningkatan kasus dari 32 pada Tahun 2019 menjadi 160 pada Tahun 2022. Kesimpulannya, sementara secara keseluruhan Provinsi Jambi mencatat penurunan kasus DBD, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tren kasus di tiap wilayah guna merancang strategi pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif.

#### **2.2.1.4. Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan (Persen)**

Penduduk mempunyai keluhan kesehatan tidak berobat jalan karena alasan seperti tidak ada biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi, dan waktu tunggu pelayanan yang lama. Pada Tahun 2019-2022, penduduk Indonesia sebesar 6,09% memiliki keluhan kesehatan tetapi enggan berobat jalan. Untuk gambaran di Provinsi Jambi dapat dibedakan sebagai berikut:

### A. Tidak Punya Biaya Berobat

Kasus tidak punya biaya berobat terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022 diberikan pada Gambar 2.19 berikut:



**Gambar 2.19.** Penduduk mempunyai keluhan tidak punya biaya berobat, menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

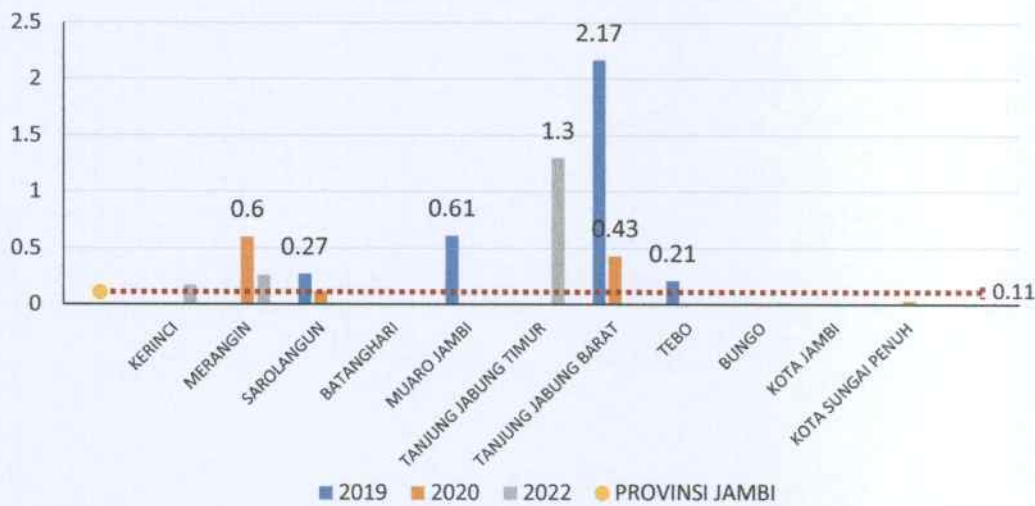
Berdasarkan Gambar 2.19 menunjukkan Kabupaten Kerinci mengalami penurunan yang signifikan dari 3,71 pada Tahun 2019 menjadi 0 pada Tahun 2020, yang merupakan penurunan sebesar 3,71. Namun, pada Tahun 2022, biaya berobat di Kabupaten Kerinci naik kembali menjadi 1,46, menunjukkan peningkatan sebesar 1,46 dari Tahun sebelumnya. Hal yang serupa dapat diamati di kabupaten lainnya. Misalnya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan dari 12,77 pada Tahun 2019 menjadi 0 pada Tahun 2020, yang merupakan penurunan sebesar 12,77. Namun, pada Tahun 2022, biaya berobat di kabupaten tersebut naik menjadi 1,36, menunjukkan peningkatan sebesar 1,36 dari Tahun sebelumnya. Penurunan dan peningkatan yang terjadi pada setiap kabupaten/kota memberikan gambaran tentang dinamika biaya berobat di daerah tersebut selama periode waktu yang diamati.

Untuk mengatasi fluktuasi dan penurunan biaya berobat di beberapa kabupaten/kota Provinsi Jambi, pemerintah dapat mengimplementasikan strategi-strategi yang terintegrasi. Ini termasuk

melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan yang ada, memperkuat infrastruktur kesehatan dan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, memberikan subsidi kepada masyarakat yang kesulitan membayar biaya berobat, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian biaya kesehatan, melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya kesehatan masyarakat, menggalakkan kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan kesehatan terjangkau, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan preventif. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta mengurangi beban biaya berobat bagi masyarakat di Provinsi Jambi.

### B. Tidak ada biaya transportasi

Untuk mengatasi fluktuasi yang tidak konsisten dalam aksesibilitas layanan kesehatan di Kabupaten Kerinci, diperlukan serangkaian strategi yang terkoordinasi dengan baik.



**Gambar 2. 20.** Penduduk Mempunyai Keluhan Tidak Punya Biaya Transportasi, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

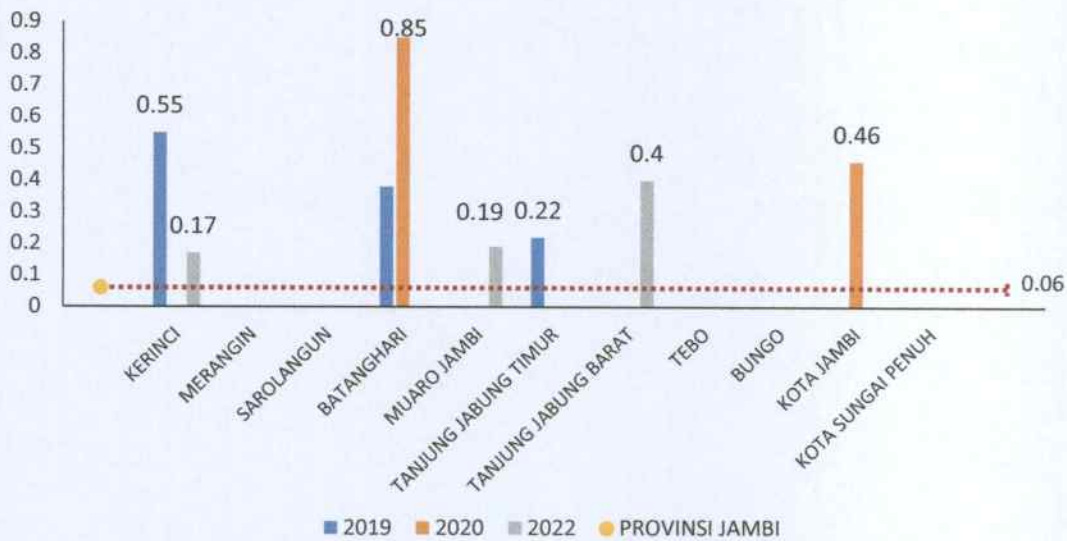
Berdasarkan Gambar 2.20 menunjukkan analisis perubahan persentase masyarakat yang tidak memiliki biaya berobat di Kabupaten Kerinci selama Tahun 2019, 2020, dan 2022, terjadi penurunan yang signifikan dari 2019 ke 2020 sebesar 3,71, kemudian terjadi peningkatan yang cukup besar dari 2020 ke 2022 sebesar -1,46, yang sebenarnya mencerminkan penurunan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi yang tidak konsisten dalam

aksesibilitas layanan kesehatan di wilayah tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memahami dan mengatasi masalah akses terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Kerinci.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap kebijakan kesehatan yang ada untuk memahami dampaknya terhadap fluktuasi, penguatan infrastruktur kesehatan dengan meningkatkan fasilitas dan tenaga medis, pemberian subsidi kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, kampanye edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kemitraan dengan sektor swasta untuk menyediakan layanan kesehatan terjangkau, peningkatan pengawasan dan pengendalian biaya kesehatan, serta promosi partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan preventif.

### **C. Tidak ada sarana transportasi**

Untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi di wilayah-wilayah Provinsi Jambi, beberapa strategi dapat diimplementasikan secara terintegrasi. Pertama, pemerintah perlu fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi seperti jalan raya dan transportasi publik untuk memperluas jangkauan transportasi bagi masyarakat. Selain itu, program subsidi transportasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi.



**Gambar 2. 21.** Penduduk mempunyai keluhan tidak ada sarana transportasi, menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.21 menunjukkan mengenai persentase masyarakat yang tidak memiliki sarana transportasi di berbagai wilayah Provinsi Jambi selama Tahun 2019, 2020, dan 2022, terdapat pola perubahan yang menarik untuk diamati. Sebagian besar wilayah menunjukkan stagnasi dalam angka persentase, menandakan ketidakberubahan kondisi aksesibilitas transportasi dari tahun ke tahun.

Namun, ada beberapa penurunan dan peningkatan yang terjadi di beberapa wilayah. Misalnya, Kabupaten Kerinci mengalami penurunan yang signifikan dari 0,55 pada Tahun 2019 menjadi 0 pada Tahun 2020, namun mengalami peningkatan kecil menjadi 0,17 pada Tahun 2022. Sebaliknya, Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan yang cukup besar dari 0,38 pada Tahun 2019 menjadi 0,85 pada Tahun 2020, namun kembali ke nilai 0 pada Tahun 2022. Wilayah lain seperti Kota Jambi menunjukkan peningkatan dari 0 pada Tahun 2019 menjadi 0,46 pada Tahun 2020, namun kembali stabil pada Tahun 2022. Kesimpulannya, meskipun beberapa wilayah mengalami fluktuasi dalam aksesibilitas transportasi, sebagian besar wilayah Provinsi Jambi menunjukkan stabilitas dalam hal ini selama periode yang diamati. Kampanye informasi dan edukasi juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transportasi

yang aman dan terjangkau. Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur transportasi serta pemanfaatan teknologi transportasi juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas transportasi secara keseluruhan.

#### **D. Waktu Tunggu Pelayanan Lama**

Perkembangan angka penurunan dan peningkatan persentase masyarakat yang tidak memiliki sarana transportasi di wilayah-wilayah Provinsi Jambi selama Tahun 2019, 2020, dan 2022 menunjukkan variasi yang signifikan. Untuk mengatasi variasi dalam aksesibilitas transportasi di wilayah-wilayah Provinsi Jambi, sejumlah strategi dapat diadopsi. Pertama, perlu dilakukan peningkatan investasi dalam infrastruktur transportasi, seperti perbaikan jalan dan pengembangan transportasi publik, untuk memperluas jangkauan transportasi bagi masyarakat. Selanjutnya, program subsidi transportasi dapat diperkenalkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mengatasi kendala biaya transportasi.

Kampanye informasi dan edukasi juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transportasi yang aman dan terjangkau. Selain itu, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan ketersediaan layanan transportasi. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi transportasi online juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas transportasi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan Provinsi Jambi dapat mengatasi tantangan dalam aksesibilitas transportasi dan meningkatkan mobilitas serta kualitas hidup masyarakatnya.



**Gambar 2. 22.** Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan karena Waktu Tunggu Pelayanan Lama, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

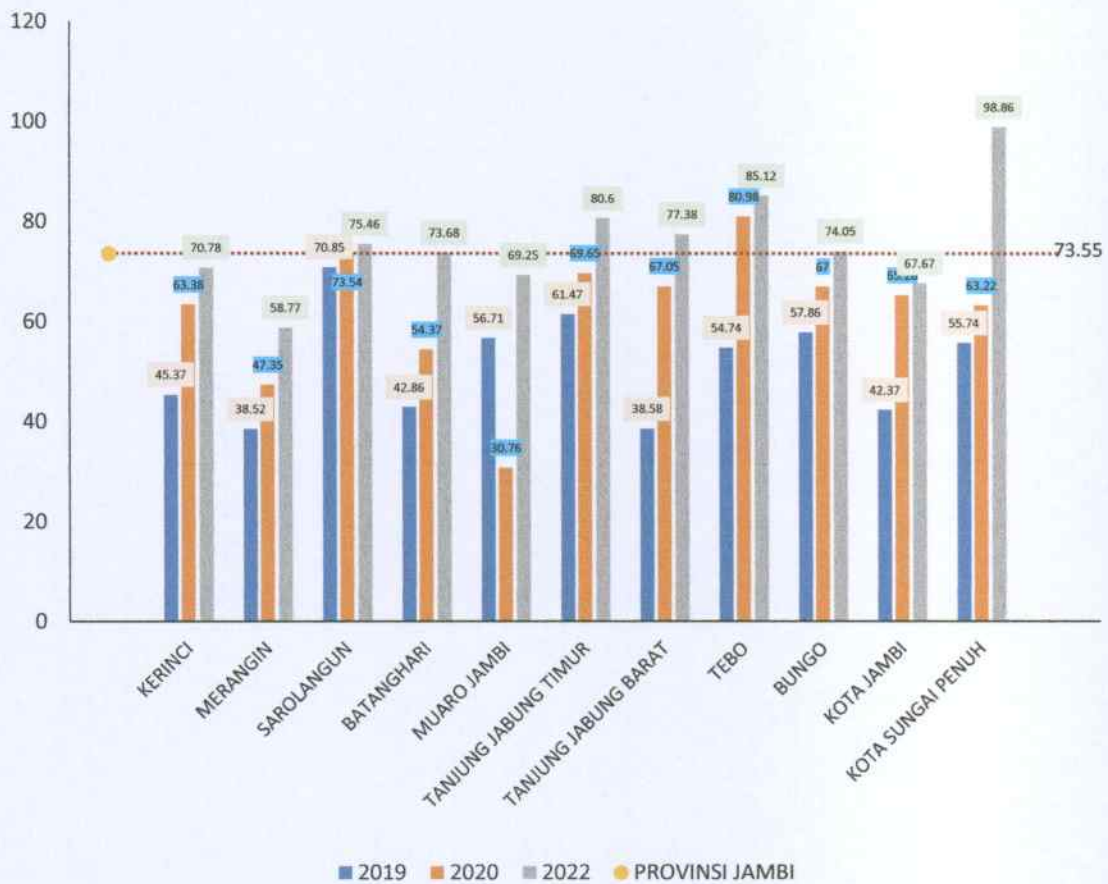
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.22 menunjukkan beberapa wilayah seperti Kerinci, Merangin, Sarolangun, dan Tanjung Jabung Barat mengalami stagnasi dengan nilai tetap 0 sepanjang periode, sementara wilayah lainnya seperti Kota Jambi dan Muaro Jambi mengalami fluktuasi yang cukup besar. Kota Jambi mencatatkan peningkatan yang signifikan pada Tahun 2020, tetapi kembali ke nilai 0 pada Tahun 2022, sementara Muaro Jambi mengalami peningkatan yang terus meningkat dari 0 pada Tahun 2019 dan 2020 menjadi 0,48 pada Tahun 2022. Kesimpulannya, variasi dalam perubahan angka tersebut menunjukkan kompleksitas dalam aksesibilitas transportasi di Provinsi Jambi, dan diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut serta mengembangkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi secara menyeluruh.

### E. Mengobati sendiri

Untuk mengatasi meningkatnya tren pengobatan mandiri di berbagai wilayah Provinsi Jambi, beberapa strategi dapat diimplementasikan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan yang terjangkau, baik di pusat

kesehatan maupun di tingkat desa atau kelurahan, sehingga masyarakat memiliki opsi yang lebih baik selain mengobati diri sendiri. Selain itu, kampanye penyuluhan kesehatan perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsultasi dengan tenaga medis terlatih sebelum memutuskan untuk mengobati sendiri.



**Gambar 2. 23.** Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan karena Mengobati Sendiri, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pemerintah juga dapat mendorong kerjasama antara sektor kesehatan dan komunitas lokal untuk memberikan edukasi tentang penggunaan obat-obatan secara bijak dan aman. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih pengobatan mandiri, sehingga strategi yang lebih spesifik dan efektif dapat dikembangkan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara komprehensif, diharapkan dapat mengurangi angka pengobatan mandiri dan

meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang tepat dan terpercaya.

#### F. Tidak ada yang mendampingi

Selama periode yang diamati, terdapat variasi dalam trend penurunan dan peningkatan persentase masyarakat yang tidak memiliki pendamping atau yang mendampingi di beberapa wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan

Gambar 2.24 menunjukkan wilayah Kerinci mengalami penurunan signifikan dari 0,52 pada Tahun 2019 menjadi 0 pada Tahun 2020, dan tetap stabil pada nilai 0 pada Tahun 2022. Sementara itu, wilayah Merangin dan Sarolangun menunjukkan kestabilan dengan tetap pada nilai 0 sepanjang periode yang diamati. Di sisi lain, wilayah Batanghari mengalami peningkatan dari 0,51 pada Tahun 2019 menjadi 0,94 pada Tahun 2020, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 0,43 pada Tahun 2022. Wilayah lainnya, seperti Muaro Jambi, Bungo, dan Kota Sungai Penuh, tetap pada nilai 0 sepanjang periode yang diamati. Sedangkan wilayah Tebo dan Kota Jambi mengalami peningkatan pada Tahun 2022 setelah tetap stabil pada Tahun-Tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pola perubahan ini menunjukkan dinamika kompleks dalam preferensi masyarakat terkait dengan pendampingan dalam aktivitas mereka di berbagai wilayah Provinsi Jambi.



**Gambar 2. 24.** Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan karena Tidak Ada yang Mendampingi, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Untuk mengatasi variasi dalam tren penurunan dan peningkatan persentase masyarakat yang tidak memiliki pendamping atau yang mendampingi di wilayah-wilayah Provinsi Jambi, beberapa strategi dapat dipertimbangkan. Pertama, diperlukan kampanye penyuluhan yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki pendamping atau mendampingi dalam berbagai aktivitas, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan.

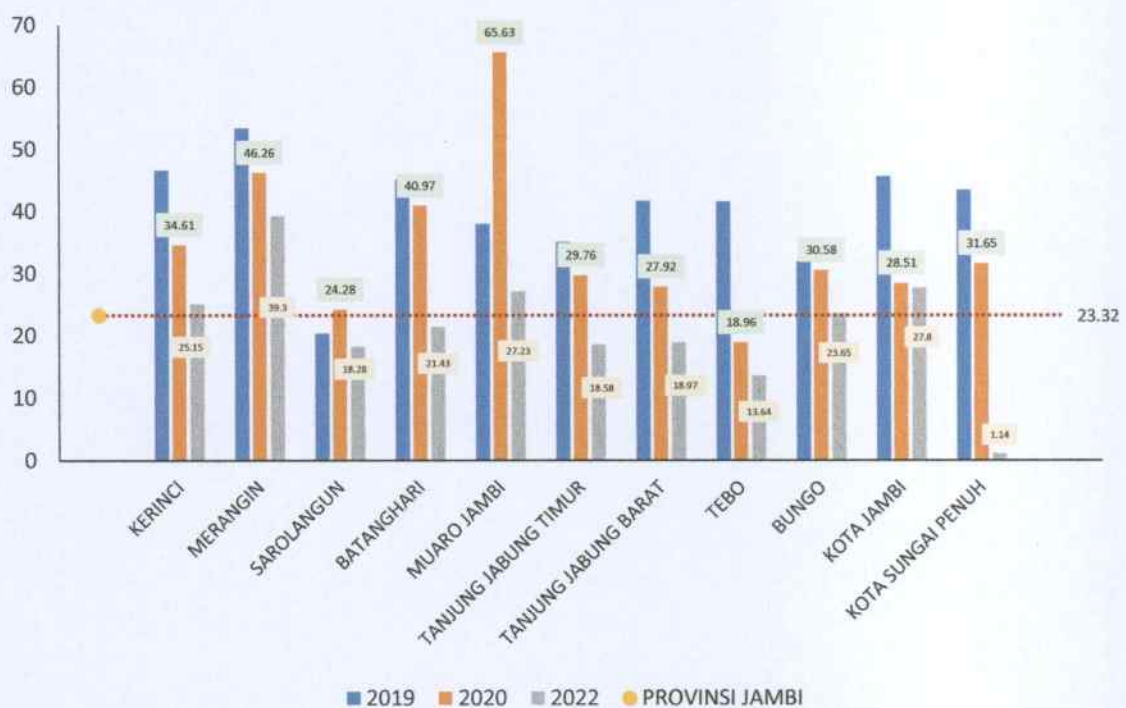
Selain itu, perlu dilakukan program pelatihan bagi tenaga sosial dan kesehatan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, khususnya yang rentan seperti lansia, anak-anak, dan difabel. Pemerintah juga dapat mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendampingan yang lebih luas dan terjangkau. Selain itu, perlu adanya regulasi yang jelas dan implementasi yang ketat untuk melindungi hak-hak masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

#### **G. Merasa tidak perlu**

Dalam rentang waktu yang diamati, beberapa wilayah di Provinsi Jambi mengalami perubahan signifikan dalam persentase masyarakat yang merasa tidak perlu melakukan cek kesehatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya bantuan dan dukungan sosial, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam memperbaiki kualitas hidup di wilayah tersebut.

Strategi untuk mengatasi penurunan persentase masyarakat yang merasa tidak perlu di berbagai wilayah Provinsi Jambi dapat melibatkan pendekatan berbasis komunitas dan edukasi. Pertama, pemerintah daerah dapat memperkuat komunikasi dan interaksi langsung dengan masyarakat melalui program-program sosialisasi yang berkelanjutan tentang pentingnya perlunya bantuan dan dukungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan pertemuan komunitas yang melibatkan tokoh

masyarakat setempat. Kedua, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial bagi individu yang mungkin merasa tidak perlu. Ini dapat dilakukan dengan memperluas jaringan layanan kesehatan mental di wilayah tersebut dan menyediakan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan layanan sosial untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan individu yang merasa tidak perlu. Ketiga, mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pembangunan dan rehabilitasi komunitas sebagai cara untuk meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam upaya-upaya perbaikan sosial.



**Gambar 2. 25.** Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Tidak Berobot Jalan karena Merasa Tidak Perlu, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

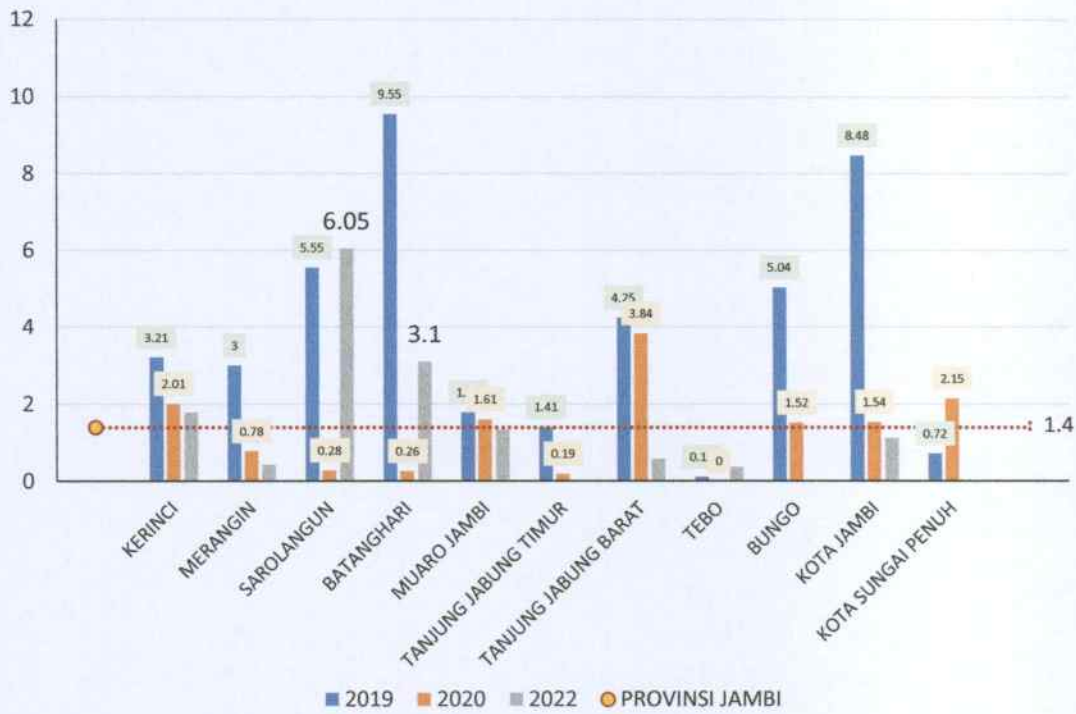
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.25 menunjukkan Kerinci mengalami penurunan dari 46,64% pada Tahun 2019 menjadi 34,61% pada Tahun 2020, kemudian terus menurun menjadi 25,15% pada Tahun 2022. Sementara itu, Merangin juga mengalami penurunan yang berkelanjutan dari 53,42% pada Tahun 2019 menjadi 39,3% pada Tahun 2022. Namun, tidak semua wilayah mengikuti pola serupa; Sarolangun mengalami kenaikan singkat dari 20,39% pada Tahun 2019 menjadi 24,28% pada Tahun 2020, sebelum turun kembali menjadi

18,28% pada Tahun 2022. Begitu juga, Muaro Jambi mengalami peningkatan dramatis dari 38,06% pada Tahun 2019 menjadi 65,63% pada Tahun 2020, sebelum kemudian turun menjadi 27,23% pada Tahun 2022. Pola penurunan yang serupa terlihat di beberapa wilayah lainnya, menyoroti perubahan yang dinamis dalam persepsi masyarakat terhadap kebutuhan akan bantuan atau perlindungan.

#### **H. Lainnya**

Perkembangan angka penurunan dan peningkatan persentase masyarakat yang merasa tidak perlu atau tidak mendesak keberadaan layanan atau bantuan selama Tahun 2019, 2020, dan 2022, di berbagai wilayah Provinsi Jambi, menunjukkan pola yang bervariasi. Setelah itu, program sosialisasi dan pendidikan publik dapat diperkuat untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat layanan yang tersedia dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mereka. Selain itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan lokal. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam layanan yang disediakan, sehingga menciptakan dampak yang lebih positif bagi kesejahteraan dan pembangunan wilayah secara keseluruhan.



**Gambar 2. 26.** Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan karenaLainnya, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.26 menunjukkan wilayah seperti Kerinci dan Merangin mengalami penurunan yang signifikan dari Tahun 2019 hingga 2022, sementara wilayah lain seperti Sarolangun dan Kota Sungai Penuh mengalami fluktuasi yang besar. Penurunan terbesar umumnya terjadi pada Tahun 2020, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pandemi Covid-19. Meskipun demikian, beberapa wilayah menunjukkan tren peningkatan atau stabil dalam persentase yang merasa tidak perlu bantuan. Ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial dan ekonomi di setiap wilayah serta perlunya penanganan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam layanan yang tersedia.

Strategi untuk mengatasi penurunan atau fluktuasi dalam persentase masyarakat yang merasa tidak perlu atau mendesak keberadaan layanan atau bantuan di berbagai wilayah Provinsi Jambi dapat mencakup beberapa langkah. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam untuk memahami faktor-faktor lokal yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebutuhan layanan dan bantuan.

### 2.2.1.5. Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan (Persen)

Strategi yang dapat diadopsi untuk mengatasi fluktuasi angka penurunan dan peningkatan keluhan kesehatan serta kunjungan berobat di wilayah-wilayah Provinsi Jambi antara lain meliputi peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan di daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jaringan sarana kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit serta meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia.

**Tabel 2.10.** Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan (Persen), Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2022

Wilayah	Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	41	38	47,24	45,81	40,49	39,47
Merangin	38	40	44,06	32,83	29,05	28,24
Sarolangun	33	34	26,26	29,41	22,79	28,99
Batanghari	43	42	58,2	41,47	36,76	30,35
Muaro Jambi	37,68	42,67	31,2	24,59	24,94	28,77
Tanjung Jabung Timur	28,48	27,95	38,35	30,47	38,75	32,03
Tanjung Jabung Barat	35,68	33,81	38,24	33,12	32,58	36,71
Tebo	42,99	35,98	41,48	31,55	22,77	31,08
Bungo	42,37	46	45,5	37,91	33,4	41,6
Kota Jambi	51,88	58,6	63,34	57,05	45,43	33,2
Kota Sungai Penuh	53,13	50,02	61,62	57,75	38,16	76
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>44,73</b>	<b>38,4</b>	<b>31,82</b>	<b>34,69</b>

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan Tabel 2.10 menunjukkan Sarolangun mengalami fluktuasi dalam angka penurunan dari 33% pada Tahun 2017 menjadi 28,99% pada Tahun 2022, menandakan adanya variasi dalam tingkat keluhan kesehatan dan perawatan medis di wilayah tersebut. Sementara itu, Batanghari juga mengalami fluktuasi angka dengan beberapa peningkatan dan penurunan, namun secara keseluruhan mengalami

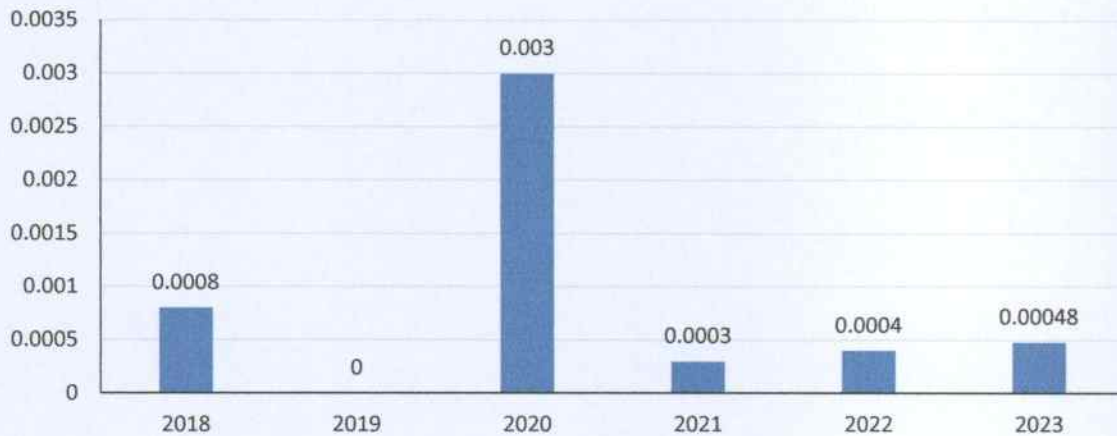
penurunan dari 43% pada Tahun 2017 menjadi 30,35% pada Tahun 2022. Muaro Jambi menunjukkan fluktuasi yang signifikan, tetapi menunjukkan peningkatan yang cukup stabil dari 37,68% pada Tahun 2017 menjadi 28,77% pada Tahun 2022. Di sisi lain, Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuasi dengan penurunan keseluruhan dari 28,48% pada Tahun 2017 menjadi 32,03% pada Tahun 2022. Tanjung Jabung Barat mengalami fluktuasi angka dengan sedikit peningkatan keseluruhan dari 35,68% pada Tahun 2017 menjadi 36,71% pada Tahun 2022. Tebo juga mengalami fluktuasi dengan beberapa penurunan yang signifikan, turun dari 42,99% pada Tahun 2017 menjadi 31,08% pada Tahun 2022. Sementara Bungo mengalami fluktuasi namun menunjukkan peningkatan keseluruhan dari 42,37% pada Tahun 2017 menjadi 41,6% pada Tahun 2022. Kota Jambi menunjukkan fluktuasi angka dengan penurunan yang signifikan dari 51,88% pada Tahun 2017 menjadi 33,2% pada Tahun 2022, sementara Kota Sungai Penuh mengalami fluktuasi dengan peningkatan yang signifikan dari 53,13% pada Tahun 2017 menjadi 76% pada Tahun 2022. Secara keseluruhan, Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan penurunan dari 41% pada Tahun 2017 menjadi 34,69% pada Tahun 2022, menunjukkan variasi yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Selain itu, program edukasi kesehatan masyarakat juga dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga penting untuk memperkuat infrastruktur kesehatan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta mengurangi fluktuasi dalam angka keluhan kesehatan dan berobat di Provinsi Jambi.

#### **2.2.1.6. Persentase Balita Gizi Buruk Provinsi Jambi**

Untuk menjaga dan meningkatkan tingkat gizi balita yang baik di Provinsi Jambi, diperlukan strategi yang komprehensif. Langkah-langkah strategis tersebut dapat mencakup peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama di

daerah-daerah terpencil. Selain itu, pendekatan pendidikan kesehatan yang intensif kepada ibu-ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya gizi seimbang dan praktik-praktik pemberian makan yang baik untuk anak-anak juga perlu diperkuat.



**Gambar 2. 27.** Persentase Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

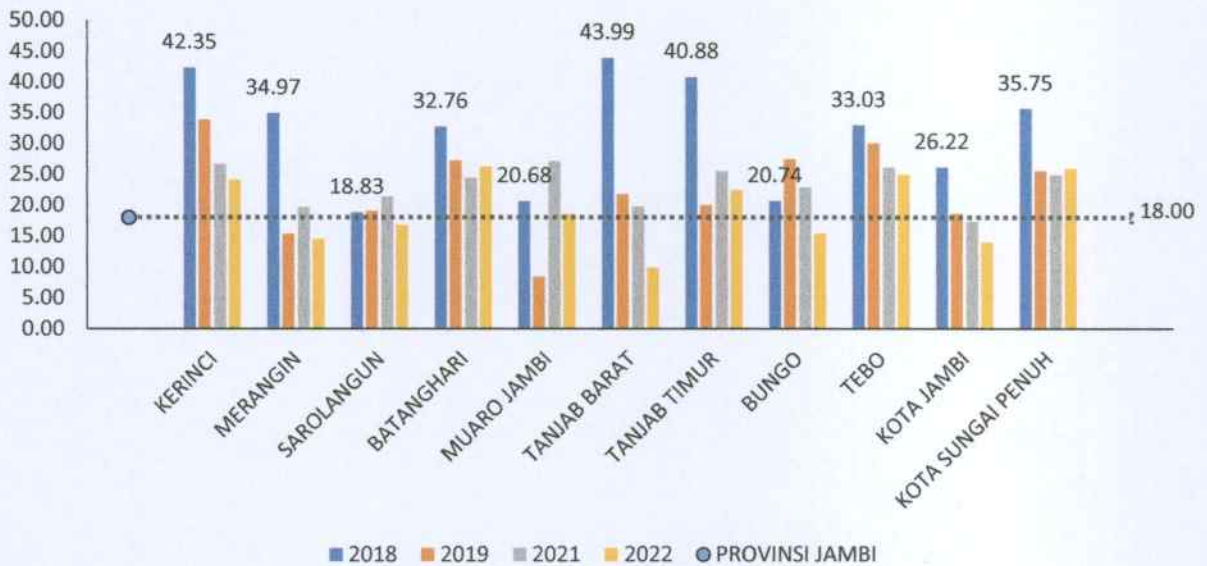
Berdasarkan Gambar 2.27 menunjukkan tersebut, terlihat bahwa persentase balita gizi buruk di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi yang relatif kecil dari Tahun 2018 hingga 2023. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada Tahun 2020, angka tersebut kembali menurun pada Tahun 2021 dan 2022, namun sedikit meningkat lagi pada Tahun 2023. Meskipun demikian, persentase tersebut tetap relatif rendah di bawah 0,01% sepanjang periode tersebut. Kesimpulannya, Provinsi Jambi dapat dianggap telah berhasil dalam mengendalikan tingkat gizi buruk pada balita, namun masih perlu dilakukan upaya lanjutan untuk memastikan bahwa angka tersebut tetap rendah dan bahkan dapat ditekan lebih lanjut.

Program pencegahan dan intervensi dini juga harus diprioritaskan, termasuk identifikasi dini dan pengobatan penyakit yang berkontribusi pada masalah gizi buruk. Selain itu, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi strategi tersebut secara efektif. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Provinsi Jambi dapat terus memperbaiki kondisi gizi balita dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah tersebut.

### 2.2.1.7. Prevalensi Stunting

Untuk mengatasi stunting per kabupaten/kota di Provinsi Jambi, langkah-langkah yang diperlukan mencakup peningkatan akses terhadap gizi yang baik dengan program bantuan pangan bagi keluarga miskin, kampanye pendidikan gizi intensif, perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, implementasi program suplementasi gizi, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok dukungan, dan pemantauan serta evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi prevalensi.

Prevalensi stunting pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 diberikan pada Gambar 2.28 berikut:



**Gambar 2. 28.** Indikator Prevalensi Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

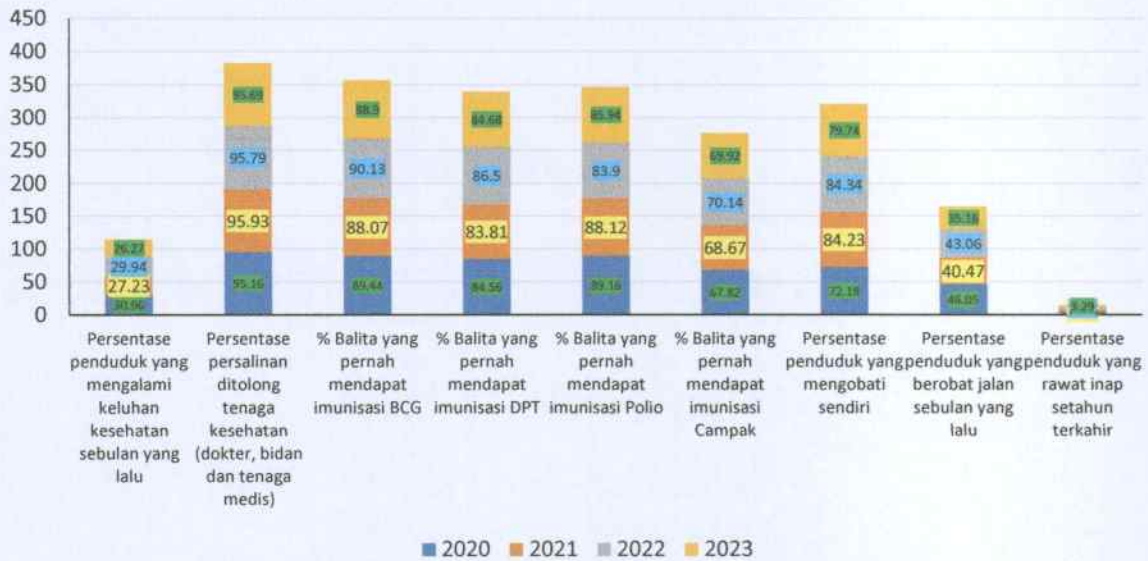
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.28 menunjukkan data yang diberikan mengenai indikator prevalensi stunting per kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022, terlihat variasi yang cukup besar antara daerah-daerah tersebut. Pada Tahun 2018, Kabupaten Kerinci memiliki prevalensi stunting tertinggi dengan 42,35%, sementara Kabupaten Sarolangun memiliki prevalensi terendah dengan 18,83%. Namun, pada Tahun 2019, terjadi penurunan yang signifikan di beberapa kabupaten/kota seperti Merangin dan

Muaro Jambi, sementara Kabupaten Kerinci tetap memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Pada Tahun 2021, terjadi fluktuasi dalam prevalensi stunting di beberapa daerah, dengan beberapa daerah mengalami peningkatan seperti Kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, dan Tanjab Timur. Sementara Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan. Di Tahun 2022, sebagian besar daerah mengalami penurunan, namun terdapat beberapa daerah yang mengalami peningkatan, seperti Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh. Kesimpulannya, Meskipun terjadi penurunan umum dalam prevalensi stunting di beberapa daerah, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah stunting ini secara efektif di seluruh Provinsi Jambi, dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhinya di setiap daerah secara khusus.

#### **2.2.1.8. Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap**

Upaya ini sangat penting mengingat adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang lebih formal, seperti terlihat dalam peningkatan persentase penduduk yang mengobati sendiri dan berobat jalan dalam beberapa Tahun terakhir. Sementara itu, penurunan konsisten dalam persentase penduduk yang rawat inap setahun terakhir mungkin mencerminkan peningkatan kualitas layanan kesehatan preventif dan pengobatan. Meskipun terdapat fluktuasi dalam beberapa indikator kesehatan, secara umum terlihat adanya perbaikan dalam akses dan pemanfaatan layanan kesehatan di Provinsi tersebut. Penting untuk terus memantau dan memperkuat program-program kesehatan yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



**Gambar 2. 29.** Kondisi Kesehatan Masyarakat Provinsi Jambi, Tahun 2020 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.29 menunjukkan Terdapat perubahan yang menarik dalam data kesehatan masyarakat selama beberapa Tahun terakhir. Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan menunjukkan fluktuasi, namun secara keseluruhan mengalami penurunan dari 30,96% pada Tahun 2020 menjadi 26,27% pada Tahun 2023. Hal ini mungkin mencerminkan peningkatan kesadaran akan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit. Di sisi lain, persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan tetap tinggi dan stabil di sekitar 95%, menunjukkan akses yang baik terhadap layanan kesehatan maternal di wilayah tersebut.

Selain itu, persentase imunisasi menunjukkan bahwa balita yang pernah mendapat beberapa imunisasi seperti: BCG, DPT, Polio, dan Campak mengalami fluktuasi dari Tahun ke Tahun, namun secara keseluruhan tetap menunjukkan tingkat yang relatif tinggi. Meskipun terdapat variasi dalam data ini, penting untuk terus memperjuangkan dan melaksanakan program imunisasi dengan baik guna melindungi kesehatan anak-anak.

### 2.2.1.9. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak (%)

Untuk meningkatkan akses air minum layak di Provinsi Jambi, perlu diterapkan strategi yang holistik dan berkelanjutan. Pertama,

penguatan infrastruktur air bersih perlu dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya air, memperbaiki sistem distribusi, dan membangun instalasi pengolahan air yang efisien di daerah-daerah yang masih mengalami penurunan akses.

Selanjutnya, perlu dilakukan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih dan praktik-hygiene yang baik. Kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga internasional dapat membantu mendapatkan sumber daya dan teknologi yang diperlukan.

Pemberdayaan komunitas lokal melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sistem air di tingkat lokal. Penyusunan kebijakan yang progresif dan mendukung, serta implementasi regulasi yang ketat terkait dengan perlindungan sumber air dan lingkungan, juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan akses air minum. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap kinerja infrastruktur air dan tingkat keberlanjutan program-program edukasi akan membantu dalam penyesuaian strategi dan tindakan yang dibutuhkan.

**Tabel 2. 11.** Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020 – 2023

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023
		Susenas 2020	Susenas 2021	Susenas 2022	Susenas 2023
1.	Kerinci	84,60	74,59	81,16	79,25
2.	Merangin	69,20	68,91	51,26	55,90
3.	Sarolangun	69,26	69,96	72,01	71,44
4.	Batang Hari	74,18	73,08	83,35	82,60
5.	Muaro Jambi	76,57	80,66	74,15	73,00
6.	Tanjung Jabung Timur	87,65	91,76	92,85	92,04
7.	Tanjung Jabung Barat	89,37	85,91	83,71	86,91
8.	Tebo	71,79	73,63	77,26	76,02
9.	Bungo	58,92	69,97	74,24	74,76
10.	Kota Jambi	97,09	95,83	95,30	98,41
11.	Kota Sungai Penuh	94,19	90,55	93,67	90,74

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023
		Susenas 2020	Susenas 2021	Susenas 2022	Susenas 2023
	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>78,86</b>	<b>79,70</b>	<b>79,19</b>	<b>80,02</b>
	<b>Nasional</b>	90,21	90,78	91,05	91,72

Sumber: SiPerindu, Susenas 2024

Berdasarkan Tabel 2.11 menunjukkan indikator akses air minum layak dari Tahun 2020 hingga 2023 di beberapa daerah di Provinsi Jambi, dapat dilihat variasi dalam perkembangan persentase. Kerinci mengalami penurunan dari 84,60% pada Tahun 2020 menjadi 79,25% pada Tahun 2023. Merangin menunjukkan penurunan signifikan dari 69,20% menjadi 55,90% selama periode yang sama.

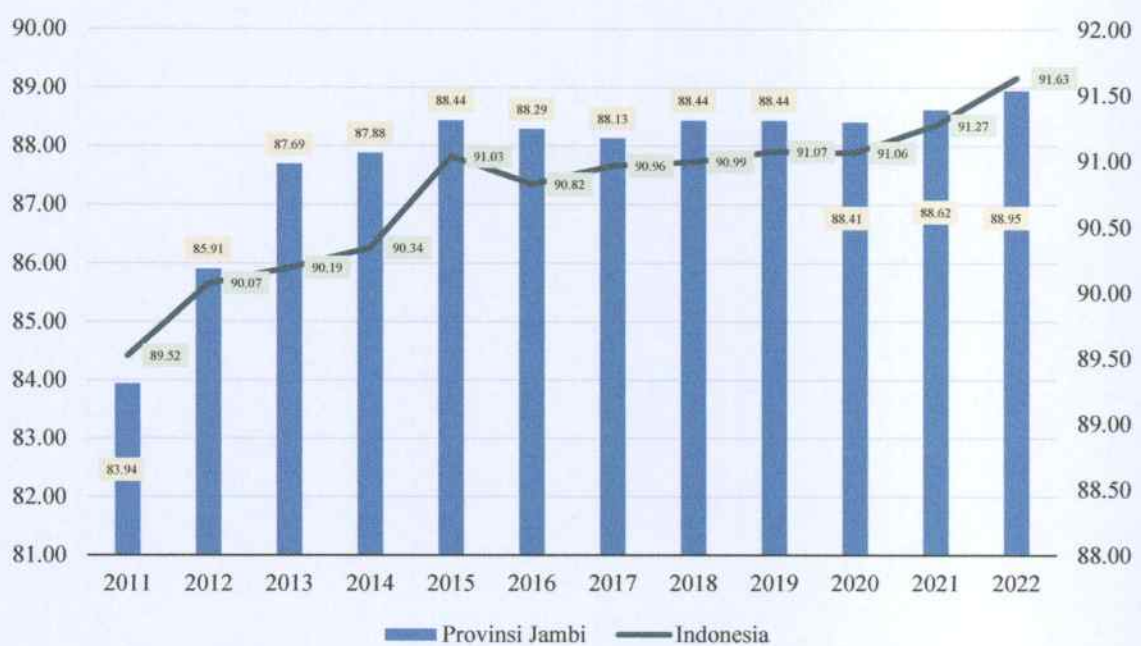
Sementara itu, daerah seperti Kota Jambi dan Tanjung Jabung Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan Kota Jambi mencapai 98,41% pada Tahun 2023. Meskipun demikian, beberapa daerah seperti Kota Sungai Penuh mengalami fluktuasi yang tidak konsisten. Kesimpulannya, sementara sebagian besar daerah mencapai kemajuan dalam akses air minum layak, perlu perhatian khusus pada daerah yang mengalami penurunan signifikan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang mungkin muncul. Evaluasi dan pemantauan terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan dalam upaya meningkatkan akses air minum layak di seluruh Provinsi Jambi.

#### **2.2.1.10. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi**

Meskipun terjadi peningkatan kesetaraan gender di Provinsi Jambi dari Tahun 2011 hingga 2022, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi masih berada di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna mempercepat peningkatan kesetaraan gender di Provinsi Jambi.

Berdasarkan Gambar 2.30 menunjukkan yang diamati, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan peningkatan secara bertahap dari Tahun ke Tahun. Meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam beberapa Tahun tertentu, namun secara keseluruhan, terlihat adanya peningkatan yang stabil

dari nilai IPG Provinsi Jambi, yang awalnya sebesar 83,94 pada Tahun 2011, meningkat menjadi 88,95 pada Tahun 2022. Meskipun terdapat perbaikan dalam IPG Provinsi Jambi, perbandingan dengan IPG Nasional menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih memiliki IPG yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada Tahun 2022, IPG Provinsi Jambi adalah 88,95, sedangkan IPG Indonesia mencapai angka 91,63, menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam beberapa Tahun tertentu, seperti pada Tahun 2014 dan 2016, fluktuasi tersebut tidak mengganggu tren umum peningkatan kesetaraan gender yang terjadi di Provinsi Jambi.



**Gambar 2. 30.** Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Upaya-upaya ini mungkin meliputi investasi dalam pendidikan dan kesehatan yang lebih merata, kebijakan yang mendukung partisipasi ekonomi perempuan, serta advokasi untuk mengatasi ketimpangan gender dalam akses dan kesempatan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa Provinsi Jambi akan terus mengalami peningkatan dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam beberapa Tahun mendatang.

### **2.2.2. Pendidikan**

Salah satu program pokok pembangunan Provinsi Jambi adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) lebih khusus dalam peningkatan pembangunan sektor pendidikan formal, mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai perguruan tinggi dan pendidikan non formal, berupa pendidikan dan latihan berbagai bidang pengetahuan ketrampilan yang diperlukan untuk pembangunan serta pembinaan generasi muda, serta dalam bidang olah raga dalam mempersiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani. Jumlah sekolah, Guru dan Murid di bawah Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Provinsi Jambi tahun 2023/2024: Jumlah sekolah: Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2.464 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 708 buah, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 247 buah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 181 buah. Jumlah guru, SD sebanyak 27.580 orang, SMP sebanyak 11.462 orang, SMA sebanyak 6.131 orang, SMK sebanyak 4.476 orang. Jumlah murid: terdiri dari 1).SD sebanyak 368.620 siswa. 2).SMP sebanyak 119.756 siswa, 3). SMA sebanyak 81.429 siswa. 4).SMK sebanyak 49.229 siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan di Indonesia. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai, makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu

#### **2.2.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah statistik penting dalam pendidikan yang mengukur proporsi individu dalam suatu kelompok usia tertentu yang terdaftar di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. APS sering kali dihitung untuk kelompok usia spesifik seperti anak usia dini, anak usia sekolah dasar, remaja di sekolah menengah,

dan dewasa muda di perguruan tinggi atau universitas. Statistik ini memberikan gambaran mengenai akses dan partisipasi pendidikan dalam suatu populasi, serta membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan dan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

APS adalah indikator utama dalam menentukan seberapa baik suatu negara atau wilayah menyediakan akses ke pendidikan bagi warga muda. Tingkat yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak dan remaja mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka di masa depan. Di sisi lain, angka APS yang rendah mungkin menunjukkan adanya hambatan dalam akses ke pendidikan, seperti biaya, jarak dari sekolah, atau kekurangan infrastruktur pendidikan. APS yang tinggi juga sering dikaitkan dengan peningkatan ekonomi dan sosial, karena pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidup.

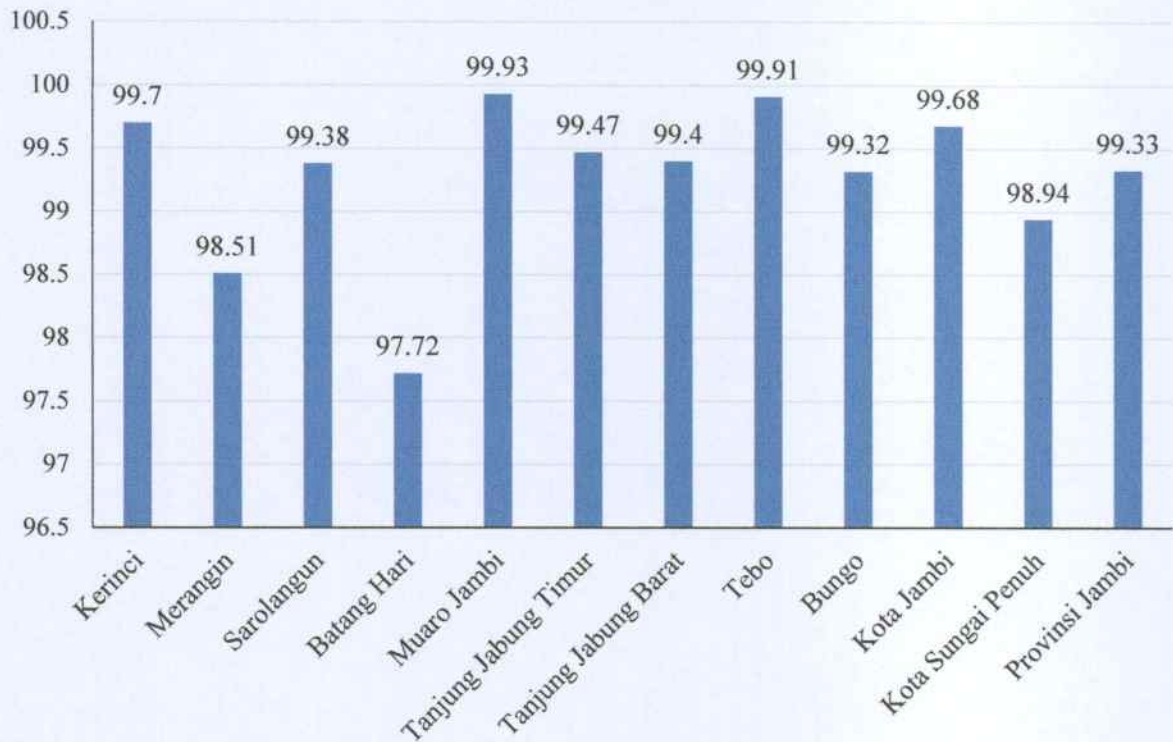
Berdasarkan Tabel 2.12 menunjukkan bahwa perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenis kelamin dan kelompok usia dari Tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan tren peningkatan yang positif secara keseluruhan. Kelompok usia 7-12 Tahun mencatat peningkatan yang stabil dari 99,55% pada Tahun 2015 menjadi 99,82% pada Tahun 2020, sementara kelompok usia 13-15 Tahun juga mengalami peningkatan signifikan dari 95,06% menjadi 96,41% dalam periode yang sama. Di sisi lain, kelompok usia 16-18 Tahun mencatat peningkatan yang stabil dari 70,75% menjadi 72,37%, menunjukkan konsistensi dalam upaya peningkatan partisipasi sekolah. Meskipun demikian, terdapat fluktuasi kecil dalam kelompok usia 19-23 Tahun, yang meskipun mengalami peningkatan keseluruhan dari 25,48% pada Tahun 2015 menjadi 25,53% pada Tahun 2020, namun tetap memerlukan perhatian untuk meningkatkan partisipasi sekolah di kalangan usia ini.

**Tabel 2. 12.** APS Menurut Kelompok Umur, Provinsi Jambi Tahun 2015-2022

Umur	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
7-12	99,55	99,57	99,59	99,67	99,7	99,82	99,33
13-15	95,06	95,35	95,89	96,14	96,42	96,41	96,20
16-18	70,75	71,2	71,54	71,94	71,97	72,37	72,52
19-23	25,48	26,88	26,57	26,16	24,83	25,53	25,10

Sumber: Susenas, 2015-2022

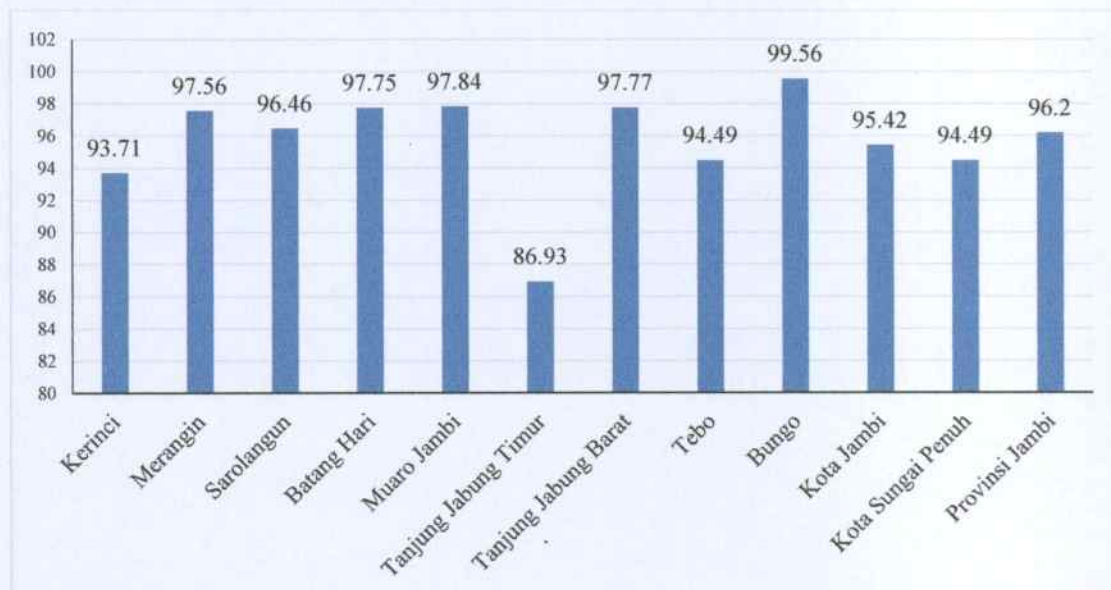
Strategi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat mencakup beberapa langkah. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif, terutama bagi kelompok usia 19-23 Tahun yang masih mengalami tantangan dalam partisipasi sekolah. Langkah-langkah konkret seperti penyediaan beasiswa, bantuan keuangan, atau program pembelajaran khusus dapat membantu meningkatkan partisipasi sekolah di kelompok usia ini. Selain itu, program sosialisasi dan advokasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan manfaatnya bagi masa depan mereka. Selain itu, pendekatan yang lebih terpadu antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat lokal dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memastikan bahwa semua kelompok usia memiliki akses yang sama dan setara ke pendidikan.



**Gambar 2. 31.** Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022

Sumber: Susenas, 2022

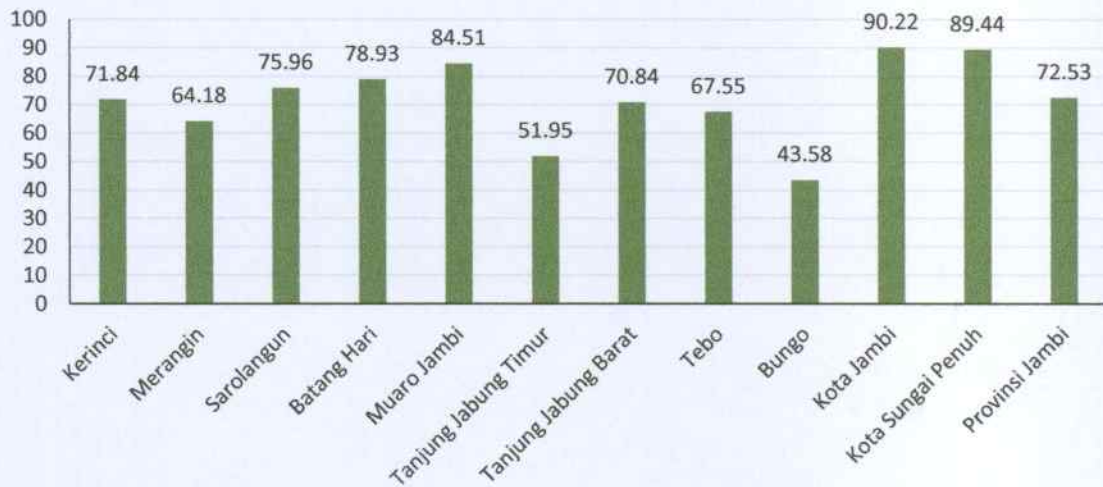
Berdasarkan Gambar 2.31 menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan APS 7-12 tahun relatif tidak jauh, berbeda antar kabupaten/kota di mana APS 7-12 tahun berada pada kisaran 97,72 hingga 99,93 persen (Gambar 3.2). APS 7-12 tahun tertinggi terdapat di Kab. Muaro Jambi (99,93).



**Gambar 2. 32.** Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022

Sumber: Susenas, 2022

Berdasarkan Gambar 2.32 menunjukkan bahwa Pada APS 13-15 tahun, mulai terlihat sedikit perbedaan antar kabupaten/kota. APS 13-15 tahun terendah di Kab. Tanjung Jabung Timur sebesar 86,93 persen. Sedangkan, APS 13-15 tahun tertinggi di Kab. Bungo sebesar 99,56 persen.

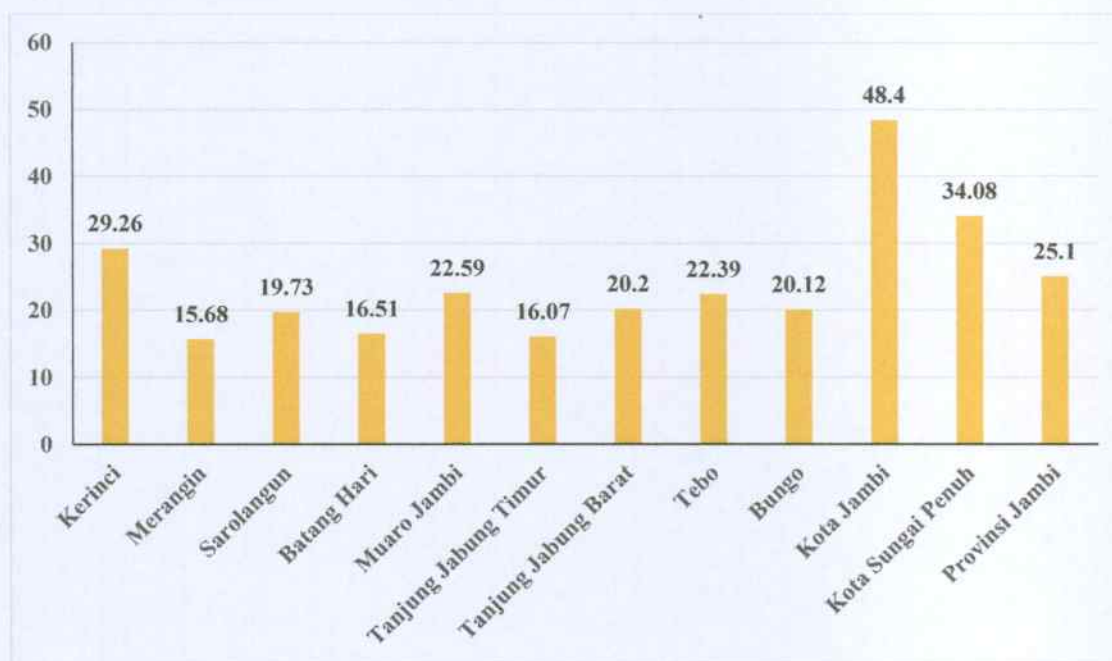


**Gambar 2. 33.**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022

Sumber: Susenas, 2022

Berdasarkan Gambar 2.33 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) memasuki usia 16-18 tahun, kesenjangan antar kabupaten/kota semakin terlihat. APS 16-18 tahun terendah di Kab. Bungo dengan APS sebesar 43,58 persen. Sedangkan, APS 16-18 tahun tertinggi dipegang Kota Jambi dengan APS sebesar 90,22 persen.

Selanjutnya, Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 diberikan pada Gambar 2.34 berikut:



**Gambar 2. 34.**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022  
Sumber: Susenas, 2022

Berdasarkan Gambar 2.34 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 19-23 tahun, APS semakin rendah, yaitu 25,10 persen. Rendahnya partisipasi sekolah pada usia ini dapat disebabkan karena penduduk lebih memilih untuk bekerja, menikah, merasa pendidikan sudah cukup, atau tidak mampu secara ekonomi. Pada kelompok umur 19-23 tahun, kesenjangan antar kabupaten dan kota, semakin melebar. APS usia 19-23 tahun tertinggi terdapat di Kota Jambi 48,40 persen. Hal ini dapat dipahami mengingat fasilitas pendidikan tinggi pada umumnya tersedia di kota. Sedangkan, APS usia 19-23 tahun terendah di Kabupaten Merangin 5,68 persen. Minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan tinggi di kabupaten dan tingginya biaya pendidikan dapat menjadi faktor penghambat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.

#### **2.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jambi**

Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jambi adalah indikator yang mengukur proporsi penduduk dalam rentang usia yang seharusnya bersekolah (biasanya usia 7-12 Tahun untuk SD dan 13-15 Tahun untuk SMP) yang sebenarnya bersekolah pada tingkat

pendidikan yang sesuai. APK dinyatakan sebagai persentase dari total populasi dalam kelompok usia tersebut. Kenaikan APK menunjukkan peningkatan partisipasi pendidikan di masyarakat, sementara penurunan APK dapat menandakan adanya masalah dalam akses atau kualitas pendidikan. Dengan memonitor APK, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. Selain itu, angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah di suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tersebut. APK bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan. Nilai APK dapat melebihi 100 ketika terdapat penduduk yang terlalu dini/terlambat mendaftar sekolah dan pengulangan kelas

**2.2.2.3. Persentase APK SD/MI Kab/Kota Provinsi Jambi**

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi mencerminkan tingkat keterlibatan siswa usia sekolah dasar dalam sistem pendidikan formal Kabupaten/Kota yang dapat dilihat pada Gambar 2.35 berikut:



**Gambar 2. 35.** Persentase APK SD/MI Kab/Kota Provinsi Jambi  
 Sumber: Susenas, 2015-2020

Berdasarkan Gambar 2.35 menunjukkan pada Tahun 2023, terjadi variasi yang signifikan dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci mencatat

peningkatan kecil dari 106,26 menjadi 106,32, menunjukkan adanya peningkatan dalam partisipasi pendidikan. Namun, sebaliknya, Kabupaten Merangin mengalami penurunan dari 110,58 menjadi 108,79, sementara Sarolangun juga mengalami penurunan yang signifikan dari 111,94 menjadi 108,63. Begitu pula dengan Kabupaten Batang Hari yang turun dari 110,54 menjadi 110,32, dan Muaro Jambi dari 111,80 menjadi 110,67.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan kecil dari 108,26 menjadi 108,01, sementara Tanjung Jabung Barat menurun dari 114,24 menjadi 111,44. Kabupaten Tebo mencatat penurunan dari 108,30 menjadi 107,28, sedangkan Bungo dari 106,24 menjadi 105,23. Di kota-kota, Kota Jambi juga mengalami penurunan dari 107,42 menjadi 107,19, demikian pula dengan Kota Sungai Penuh dari 106,48 menjadi 105,24. Variasi ini menunjukkan perlunya strategi yang berbeda-beda untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di setiap wilayah tersebut.

Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, sejumlah strategi dapat diterapkan. Hal ini termasuk memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dengan pembangunan sekolah baru, perbaikan infrastruktur transportasi, dan penyediaan fasilitas pendukung. Selain itu, pembangunan program pendidikan inklusif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat juga penting, dengan melalui kampanye penyuluhan dan pembentukan komite pendidikan di tingkat lokal.

Peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi fokus utama dengan meningkatkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Selanjutnya, perlu adanya upaya khusus untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan, termasuk melalui kampanye sosial dan penyediaan beasiswa khusus. Terakhir, monitoring dan evaluasi rutin terhadap program-program pendidikan dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi serta menyesuaikan strategi yang diterapkan.

#### 2.2.2.4. Persentase APK SMP/MTS Kab/Kota Provinsi Jambi

Persentase APK SMP/MTS Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2023 mencerminkan tingkat keterlibatan siswa usia sekolah dasar dalam sistem pendidikan formal Kabupaten/Kota yang dapat dilihat pada Gambar 2.36 berikut:



**Gambar 2. 36.** Persentase APK SMP/MTS Kab/Kota Provinsi Jambi

Sumber: Susenas, 2015-2020

Berdasarkan Gambar 2.36 menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jambi antara Tahun 2022 dan 2023. Kerinci dan Merangin mengalami penurunan masing-masing dari 91,29 menjadi 88,92 dan dari 91,03 menjadi 87,19. Sarolangun mencatat penurunan yang lebih kecil dari 86,91 menjadi 86,42, sedangkan Batang Hari turun dari 87,23 menjadi 86,89. Muaro Jambi juga mengalami penurunan dari 92,39 menjadi 90,33, sementara Tanjung Jabung Timur turun dari 89,54 menjadi 87,56. Di sisi lain, Tanjung Jabung Barat mencatat peningkatan yang signifikan dari 92,53 menjadi 96,74, bersamaan dengan Tebo yang meningkat dari 87,39 menjadi 94,29. Bungo juga mengalami peningkatan kecil dari 87,44 menjadi 87,68. Selain itu, Kota Jambi mencatat peningkatan yang signifikan dari 77,57 menjadi 81,08, dan Kota Sungai Penuh juga mengalami peningkatan yang cukup besar dari 91,36 menjadi 96,31. pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta

penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan APK dan kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Provinsi Jambi.

#### 2.2.2.5. Persentase APK SMA/MAN Kab/Kota Provinsi Jambi

Persentase APK SMA/MAN kabupaten kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2023 mencerminkan tingkat keterlibatan siswa usia sekolah dasar dalam sistem pendidikan formal Kabupaten/Kota yang dapat dilihat pada Gambar 2.37 berikut:



**Gambar 2. 37.** Persentase APK SMA/MAN Kab/Kota Provinsi Jambi  
Sumber: Susenas, 2015-2020

Berdasarkan Gambar 2.37 menunjukkan Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA di berbagai daerah Provinsi Jambi. Beberapa daerah mengalami peningkatan, seperti Sarolangun dan Tebo, sementara yang lain mengalami penurunan, seperti Kerinci dan Kota Jambi. Perubahan yang paling mencolok terjadi di Muaro Jambi yang mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 7.67 poin dari 84.58 menjadi 92.25. Hal ini menunjukkan adanya dinamika yang beragam dalam kondisi pendidikan di provinsi tersebut, yang memerlukan perhatian dan strategi yang berbeda-beda untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.

### 2.2.2.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jambi, 2018-2022

Persentase tren APK Provinsi Jambi menurut jenjang pendidikan mulai dari jenjang pendidikan SD sampai perguruan tinggi di Provinsi Jambi Tahun 2022 mencerminkan tingkat keterlibatan siswa dalam sistem pendidikan formal dapat dilihat pada Gambar 2.38 berikut:



**Gambar 2. 38.** Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jambi, 2018-2022

Sumber: Susenas, 2018-2022

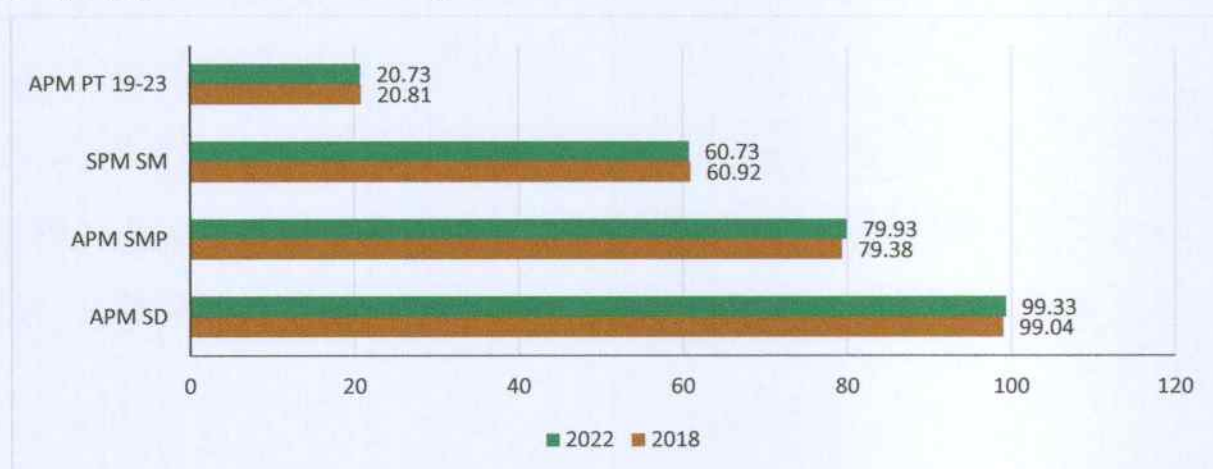
Berdasarkan Gambar 2.38 menunjukkan capaian APK semakin kecil seiring peningkatan jenjang pendidikan. Capaian APK SD/ sederajat dan APK SMP/ sederajat cenderung stagnan selama periode 2018-2022. Di sisi lain, APK SM/ sederajat perlahan meningkat. APK SM di tahun 2022 berada di kisaran 84,33. APK PT sempat mengalami penurunan di tahun 2019 namun setelahnya cenderung stagnan hingga mencapai 30,08 di tahun 2022.

### 2.2.2.7. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jambi, 2018-2022

APM menunjukkan partisipasi sekolah tepat waktu, yaitu usia 7-12 tahun untuk jenjang SD/ sederajat, usia 13-15 tahun untuk jenjang SMP/ sederajat, dan usia 16-18 tahun untuk jenjang SM/ sederajat. Sedangkan, untuk jenjang pendidikan tinggi, APM kurang tepat digunakan karena durasi program pendidikan yang bervariasi (UNESCO, 2009). APM tidak masuk target Renstra Kemdikbud dan

RPJMN 2020-2024. Ketepatan waktu dalam partisipasi sekolah bukan merupakan isu utama dalam agenda pendidikan di Indonesia. Namun, indikator APM termasuk dalam indikator SDGs untuk melihat ketidakmerataan partisipasi pendidikan (Bappenas, 2017).

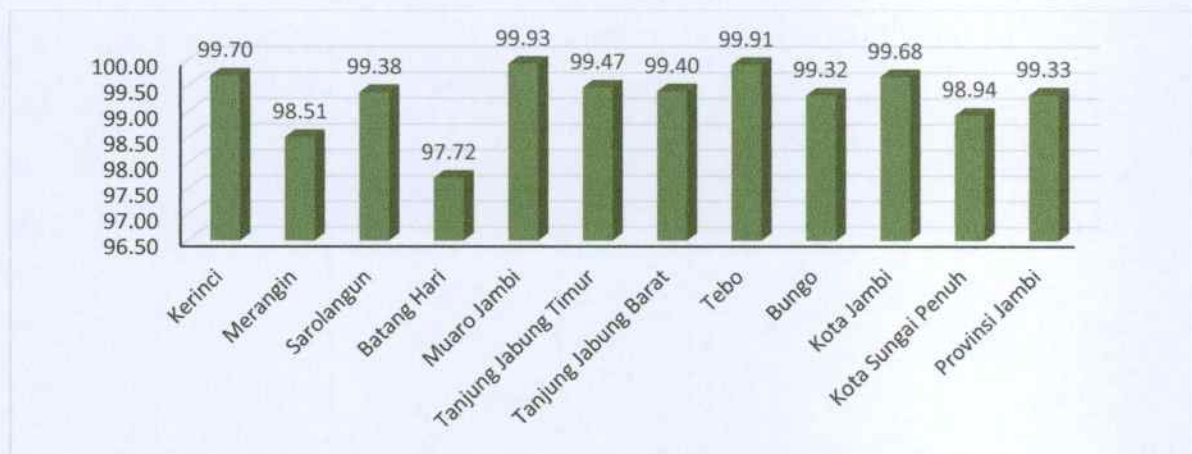
Nilai APM akan selalu kurang dari atau sama dengan nilai APK. Selisih antara APM dan APK merupakan kejadian terlalu dini/terlambat mendaftar dan pengulangan kelas di jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar perbedaan APK dan APM. Dengan kata lain, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar cenderung lebih tepat waktu dibandingkan jenjang pendidikan menengah.



**Gambar 2. 39.** Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jambi, 2018-2022

Sumber: Susenas, 2018-2022

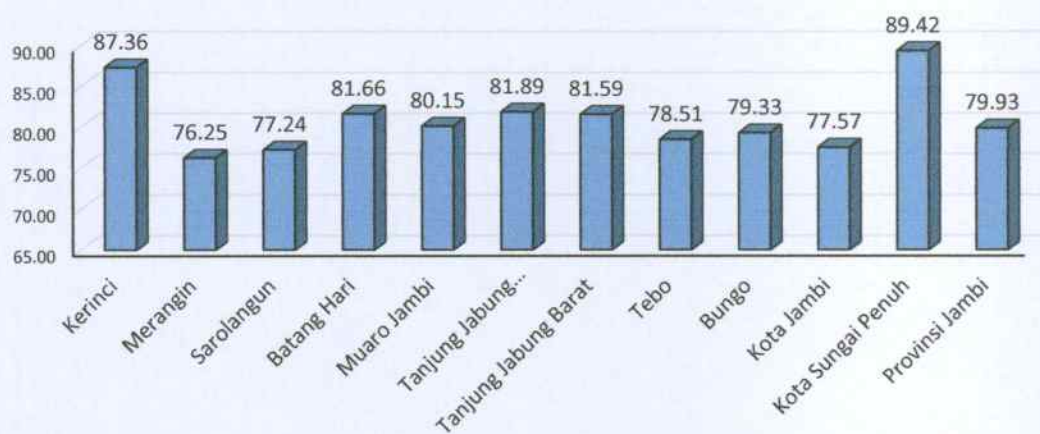
Gambar 2.39 menunjukkan tren APM Provinsi Jambi menurut jenjang pendidikan. Sama halnya dengan APS dan APK, tidak ditemukan adanya indikasi dampak pandemi Covid-19 dari perkembangan indikator APM. APM semakin kecil seiring peningkatan jenjang pendidikan. Capaian APM di seluruh jenjang pendidikan cenderung stagnan selama periode 2018-2022.



**Gambar 2. 40.** Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022

Sumber: Susenas, 2022

Gambar 2.40 menunjukkan di tahun 2022, APM SD/ sederajat Provinsi Jambi mencapai 99,33 persen. Dengan kata lain, sekitar 99 dari 100 penduduk usia 7-12 tahun di Provinsi Jambi sedang menempuh pendidikan SD/ sederajat. Tidak terdapat perbedaan APM SD/ sederajat yang mencolok antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi. APM SD/ sederajat terendah di Kabupaten Batang Hari (97,72 persen) sedangkan APM SD/ sederajat tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi (99,93 persen). Pada jenjang SMP/ sederajat, mulai terlihat perbedaan antar kabupaten/kota. APM SMP/ sederajat terendah di Kabupaten Merangin (76,25 persen) sedangkan APM SMP/ sederajat tertinggi di Kota Sungai Penuh (89,42 persen).

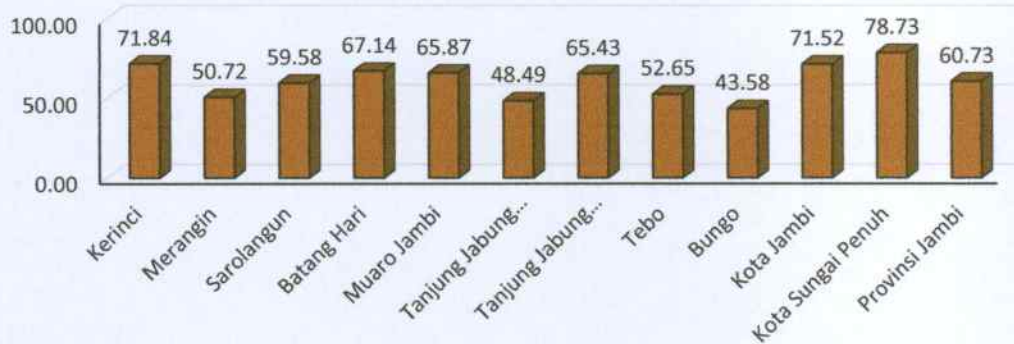


**Gambar 2. 41.** Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022

Sumber: Susenas, 2022

Pada Gambar 2.41 menunjukkan ada jenjang SMP/ sederajat, mulai terlihat perbedaan antar kabupaten/kota. APM SMP/ sederajat

terendah di Kabupaten Merangin (76,25 persen) sedangkan APM SMP/ sederajat tertinggi di Kota Sungai Penuh (89,42 persen).

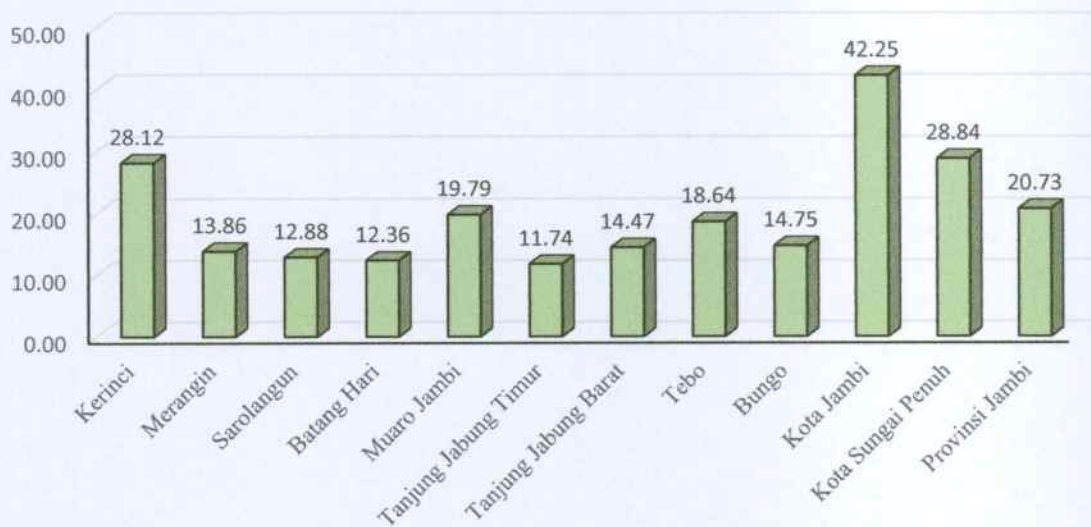


**Gambar 2. 42.** Angka Partisipasi Murni (APM) SM/ sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022

Sumber: Susenas, 2022

Gambar 2.42 menunjukkan pada jenjang SM/ sederajat, perbedaan antar kabupaten/kota makin mencolok. APM SM/ sederajat terendah di Kabupaten Bungo (43,58 persen). Sedangkan, APM SM/ sederajat tertinggi di Kota Sungai Penuh (78,73 persen).

Selanjutnya, secara terperinci APM perguruan tinggi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 diberikan pada Gambar 2.43



**Gambar 2. 43.** Angka Partisipasi Murni (APM) PT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022

Sumber: Susenas, 2022

Gambar 2.43 menunjukkan Indikator partisipasi pada jenjang pendidikan perguruan tinggi lebih sering menggunakan APK PT karena usia seseorang masuk ke perguruan tinggi dan lama menempuh pendidikan perguruan tinggi cenderung bervariasi. Sehingga, indikator

APM PT jarang digunakan untuk mengukur capaian pendidikan. Di tahun 2022, capaian APM PT mencapai 20,73 persen. Dengan kata lain, hanya 1 dari 5 penduduk usia 19-23 tahun di Provinsi Jambi yang sedang menempuh pendidikan PT. Jika dilihat capaian menurut kabupaten/kota, APM PT cenderung tinggi pada daerah kota, yaitu Kota Jambi (42,25 persen) dan Kota Sungai Penuh (28,84 persen).

#### **2.2.2.8. Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan sebuah metrik yang menunjukkan estimasi tahun pendidikan yang diharapkan dapat diraih oleh penduduk yang memasuki usia sekolah formal (umumnya mulai dari usia 7 tahun) ke atas, selama mereka hidup, berdasarkan data saat ini. HLS memberikan gambaran tentang kualitas dan akses pendidikan di suatu wilayah pada masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, HLS adalah indikator penting yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menilai dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memantau perubahan HLS dari tahun ke tahun, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi kebutuhan untuk intervensi atau penyesuaian dalam sistem pendidikan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

**Tabel 2. 13.** Angka Harapan Lama Sekolah

Wilayah	Laki-laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
Kerinci	14,05	14,07	13,85	13,87
Merangin	12,05	12,06	12,26	12,48
Sarolangun	12,38	12,44	12,49	12,5
Batang Hari	12,94	12,96	13,32	13,34
Muaro Jambi	12,87	12,88	13,56	13,8
Tanjung Jabung Timur	11,85	11,87	12,7	12,72
Tanjung Jabung Barat	12,52	12,53	12,9	13,03
Tebo	12,63	12,65	12,83	13,11
Bungo	12,64	12,66	12,76	12,78
Kota Jambi	15,17	15,45	15,69	15,7
Kota Sungai Penuh	15,15	15,17	14,81	14,83
Provinsi Jambi	12,96	12,98	13,27	13,47

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

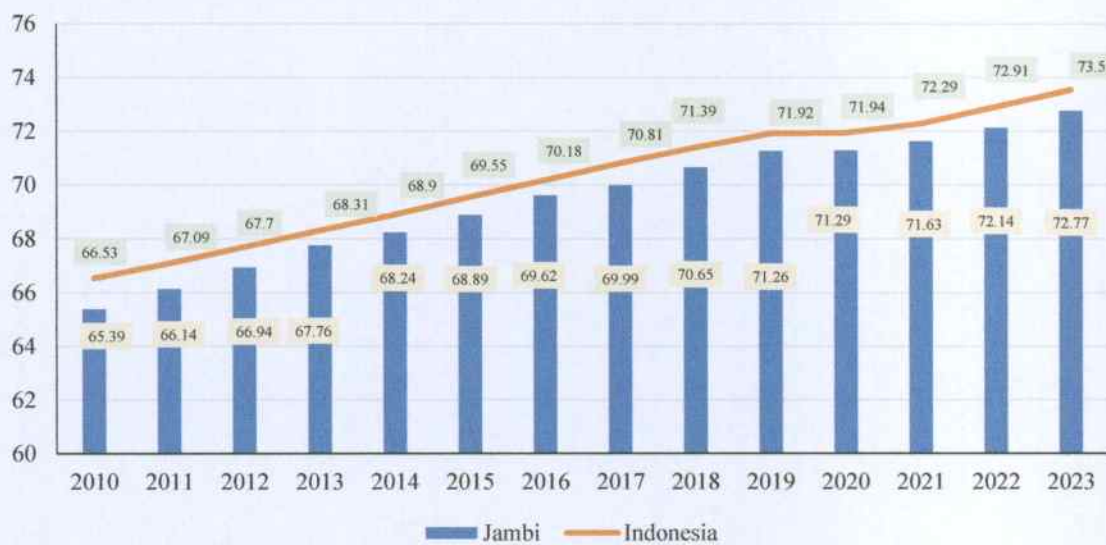
Berdasarkan Tabel 2.13 menunjukkan data HLS untuk laki-laki dan perempuan di berbagai wilayah di Provinsi Jambi selama tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan tingkat pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat lokal berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. Misalnya, Kota Jambi menunjukkan HLS paling tinggi, yakni lebih dari 15 tahun untuk kedua jenis kelamin, yang mengindikasikan bahwa penduduk di kota tersebut memiliki akses dan kesempatan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain. peningkatan HLS secara umum di seluruh wilayah yang dicakup, dengan beberapa wilayah menunjukkan perubahan yang lebih signifikan, terutama di antara perempuan di beberapa wilayah seperti Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tebo. Ini menunjukkan peningkatan kesempatan pendidikan atau efektivitas kebijakan pendidikan di wilayah-wilayah tersebut.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa wilayah menunjukkan adanya variabilitas dalam akses atau kesempatan pendidikan antargender. Sebagai contoh, di Muaro Jambi, perempuan

memiliki HLS yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang bisa jadi mencerminkan prioritas atau keberhasilan program pendidikan yang ditujukan untuk perempuan di wilayah tersebut.

#### 2.2.2.9. Indeks Pendidikan dalam IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di provinsi tersebut. Peningkatan IPM tidak selalu merata di seluruh wilayah, dan masih mungkin ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan manusia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi masalah seperti kesenjangan ekonomi, akses terhadap layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Jambi benar-benar inklusif dan berkelanjutan.



**Gambar 2. 44.** Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.44 menunjukkan bahwa adalah beberapa informasi tentang IPM Provinsi Jambi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi telah masuk ke dalam kategori tinggi sejak Tahun 2018 karena angka IPM sudah melebihi 70,65 dan terus meningkat setiap Tahunnya sampai pada Tahun 2023 sudah mencapai 72,27. Peningkatan IPM yang terus meningkat

menunjukkan bahwa Provinsi Jambi terus mengalami keberhasilan Pembangunan manusia di Kabupaten/Kota.

Perkembangan IPM Jambi Tahun 2022 mencapai 72,14 atau meningkat 0,71 persen dibandingkan Tahun 2021, Jumlah angkatan kerja di Jambi pada Februari 2023 sebanyak 1,85 juta orang, bertambah 3,44 ribu. Selanjutnya IPM Jambi pada Tahun 2021 adalah 71,63, Tahun 2022 adalah 72,14, dan Tahun 2023 adalah 72,77. Peningkatan IPM menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Melalui peningkatan IPM, Provinsi Jambi menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak bagi penduduknya di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

### 2.2.2.10. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Secara terperinci angka harapan lama sekolah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019 - 2022 diberikan pada Tabel 2.14

**Tabel 2. 14.**Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Jambi, 2020-2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Kerinci	72,47	72,72	73,24	73,77
Merangin	70,2	70,55	70,98	71,81
Sarolangun	71,63	72,02	72,66	73,05
Batang Hari	71,34	71,61	71,99	72,5
Muaro Jambi	70,41	70,79	71,41	72,26
Tanjung Jabung Timur	67,58	68,09	68,96	69,85
Tanjung Jabung Barat	69,62	70,26	70,88	71,44
Tebo	70,51	70,73	71,14	71,99
Bungo	72,46	72,7	73,08	73,57
Kota Jambi	79,19	79,94	80,38	80,93
Kota Sungai Penuh	76,02	76,3	76,75	77,2
Jambi ( <i>Province Average</i> )	72,29	72,62	73,11	73,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.14 menunjukkan bahwa IPM Provinsi Jambi Tahun 2023 mencapai 73,73, meningkat 0,62 poin (0,85 persen) dibandingkan dengan Tahun 2022. Peningkatan IPM Provinsi Jambi sejalan dengan peningkatan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Berikut adalah beberapa aspek yang diincar dalam IPM, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Digambarkan bahwa Kota/Kabupaten Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi dan terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dari tingkat IPM yang tinggi dan meningkat dari Tahun 2015 hingga 2023. Kabupaten/Kota Provinsi Jambi yang memiliki IPM tertinggi yaitu Kota Jambi, Kota Sungai

Penuh, Kerinci, Bungo, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, dan IPM terendah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih di bawah 70.

### **2.2.3. Ekonomi**

Indikator ekonomi dalam GDPK adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi ekonomi suatu wilayah atau negara dan untuk membantu merumuskan kebijakan yang tepat dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memantau dan menganalisis indikator ekonomi, pemerintah dan para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi masalah ekonomi, mengevaluasi kebijakan yang ada, dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Jambi akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019 sampai dengan 2023, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi, pandemi Covid-19 (tahun 2020–2021), struktur perdagangan global, dan kondisi politik (persiapan penyelenggaraan pemilu 2024)

#### **2.2.3.1. Tingkat Partisipasi Angka Kerja**

Selama kurun waktu 2017 hingga 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jambi menunjukkan pola peningkatan yang stabil dari 67,52 pada Tahun 2017 menjadi 68,75 pada Tahun 2023. Untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jambi, strategi yang holistik dapat diadopsi. Pertama, perlu dilakukan pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas guna memastikan keterampilan angkatan kerja sesuai dengan tuntutan pasar kerja lokal. Stimulasi ekonomi lokal menjadi kunci dengan mendukung pelaku usaha, menggencarkan investasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui insentif dan dukungan keuangan. Selain itu, penguatan kemitraan antara lembaga pendidikan dan industri juga penting untuk memastikan

kurikulum pendidikan relevan. Pemberdayaan perempuan, adopsi teknologi, dan digitalisasi juga dapat menjadi fokus strategi, sementara pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk respons yang tepat terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Dengan menggabungkan strategi ini, Provinsi Jambi dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan peluang pekerjaan yang adil dan setara bagi masyarakat.

Secara terperinci Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017 - 2023 diberikan pada Tabel 2.15.

**Tabel 2. 15.** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2017-2023

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>TPAK 2017</b>	<b>TPAK 2018</b>	<b>TPAK 2019</b>	<b>TPAK 2020</b>	<b>TPAK 2021</b>	<b>TPAK 2022</b>	<b>TPAK 2023</b>
Kerinci	69,46	71,14	66,26	69,55	70,90	73,53	71,89
Merangin	69,82	69,62	68,91	70,17	69,85	69,50	71,17
Sarolangun	70,08	67,03	65,20	68,58	64,86	66,74	66,52
Batang Hari	64,39	65,07	60,35	67,02	68,81	63,42	62,01
Muaro Jambi	62,30	63,88	59,16	61,63	62,78	67,21	74,38
Tanjung Jabung Timur	75,97	71,57	69,84	74,18	71,22	72,85	67,56
Tanjung Jabung Barat	70,24	75,35	70,42	74,83	73,89	70,00	70,17
Tebo	70,61	70,46	70,17	71,13	70,65	69,02	70,13
Bungo	65,89	67,08	63,78	64,89	63,58	67,83	70,30
Kota Jambi	64,06	65,11	66,30	64,12	63,12	64,52	64,85
Kota Sungai Penuh	66,05	71,15	63,18	65,99	64,92	63,02	68,24
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>67,52</b>	<b>68,21</b>	<b>65,79</b>	<b>67,79</b>	<b>67,17</b>	<b>67,84</b>	<b>68,75</b>

Sumber: Susenas, BPS, 2015-2020

Berdasarkan Tabel 2.15 menunjukkan beberapa daerah seperti Muaro Jambi mencatatkan peningkatan yang signifikan, mencapai 74,38 pada Tahun 2022, menandakan tingginya partisipasi angkatan kerja di wilayah tersebut. Sementara sebagian besar wilayah lainnya, seperti Kerinci, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh, menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif stabil selama periode tersebut. Meskipun terdapat fluktuasi di beberapa wilayah seperti Batang Hari yang mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dan penurunan pada Tahun 2022, keseluruhan Provinsi Jambi

menunjukkan keberlanjutan dalam keterlibatan angkatan kerja. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan TPAK di tingkat regional

### 2.2.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi dari 2017 hingga 2023 menggambarkan berbagai tren di berbagai wilayah. Untuk mengatasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi, strategi holistik dapat diterapkan. Pertama, perlu dilakukan pengembangan keterampilan melalui program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, dengan fokus pada keterampilan teknologi dan vokasional. Provinsi Jambi perlu mempertimbangkan kebijakan yang mendukung pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi guna mengurangi tingkat pengangguran dan mencapai stabilitas yang berkelanjutan.

Secara terperinci tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017 - 2023 diberikan pada Tabel 2.16.

**Tabel 2. 16.** Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>TPT 2017</b>	<b>TPT 2018</b>	<b>TPT 2019</b>	<b>TPT 2020</b>	<b>TPT 2021</b>	<b>TPT 2022</b>	<b>TPT 2023</b>
Kerinci	3,26	2,74	2,62	2,43	2,32	2,63	2,48
Merangin	4,1	3,47	3,68	4,86	4,83	4,69	4,35
Sarolangun	2,25	4,06	4,09	5,71	5,52	5,22	5,09
Batang Hari	3,57	3,87	4,56	4,42	4,26	3,53	3,85
Muaro Jambi	5,39	4,52	5,20	5,43	5,59	5,35	5,40
Tanjung Jabung Timur	2,36	1,80	1,63	1,41	1,56	1,32	1,67
Tanjung Jabung Barat	3,07	2,38	2,57	2,16	2,53	2,88	2,95
Tebo	1,98	2,00	2,90	2,95	2,83	1,38	1,71
Bungo	4,89	3,03	3,82	5,94	5,86	5,50	5,23
Kota Jambi	5,55	6,41	6,53	10,49	10,66	8,95	8,27
Kota Sungai Penuh	4,14	5,13	4,00	5,56	3,00	2,49	3,80
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>3,87</b>	<b>3,73</b>	<b>4,06</b>	<b>5,13</b>	<b>5,09</b>	<b>5,49</b>	<b>4,53</b>

Sumber: Susenas, 2015-2020

Berdasarkan Tabel 2.16 menunjukkan Kota Jambi mencatatkan peningkatan yang signifikan dari 5,55 pada Tahun 2017 menjadi 10,66

pada Tahun 2021, menandakan adanya tantangan ekonomi tertentu. Sementara itu, sebagian besar wilayah seperti Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, dan Provinsi Jambi sendiri menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif stabil, dengan fluktuasi kecil. Terdapat juga beberapa wilayah seperti Tanjung Jabung Timur dan Tebo yang mencatatkan penurunan berkelanjutan dalam TPT, mencerminkan keberhasilan kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi lokal menjadi kunci dengan memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal, mendorong investasi, dan mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kolaborasi yang erat antara lembaga pendidikan dan industri perlu diperkuat untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan. Adopsi inovasi dan teknologi juga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan. Selain itu, promosi kewirausahaan dan dukungan bagi UMKM dapat membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Monitoring dan evaluasi yang rutin menjadi penting untuk mengukur efektivitas kebijakan dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Peningkatan akses pendidikan juga perlu diperhatikan untuk memastikan masyarakat memiliki kualifikasi yang dibutuhkan di pasar kerja. Dengan pendekatan ini, Provinsi Jambi dapat mencapai penurunan yang berkelanjutan dalam tingkat pengangguran dan menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan dinamis.

#### **2.2.3.3. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi 2017-2023**

Selama kurun waktu 2002 hingga 2023, terjadi fluktuasi angka penurunan dan peningkatan indeks kombinasi perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jambi. Meskipun Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan signifikan pada beberapa periode, terdapat kecenderungan umum penurunan indeks kombinasi perkotaan dan perdesaan, yang dapat mengindikasikan dinamika perubahan struktural dan keberlanjutan pembangunan wilayah di tingkat provinsi dan nasional.

Untuk meningkatkan indeks kombinasi perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jambi, perlu diadopsi serangkaian strategi yang holistik.

Fokus utama adalah pada pengembangan infrastruktur terpadu yang mencakup kedua wilayah, termasuk transportasi, listrik, air bersih, dan sanitasi. Pemberdayaan ekonomi lokal menjadi prioritas dengan mendorong pertumbuhan sektor pertanian di perdesaan dan mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah di perkotaan. Peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan di kedua wilayah juga mendapat perhatian khusus, bersama dengan program penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

Secara terperinci tingkat kesempatan kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017 - 2023 diberikan pada Tabel 2.17.

**Tabel 2. 17.** Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi 2017-2023

Kabupaten/ Kota	TKK 2017	TKK 2018	TKK 2019	TKK 2020	TKK 2021	TKK 2022	TKK 2023
Kerinci	96,74	97,26	97,38	97,57	97,68	97,37	97,52
Merangin	95,90	96,53	96,32	95,14	95,17	95,31	95,65
Sarolangun	97,75	95,94	95,91	94,29	94,48	94,78	94,91
Batang Hari	96,43	96,13	95,44	95,58	95,74	96,47	96,15
Muaro Jambi	94,61	95,48	94,80	94,57	94,41	94,65	94,60
Tanjung Jabung Timur	97,64	98,20	98,37	98,59	98,44	98,68	98,33
Tanjung Jabung Barat	96,93	97,62	97,43	97,84	97,47	97,12	97,05
Tebo	98,02	98,00	97,10	97,05	97,17	98,62	98,29
Bungo	95,11	96,97	96,18	94,06	94,14	94,50	94,77
Kota Jambi	94,45	93,59	93,47	89,51	89,34	91,05	91,73
Kota Sungai Penuh	95,86	94,87	96,00	94,44	97,00	97,51	96,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.17 menunjukkan pada Tahun 2002, indeks tersebut berada pada level 0,273 dan mengalami kenaikan signifikan menjadi 0,304 pada Tahun 2005. Tren kenaikan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada Tahun 2015 dengan nilai 0,361. Namun, sejak Tahun 2016 hingga 2023, terlihat kecenderungan penurunan secara bertahap, mencapai 0,320 pada Tahun 2023. Sementara itu, tingkat nasional menunjukkan tren serupa dengan peningkatan dari

0,341 pada Tahun 2002 menjadi 0,408 pada Tahun 2015, diikuti oleh penurunan sejak Tahun 2016 hingga 2023. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan, partisipasi masyarakat aktif, dan pengelolaan risiko bencana terintegrasi akan menjadi komponen penting dalam mencapai kesinambungan pembangunan yang merata dan berkelanjutan antara perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jambi.

#### 2.2.3.4. Laju Pertumbuhan PDB

Meskipun mengalami fluktuasi, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada akhirnya menunjukkan kestabilan dan potensi pemulihan. Perlu dicatat bahwa meskipun mengalami beberapa penurunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Tahun 2020 tidak sebesar penurunan yang dialami oleh Indonesia pada umumnya. Kesimpulannya, Provinsi Jambi memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan, dan upaya pemulihan pasca-pandemi serta perbaikan kebijakan ekonomi dapat memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Secara terperinci laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2015 - 2023 diberikan pada Gambar 2.46 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

**Gambar 2. 45.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

Berdasarkan Gambar 2.45 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari Tahun 2015 hingga 2023, terlihat variasi yang cukup signifikan. Pada periode 2015-2019, Provinsi Jambi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan puncak pertumbuhan mencapai 5,2% pada Tahun 2017. Namun, pada Tahun 2020, terjadi penurunan tajam sebesar -0,46%, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19. Provinsi ini kemudian berhasil pulih pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,66%, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut menjadi 5,13% pada Tahun 2022, dan 4,66% pada Tahun 2023.

Untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, langkah-langkah strategis dapat diambil. Pertama, diversifikasi ekonomi perlu diperkuat dengan fokus pada pengembangan sektor non-minyak dan gas, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Pemberdayaan UMKM menjadi kunci dalam mendukung perekonomian lokal, dengan menyediakan dukungan finansial, pelatihan, dan infrastruktur yang mendukung. Investasi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor transportasi, energi, dan telekomunikasi, dapat memperkuat konektivitas dan daya saing wilayah. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja perlu ditingkatkan untuk memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan. Mendorong inovasi dan adopsi teknologi di berbagai sektor juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemitraan yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi perlu diperkuat, sementara prinsip keberlanjutan harus menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi. Selain itu, pengelolaan krisis yang responsif dan berkelanjutan akan meningkatkan ketangguhan ekonomi Provinsi Jambi terhadap perubahan kondisi global. Dengan pendekatan holistik ini, Provinsi Jambi dapat membangun fondasi ekonomi yang kokoh, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi

#### **2.2.3.5. Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15**

##### **Tahun**

Menurut Mukri (2018) menyatakan bahwa nilai tenaga kerja terampil dapat diciptakan melalui peningkatan pendidikan,

keterampilan, dan kesehatan sehingga mampu memperoleh pendapatan yang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya, terutama masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya pada usia non-produktif. Oleh karena itu, negara harus mampu mempersiapkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan kerjanya berdasarkan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya (Mukri, 2018) berupa seperangkat keterampilan tertentu yang dimiliki oleh angkatan kerja seperti soft, hard, teknis, dan dapat dipindahtangankan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Untuk mengatasi tantangan tingkat kesempatan kerja di Provinsi Jambi, sejumlah strategi dapat diterapkan. Pertama, perlu dilakukan pengembangan keterampilan melalui program pelatihan yang fokus pada kebutuhan pasar kerja lokal, khususnya dalam bidang teknologi dan industri. Stimulasi ekonomi lokal menjadi kunci, dengan memberikan dukungan finansial dan fasilitas kepada pelaku usaha lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan.

**Tabel 2. 18.** Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kab/Kota Provinsi Jambi 2017-2023

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>TKK 2017</b>	<b>TKK 2018</b>	<b>TKK 2019</b>	<b>TKK 2020</b>	<b>TKK 2021</b>	<b>TKK 2022</b>	<b>TKK 2023</b>
Kerinci	96,74	97,26	97,38	97,57	97,68	97,37	97,52
Merangin	95,90	96,53	96,32	95,14	95,17	95,31	95,65
Sarolangun	97,75	95,94	95,91	94,29	94,48	94,78	94,91
Batang Hari	96,43	96,13	95,44	95,58	95,74	96,47	96,15
Muaro Jambi	94,61	95,48	94,80	94,57	94,41	94,65	94,60
Tanjung Jabung Timur	97,64	98,20	98,37	98,59	98,44	98,68	98,33
Tanjung Jabung Barat	96,93	97,62	97,43	97,84	97,47	97,12	97,05
Tebo	98,02	98,00	97,10	97,05	97,17	98,62	98,29
Bungo	95,11	96,97	96,18	94,06	94,14	94,50	94,77
Kota Jambi	94,45	93,59	93,47	89,51	89,34	91,05	91,73
Kota Sungai Penuh	95,86	94,87	96,00	94,44	97,00	97,51	96,20

Sumber: Susenas, 2015-2020

Berdasarkan Tabel 2.18 menunjukkan tingkat kesempatan kerja (TKK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari Tahun 2017 hingga 2023, terlihat adanya variasi dalam perkembangan angka

penurunan dan peningkatan. Sebagian besar wilayah menunjukkan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, dengan Kerinci, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo mencapai tingkat di atas 97%. Meskipun demikian, beberapa daerah seperti Kota Jambi mengalami penurunan signifikan dari 94,45 pada Tahun 2017 menjadi 89,34 pada Tahun 2021 sebelum mengalami sedikit kenaikan pada Tahun-Tahun berikutnya. Rata-rata tingkat kesempatan kerja di Provinsi Jambi tetap relatif stabil, mencapai 95,93 pada Tahun 2023. Kesimpulannya, meskipun sebagian besar wilayah menunjukkan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, perlu perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang mengalami penurunan untuk memahami faktor-faktor penyebabnya dan mengimplementasikan strategi yang sesuai guna meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi Jambi secara keseluruhan.

Kemitraan yang kuat antara lembaga pendidikan dan industri perlu diperkuat guna memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Selain itu, adopsi inovasi dan teknologi di sektor-sektor tertentu dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses ke pembiayaan dan pelatihan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Upaya peningkatan investasi dan program pengembangan karir untuk pemuda serta lulusan baru juga menjadi strategi yang relevan. Dengan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, Provinsi Jambi dapat mencapai peningkatan signifikan dalam tingkat kesempatan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memperkuat daya saing masyarakat di pasar kerja.

#### **2.2.3.6. Persentase Penduduk Miskin**

Selama periode 2018 hingga 2023, terdapat variasi signifikan dalam persentase penduduk miskin di berbagai kabupaten/kota Provinsi Jambi. Untuk mengatasi tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi, diperlukan strategi holistik yang mencakup sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Fokus utama harus diberikan pada pemberdayaan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM dan sektor pertanian, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan pendidikan dan vokasional. Program sosial yang tertarget dan efektif juga menjadi

kunci dalam memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Penguatan infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, dan energi listrik, akan memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

**Tabel 2. 19.** Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Jambi

No	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		BPS	BPS	BPS	BPS	BPS	BPS
1.	Kerinci	7,07	7,13	7,3	7,71	7,57	7,54
2.	Merangin	8,88	8,48	8,63	9,11	8,7	8,9
3.	Sarolangun	8,73	8,45	8,42	8,87	8,48	8,54
4.	Batang Hari	10,23	9,75	9,65	10,05	9,63	9,45
5.	Muaro Jambi	4,05	3,83	3,83	4,53	4,47	4,43
6.	Tanjung Jabung Timur	11,1	10,56	10,29	10,75	10	9,79
7.	Tanjung Jabung Barat	12,38	11,54	10,95	11,39	10,91	10,85
8.	Tebo	5,78	5,6	5,8	6,23	5,38	5,29
9.	Bungo	6,58	6,47	6,26	6,68	6,34	6,46
10	Kota Jambi	8,49	8,12	8,27	9,02	8,33	8,24
11	Kota Sungai Penuh	2,76	2,81	3,03	3,41	2,97	3
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>7,92</b>	<b>7,6</b>	<b>7,58</b>	<b>8,09</b>	<b>7,62</b>	<b>7,58</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.19 menunjukkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatatkan penurunan yang cukup tajam dari 14,17% pada Tahun 2015 menjadi 10,85% pada Tahun 2023, menunjukkan upaya yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Wilayah lain seperti Kerinci, Merangin, Sarolangun, dan Batanghari juga mengalami penurunan yang berkesinambungan, menandakan progres positif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, beberapa kota seperti Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh menghadapi fluktuasi yang lebih dinamis, meskipun secara umum menunjukkan tren penurunan pada akhir periode. Kesimpulannya, Provinsi Jambi secara keseluruhan berhasil mencapai penurunan persentase penduduk miskin, menandakan progres positif dalam upaya pengentasan kemiskinan

Secara keseluruhan, persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi menunjukkan penurunan yang konsisten dari 8,86% pada Tahun 2015 menjadi 7,58% pada Tahun 2023. Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, namun tren penurunan secara menyeluruh memberikan gambaran positif terkait upaya mengatasi kemiskinan di berbagai tempat tinggal. Provinsi Jambi berhasil menunjukkan peningkatan kesejahteraan dengan mengurangi persentase penduduk miskin, yang dapat diartikan sebagai indikasi positif keberhasilan program-program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat strategi dan kebijakan yang telah efektif serta menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial agar kemajuan yang dicapai dapat berlanjut dan berdampak secara lebih luas. Dengan penerapan strategi ini secara terkoordinasi, Provinsi Jambi dapat meraih pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.2.3.7. PDRB**

PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan) adalah salah satu metode pengukuran PDRB yang memperhitungkan perubahan harga dari waktu ke waktu untuk menilai pertumbuhan ekonomi sebenarnya tanpa terpengaruh oleh fluktuasi harga. Terdapat lima sektor dominan di Provinsi Jambi: 1).Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A), 2).Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G), 3).Sektor Industri Pengolahan (C), 4).Sektor Konstruksi (F), 5).Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (K). Dalam rentang waktu 2018-2023, lapangan usaha di Provinsi Jambi menunjukkan variasi dalam tingkat pertumbuhan Tahunan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan yang stabil dari Tahun ke Tahun, sementara sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami fluktuasi yang lebih besar. Industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, mencerminkan perkembangan industri lokal. Sektor Perdagangan, Transportasi, dan Konstruksi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan aktivitas ekonomi yang meningkat. Secara

keseluruhan, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan yang stabil, namun perlu diperhatikan variasi dalam pertumbuhan sektor-sektor spesifik untuk merancang kebijakan yang sesuai guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Tabel 2. 20.** PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi 2018-2023 (Milyar)

<b>Komponen Pengeluaran PDRB</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62685.31	65279.81	64991.00	67206.00	70205.90	73149.40
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	785.47	845.22	839.00	855.20	906.90	1000.50
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10742.18	11556.81	10951.00	10956.40	11121.80	11341.30
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30777.99	31894.30	32227.00	35215.50	36100.10	39667.40
Perubahan Inventori	399.69	1177.08	815.00	1720.60	1286.60	1271.90
Ekspor Barang dan Jasa	108691.61	112297.08	101607.00	106352.30	110835.00	108956.50
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	71180.25	73939.21	63076.00	68455.40	68726.20	66118.20
Produk Domestik Regional Bruto	142902.00	149111.09	148354.00	153850.60	161730.00	169268.80

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan Tabel 2.20 menunjukkan Dalam periode 2018-2023, Komponen Pengeluaran PDRB menunjukkan tren pertumbuhan yang positif secara keseluruhan. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga meningkat dari 62.685,31 miliar pada Tahun 2018 menjadi 73.149,40 miliar pada Tahun 2023, menunjukkan kenaikan yang stabil dari Tahun ke Tahun. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto juga

mengalami pertumbuhan yang signifikan, naik dari 30.777,99 miliar pada Tahun 2018 menjadi 39.667,40 miliar pada Tahun 2023. Meskipun demikian, terdapat fluktuasi dalam beberapa komponen seperti Perubahan Inventori yang mengalami variasi dari Tahun ke Tahun, mencerminkan dinamika dalam kebijakan persediaan Perusahaan.

Selain itu, ekspor barang dan jasa juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, tetapi terjadi sedikit penurunan pada Tahun 2023, sementara Dikurangi Impor Barang dan Jasa menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, mencerminkan dinamika perdagangan internasional. Dengan demikian, meskipun ada variasi dalam komponen individu, Produk Domestik Regional Bruto secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang positif dari Tahun ke Tahun, mencapai 169.268,80 miliar pada Tahun 2023.

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 tumbuh sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Perusahaan sebesar 16,84 persen. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,15 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 8,87 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,76 persen; kategori Jasa lainnya tumbuh 8,54 persen; Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 8,29 persen; dan Konstruksi tumbuh 7,98 persen. Sedangkan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 5,61 persen; Industri Pengolahan sebesar 4,16 persen; dan Pertambangan dan Penggalian tumbuh 0,07 persen.



**Gambar 2. 46.** Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,83 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,31 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,30 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,98 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi mencapai 70 persen.

**Tabel 2. 21.** Distribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi (Persen), 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Kerinci	4,49	4,52	5,05	4,83	4,43
2	Merangin	6,90	6,97	7,57	7,66	7,36
3	Sarolangun	6,92	6,9	6,97	7,11	7,53
4	Batang Hari	7,48	7,51	7,92	8,08	8,82
5	Muaro Jambi	10,96	11,08	11,77	11,85	11,96
6	Tanjung Jabung Timur	11,51	11,25	9,45	9,36	9,29
7	Tanjung Jabung Barat	19,79	19,58	17,93	18,07	18,17
8	Tebo	6,61	6,65	7,12	7,28	7,15
9	Bungo	8,26	8,16	8,36	8,63	9,04
10	Kota Jambi	13,75	13,97	14,23	13,7	13,11
11	Kota Sungai Penuh	3,32	3,41	3,65	3,43	3,15
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, 2023

Untuk melihat kontribusi PDRB masing-masing Kabupaten/Kota terhadap total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, digunakan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Pada Tabel 2.21 menunjukkan perbandingan data PDRB kabupaten/kota tahun 2018 dan tahun 2022, yang menunjukkan kontribusi dari masing-masing kabupaten/kota terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB di Provinsi Jambi pada tahun 2022, yaitu sebesar 18,17 persen. Kemudian Kota Jambi menempati peringkat kedua dengan peranan sebesar 13,11 persen, berikutnya Kabupaten Muaro Jambi menempati urutan ketiga dengan peranan sebesar 11,96 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi pergeseran peringkat kontribusi kabupaten/kota pada tahun 2022, yaitu Kabupaten Muaro Jambi dari peringkat 4 naik menjadi peringkat 3, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari peringkat 3 turun menjadi peringkat 4. Jika dilihat dari peranan pada 2018 dibandingkan 2022, terdapat 6 kabupaten/ kota yang kontribusinya meningkat dan 5 kabupaten/kota yang kontribusinya mengalami penurunan. Peningkatan terbesar dialami Kabupaten Tebo (1,34 persen), sedangkan penurunan terbesar dialami Kabupaten Batang Hari (-2,22 persen). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas

dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh perubahan harga sedangkan PDRB atas dasar harga konstan telah meniadakan pengaruh faktor harga. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan harga yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2021–2023, PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami kenaikan yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi perekonomian secara umum.

**Tabel 2. 22.** PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi  
(Milyar Rupiah)

Sektor PDRB	[Seri 2010] PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Milyar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38041,6	39160,1	39751,9	41209,1	43267,9	45697,3
B. Pertambangan dan Penggalian	34104,2	35709,3	34989	35730,2	38502	38529
C. Industri Pengolahan	15137,4	15495,3	15513,7	15727,4	16218,8	16892,9
D. Pengadaan Listrik dan Gas	73,32	77,58	81,14	86,9	97	108,8
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	191,09	198,74	202,68	213,1	219,8	220,3
F. Konstruksi	10330,5	11043,4	11140,6	12025	11919	12870,5
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13902,9	14724,6	14203,5	15049,6	15857,8	17264,4
H. Transportasi dan Pergudangan	4722,34	4891,84	4203,82	4437,5	5190,3	5620,5
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1610,01	1700,44	1582,75	1661,4	1845,6	2007,3
J. Informasi dan Komunikasi	5295,71	5624,3	6101,01	6335	6794,2	7304
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3198,49	3259,9	3487,26	3674,3	3647,8	3692,4
L. Real Estate	2069,29	2212,37	2212	2281,9	2378,2	2456,6
M.N. Jasa Perusahaan	1503,45	1564,91	1480,6	1540,3	1773,4	2071,9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4874,76	5148,49	4823,16	4929,3	4897,5	5043,2
P. Jasa Pendidikan	4700,92	4971,05	5153,71	5216,5	5321,8	5457,1
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1660,01	1781,23	1914,1	2211,8	2158,8	2252,5
R.S.T.U. Jasa Lainnya	1486,04	1547,59	1513,38	1521,3	1640,1	1780,3
Produk Domestik Regional Bruto	142902	149111	148354	153851	161730	169269

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

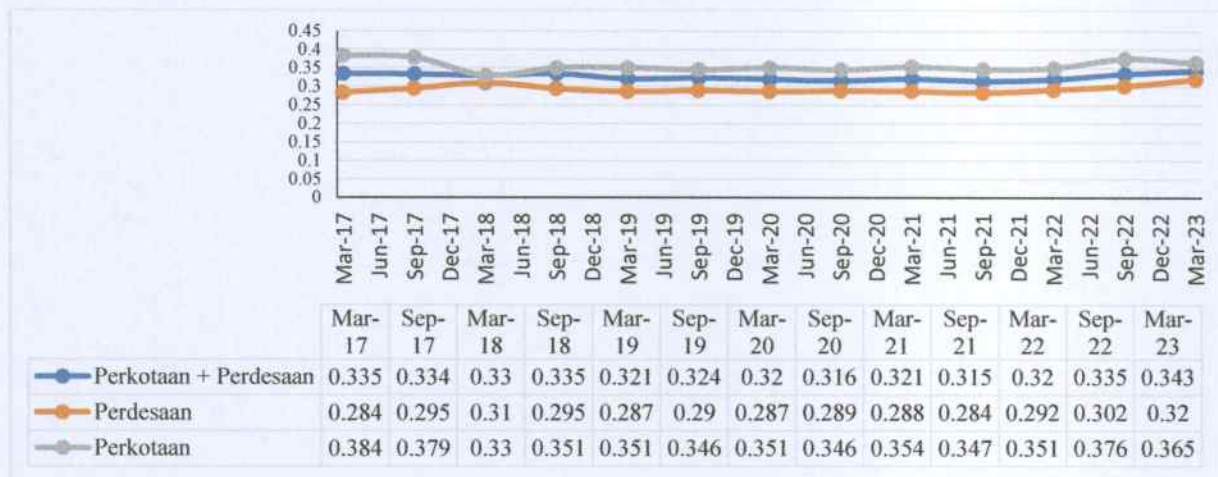
Berdasarkan Tabel 2.22 menunjukkan pada Tahun 2023, kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi yang terdiri dari: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) memiliki kontribusi sebesar 27.00%. Sektor ini tetap menjadi salah satu pemain utama dalam struktur ekonomi regional, menunjukkan pentingnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam kontribusinya terhadap PDRB. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) memiliki kontribusi sebesar 10.20%. Aktivitas perdagangan dan reparasi kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, mencerminkan pentingnya sektor perdagangan dalam perekonomian regional. Sektor Industri Pengolahan (C) memiliki kontribusi sebesar 9.99%. Meskipun kontribusinya sedikit lebih rendah dibandingkan sektor perdagangan, industri pengolahan tetap menjadi pemain kunci dalam struktur ekonomi regional, menunjukkan keberlanjutan aktivitas industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa Sektor Konstruksi (F) memiliki kontribusi sebesar 7.60%. Sektor konstruksi memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan properti, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Dimana sektor jasa keuangan dan asuransi (K) memiliki kontribusi sebesar 2.18%. Meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lain, jasa keuangan dan asuransi tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, mencerminkan peran pentingnya dalam menyediakan layanan keuangan dan proteksi bagi masyarakat dan bisnis lokal.

#### **2.2.2.8. Gini Ratio**

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Jambi pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,335, mengalami penurunan sampai dengan Maret 2018, kemudian naik pada September 2018 menjadi 0,335 dan turun lagi pada Maret 2019 menjadi 0,321. Sejak

September 2019 sampai dengan September 2021, Gini Ratio Jambi cenderung naik turun nilainya, dan pada Maret 2023 merupakan angka tertinggi selama periode Maret 2017-Maret 2023 (Gambar 2.48).



**Gambar 2. 47.** Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jambi, Maret 2017-Maret 2023

Sumber: BPS Provinsi Jambi

#### 2.2.2.9. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

**Tabel 2. 23.** Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi Jambi Maret 2022-Maret 2023

Daerah	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan					
	P1			P2		
	Mar-22	Sep-22	Mar-23	Mar-22	Sep-22	Mar-23
Perkotaan	1,673	1,739	1,616	0,385	0,393	0,368
Perdesaan	0,928	0,923	0,985	0,199	0,16	0,246
<b>Kota + Desa</b>	<b>1,174</b>	<b>1,193</b>	<b>1,195</b>	<b>0,26</b>	<b>0,237</b>	<b>0,287</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Bedasarkan Tabel 2.23 menunjukkan pada periode September 2022 – Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan, sama halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 1,195, naik dibandingkan September 2022 yang sebesar 1,193. Demikian juga

dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,237 menjadi 0,287. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,616, sedangkan di perdesaan jauh lebih rendah, yaitu mencapai 0,985. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,368, sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,246.

### **2.3. Pembangunan Keluarga (Pilar III)**

Ketenagakerjaan - Jumlah Penduduk Usia Kerja - Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Pengembangan Keluarga Berkualitas merupakan usaha untuk menciptakan keluarga yang mandiri, damai, dan sejahtera dengan memperkuat keberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Indeks Pengembangan Keluarga (iBerkualitas) dipergunakan untuk menilai kualitas keluarga, yang mencakup aspek ketenangan, kemandirian, dan kebahagiaan. Proses pengembangan keluarga dapat diukur menggunakan iBerkualitas, yang membagi status pengembangan keluarga ke dalam kategori kuat, berkembang, atau rentan. Target iBerkualitas untuk Tahun 2024 adalah 61.0, sementara pada Tahun 2022 ditetapkan sebesar 57, dengan baseline awal pada Tahun 2018 sebesar 53.6.

Konsep Keluarga Berkualitas melibatkan keluarga yang mandiri, damai, dan bahagia, yang menjadi unit dasar di tingkat wilayah setingkat kelurahan yang mengintegrasikan keluarga dan masyarakat. Pendekatan pengembangan keluarga yang bersifat universal bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pemberdayaan.

Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan mutu keluarga agar menciptakan rasa aman, kedamaian, dan harapan akan masa depan yang lebih baik, mencakup kesejahteraan fisik dan kebahagiaan emosional. Indikator pengembangan keluarga terdiri dari tiga dimensi: kemandirian, ketenangan, dan kebahagiaan. Tujuan dari pembangunan keluarga ini adalah untuk mencapai keluarga yang berkualitas, tahan banting, dan sejahtera secara lahir dan batin.

### 2.3.1. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Provinsi Jambi, strategi yang holistik perlu diterapkan. Penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama untuk ibu dan anak, menjadi prioritas utama, disertai dengan kampanye edukasi kesehatan reproduksi.



**Gambar 2. 48.** Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) Provinsi Jambi  
Sumber: BKKBN, BPS dan SiPerindu, 2024

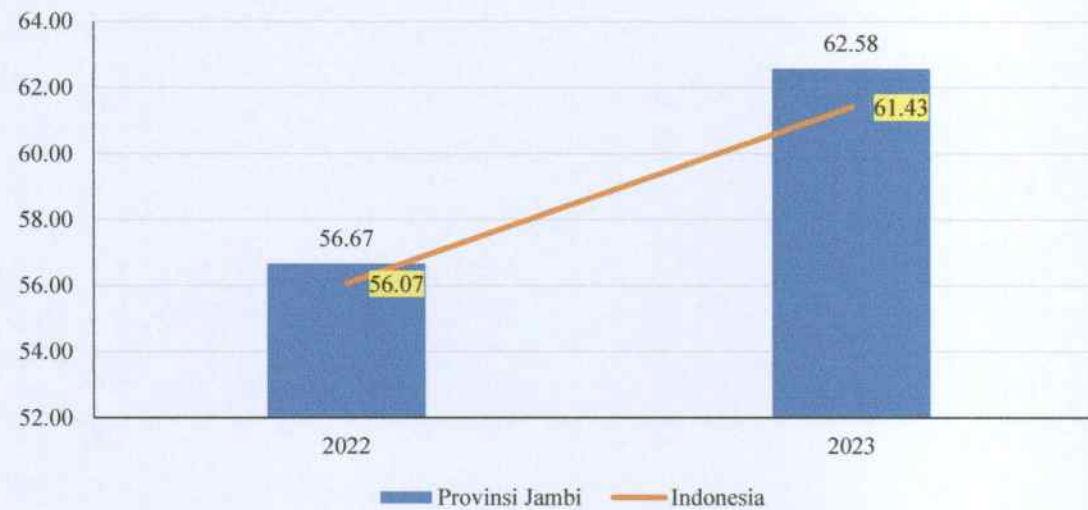
Berdasarkan Gambar 2.48 menunjukkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada Tahun PK22 dan PK23 untuk sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, terlihat adanya variasi angka yang mencerminkan perkembangan kesejahteraan keluarga. Sebagian besar daerah menunjukkan peningkatan indeks tersebut dari PK22 ke PK23. Sebagai contoh, Kota Jambi mencatatkan pertumbuhan signifikan dari 58,4 pada PK22 menjadi 66,48 pada PK23. Meskipun demikian, terdapat beberapa daerah seperti Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat yang mencatatkan penurunan indeks. Secara keseluruhan, Provinsi Jambi mencatatkan pertumbuhan indeks dari 56,67 pada PK22 menjadi 62,58 pada PK23. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa beberapa daerah masih memiliki indeks di bawah rata-rata provinsi. Kesimpulannya, sementara terdapat kemajuan dalam Indeks Pembangunan Keluarga di Provinsi Jambi, perlu dilakukan evaluasi dan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap

kabupaten dan kota dapat mengalami peningkatan kesejahteraan keluarga secara merata.

Selanjutnya, peningkatan akses dan mutu pendidikan, melalui program beasiswa dan pelatihan keterampilan, diharapkan dapat mendukung perkembangan keluarga. Pemberdayaan perempuan, baik melalui pelatihan maupun peluang pekerjaan, menjadi aspek kunci untuk meningkatkan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Program pengembangan ekonomi keluarga, seperti pelatihan kewirausahaan dan dukungan usaha mikro, perlu diperkuat untuk meningkatkan daya ekonomi keluarga. Selain itu, pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di daerah terpencil menjadi krusial guna memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan Provinsi Jambi dapat mencapai peningkatan signifikan dalam iBangga, menciptakan kesejahteraan keluarga, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk menjaga dan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang berada di atas rata-rata nasional di Provinsi Jambi, strategi holistik diperlukan. Upaya perlu difokuskan pada penguatan sektor kesehatan keluarga melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya untuk ibu dan anak, serta melalui kampanye edukasi kesehatan reproduksi. Selain itu, perlu diperkuat akses dan mutu pendidikan melalui program beasiswa dan pelatihan keterampilan untuk mendukung kualitas keluarga. Pemberdayaan perempuan tetap menjadi aspek kunci dengan melibatkan program pelatihan dan menciptakan peluang pekerjaan. Pengembangan ekonomi keluarga dapat ditingkatkan melalui program kewirausahaan dan dukungan untuk usaha mikro, sementara peningkatan infrastruktur sosial dan ekonomi di daerah terpencil menjadi esensial. Sistem pemantauan yang efektif dan kolaborasi antarstakeholder akan menjadi penopang utama dalam mewujudkan strategi ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan perkembangan keluarga di Provinsi Jambi.

Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) Provinsi Jambi dan Indonesia pada Tahun 2022 – 2023 diberikan pada Gambar 2.49 berikut:



**Gambar 2. 49.** Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) Provinsi Jambi dan Indonesia

Sumber: BKKBN, BPS dan SiPerindu, 2024

Berdasarkan Gambar 2.49 menunjukkan data Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) untuk Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023, terlihat adanya peningkatan yang positif di Provinsi Jambi dan tingkat nasional. Pada Tahun 2022, Provinsi Jambi mencatatkan iBangga sebesar 56,67, sementara Indonesia secara keseluruhan memiliki indeks sebesar 56,07. Namun, pada Tahun 2023, diperkirakan iBangga Provinsi Jambi akan meningkat menjadi 62,58, sedangkan Indonesia secara keseluruhan akan mencapai indeks 61,43. Peningkatan indeks ini mencerminkan upaya dan perbaikan yang dilakukan dalam pembangunan keluarga di Provinsi Jambi. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa gap antara iBangga Provinsi Jambi dan rata-rata nasional relatif kecil dan Provinsi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Jambi diatas rata-rata nasional artinya memiliki tingkat pembangunan keluarga yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata seluruh Indonesia.

### 2.3.2. Median Usia Perkawinan Pertama

Median Usia Perkawinan Pertama adalah statistik demografi yang menunjukkan usia di mana separuh dari populasi telah menikah untuk pertama kali. Secara teknis, ini adalah nilai tengah yang membagi

populasi menjadi dua bagian numerik yang sama: 50% dari populasi telah menikah di usia yang lebih muda dari median, dan 50% lainnya di usia yang lebih tua.

**Tabel 2. 24.** Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin 10 Tahun ke Atas Menurut Tempat Tinggal, 2019

No	Wilayah	2022	2023
		PK 2022	PK 2023
1.	Kerinci	19,31	19,63
2.	Merangin	19,42	19,53
3.	Sarolangun	19,66	19,91
4.	Batang Hari	19,97	19,86
5.	Muaro Jambi	20,39	21,32
6.	Tanjung Jabung Timur	19,88	20,55
7.	Tanjung Jabung Barat	19,95	20,12
8.	Tebo	19,53	19,79
9.	Bungo	19,59	19,67
10.	Kota Jambi	23,68	23,66
11.	Kota Sungai Penuh	21,45	20,67
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>20,21</b>	<b>21,28</b>
<b>Nasional</b>		<b>20,98</b>	<b>22,30</b>

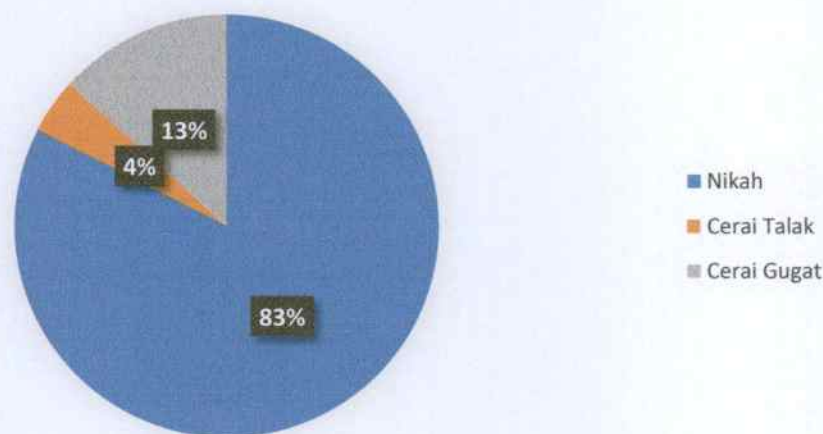
Sumber: BKKBN, BPS dan SiPerindu, 2024

Berdasarkan Tabel 2.24 menunjukkan Usia median kawin pertama perempuan pernah kawin 10 Tahun ke atas menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai wilayah Provinsi Jambi, berkisar antara 18 hingga 22 Tahun. Wilayah dengan median usia kawin pertama terendah adalah Kerinci, Merangin, dan Bungo, masing-masing mencapai 18 Tahun, sementara Kota Jambi menonjol dengan median usia kawin pertama tertinggi, mencapai 22 Tahun. Mayoritas wilayah di Provinsi Jambi, seperti Sarolangun, Batang Hari, Tanjab Timur, Tanjab Barat, Tebo, dan Provinsi Jambi sendiri, memiliki median usia kawin pertama antara 18 hingga 20 Tahun, dengan angka median sebesar 19 Tahun. Variasi yang cukup besar ini mencerminkan pengaruh faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, dan sosial dalam menentukan usia perkawinan pertama perempuan di wilayah tersebut. Median Usia Perkawinan Pertama sering digunakan untuk mengukur tren sosial terkait usia perkawinan dalam suatu populasi dan dapat memberikan wawasan mengenai aspek-aspek seperti kematangan ekonomi, tingkat pendidikan, norma sosial, dan prioritas individu dalam hal karir dan pendidikan sebelum memasuki pernikahan. Angka ini juga berguna dalam merencanakan

dan mengimplementasikan kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

### 2.3.3. Angka Perceraian

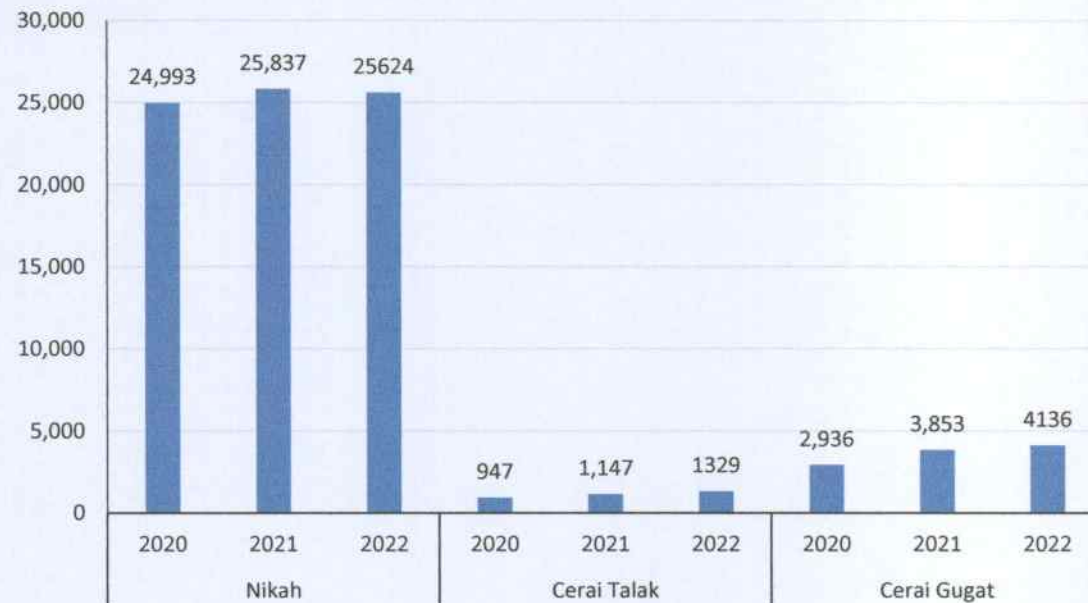
Data menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang lebih besar bagi wanita di Jambi untuk mengajukan gugatan cerai dibandingkan dengan pria yang mengajukan talak. Hal ini bisa menunjukkan beberapa kemungkinan, seperti kesadaran yang lebih tinggi di kalangan wanita tentang hak-hak mereka, atau mungkin adanya masalah sosial yang membuat wanita lebih memilih untuk mengakhiri pernikahan.



**Gambar 2. 50.** Persentase Data Nikah, Cerai Talak, dan Cerai Gugat, Provinsi Jambi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Meskipun jumlah nikah masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perceraian, proporsi perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) menunjukkan bahwa terdapat isu-isu dalam stabilitas pernikahan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan Gambar 2.50 menunjukkan jumlah nikah mencakup mayoritas kasus dengan persentase sekitar 83 %, menunjukkan bahwa sebagian besar individu di Jambi memilih untuk menikah dibandingkan dengan bercerai, cerai talak mempunyai persentase terkecil dari total kasus, yaitu sekitar 4%, menandakan bahwa inisiasi perceraian oleh suami (talak) relatif rendah dibandingkan dengan cerai gugat. Cerai Gugat dengan persentasenya mencapai 13%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak, menunjukkan bahwa lebih banyak wanita di Jambi yang menginisiasi perceraian dibandingkan dengan pria.



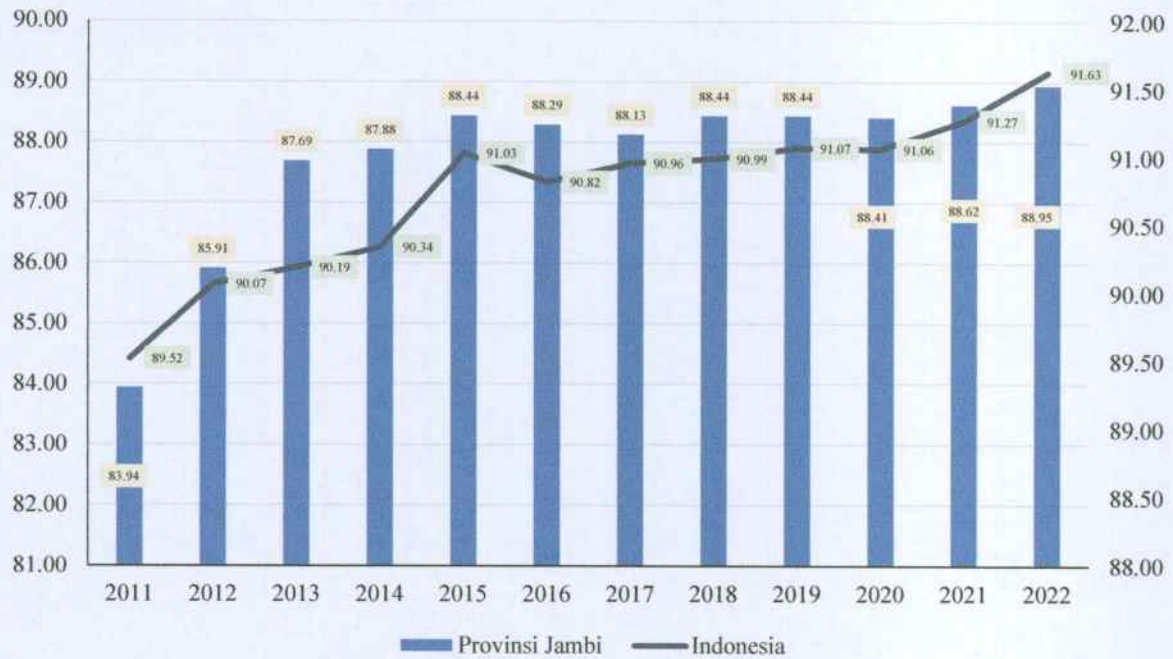
**Gambar 2. 51.** Perkembangan Data Nikah, Cerai Talak, dan Cerai Gugat, Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.51 menunjukkan kenaikan jumlah kasus nikah sebesar 25,837 merupakan angka yang dominan dibandingkan dengan kasus perceraian, menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang memilih untuk menikah. Cerai Talak dengan jumlah kasus cerai talak 1,329 lebih rendah dibandingkan dengan cerai gugat. Cerai talak adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam, di mana suami menginisiasi proses perceraian. Cerai gugat dengan jumlah kasus cerai gugat 4,136 lebih tinggi daripada cerai talak, menunjukkan bahwa ada kecenderungan lebih besar bagi istri untuk menginisiasi proses perceraian dibandingkan dengan suami.

#### **2.3.4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Meskipun terdapat perbaikan dalam IPG Provinsi Jambi, perbandingan dengan IPG Nasional menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih memiliki IPG yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada Tahun 2022, IPG Provinsi Jambi adalah 88,95, sedangkan IPG Indonesia mencapai angka 91,63, menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam beberapa Tahun tertentu, seperti pada Tahun 2014 dan 2016, fluktuasi tersebut tidak mengganggu tren umum peningkatan kesetaraan gender yang terjadi di Provinsi Jambi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

**Gambar 2. 52.** Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2022

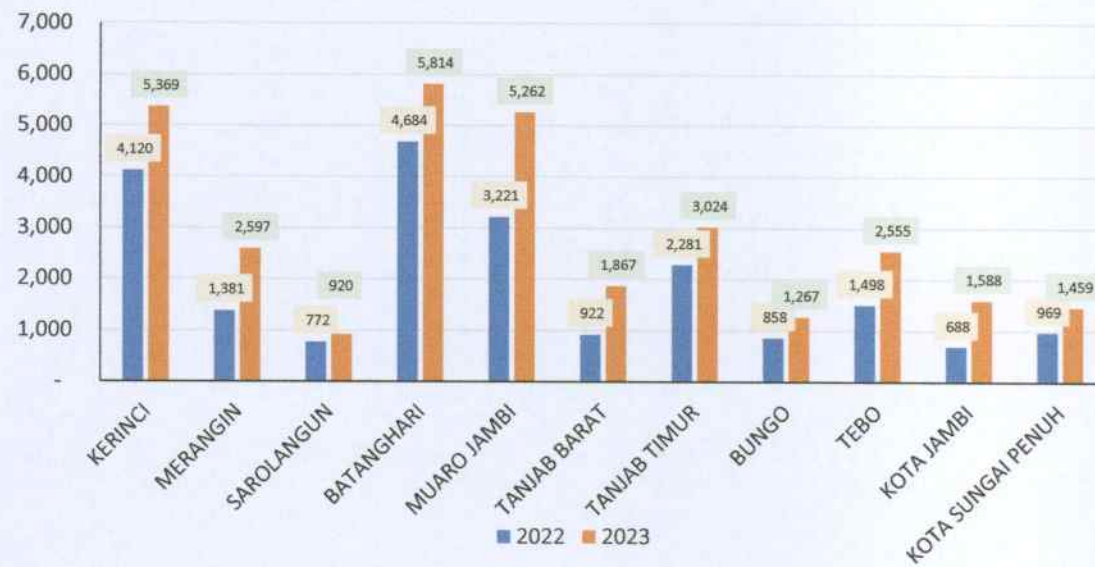
Berdasarkan Gambar 2.52 menunjukkan data yang diamati, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan peningkatan secara bertahap dari Tahun ke Tahun. Meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam beberapa Tahun tertentu, namun secara keseluruhan, terlihat adanya peningkatan yang stabil dari nilai IPG Provinsi Jambi, yang awalnya sebesar 83,94 pada Tahun 2011, meningkat menjadi 88,95 pada Tahun 2022.

Meskipun terjadi peningkatan kesetaraan gender di Provinsi Jambi dari Tahun 2011 hingga 2022, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi masih berada di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna mempercepat peningkatan kesetaraan gender di Provinsi Jambi. Upaya-upaya ini mungkin meliputi investasi dalam pendidikan dan kesehatan yang lebih merata, kebijakan yang mendukung partisipasi ekonomi perempuan, serta advokasi untuk mengatasi ketimpangan gender dalam akses dan kesempatan.

### **2.3.5. Persentase Keluarga memiliki balita mengikuti kegiatan BKB**

Distribusi jumlah keluarga peserta BKB menunjukkan variasi yang signifikan antara daerah-daerah. Batanghari memiliki jumlah peserta terbanyak dengan 4.684 keluarga, diikuti oleh Kerinci dengan 4.120

keluarga, sementara Kota Jambi memiliki jumlah peserta terendah dengan hanya 688 keluarga.



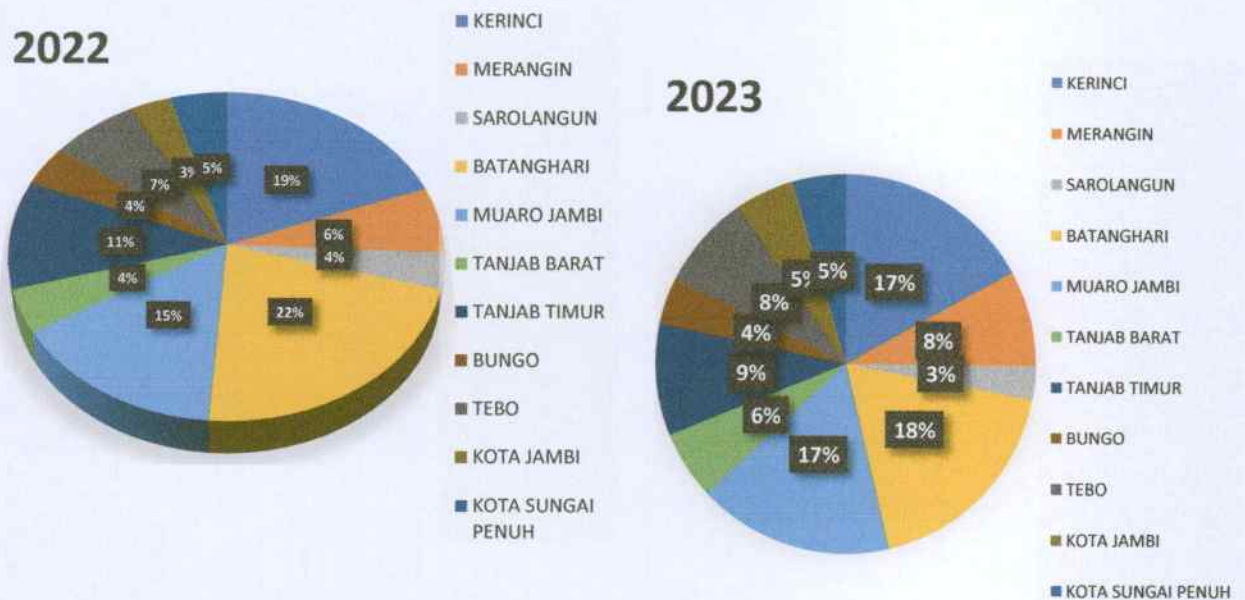
**Gambar 2. 53.** Jumlah Keluarga Anggota BKB, menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi

Sumber: Statistik Rutin BKKBN, 2024

Berdasarkan Gambar 2.53 menunjukkan Data Bina Keluarga Balita (BKB) Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan pada Tahun 2022 hingga 2023. Secara spesifik, terdapat peningkatan jumlah balita yang terdaftar di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tersebut. Kabupaten Kerinci, Batanghari, dan Muaro Jambi menunjukkan jumlah balita yang paling signifikan, dengan peningkatan masing-masing dari 4.120 menjadi 5.369, 4.684 menjadi 5.814, dan 3.221 menjadi 5.262. Meskipun demikian, terdapat juga peningkatan yang cukup besar di beberapa kabupaten/kota lainnya seperti Merangin, Tanjab Barat, dan Tanjab Timur. Selain itu, secara keseluruhan, jumlah balita yang terdaftar di Provinsi Jambi meningkat dari 21.394 pada Tahun 2022 menjadi 31.722 pada Tahun 2023.

Variasi ini mungkin mencerminkan perbedaan dalam tingkat kesadaran dan akses terhadap program BKB di setiap daerah, serta perbedaan dalam ketersediaan sumber daya dan infrastruktur kesehatan. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program BKB di setiap daerah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada balita dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan mereka secara optimal.

Persentase keluarga anggota BKB menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2023 diberikan pad Gambar 2.55 berikut:



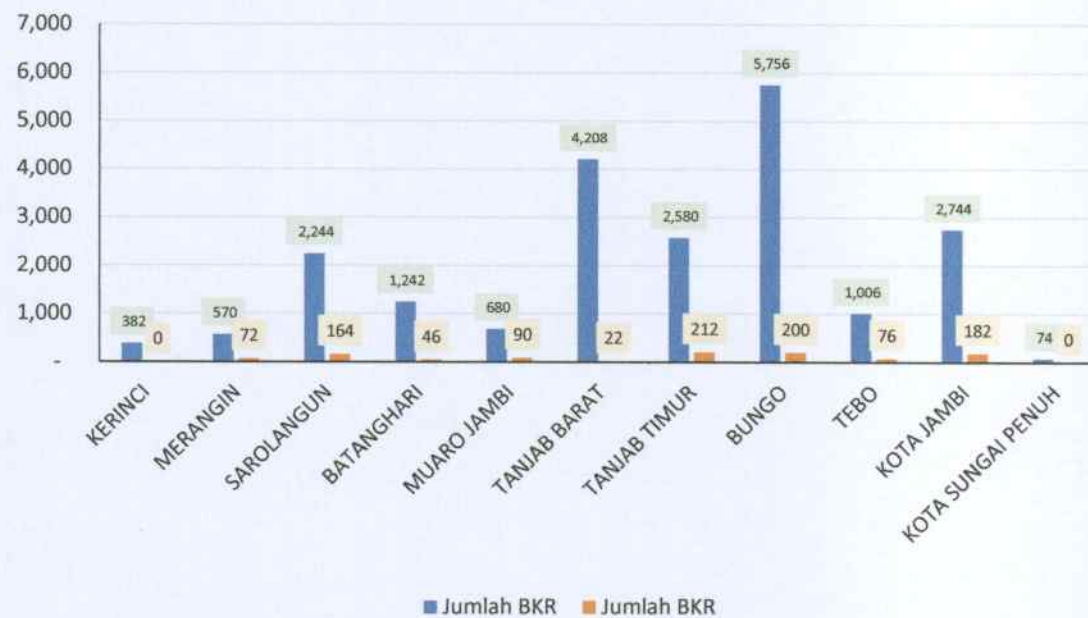
**Gambar 2. 54.** Persentase Keluarga Anggota BKB, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2023  
 Sumber : Siga BKKBN 2023

Berdasarkan Gambar 2.55 menunjukkan total jumlah keluarga peserta BKB pada Tahun 2022 menunjukkan Batanghari menonjol sebagai daerah dengan presentase tertinggi dari jumlah keluarga peserta Bina Keluarga Balita (BKB), mencapai sekitar 21.87% dari total, menandakan tingkat partisipasi yang signifikan dalam program tersebut. Sementara itu, Kerinci menyusul dengan presentase sekitar 19.25%, mengindikasikan dukungan kuat dari masyarakat terhadap program BKB di wilayah tersebut. Di sisi lain, Muaro Jambi juga memberikan kontribusi yang cukup besar, mencapai 15.04% dari total, yang menunjukkan tingginya tingkat partisipasi dalam BKB di wilayah tersebut. Adapun daerah lainnya menampilkan presentase yang bervariasi antara 3.21% hingga 10.66%, menyoroti perbedaan dalam tingkat kesadaran dan partisipasi terhadap program BKB di setiap daerah. Selanjutnya Tahun 2023 menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, Daerah Batanghari menonjol sebagai wilayah dengan presentase tertinggi dari jumlah keluarga peserta Bina Keluarga Balita (BKB), menyumbang sekitar 18.00% dari total. Diikuti oleh Kerinci dan Muaro Jambi dengan presentase masing-masing sekitar 16.62% dan 16.27%, ini menandakan tingkat partisipasi yang signifikan dalam program tersebut. Sementara itu, daerah lainnya menunjukkan presentase yang

bervariasi antara 2.85% hingga 9.35%, mengindikasikan perbedaan dalam tingkat partisipasi dan kesadaran akan program BKB di masing-masing wilayah. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan anak untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam memperluas cakupan dan manfaat program BKB di seluruh wilayah.

### 2.3.6. Persentase Keluarga memiliki Remaja mengikuti BKR

Partisipasi dalam Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Jambi mengalami variasi dari Tahun 2022 ke 2023, dengan sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan perubahan dalam jumlah peserta.



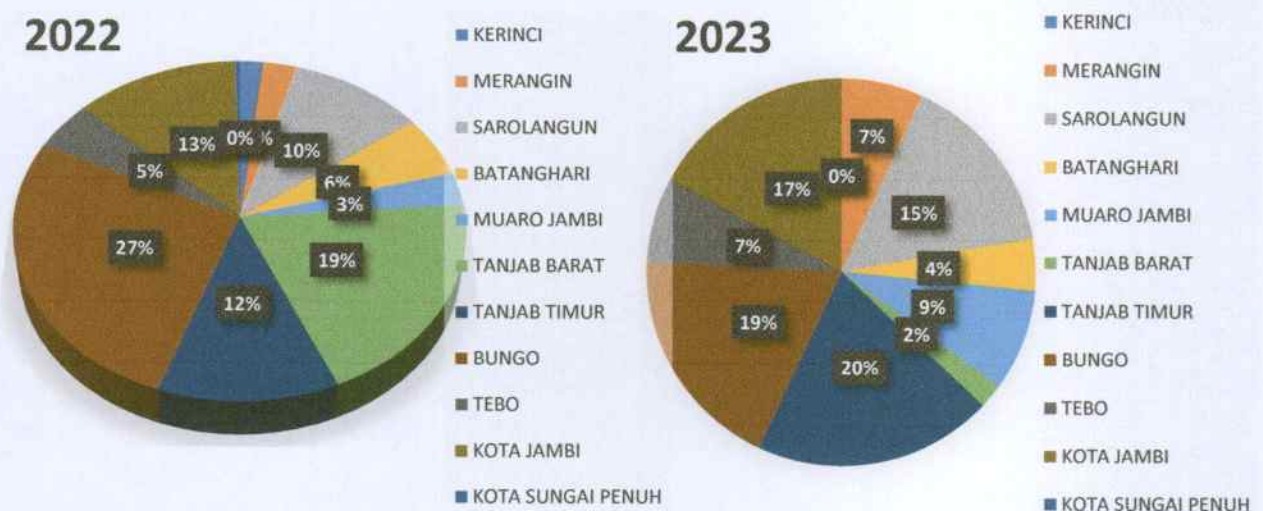
**Gambar 2. 55.** Jumlah Keluarga Yang Punya Remaja Ikut BKR Provinsi Jambi

Sumber : SigaBKKBN 2023

Berdasarkan Gambar 2.55 menunjukkan Kabupaten Bungo menjadi yang memiliki partisipasi tertinggi dalam program Bina Keluarga Remaja (BKR) baik pada Tahun 2022 maupun 2023, dengan jumlah partisipan mencapai 5,756 pada Tahun 2022 dan 200 pada Tahun 2023. Sementara itu, Tanjab Timur mengalami peningkatan yang signifikan dari 2,580 menjadi 212 partisipan. Di sisi lain, Kerinci dan Kota Sungai Penuh tidak memiliki partisipan BKR pada Tahun 2023, mengindikasikan potensi masalah dalam implementasi program di daerah tersebut. Terdapat pula beberapa daerah yang mengalami

penurunan partisipasi, seperti Merangin yang turun dari 570 menjadi 72, dan Sarolangun dari 2,244 menjadi 164. Secara keseluruhan, terdapat variasi dalam partisipasi BKR dari Tahun 2022 ke 2023 di sebagian besar kabupaten/kota di Jambi, yang menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi program untuk merumuskan strategi perbaikan yang sesuai. Untuk menganalisis distribusi Bina Keluarga Remaja (BKR) di Provinsi Jambi pada Tahun 2022, presentase masing-masing kabupaten/kota dapat dihitung dengan membagi jumlah BKR di setiap wilayah dengan total jumlah BKR di seluruh provinsi dan mengalikannya dengan 100%.

Selanjutnya Gambar 2.57 memberikan informasi mengenai keluarga yang punya remaja yang ikut BKR menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2022-2023.



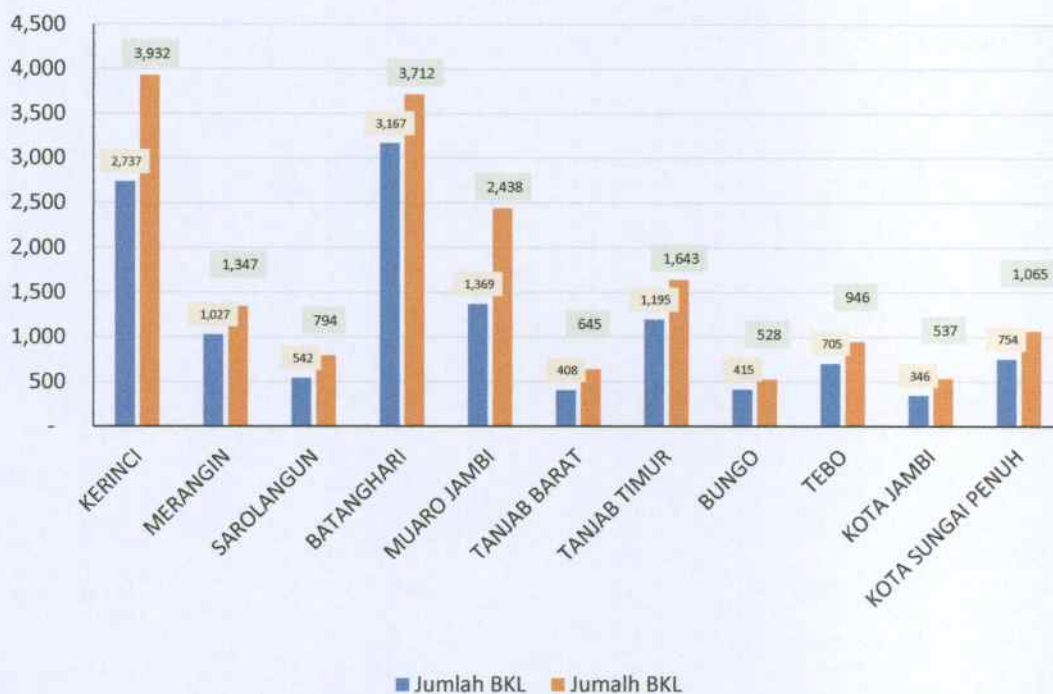
**Gambar 2. 56.** Persentase Keluarga Yang Punya Remaja Ikut BKR Provinsi Jambi  
Sumber : Siga BKKBN 2023

Berdasarkan Gambar 2.57 menunjukkan menunjukkan variasi signifikan dalam kontribusi masing-masing daerah terhadap jumlah keseluruhan BKR, dengan Kabupaten Bungo memiliki persentase tertinggi sebesar 5.756%, diikuti oleh Tanjab Barat dengan 4.208% dan Sarolangun dengan 2.244%. Sementara itu, Kota Sungai Penuh memiliki kontribusi terendah dengan hanya 0.249%. Analisis ini memberikan gambaran tentang distribusi BKR di Provinsi Jambi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan yang

lebih terfokus dan program pembangunan remaja di masing-masing daerah.

### 2.3.7. Persentase Keluarga yang punya Lansia Ikut BKL Provinsi Jambi

Strategi yang dapat diambil berdasarkan analisis perubahan jumlah keluarga anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 adalah meningkatkan upaya promosi dan edukasi mengenai manfaat program BKL di setiap daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi yang lebih luas, seminar, dan lokakarya yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program BKL yang sudah berjalan dan mengidentifikasi area-area di mana peningkatan lebih lanjut dapat dilakukan, seperti peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan bagi keluarga anggota BKL, pelatihan bagi para relawan, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat pelayanan bagi populasi lansia.



**Gambar 2. 57.** Jumlah keluarga anggota BKL, menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi

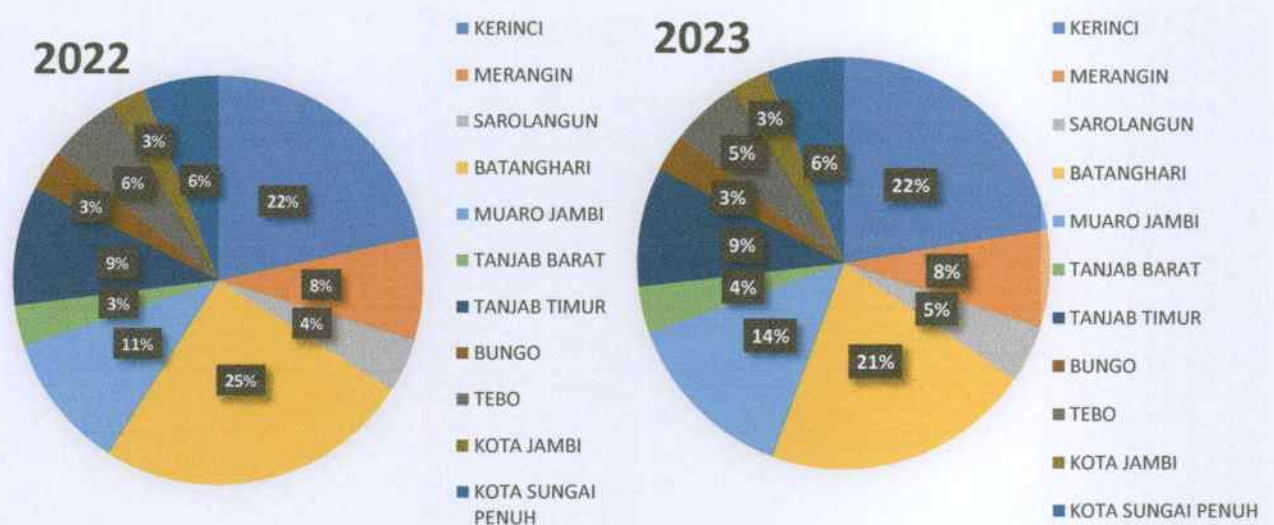
Sumber : Siga BKKBN 2023

Berdasarkan Gambar 2.57 menunjukkan analisis perubahan jumlah keluarga anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) dari Tahun 2022

ke Tahun 2023 mengungkapkan peningkatan yang konsisten di seluruh daerah yang diamati. Secara khusus, terlihat bahwa di Kerinci, jumlah keluarga anggota BKL meningkat sebesar 1.195, diikuti oleh Merangin dengan peningkatan sebesar 320, dan Sarolangun dengan peningkatan sebesar 252. Peningkatan yang signifikan juga terlihat di daerah Batanghari dengan kenaikan sebesar 545, Muaro Jambi sebesar 1.069, dan Tanjab Timur sebesar 448. Begitu juga dengan daerah lainnya, seperti Tanjab Barat, Bungo, Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh, yang semuanya menunjukkan peningkatan jumlah keluarga anggota BKL yang mengindikasikan tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap program BKL serta meningkatnya perhatian terhadap populasi lansia di wilayah-wilayah tersebut.

Variasi presentase yang signifikan antara daerah-daerah tersebut menunjukkan distribusi yang cukup beragam dari anggota BKL di tingkat regional, mencerminkan kebutuhan yang berbeda-beda dalam pelayanan dan perhatian terhadap populasi lansia di masing-masing wilayah.

Selanjutnya persentase keluarga anggota BKL menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2023 diberikan pada Gambar 2.58 berikut:



**Gambar 2. 58.** Presentase keluarga anggota BKL, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022-2023  
 Sumber : Siga BKKBN 2023

Berdasarkan Gambar 2.58 menunjukkan Tahun 2022 presentase di atas, dapat dilihat bahwa wilayah Batanghari memiliki presentase tertinggi dari total anggota BKL, yaitu sekitar 24.27%. Sementara itu, wilayah dengan presentase terendah adalah Kota Jambi dengan sekitar 2.65%. Berdasarkan analisis presentase keluarga anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) di berbagai daerah pada Tahun 2023, ditemukan bahwa daerah Kerinci dan Batanghari memiliki presentase tertinggi, masing-masing sekitar 22.39% dan 21.13% dari total jumlah keluarga anggota BKL. Disisi lain, daerah Bungo, Tanjab Barat, dan Kota Jambi menunjukkan presentase terendah, yakni sekitar 3% dari total.

### 2.3.8. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting mengacu pada proporsi anak-anak yang tinggi badannya lebih pendek dari standar yang seharusnya untuk usia mereka, yang merupakan indikasi dari kekurangan gizi kronis. Stunting adalah hasil dari nutrisi yang tidak memadai selama periode yang lama, sering kali dipengaruhi oleh kekurangan akses yang berkelanjutan ke makanan bergizi, infeksi berulang, dan kondisi lingkungan yang buruk.

Secara umum, data menunjukkan pola penurunan yang signifikan dalam tingkat prevalensi stunting di beberapa daerah di Provinsi Jambi pada Tabel 2.25 berikut:

**Tabel 2. 25.** Indikator Prevalensi Stunting Per Kab/Kota Se Provinsi Jambi, 2018-2022

No	Wilayah	2018	2019	2021	2022
		Riskesdas 2018	SSGBI 2019	SSGI 2021	SSGI 2022
1.	Kerinci	42,35	33,85	26,7	24,2
2.	Merangin	34,97	15,37	19,7	14,5
3.	Sarolangun	18,83	19,06	21,4	16,8
4.	Batang Hari	32,76	27,32	24,5	26,3
5.	Muaro Jambi	20,68	8,41	27,2	18,6
6.	Tanjung Jabung Timur	43,99	21,81	19,8	9,9
7.	Tanjung Jabung Barat	40,88	20,05	25,6	22,5
8.	Tebo	20,74	27,57	22,9	15,4
9.	Bungo	33,03	30,13	26,2	25,0
10.	Kota Jambi	26,22	18,63	17,4	14,0
11.	Kota Sungai Penuh	35,75	25,66	25,0	26,0
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>30,12</b>	<b>21,03</b>	<b>22,4</b>	<b>18,0</b>
<b>Nasional</b>		<b>30,79</b>	<b>27,67</b>	<b>24,4</b>	<b>21,6</b>

Sumber : BKKBN 2023

Berdasarkan Tabel 2.25 menunjukkan Batang Hari sendiri mengalami penurunan dari 32.76% pada Tahun 2018 menjadi 26.30% pada Tahun 2022. Di sisi lain, Bungo menunjukkan fluktuasi dengan penurunan dari 20.74% pada Tahun 2018 menjadi 15.40% pada Tahun 2022 setelah mengalami kenaikan pada Tahun 2019. Kerinci juga mengalami penurunan yang signifikan dari 42.35% pada Tahun 2018 menjadi 24.20% pada Tahun 2022. Kota Jambi mencatat penurunan yang cukup stabil dari 26.22% pada Tahun 2018 menjadi 14.00% pada Tahun 2022. Sementara Kota Sungai Penuh menunjukkan fluktuasi, namun secara keseluruhan mengalami penurunan dari 35.75% pada Tahun 2018 menjadi 26.00% pada Tahun 2022. Terakhir, Merangin juga mengalami penurunan yang signifikan dari 34.97% pada Tahun 2018 menjadi 14.50%. Meskipun fluktuasi terjadi di beberapa daerah, penurunan secara keseluruhan menandakan potensi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat dalam mengatasi masalah kebutaan di wilayah tersebut.

### **2.3.9. Persentase Keluarga Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim**

Persentase keluarga dengan jumlah penduduk miskin ekstrim mengukur proporsi rumah tangga di suatu wilayah yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini didefinisikan berdasarkan batasan pendapatan atau konsumsi yang sangat rendah, di bawah ambang batas minimum yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Menentukan persentase keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim juga membantu dalam menargetkan intervensi pembangunan dan bantuan sosial yang spesifik. Ini penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan global, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengutamakan pengentasan kemiskinan

Tabel 2.26 memberikan persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrim Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2022.

**Tabel 2. 26.** Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim Kab/ Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2021 - 2022

<b>Wilayah</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
----------------	-------------	-------------

	<b>Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (dlm 000)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (PO)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (dlm 000)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (PO)</b>
Kerinci	1,52	0,64	4,13	1,72
Merangin	5,67	1,46	3,7	0,94
Sarolangun	2,54	0,83	5,28	1,71
Batang Hari	4,12	1,52	4,79	1,76
Muaro Jambi	1,86	0,41	2,35	0,51
Tanjung Jabung Timur	6,85	3,19	3,62	1,69
Tanjung Jabung Barat	9,57	2,85	5,58	1,64
Tebo	3,94	1,11	2,65	0,74
Bungo	2,35	0,62	3,61	0,94
Kota Jambi	7,96	1,32	6,56	1,08
Kota Sungai Penuh	0,85	0,96	0,14	0,15
Provinsi Jambi	47,23	1,3	42,41	1,16

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*

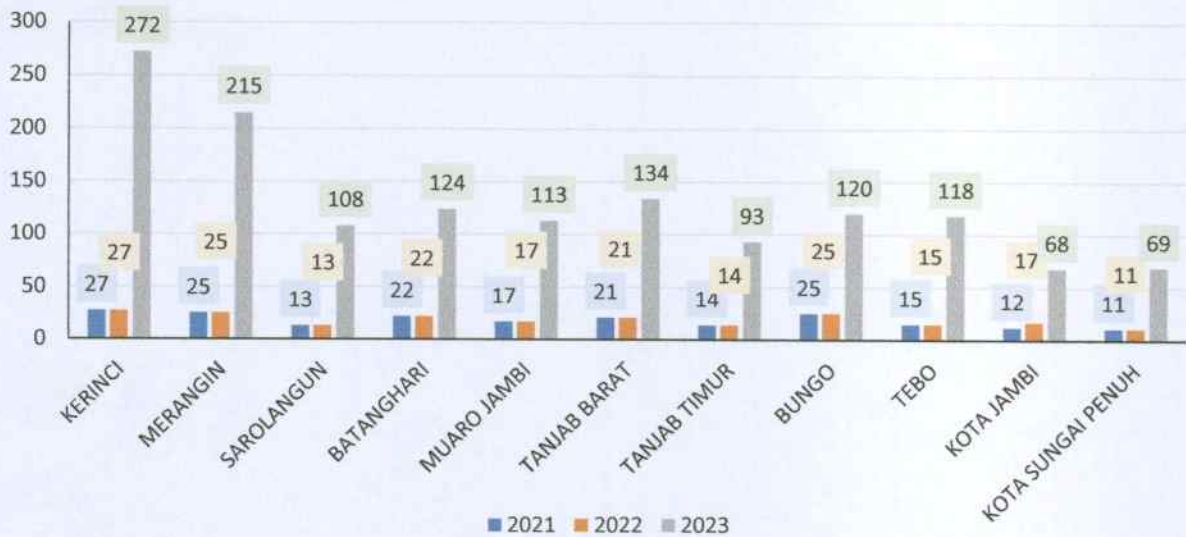
Berdasarkan Tabel 2.25 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi untuk tahun 2021 dan 2022. Penduduk miskin ekstrem di sini diukur dalam ribuan (000) dan sebagai persentase (PO) dari total penduduk. Pada tahun 2021, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi di antara daerah lainnya dengan 3,19%, diikuti oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 2,85%, dan Kabupaten Batang Hari dengan 1,52%. Kota Sungai Penuh memiliki persentase penduduk miskin ekstrem terendah di tahun yang sama dengan 0,96%. Bergerak ke tahun 2022, beberapa kabupaten mengalami kenaikan dalam jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem, seperti Kabupaten Kerinci yang meningkat dari 0,64% menjadi 1,72% dan Kabupaten Sarolangun dari 0,83% menjadi 1,71%. Sementara itu, Kabupaten Merangin dan Kota Jambi menunjukkan penurunan dalam kedua indikator tersebut. Secara keseluruhan, pada tingkat provinsi, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 47,23 ribu pada tahun 2021 menjadi 42,41 ribu pada tahun 2022, dan persentase penduduk miskin ekstrem juga turun dari 1,3% menjadi 1,16%.

Data ini memberikan gambaran tentang tantangan kemiskinan yang dihadapi oleh penduduk di Provinsi Jambi dan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menargetkan dan mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan dan intervensi sosial ekonomi. Fokus pada pengurangan kemiskinan ekstrem adalah krusial dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup warga. Pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 280,68 ribu jiwa turun sebesar 1,11 persen dari tahun 2022 di bulan September yaitu, sebesar 283,82 ribu jiwa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 sebesar 73,73 meningkat 0,62 persen poin dari tahun 2022. IPM 2020-2023 dihitung menggunakan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) hasil Long Form SP2020 (LF SP2020). IPM 2023 yang menggunakan UHH hasil SP2010 masih tersedia dan dapat diakses pada website BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Provinsi Jambi

#### **2.3.10. Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Jambi**

Secara umum, terlihat peningkatan jumlah angka dari Tahun ke Tahun di sebagian besar kabupaten/kota Kampung KB. Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) di Provinsi Jambi mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Program KKB bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis bagi keluarga di kawasan pedesaan.

Gambar 2.59 memberikan jumlah kampung KB menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2023.



**Gambar 2. 59.** Kampung KB Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021-2023

Sumber : Website Kampung KB BKKBN

Berdasarkan Gambar 2.59 menunjukkan peningkatan signifikan pada beberapa kabupaten/kota, seperti Kerinci yang jumlahnya melonjak dari 27 pada Tahun 2022 menjadi 272 pada Tahun 2023, serta Merangin yang naik dari 25 menjadi 215 dalam periode yang sama. Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota menunjukkan stabilitas dalam jumlah angka mereka, Seperti Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Bungo, dan Tebo, yang jumlah angkanya relatif tetap dari Tahun ke Tahun. Meskipun mayoritas wilayah mengalami peningkatan, terdapat juga penurunan jumlah angka, seperti yang terjadi di Kota Jambi yang mengalami penurunan dari 17 pada Tahun 2022 menjadi 68 pada Tahun 2023. Terdapat beberapa perubahan yang mungkin tidak terduga, seperti kenaikan yang signifikan di Kerinci dan Merangin, serta penurunan yang cukup besar di Kota Jambi. Peningkatan KKB dapat tercermin dalam berbagai indikator, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, serta peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

### 2.3.11. Persentase Rumah Layak Huni

Persentase rumah layak huni adalah indikator yang mengukur proporsi rumah atau unit hunian dalam suatu wilayah yang memenuhi standar tertentu untuk dihuni dengan layak. Standar ini biasanya mencakup aspek-aspek seperti kekokohan bangunan, ketersediaan

fasilitas dasar (seperti air bersih, sanitasi, dan ventilasi yang memadai), keamanan, dan kenyamanan untuk penghuninya.

**Tabel 2. 27.** Persentase Rumah Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023
		Susenas 2020	Susenas 2021	Susenas 2022	Susenas 2023
1.	Kerinci	63,77	53,50	54,98	55,20
2.	Merangin	53,30	49,62	35,38	43,96
3.	Sarolangun	55,95	56,96	59,32	57,89
4.	Batang Hari	62,52	56,81	64,41	64,98
5.	Muaro Jambi	63,16	67,89	58,59	56,92
6.	Tanjung Jabung Timur	54,73	67,03	66,97	65,67
7.	Tanjung Jabung Barat	51,12	55,91	55,08	61,67
8.	Tebo	53,96	60,58	64,98	65,51
9.	Bungo	48,55	54,57	58,09	56,77
10.	Kota Jambi	85,95	82,68	78,32	91,89
11.	Kota Sungai Penuh	73,06	67,49	68,17	72,07
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>61,41</b>	<b>62,54</b>	<b>60,85</b>	<b>64,12</b>
<b>Nasional</b>		<b>59,54</b>	<b>60,90</b>	<b>60,66</b>	<b>63,15</b>

Sumber: Siperindu, Susenas 2020, 2021, 2022, 2023

Berdasarkan Tabel 2.27 menunjukkan persentase rumah layak huni dari tahun 2020 hingga 2023 di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Angka-angka ini memberikan gambaran tentang perubahan dalam kondisi dan kualitas perumahan di masing-masing daerah sepanjang waktu. Kabupaten Kerinci mengalami penurunan persentase rumah layak huni dari 63,77% pada tahun 2020 menjadi 53,50% pada tahun 2021, namun terlihat sedikit peningkatan setelah itu, mencapai 55,20% pada tahun 2023. Kabupaten Merangin menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2022 dengan hanya 35,38% rumah yang layak huni, meskipun ada peningkatan pada tahun 2023 menjadi 43,96%. Kabupaten Sarolangun, Batanghari, dan Bungo secara umum menunjukkan tren peningkatan dalam kualitas perumahan yang layak huni selama periode tersebut. Kota Jambi memperlihatkan penurunan di tahun 2022 tetapi mengalami lonjakan menjadi 91,89% pada tahun

2023, menunjukkan peningkatan besar dalam kualitas perumahan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur juga menunjukkan fluktuasi dengan angka yang umumnya meningkat pada akhir periode. Kabupaten Tebo dan Kota Sungai Penuh menunjukkan variasi namun umumnya tetap di kisaran yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pada tingkat provinsi, Provinsi Jambi mengalami penurunan persentase rumah layak huni di tahun 2022 namun menunjukkan pemulihan pada tahun 2023 menjadi 64,12%. Tingkat nasional juga mengalami fluktuasi serupa, tetapi terlihat adanya peningkatan pada tahun 2023 menjadi 63,15%.

Berdasarkan Tabel 2.28 menunjukkan bahwa Provinsi Jambi memiliki program konseling remaja dan keterlibatan usia muda. Rentang usia 15-19 tahun menjadi yang paling sering terlibat dalam konseling individu, diikuti rapat oleh kelompok usia 20-24 tahun, menandakan fase transisional ini sebagai periode penting untuk dukungan psikososial. Namun, konseling kelompok mencuri perhatian, menarik partisipasi yang lebih tinggi dan mencerminkan preferensi remaja akan interaksi sosial dan pembelajaran kolektif. Distribusi partisipasi yang merata antara laki-laki dan perempuan dalam sesi kelompok menunjukkan keberhasilan program dalam menghapus stigma dan membangun keterbukaan. Khususnya di Tanjung Jabung Barat, antusiasme untuk konseling kelompok mencatat angka yang mengesankan, mengindikasikan keefektifan inisiatif lokal. Dengan total 307 remaja laki-laki dan 324 perempuan yang mendapat konseling individu serta 243 laki-laki dan 289 perempuan dalam konseling kelompok, jelas bahwa kegiatan PIK Remaja telah menempatkan fondasi yang kuat untuk masa depan yang sehat dan berencana bagi generasi muda Jambi.

1				
2	Merangin	14	12	1
3	Sarolangun	25	22	2
4	Batanghari	18	26	1
5	Muaro Jambi	24	14	2
6	Tanjung Jabung Timur	54	57	1
7	Tanjung Jabung Barat	54	58	2
8	Bungo	52	64	2
9	Tebo	18	21	5
10	Kota Jambi	46	49	2
11	Kota Sungai Penuh	1	-	1
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>307</b>	<b>324</b>	<b>12</b>

Sumber : Siga BKKBN Tahun 2024

## **2.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk (pilar IV)**

### **2.4.1. Persebaran Penduduk**

Masalah kependudukan di Provinsi Jambi, selain kualitas penduduk dan kuantitas penduduk yang pertumbuhannya masih di atas nasional, juga masalah persebaran penduduk yang belum merata antar kabupaten/Kota maupun antar desa dan Kota. Kesenjangan Pembangunan antarwilayah maupun perbedaan potensi antara kabupaten/kota merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan persebaran penduduk. Kesenjangan tersebut akan mempengaruhi pola, arah, dan trend mobilitas penduduk. Kecenderungan yang terjadi di Provinsi Jambi adalah arus mobilitas penduduk berasal dari Kabupaten yang fasilitasnya belum memadai seperti fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan fasilitas ekonomi bergerak menuju Kota Jambi yang lebih lengkap dan maju fasilitasnya. Disisi lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, pusat pelayanan yang baru, pembentukan wilayah administrasi baru dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor tersebut turut menjadi penentu arah, arus, dan volume mobilitas penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

**Tabel 2. 29.**Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Per Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020 (Jiwa)

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	235.01 4	235.80 0	236.78 2	237.79 1	238.70 0	250.30 0
Merangin	365.29 9	372.20 0	377.90 5	383.48 0	388.90 0	354.10 0
Sarolangun	277.12 4	284.20 0	290.23 1	295.98 5	301.90 0	290.10 0
Batang Hari	263.03 0	263.90 0	266.97 1	269.96 6	272.90 0	301.70 0
Muaro Jambi	396.44 9	410.34 0	421.17 9	432.30 5	443.40 0	402.00 0
Tanjung Jabung Timur	213.27 4	215.32 0	216.77 7	218.41 3	220.00 0	229.80 0
Tanjung Jabung Barat	309.80 2	316.81 0	322.52 7	328.34 3	333.90 0	317.50 0
Tebo	331.37 0	337.02 0	343.00 3	348.76 0	354.50 0	337.70 0
Bungo	342.83 4	351.88 0	359.59 0	367.18 2	374.80 0	362.40 0
Kota Jambi	574.40 1	583.49 0	591.13 4	598.10 3	604.70 0	606.20 0
Kota Sungai Penuh	86.980	87.970	88.918	89.944	90.900	96.600
Provinsi Jambi	3.395.5 77	3.458.9 30	3.515.0 17	3.570.2 72	3.624.6 00	3.548.4 00

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Ket. GR = Pertumbuhan rata-rata (%)

Data Tabel 2.29 menunjukkan pada tahun 2015 , sebesar 574.404 jiwa atau sekitar 16,92 persen penduduk Provinsi Jambi ada di Kota Jambi dan sebesar 396.449 jiwa atau 11,68 persen ada di Kabupaten Muaro Jambi artinya sebesar 970.853 jiwa atau sekitar 28,60 persen atau sekitar sepertiga penduduk Provinsi Jambi berada di wilayah Kota Jambi dan hinterlandnya yaitu Kabupaten Muaro Jambi. Masalah persebaran penduduk ini sampai tahun 2020 tidak mengalami perubahan, karena persentase penduduk Provinsi Jambi yang tinggal di Kota Jambi meningkat menjadi 606.200 jiwa atau 17,08 persen dan 402.000 jiwa atau 11,33 persen berada di Kabupaten Muaro Jambi atau sebanyak 1.008.200 jiwa atau sebesar 28,41 persen berada di dua wilayah tersebut. Selanjutnya jika dilihat dari pertumbuhan

rata-rata kurun waktu 2015-2020 yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Batanghari sebesar 2,52 persen, kemudian yang terendah atau pertumbuhannya negative adalah Kabupaten Merangin yaitu menurun sebesar 0,62 persen. Sedangkan pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi kurun waktu tersebut hanya sebesar 0,88 persen.

**Tabel 2. 30.** Persentase Luas Daratan dengan Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Per Kabupaten/Kota Tahun 2015-2022

Kab/Kota	Persentase Luas Daratan (%)	Distribusi/Persebaran Penduduk (%)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	6,81	6,92	6,82	6,74	6,66	6,59	7,05	7,03	6,99
Merangin	15,33	10,76	10,76	10,75	10,74	10,73	9,98	9,92	9,85
Sarolangun	12,14	8,16	8,22	8,26	8,29	8,33	8,18	8,19	8,21
Batang Hari	11,30	7,75	7,63	7,60	7,56	7,53	8,50	8,56	8,63
Muaro Jambi	10,86	11,68	11,86	11,98	12,11	12,23	11,33	11,35	11,37
Tanjung Jabung Timur	10,19	6,28	6,23	6,17	6,12	6,07	6,48	6,46	6,45
Tanjung Jabung Barat	10,09	9,12	9,16	9,18	9,20	9,21	8,95	8,94	8,94
Tebo	9,54	9,76	9,74	9,76	9,77	9,78	9,52	9,51	9,50
Bungo	12,67	10,10	10,17	10,23	10,28	10,34	10,21	10,24	10,28
Kota Jambi	0,35	16,92	16,87	16,82	16,75	16,68	17,08	17,08	17,06
Kota Sungai Penuh	0,72	2,56	2,54	2,53	2,52	2,51	2,72	2,73	2,73
Provinsi Jambi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (Data diolah)

Pada Tabel 2.30 menunjukkan ditribusi penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Kabupaten Kota dikaitkan dengan persentase luas daratannya. Data menunjukkan Kabupaten yang sangat luas adalah Kabupaten Merangin sebesar 15,33 persen dari total luas daratan

Provinsi Jambi, dengan jumlah penduduk hanya 10,76 persen pada tahun 2015, kemudian distribusi jumlah penduduknya menurun menjadi 9,85 persen pada tahun 2022. Kondisi ini bertolak belakang dengan Kota Jambi, dimana luasnya hanya sebesar 0,35 persen dari total luas Provinsi Jambi pada tahun 2015, namun jumlah penduduknya mencapai 16,92 persen dan terus meningkat menjadi 17,06 persen pada tahun 2022. Kondisi ini juga dialami oleh Kota Sungai Penuh dengan luas hanya 0,72 persen dari luas Provinsi Jambi jumlah penduduknya mencapai 2,56 persen tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 2,73 persen pada tahun 2022.

Provinsi Jambi yang berbasis pada sektor pertanian, terutama sektor Perkebunan juga menentukan persebaran penduduk, karena daerah yang potensi sektor perkebunannya tinggi, mobilitas penduduk juga bergerak ke wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan distribusi penduduk pada tabel berikut ini. Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Merangin, Sarolangun yang sektor perkebunannya sangat luas, juga menjadi daerah tujuan para migran, Dimana persentase penduduk didaerah tersebut Sebagian besar bergerak disektor pertanian, terutama Perkebunan kelapa sawit dan karet. Pada table berikut dapat dilihat jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi selama periode 2015-2022.

Jika dilihat persebaran penduduk dengan persentase luas daratan masing-masing kabupaten/kota, sangat timpang dan butuh kebijakan, strategi dan penanganan yang lebih komprehensif untuk menangani masalah ketimpangan persebaran penduduk tersebut. Kebijakan yang baik dan didukung dengan program Pembangunan yang merata diharapkan daerah yang masih kecil persentase distribusi penduduknya dapat dibangun infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum yang lebih baik, sehingga dapat mendorong mobilitas penduduk ke daerah tersebut.

#### **2.4.2. Kepadatan Penduduk**

Tingkat kepadatan penduduk menjadi barometer penting dalam dinamika pembangunan kependudukan. Tantangan ini tak hanya berbicara tentang jumlah individu yang tinggal per unit area, tetapi juga

tentang distribusi sumber daya, akses ke layanan dasar, dan kualitas hidup. Kepadatan yang berlebihan dapat memberikan tekanan pada infrastruktur, lingkungan, dan sistem sosial-ekonomi, yang menuntut perencanaan yang matang dan adaptif.

Salah satu tantangan Pembangunan kependudukan kedepan yang perlu diperhatikan adalah masalah Tingkat kepadatan penduduk. Provinsi Jambi secara umum belum mengalami kepadatan penduduk yang perlu dikuatirkan, namun jika dilihat dari kaca mata Kabupaten/Kota, maka Kota Jambi menjadi salah satu wilayah harus mendapat perhatian yang serius, karena Tingkat kepadatannya sudah diatas 2.500 jiwa per Km. Demikian juga untuk Kota Sungai Penuh kedepan harus mengatur kebijakan distribusi penduduk dengan melakukan migrasi kedaerah yang masih memerlukan penduduk terutama yang potensi sektor pertaniannya tinggi. Persebaran atau distribusi penduduk yang lebih merata akan berdampak pada Tingkat kepadatan penduduk.

Secara terperinci, kepadatan penduduk Provinsi Jambi menurut kabupaten/kota Tahun 2015-2022, diberikan pada Tabel 2.31 berikut:

**Tabel 2. 31.**Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Per Kabupaten/Kota Tahun 2015-2022 (Jiwa/Km)

<b>Kab/Kota</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kerinci	71,00	71,30	71,57	75,05	75,54	76,12
Merangin	50,33	51,07	51,80	47,16	47,38	47,62
Sarolangun	48,79	49,76	50,75	48,77	49,36	50,11
Batang Hari	48,22	48,76	49,29	54,49	55,40	56,57
Muaro Jambi	79,14	81,23	83,32	75,54	76,44	77,58
Tanjung Jabung Timur	43,43	43,76	44,08	46,04	46,44	46,92
Tanjung Jabung Barat	65,24	66,42	67,55	64,23	64,86	65,63
Tebo	73,40	74,63	75,86	72,26	72,94	73,79
Bungo	57,94	59,17	60,40	58,40	59,17	60,16
Kota Jambi	3.429,6 5	3.470,0 8	3.508,3 5	3.517,0 6	3.551,6 5	3.594,5 3
Kota Sungai Penuh	251,35	254,25	256,9 5	273,07	276,37	280,51
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>71,75</b>	<b>72,88</b>	<b>73,99</b>	<b>72,43</b>	<b>73,18</b>	<b>74,12</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023 (diolah)

Dari Tabel 2.31 dapat dilihat wilayah yang paling tinggi Tingkat kepadatannya pada tahun 2015 adalah Kota Jambi yaitu sebesar 3.332,57 jiwa /Km, kemudian menyusul Kota Sungai Penuh sebesar 245,87 jiwa/Km. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 42,73 jiwa/Km dan Kabupaten Sarolangun sebesar 46,59 jiwa/Km. Kondisi tingkat kepadatan ini tidak mengalami

perubahan pada tahun 2022, Dimana Kota Jambi masih terpadat yaitu meningkat menjadi 3.594,53 jiwa/Km, kemudian Kota Sungai penuh juga meningkat sebesar 280,51 Jiwa/Km. Sedangkan yang terendah masih tetap Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 46,92 jiwa/Km dan Kabupaten Merangin sebesar 47,62 jiwa/Km. Jika dilihat dari perkembangan Tingkat kepadatan penduduk tersebut di kabupaten Kota di Provinsi Jambi, maka program kerja sama antar daerah, mutlak harus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan penduduk antar Kabupaten/Kota di Provinsi jambi.

#### **2.4.2. Migrasi (Mobilitas Penduduk)**

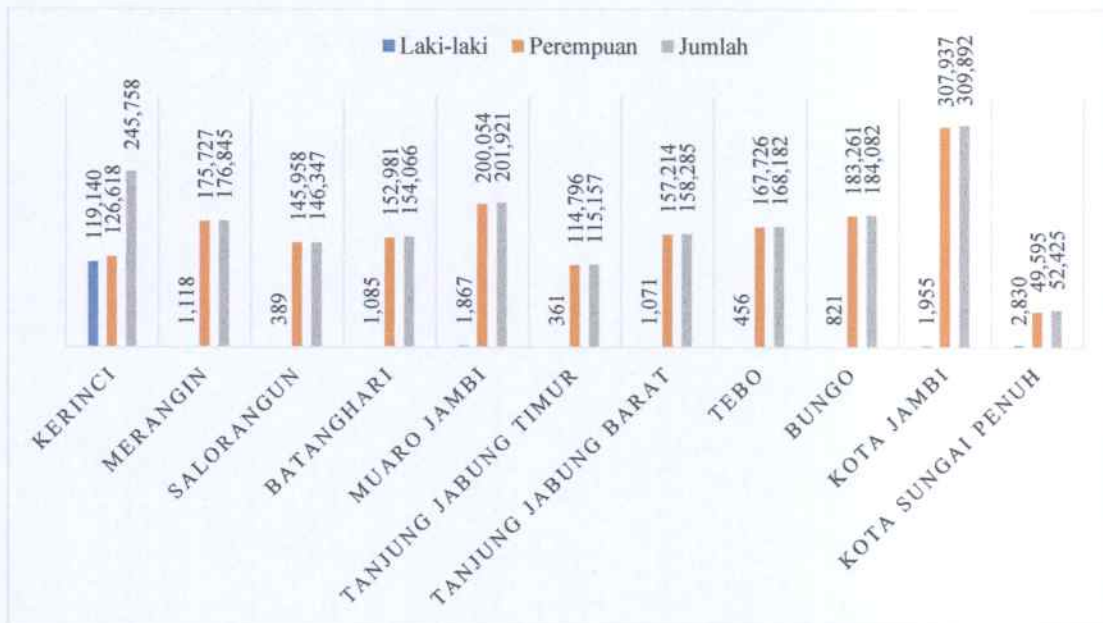
Migrasi merupakan perpindahan penduduk antarwilayah dalam jangka waktu tertentu, dengan melibatkan perubahan tempat tinggal. Arus migrasi yang dibahas dalam bagian ini adalah migrasi seumur hidup, migrasi risen, dan migrasi ulang-alik atau komuter. Data migrasi yang digunakan berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020).

Mobilitas Penduduk merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan penduduk, selain komponen kelahiran dan kematian penduduk. Mobilitas atau migrasi penduduk didefinisikan sebagai gerakan (*Movement*) penduduk yang melintasi daerah satu menuju daerah lain dalam periode waktu tertentu. Batasan wilayah yang umumnya digunakan di Indonesia adalah data administrative seperti Provinsi/kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga dukuh (BPS,2012). Sehingga gambaran tentang Mobilitas maupun pelaku mobilitas beserta karakteristiknya disuatu wilayah setidaknya mampu menjadi alat bantu para pelaku kebijakan maupun mereka yang peduli untuk memahami dinamika penduduk.

Ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan orang melakukan migrasi yaitu (1) factor-faktor yang terjadi di daerah asal, (2) factor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) rintangan-rintangan yang menghambat dan (\$) factor pribadi (Everest S. Lee, 2000). Dalam SUPAS 2020 mobilitas penduduk dibedakan menjadi mobilitas permanen dan non permanen. Yang dimaksud mobilitas permanen adalah migrasi seumur hidup, migrasi risen dan migrasi total. Sedangkan mobilitas non permanen adalah kegiatan ulang alik (*commuting*) dan mobilitas musiman.

### 2.4.2.1. Migrasi Seumur Hidup

Migrasi seumur hidup menggambarkan banyaknya penduduk yang tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang. Dalam migrasi seumur hidup tidak ada batasan waktu sehingga jumlahnya akan lebih besar dibandingkan dengan migrasi lainnya. Untuk mengetahui lebih jelas perkembangan jumlah migrasi seumur hidup di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar 2.60.



**Gambar 2. 60.** Jumlah Migrasi Seumur Hidup di Provinsi Jambi berdasarkan jenis kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2020

Sumber: Statistik Migrasi Provinsi Jambi Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan Gambar 2.60 menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2020 sebanyak 3.63 juta orang yang relative banyak melakukan migrasi adalah yang berasal dari kota Jambi yaitu sekitar 17,06 persen dan Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebesar 11,37 persen. Migrasi seumur hidup terendah terdapat di Kota Sungai Penuh yaitu sebesar 2,73 persen dan Kabupeten Kerinci yaitu sebesar 6,49 persen. Sedangkan untuk kabupaten lainnya cenderung mengalami migrasi sebesar 5 atau 6 persen. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah migrasi seumur hidup di Provinsi Jambi lebih didominasi oleh migrasi yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 50,93 persen dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 49,07 persen.

#### 2.4.2.2.Migrasi Risen

Migrasi Risen menggambarkan banyaknya penduduk dimana tempat tinggal lima tahun lalu berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Lima tahun yang lalu adalah kondisi pada bulan Mei tahun 2015.

**Tabel 2. 32.** Statistik Migrasi Provinsi Jambi Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

<b>Wilayah</b>	<b>Masuk</b>	<b>Keluar</b>	<b>Netto</b>
Kerinci	10.186	7.225	2.961
Merangin	4.485	9.291	-4806
Sarolangun	5.830	8.029	-2199
Batanghari	6.269	6.562	-293
Muaro Jambi	18.041	10.462	7.579
Tanjung Jabung Timur	5.425	4.961	464
Tanjung Jabung Barat	7.482	7.123	359
Tebo	6.799	7.523	-724
Bungo	7.018	9.211	-2.193
Kota Jambi	21.690	32.972	-11.282
Kota Sungai Penuh	4.781	2.401	2.380
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>98.007</b>	<b>105.759</b>	<b>-7.752</b>

Sumber : Statistik Migrasi Provinsi Jambi Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan Tabel 2.32 menunjukkan bahwa setiap wilayah di Provinsi Jambi memiliki dinamika migrasi yang berbeda, dengan beberapa wilayah mengalami migrasi netto positif, menunjukkan pertumbuhan populasi akibat imigrasi, sementara beberapa lainnya mengalami migrasi netto negatif, yang mengindikasikan kehilangan populasi. Wilayah seperti Muaro Jambi dan Kerinci menunjukkan angka migrasi netto positif yang signifikan, menunjukkan adanya faktor-faktor penarik yang mungkin berhubungan dengan peluang ekonomi, lingkungan yang stabil, atau fasilitas umum yang lebih baik.

Setiap wilayah di Provinsi Jambi memiliki dinamika migrasi yang berbeda, dengan beberapa wilayah mengalami migrasi netto positif, menunjukkan pertumbuhan populasi akibat imigrasi, sementara beberapa lainnya mengalami migrasi netto negatif, yang mengindikasikan kehilangan populasi. Kota Jambi dan Merangin

adalah contoh dari wilayah yang mengalami migrasi netto negatif yang tinggi, yang mungkin mencerminkan adanya isu ekonomi, sosial, atau kehidupan yang kurang menarik yang mendorong penduduk untuk pindah. Data migrasi seperti ini sangat penting untuk perencanaan kebijakan regional. Pemerintah daerah dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan, dan strategi penarikan investasi untuk menstimulasi pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Secara keseluruhan, Provinsi Jambi mengalami migrasi netto negatif, yang menunjukkan kecenderungan umum penduduk untuk pindah dari provinsi ini. Hal ini memerlukan tindakan strategis dari pihak berwenang untuk membalikkan tren ini melalui peningkatan kualitas hidup dan peluang ekonomi.

#### **2.4.2.3. Komuter**

Hugo (1981), dikutip dari Profil Komuter Hasil SUPAS 2005, membedakan komuter dengan melihat daerah tempat tinggalnya. Pertama *Autochthonous Commuter* adalah penduduk asli luar kota yang melakukan komutasi ke kota untuk bekerja disebabkan oleh faktor ekonomi juga didorong oleh faktor budaya. Di satu pihak mereka enggan tinggal jauh dari lingkungan keluarga dan sanak famili, di lain pihak mereka membutuhkan kota untuk mencari nafkah dan penghasilan yang baik. Dengan adanya transportasi yang semakin lancar mereka cenderung untuk tetap tinggal menetap di desa dan tiap hari pergi ke daerah tujuan untuk bekerja. Kedua *Allochthonous Commuter* adalah penduduk yang sebelumnya tinggal di kota namun karena alasan-alasan tertentu pindah dan menetap di luar kota, mereka tetap bekerja dengan melakukan komuter. *Allochthonous Commuter* merupakan bagian dari sub urbanisasi dimana terjadi perpindahan penduduk dari pusat kota ke pinggiran atau ke luar kota dengan tujuan untuk mendapatkan perumahan yang baik dengan biaya yang relatif murah dan lingkungan yang bersih dan sehat. Jumlah komuter di Provinsi Jambi terbanyak adalah yang berasal dari Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebanyak 12,44 persen, diikuti selanjutnya oleh Kota Sungai Penuh sebanyak 7,86 persen. Untuk Kota Jambi persentase komuter yang terjadi sebanyak 4,16 persen dan

dilanjutkan dengan komuter di Provinsi Jambi sebanyak 2,69 persen. Untuk presentase komuter yang terjadi di Provinsi Jambi hanya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur yang tidak terjadi komuter atau boleh dinyatakan bahwa presentase komuternya sebesar 0 persen.

Untuk persentase komuter berdasarkan Jenis kelamin yang terdapat di Provinsi Jambi diketahui bahwa jumlah komuter laki-laki cenderung leboh besar disbanding dengan perempuan. Hal ini disebabkan kecenderungan komuter yang terjadi baik untuk pekerjaan maupun untuk sekolah masih di dominasi oleh laki-laki. Artinya, mobilitas ulang alik (*commuting*) lebih banyak dilakukan oleh laki- laki dibandingkan perempuan. Perempuan cenderung melakukan perjalanan komuting pada jarak pendek. Salah satu penyebab pembatasan jarak komuting pada perempuan dikarenakan peran ganda sebagai ibu atau pekerja rumah tangga.

Salah satu bentuk migrasi/mobilitas non permanen yang mengalami perkembangan adalah kegiatan *comuting* atau melaju, dimana keberadaannya semakin pesat terutama pada kota-kota besar dan sekitarnya. Keberadaan penglaju atau komuter akan memberikan dampak pada pembangunan di daerah asal maupun di daerah tujuan komuter. Komuter adalah seseorang yang melakukan kegiatan bekerja/sekolah/kursus di luar kabupaten/kota tempat tinggal dan secara rutin pergi pulang (PP) ke tempat tinggal pada hari yang sama. Salah satu yang menjadi indicator pemilihan tempat tinggal pelaku komuter adalah tempat aktivitas utama sehari-hari. Hukum perilaku mobilitas penduduk (*Revenstein*) mengatakan bahwa para migran akan memilih tempat terdekat sebagai tujuan beraktivitas utama.

Berdasarkan jenis transportasi yang digunakan oleh komuter di Provinsi Jambi, maka penggunaan transportasi pribadi/dinas (baik berupa mobil, sepeda, sepeda motor) lebih mendominasi, yaitu sekitar 96,29 persen yang menggunakan pribadi. Sedangkan sisanya adalah penggunaan Transportasi umum (becak, motor ojek, kendaraan jemputan, omprengan, taksi, angkutan kota, bus umum/kota, kereta) sebesar 2,61 persen dan yang Jalan kaki/tidak menggunakan

kendaraan sebanyak 1,09 persen.

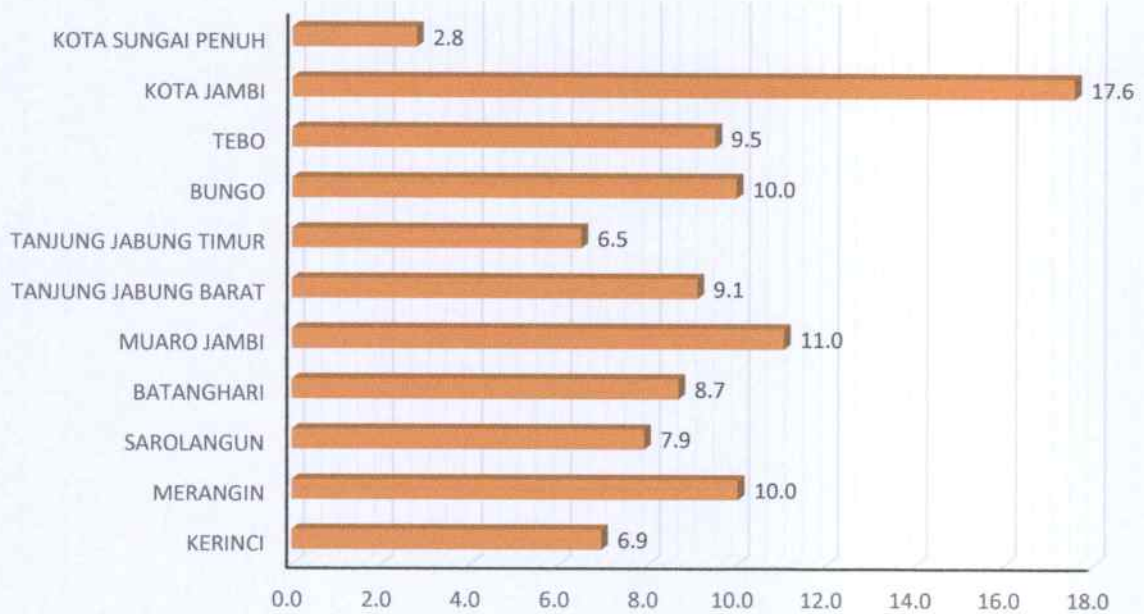
### 2.4.3. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk perkotaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan trend peningkatan pada periode 2015-2020, namun terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2019 (3,482 juta jiwa). Tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan jumlah yaitu sebesar 3,532 juta jiwa. Trend perkembangan penduduk Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar 2.61 berikut:



**Gambar 2. 61.**Trend jumlah penduduk Provinsi Jambi periode 2015-2020

Persentase komposisi jumlah Penduduk perkotaan terendah menurut Kabupaten/Kota dalam Provins Jambi terdapat di Kota Sungai Penuh hanya sebesar 2,8% dari jumlah penduduk Provinsi Jambi. Sebaliknya persentase jumlah penduduk terbesar berada pada Kota Jambi yaitu Sebesar 17,6%. Hal ini terjadi disebabkan adanya migrasi penduduk dari kota-kota lain di Provinsi Jambi masuk ke dalam Kota Jambi. Perkembangan penduduk dapat dilihat pada Gambar 2.62.



**Gambar 2. 62.** Persentase Penduduk Menurut Kabupaten /Kota Provinsi Jambi 2020

Sumber : Statistik Migrasi Provinsi Jambi Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Dengan mengedepankan pentingnya pengembangan ruang hidup yang layak dan aman terkait dengan kondisi kebutuhan dan ketersediaan ruang hidup layak di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jambi untuk tahun 2020. Keterkaitan antara kebutuhan dan ketersediaan ruang hidup layak, serta surplus atau defisit lahan di Provinsi Jambi, menyoroti aspek penting dalam pengembangan perkotaan dan perencanaan regional. Ruang hidup layak, yang mencakup aspek keamanan perumahan, aksesibilitas infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi, serta konektivitas dengan jalan utama, merupakan indikator kunci kesejahteraan penduduk. Estimasi kebutuhan ruang layak memberikan panduan tentang seberapa besar lahan yang diperlukan untuk memastikan standar hidup yang layak, sedangkan data ruang layak yang tersedia menggambarkan sejauh mana target ini telah tercapai. Selisih antara dua ukuran ini, yang diwujudkan dalam surplus atau defisit, memainkan peran krusial dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan saat ini dan menetapkan arah kebijakan masa depan.

Secara terperinci kebutuhan dan ketersediaan ruang hidup layak Provinsi Jambi menurut kabupaten/kota pada Tahun 2020 diberikan pada Tabel 2.33

**Tabel 2. 33.** Kebutuhan dan Ketersediaan ruang hidup layak (tidak waran bencana bagi penduduk Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota pada Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Ruang Layak (Ha)	Ruang Layak (Ha)	Surplus/(Defisit) (Ha)
Kerinci	826	3.304	2.478
Merangin	1.169	4.674	3.506
Sarolangun	957	3.829	2.872
Bungo	1.595	6.378	4.784
Batang Hari	1.327	5.310	3.982
Tebo	1.486	5.944	4.458
Muaro Jambi	1.327	5.306	3.980
Tanjung Jabung Barat	1.397	5.588	4.191
Tanjung Jabung Timur	1.011	4.044	3.033
Kota Jambi	1.000	1.500	500
Kota Sungai Penuh	159	239	80
Total	6.380	22.622	16.242

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2.33 menunjukkan data Tahun 2020 yang diolah menunjukkan gambaran optimis terkait dengan kebutuhan dan ketersediaan ruang hidup layak di Provinsi Jambi. Setiap kabupaten dan kota menunjukkan surplus lahan yang signifikan, menandakan bahwa luas lahan yang tersedia untuk perumahan dan infrastruktur pendukung lainnya melebihi kebutuhan aktual penduduknya. Kerinci, dengan surplus 2.478 hektar, dan Merangin, dengan surplus 3.506 hektar, merupakan contoh nyata dari distribusi lahan yang memadai. Meski demikian, perbedaan tersebut lebih kecil di daerah perkotaan seperti Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, dengan surplus masing-masing 500 dan 80 hektar, menggarisbawahi tantangan urbanisasi dan ketersediaan lahan di area tersebut. Namun, dengan total surplus 16.242 hektar di seluruh provinsi, terlihat jelas bahwa Jambi berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi pertumbuhan penduduk mendatang dan menyediakan lingkungan yang layak serta aman dari bencana bagi warganya.

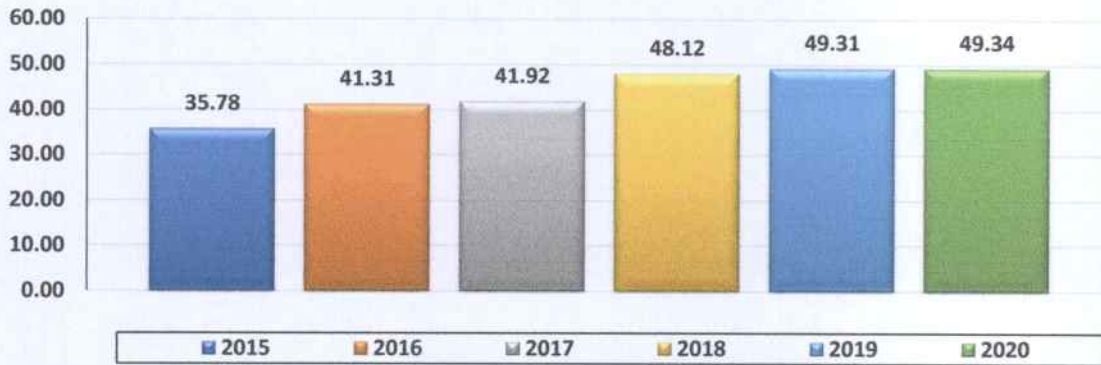
## **2.5. Pembangunan Data dan Informasi kependudukan(Pilar V)**

Sebagai sistem administrasi kependudukan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk melalui pelayanan publik, yang salah satunya adalah penerbitan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas dengan kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Dokumen ini dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk dan Pencatataan Sipil. Beberapa contoh dokumen kependudukan antara lain adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak, dan Kartu Identitas Anak.

### **2.5.1 RasioPendudukBerKTP**

Rasio penduduk yang memiliki KTP biasanya mencerminkan proporsi orang dewasa yang telah terdaftar secara resmi sebagai warga negara di wilayah administratif tersebut. Data ini penting untuk berbagai keperluan, termasuk perencanaan kebijakan, pemilihan umum, dan layanan pemerintah.

Persentase penduduk di Provinsi Jambi yang memiliki e-KTP pada periode 2015-2020 mengalami peningkatan yang cukup lambat, tahun 2020 peningkatannya hanya 0,03% dari tahun 2019. Berdasarkan data ini diketahui bahwa kesadaran penduduk terhadap pentingnya identitas (e-KTP) masih rendah. Penataan administrasi kependudukan harus perlu ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui penyuluhan, workshop maupun roadshow ke tengah masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya memiliki KTP. Perkembangan kepemilikan e-KTP penduduk di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar 2.63.



**Gambar 2. 63.**Perkembangan kepemilikan e-KTP di Provinsi Jambi tahun 2015-2020

Sumber: Dukcapil Provinsi Jambi, 2020

Gambar 2.63 menunjukkan persentase penduduk yang memiliki e-KTP di kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2020 tertinggi berada pada Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebesar 51,48%. Sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Batanghari yaitu sebesar 44,89%. Berdasarkan hasil ini perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam menata kependudukan dan mensosialisasikan pentingnya kepemilikan KTP bagi masyarakat yang telah berumur lebih dari 17 tahun. Distribusi perkembangan penduduk yang memiliki KTP berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.34.

**Tabel 2. 34.**Persentase penduduk memiliki e-KTP berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan e-KTP (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	32.49	38.71	39.56	46.82	49.34	49.37
Merangin	37.19	41.87	41.12	49.64	49.61	50.11
Sarolangun	26.42	32.99	33.46	39.36	48.74	48.90
Batanghari	34.32	37.87	37.71	44.15	44.41	44.89
Muaro Jambi	26.06	40.80	41.20	51.42	51.82	51.48
Tanjung Jabung Barat	37.59	42.94	43.83	48.89	49.74	49.62
Tanjung Jabung Timur	41.49	45.79	46.03	50.57	50.29	49.80
Bungo	46.44	48.21	47.02	51.27	50.53	50.33
Tebo	40.38	44.70	47.32	51.96	51.40	51.19
Kota Jambi	37.38	41.09	42.90	48.04	48.77	48.69
Kota Sungai Penuh	32.46	37.19	37.96	44.26	44.11	45.76

Sumber: Dukcapil Provinsi Jambi, 2020

### **2.5.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran**

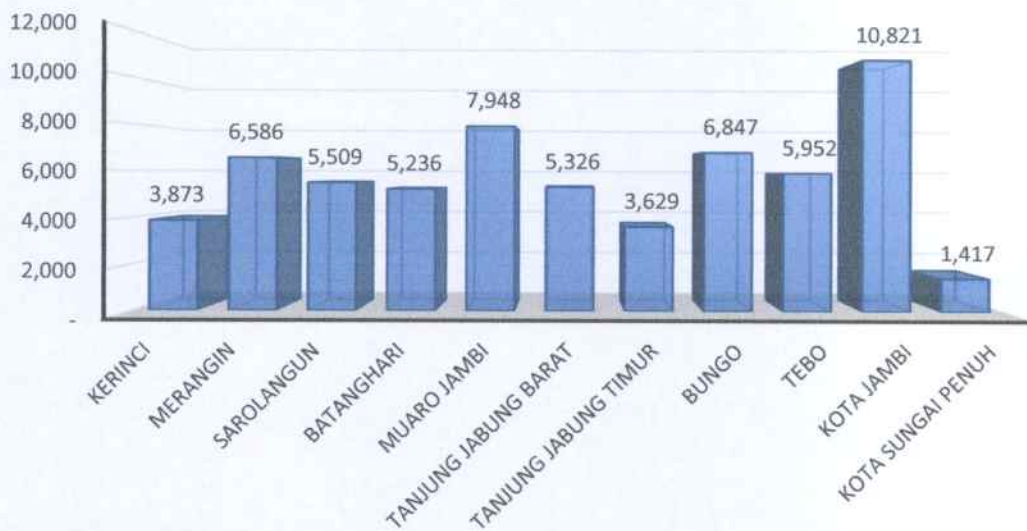
Akte Kelahiran, yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat di Indonesia, mencatat dan memberikan bukti hukum tentang kelahiran seseorang. Dokumen ini memuat informasi penting mengenai kelahiran individu, termasuk tanggal, waktu, dan tempat kelahiran.

Sebagai bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang, Akte Kelahiran memastikan bahwa bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Untuk mengurus akta kelahiran, beberapa syarat harus dipenuhi. Ini mencakup Surat keterangan kelahiran bayi atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) orang tua Bayi, Kartu Identitas Penduduk Elektronik (E-KTP) orang tua Bayi, Buku nikah KUA/Akte Pernikahan orang tua Bayi atau SPTJM kebenaran suami-istri, dan beberapa dokumen lainnya.

Prosedur pengajuan akta kelahiran melibatkan beberapa langkah. Ini termasuk pengisian dan penandatanganan formulir pelaporan serta penyerahan persyaratan kepada petugas pelayanan, verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan oleh petugas pelayanan, perekaman data dalam basis data kependudukan oleh petugas pelayanan kantor Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan pencatatan dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran oleh Pejabat Pencatatan Sipil kantor Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Jumlah akta kelahiran di Provinsi Jambi tahun 2020 berfluktuatif, terlihat pada gambar 2.109 bahwa jumlah akte kelahiran yang tercatat di dinas terkait di Provinsi Jmabi berjumlah 63.144 akte. Berdasarkan nilai tersebut penerbitan tertiniggi terdapat di Kota Jambi sebanyak 10.821 akte yang tercatat. Sedangkan yang terendah terdapat di Kota Sungai Penuh sebesar 1.417 akte. Berdasarkan data tersebut diketahui masih banyak masyarakat yang belum emlaporkan atau membuat akte kelahiran anaknya. Perlu adanya peranna aktif dari

pemerintah daerah untuk mensosialisasikan pentingnya akte kelahiran yang tercatat secara hukum. Data jumlah akte yang tercatat dapat dilihat pada gambar 2.109.



**Gambar 2. 64.** Perkembangan Akta kelahiran yang tercatat pada dinas dukcapil provinsi Jambi tahun 2020

Sumber: Dukcapil Provinsi Jambi, 2020

Berdasarkan Gambar 2.64 menunjukkan jumlah akta kelahiran di Provinsi Jambi tahun 2020 berfluktuatif, terlihat pada gambar 2.109 bahwa jumlah akte kelahiran yang tercatat di dinas terkait di provinsi Jambi berjumlah 63.144 akte. Berdasarkan nilai tersebut penerbitan akte terbanyak berada pada Kota Jambi sebanyak 10.821 akte yang tercatat. Sedangkan yang terendah terdapat pada Kota Sungai Penuh sebesar 1.417 akte. Berikut ditampilkan perkembangan akte kelahiran yang tercatat di dinas terkait pada tahun 2020. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum melapor atau membuat akte kelahiran anak pada dinas terkait. Perlu adanya peran yang aktif dari pemerintah daerah untuk mensosialisasikan pentingnya dokumen akte kelahiran sebagai administrasi kependudukan.

### 2.5.2. Penduduk Berakte Nikah

Akte pernikahan memainkan peran penting dalam penataan administrasi kependudukan suatu daerah. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan kegunaannya:

1. Pencatatan Sipil: Sebagai bukti resmi dari negara bahwa dua individu telah menikah secara sah, akte pernikahan penting

untuk memastikan bahwa semua pernikahan dicatat dan diakui oleh pemerintah.

2. Administrasi Kependudukan: Akte pernikahan berdampak pada status kependudukan seseorang, seperti perubahan status dari lajang menjadi menikah dalam kartu identitas.
3. Pelayanan Publik: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan publik, termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lainnya. Akte pernikahan menjadi dasar dalam penerbitan beberapa dokumen tersebut.
4. Administrasi Anak: Akte pernikahan juga penting dalam proses pencatatan kelahiran anak, membantu dalam penentuan kewarganegaraan, hak waris, dan identitas anak.
5. Kepastian Hukum: Dalam hal konflik hukum atau perceraian, akte pernikahan adalah dokumen penting yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan demikian, akte pernikahan sangat penting dalam penataan administrasi kependudukan suatu daerah. Selalu penting untuk memastikan bahwa semua dokumen hukum dan administratif dalam kondisi baik dan lengkap.

**Tabel 2. 35.** Perkembangan jumlah Akte Nikah di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Memiliki Akta Nikah					
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>315,855</b>	<b>332,930</b>	<b>353,509</b>	<b>395,502</b>	<b>552,350</b>	<b>696,546</b>
Kerinci	1,186	1,372	1,496	6,583	18,904	28,005
Merangin	22,585	23,285	22,952	23,483	36,881	56,290
Sarolangun	7,254	7,102	7,353	7,884	21,367	33,266
Batanghari	8,473	10,365	12,160	15,698	30,871	42,493
Muaro Jambi	6,401	7,187	7,501	12,163	40,799	67,770
Tanjung Jabung Barat	33,397	34,369	36,207	39,497	42,755	51,326
Tanjung Jabung Timur	11,950	13,385	15,036	17,702	28,641	37,253
Bungo	57,165	60,875	63,755	68,947	79,342	88,819
Tebo	78,287	82,420	89,248	94,008	107,233	114,614
Kota Jambi	74,240	77,073	81,897	90,708	122,622	151,210
Kota Sungai Penuh	14,917	15,497	15,904	18,829	22,935	25,500

Sumber: Dukcapil Provinsi Jambi, 2020

Berdasarkan Tabel 2.35 menunjukkan akte nikah yang tercatat di dinas terkait pada provinsi Jambi tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan, hal ini terjadi dikarenakan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya akte nikah yang tercatat secara hukum. Terlihat pada jumlah akte nikah tertinggi yang telah dikeluarkan oleh dinas terkait adalah di Kota Jambi yaitu sebanyak 151.210 akte. Sedangkan yang terendah terdapat pada Kota Sungai Penuh.

Pencatatan pernikahan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan akta nikah. Agar pernikahan dapat diakui oleh negara, pernikahan harus didaftarkan di kantor catatan sipil. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan dokumen akte nikah, pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi harus bersinergi dalam mensosialisasikan pentingnya pencatatan akte nikah.

### 2.5.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Base Kependudukan

Jumlah penduduk berdasarkan data base kependudukan periode 2015-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi Jambi sebanyak 3,430,812 jiwa, dan pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2020 penduduk Provinsi Jambi telah mencapai 3,532,638 jiwa atau pertumbuhan selama rentang periode tahun 2015-2020 yaitu sebesar 101.826 Jiwa (rata-rata pertumbuhan pertahun 16.971 jiwa). Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.36.

**Tabel 2. 36.** Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten.Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

Wilayah	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Provinsi</b>	<b>3,430,8</b>	<b>3,459,2</b>	<b>3,477,1</b>	<b>3,493,3</b>	<b>3,482,0</b>	<b>3,532,6</b>
<b>Jambi</b>	<b>12</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>08</b>	<b>38</b>
Kerinci	233,526	235,029	236,946	240,361	242,127	245,443
Merangin	330,439	332,670	335,136	339,247	350,643	353,705
Sarolangun	310,948	312,435	315,469	317,317	279,224	279,428
Batanghari	305,878	307,755	311,132	304,162	305,436	306,508
Muaro Jambi	356,575	358,555	360,981	363,832	368,055	390,347
Tanjung Jabung Barat	318,521	321,094	323,409	324,332	320,108	321,472
Tanjung Jabung Timur	220,398	222,167	224,131	226,390	227,941	229,206
Bungo	325,219	331,886	333,969	337,834	343,060	352,366
Tebo	324,420	326,688	320,893	324,619	327,984	335,288
Kota Jambi Kota	602,970	607,796	610,854	614,329	616,355	620,703
Sungai Penuh	101,918	103,201	104,204	100,934	101,075	98,172

Sumber: Dukcapil Provinsi Jambi, 2020

Perkembangan penduduk berdasarkan kabupaten/kota terlihat bahwa jumlah penduduk tersesar di Provinsi Jambi berada pada Kota Jambi sebanyak 620.703 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil terdapat pada Kota Sungai Penuh sebanyak 98.172 jiwa.

## 2.6. Analisis SWOT

Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu usaha perpaduan lingkungan eksternal serta internal sehingga menghasilkan rencana, keputusan dan tindakan yang tepat” (William F Glueck & Lawrence R. Jauch, 1998). Seperti diungkapkan David (2004), strategi merupakan tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak dan sumberdaya perusahaan yang banyak untuk merealisasikannya yang menjadi tolak ukur kehidupan jangka panjang dalam organisasi. Maka untuk itu, strategi harus dirumuskan dalam jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumberdaya (Rangkuti, 2015).

Sebuah organisasi dapat mengembangkan strategi yang baik apabila mampu melihat potensi kekuatan, dan meminimalisir kelemahan yang dimiliki serta mampu mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada melalui suatu perencanaan. Menurut Rangkuti (2015), proses analisis seperti ini adalah perumusan dan evaluasi strategis ini disebut sebagai perencanaan strategis. Perencanaan strategis sangat penting untuk memperoleh keunggulan dalam memilih output yang sesuai dengan keinginan pemakai/user dengan dukungan yang optimal dari sumberdaya yang tersedia.

Berdasarkan batasan tersebut, maka strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan, dan kelemahan perusahaan dengan peluang lingkungan serta ancaman untuk memastikan bahwa tujuan utama lembaga dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Jadi, strategi adalah suatu pola untuk membuat rencana dengan mengamati dan memperkirakan keadaan lingkungan internal dan lingkungan eksternal untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, alat yang digunakan

yaitu metode SWOT.

SWOT analisis adalah suatu alat perencanaan strategik yang penting untuk membantu perencana untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan kesempatan dan ancaman dari external (Menurut Kurtz,2008). Dengan kata lain, analisis SWOT perlu dilakukan dalam perencanaan suatu perusahaan karena analisa SWOT untuk mencocokkan “fit” antara sumberdaya internal dan situasi eksternal perusahaan. Pencocokkan yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan dan meminimumkan kelemahan dan ancamannya (Pearce and Robinson, 2003). Asumsi sederhana ini mempunyai implikasi yang kuat untuk design strategi yang sukses. Thompson (2008) menambahkan bahwa analisa SWOT sangat simpel tetapi merupakan alat bantu yang sangat kuat untuk memperbesar kapabilitas serta mengetahui ketidakefisienan sumberdaya perusahaan, kesempatan dari pasar dan ancaman eksternal untuk masa depan agar lebih baik lagi.

Analisis SWOT dari hasil identifikasi terhadap patensi dan permasalahan yang ada dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Jambi periode 2024 melalui 5 Pilar, meliputi: Pengendalian jumlah penduduk, Peningkatan Kualitas penduduk, Pembangunan Keluarga, Pemerataan jumlah penduduk, dan tata Kelola Data kependudukan, maka dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan kependudukan di Provinsi Jambi selama periode 2025-2050. Selanjutnya berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan

Strengths	Weaknesses
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komitmen terhadap tim penyusun GDPK Tahun 2025 – 2050.</li><li>2. Perda tentang GDPK Tahun 2025 – 2050.</li><li>3. Alokasi anggaran khusus pembangunan kependudukan.</li><li>4. Usia Harapan Hidup relative tinggi dan merata.</li><li>5. APS menurut kelompok umur (7-23) tahun,</li><li>6. Angka lama sekolah cukup tinggi, dan relative merata</li><li>7. TPAK relatif stabil antar kabupaten/kota.</li><li>8. Tersedianya sumberdaya manusia yang professional pengawaanl program pembangunan kependudukan</li><li>9. Tersedianya pedoman yang lengkap strategi dan kebijakan program 5 Pilar GDPK Provinsi Jambi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program kependudukan dan KB belum menjadi kebutuhan masyarakat.</li><li>2. Tingginya disparitas laju pertumbuhan penduduk.</li><li>3. Masih tingginya TFR penduduk Provinsi Jambi.</li><li>4. Masih rendahnya angka median usia kawin pertama.</li><li>5. Masih tingginya disparitas Angka Kematian Balita (AKB)</li><li>6. Terbatasnya jumlah dan akses layanan kesehatan reproduksi penduduk usia subur.</li><li>7. Masih terbatasnya keterjangkauan jaminan kesehatan.</li><li>8. Masih rendahnya IPM penduduk Provinsi Jambi.</li><li>9. Masih tingginya kelompok cerai usia muda.</li><li>10. Belum adanya standar kapasitas pasangan usia subur sebagai binaan bagi tenaga pengelola. (Penyuluh KB).</li><li>11. Belum optimal kebijakan program kependudukan dan keluarga berencana.</li><li>12. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG).</li><li>13. Masih tingginya disparitas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPU)</li><li>14. Terbatasnya jumlah dan program pemuda berinovasi dan berwirausaha yang berwawasan kependudukan.</li><li>15. Masih tingginya disparitas Penduduk Miskin.</li><li>16. Belum tersedianya fasilitas publik yang layak dan terjangkau terhadap kebutuhan 5 Pilar pembangunan kependudukan</li><li>17. Masih tingginya disparitas persebaran dan kepadatan penduduk</li><li>18. Terbatasnya design dan modal keluarga yang memiliki program khusus kependudukan, KB, dan pembinaan keluarga berkualitas.</li></ol>
Threats	Opportunities
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingginya disparitas usia kawin pertama kelompok penduduk usia subur.</li><li>2. Terdapat pertumbuhan pertumbuhan penduduk kelompok lansia periode 2040-2050 secara signifikan.</li><li>3. Terdapat trend penurunan Sex Ratio (SR) penduduk periode 2040-2050.</li><li>4. Terdapat trend peningkatan Dependency Ratio penduduk periode 2040-2050.</li><li>5. Tingginya tingkat disparitas prevalensi stunting.</li><li>6. Rendahnya tingkat kesetaraan gender.</li><li>7. Rendahnya persentase pencapaian akses sanitasi layak, rumah layak huni, dan air bersih layak.</li><li>8. Peningkatan trend ketimpangan kepadatan penduduk antar</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.</li><li>2. Peraturan Daerah tentang RPJMP Provinsi Jambi tahun 2025-2045,</li><li>3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Organisasi Perangkat Daerah,</li><li>4. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen memanfaatkan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah.</li><li>5. Provinsi Jambi selama periode 2025-2050 memiliki trend peningkatan kualitas penduduk melalui penurunan IMR dan kematian ibu melahirkan cukup signifikan.</li><li>6. Provinsi Jambi selama periode 2025-2050 memiliki trend peningkatan kualitas penduduk melalui penurunan prevalensi stunting cukup signifikan.</li><li>7. Provinsi Jambi selama periode 2025-2050 memiliki trend peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan jenjang pendidikan penduduk cukup tinggi.</li><li>8. Laju pertumbuhan pendapatan perkapita Penduduk Provinsi Jambi terjadi peningkatan signifikan selama periode 2025-2050.</li></ol>

tantangan yang dimiliki dilakukan analisis melalui Metoda SWOT. Secara garis besar dapat dijelaskan matriks SWOT pada gambar berikut.

**Gambar 2. 65.** Analisis Strategi Model SWOT Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Jambi 2025-2050

#### **A. Kekuatan**

1. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen terhadap tim penyusun *Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi* Tahun 2025 – 2050 melalui Surat Keputusan Gubernur,
2. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki Peraturan Daerah tentang *Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi* Tahun 2025 – 2050.
3. Pemerintah daerah memiliki alokasi anggaran secara khusus terhadap pembangunan kependudukan di Provinsi Jambi,
4. Penduduk Provinsi Jambi memiliki Usia Harapan Hidup relative tinggi dan merata pada setiap kabupaten/kota,
5. Terpenuhinya penduduk Provinsi Jambi yang memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur (7-23) tahun,
6. Penduduk Provinsi Jambi memiliki angka lama sekolah cukup tinggi, dan relative merata diantara kabupaten kecuali Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh sedikit lebih tinggi,
7. Penduduk Provinsi Jambi memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif stabil antar kabupaten/kota. Secara total TPAK Provinsi Jambi menunjukkan keterlibatan angkatan kerja keberlanjutan,
8. Tersedianya sumberdaya manusia yang professional dalam menjalan dan mengawal program pembangunan kependudukan di Provinsi Jambi;
9. Tersedianya pedoman yang lengkap strategi dan kebijakan program 5 Pilar GDPK Provinsi Jambi.

#### **B. Kelemahan.**

1. Program kependudukan dan keluarga berencana belum menjadi kebutuhan masyarakat di lingkungan Provinsi Jambi,

2. Masih tingginya disparitas laju pertumbuhan penduduk berdasarkan Kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Jambi,
3. Masih tingginya TFR penduduk Provinsi Jambi,
4. Masih rendahnya angka median usia kawin pertama di Provinsi Jambi,
5. Masih tingginya disparitas Angka Kematian Balita (AKB) berdasarkan Kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Jambi,
6. Terbatasnya jumlah dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi penduduk usia subur,
7. Masih terbatasnya keterjangkauan jaminan kesehatan bagi penduduk di Provinsi Jambi,
8. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk Provinsi Jambi,
9. Masih tingginya kelompok usia muda meminta proses perceraian,
10. Belum adanya standar kapasitas pasangan usia subur sebagai binaan bagi tenaga pengelola oleh setiap tenaga pengelola program di lini lapangan (Penyuluh KB);
11. Advokasi program kependudukan dan keluarga berencana terhadap pemangku kepentingan dan kebijakan belum optimal.
12. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) penduduk Provinsi Jambi,
13. Masih tingginya disparitas Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota,
14. Terbatasnya jumlah dan program pemuda berinovasi dan berwirausaha yang berwawasan kependudukan,
15. Masih tingginya disparitas Penduduk Miskin Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota,
16. Belum tersedianya fasilitas publik yang layak dan terjangkau terhadap kebutuhan 5 Pilar pembangunan kependudukan dilingkungan Provinsi Jambi,
17. Masih tingginya disparitas persebaran dan kepadatan penduduk di Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota,
18. Terbatasnya design dan model keluarga yang memiliki program khusus kependudukan, KB, dan pembinaan keluarga berkualitas.

### **C. Peluang**

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
2. Peraturan Daerah tentang RPJMP Provinsi Jambi tahun 2025-2045,
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen memanfaatkan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah,
5. Provinsi Jambi selama periode 2025-2050 memiliki trend peningkatan kualitas penduduk melalui penurunan IMR dan kematian ibu melahirkan cukup signifikan,
6. Provinsi Jambi selama periode 2025-2050 memiliki trend peningkatan kualitas penduduk melalui penurunan prevalensi stunting cukup signifikan,
7. Provinsi Jambi selama periode 2025-2050 memiliki trend peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan jenjang pendidikan penduduk cukup tinggi,
8. Laju pertumbuhan pendapatan perkapita Penduduk Provinsi Jambi terjadi peningkatan signifikan selama periode 2025-2050,
9. Memiliki Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) lebih baik dan cenderung meningkat selama periode 2025-2050,
10. Penduduk Provinsi Jambi telah memperoleh Bonus Demografi pada tahun 2035. Artinya, Provinsi Jambi telah memasuki Tahap 4 dan tergolong pada Bonus Demografi Lanjut.

### **D. Ancaman**

1. Masih tingginya disparitas usia kawin pertama kelompok penduduk usia subur antar kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Jambi;
2. Terdapat peningkatan cukup signifikan pertumbuhan penduduk kelompok lansia di Provinsi Jambi pada periode 2040-2050,
3. Terdapat trend penurunan Sex Ratio (SR) penduduk Provinsi Jambi pada periode 2040-2050. Artinya, terjadi pergeseran jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan pada periode tersebut. Dengan

kata lain, terjadi pengurangan jumlah penduduk Perempuan akibat adanya peningkatan kualitas sumberdaya dan akses migrasi keluar daerah lebih tinggi,

4. Terdapat trend peningkatan *Dependency Ratio* penduduk Provinsi Jambi pada periode 2040-2050. Artinya, selama periode tersebut terjadi peningkatan beban ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk belum dan tidak produktif,
5. Masih tingginya tingkat disparitas prevalensi **stunting** antar kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Jambi;
6. Masih rendahnya tingkat kesetaraan gender pada setiap kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Jambi;
7. Masih rendahnya persentase pencapaian akses sanitasi layak, rumah layak huni, dan air bersih layak di Provinsi Jambi;
8. Terdapat trend peningkatan ketimpangan kepadatan penduduk antar wilayah desa dan Kota di Provinsi Jambi, selama periode 2025-2050,
9. Masih terbatas dan belum optimalnya pengelolaan data kependudukan secara terintegrasi melalui system digital di Provinsi Jambi.

Berdasarkan analisis SWOT terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam Pembangunan kependudukan di Provinsi Jambi, maka prioritas utama program berdasarkan analisis SWOT yang perlu dilaksanakan sebagai berikut:

1. Advokasi program pengendalian kuantitas penduduk terhadap pemangku kepentingan dan kebijakan melalui sosialisasi, seminar, media elektronik, media cetak, leaflet, poster, iklan, layanan masyarakat, billboard dan media promosi lainnya;
2. Memberikan penghargaan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada pemangku kepentingan dan kebijakan;
3. Menyusun pedoman strategi operasional dan kebijakan 5 Pilar program kependudukan di Provinsi Jambi;

4. Pemetaan sasaran penggarapan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dan pemetaan jumlah penduduk di wilayah dan sasaran khusus;
5. Program pembangunan kependudukan dalam pembentukan keluarga harmonis dan sejahtera terutama keluarga muda yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui program konseling pranikah dan pascanikah,
6. Program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna mempercepat peningkatan kesetaraan gender di Provinsi Jambi. Upaya-upaya ini meliputi investasi pendidikan dan kesehatan, partisipasi ekonomi perempuan, serta advokasi untuk mengatasi ketimpangan gender dalam akses dan kesempatan jabatan disektor public dan politik,
7. Melakukan pemberdayaan ekonomi lokal kepada pelaku usaha local dalam rangka mendorong investasi, dan mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Perlu memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan. Melalui adopsi inovasi teknologi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan.
8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja terdidik dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualitas angkatan kerja sesuai dengan tuntutan pasar kerja berbasis teknologi digital.
9. Pembangunan faslitas kesehatan bagi penduduk lansia, dan pengembangan program pemberdayaan dalam keberlangsungan hidup lansia terutama kelompok khusus,
10. Membuat sistem pencatatan pelaporan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap perencanaan kependudukan;
11. Menyusun standar operasional cakupan pembinaan pengelola program di lini lapangan terhadap jumlah pasangan usia subur, peserta KB aktif dan kelompok kegiatan.

12. Sosialisasi dan promosi serta memberikan pemahaman pentingnya program kependudukan dan KB bagi kelangsungan program pembangunan daerah.

#### **A. Kekuatan**

10. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen terhadap tim penyusun *Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi* Tahun 2025 – 2050 melalui Surat Keputusan Gubernur,
11. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki Peraturan Daerah tentang *Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi* Tahun 2025 – 2050.
12. Pemerintah daerah memiliki alokasi anggaran secara khusus terhadap pembangunan kependudukan di Provinsi Jambi,
13. Penduduk Provinsi Jambi memiliki Usia Harapan Hidup relative tinggi dan merata pada setiap kabupaten/kota,
14. Terpenuhinya penduduk Provinsi Jambi yang memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur (7-23) tahun,
15. Penduduk Provinsi Jambi memiliki angka lama sekolah cukup tinggi, dan relative merata diantara kabupaten kecuali Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh sedikit lebih tinggi,
16. Penduduk Provinsi Jambi memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif stabil antar kabupaten/kota. Secara total TPAK Provinsi Jambi menunjukkan keterlibatan angkatan kerja keberlanjutan,
17. Tersedianya sumberdaya manusia yang professional dalam menjalankan dan mengawal program pembangunan kependudukan di Provinsi Jambi;
18. Tersedianya pedoman yang lengkap strategi dan kebijakan program 5 Pilar GDPK Provinsi Jambi.

#### **B. Kelemahan.**

19. Program kependudukan dan keluarga berencana belum menjadi kebutuhan masyarakat di lingkungan Provinsi Jambi,
20. Masih tingginya disparitas laju pertumbuhan penduduk berdasarkan Kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Jambi,
21. Masih tingginya TFR penduduk Provinsi Jambi,

22. Masih rendahnya angka median usia kawin pertama di Provinsi Jambi,
23. Masih tingginya disparitas Angka Kematian Balita (AKB) berdasarkan Kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Jambi,
24. Terbatasnya jumlah dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi penduduk usia subur,
25. Masih terbatasnya keterjangkauan jaminan kesehatan bagi penduduk di Provinsi Jambi,
26. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk Provinsi Jambi,
27. Masih tingginya kelompok usia muda meminta proses perceraian,
28. Belum adanya standar kapasitas pasangan usia subur sebagai binaan bagi tenaga pengelola oleh setiap tenaga pengelola program di lini lapangan (Penyuluh KB);
29. Advokasi program kependudukan dan keluarga berencana terhadap pemangku kepentingan dan kebijakan belum optimal.
30. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) penduduk Provinsi Jambi,
31. Masih tingginya disparitas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota,
32. Terbatasnya jumlah dan program pemuda berinovasi dan berwirausaha yang berwawasan kependudukan,
33. Masih tingginya disparitas Penduduk Miskin Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota,
34. Belum tersedianya fasilitas publik yang layak dan terjangkau terhadap kebutuhan 5 Pilar pembangunan kependudukan dilingkungan Provinsi Jambi,
35. Masih tingginya disparitas persebaran dan kepadatan penduduk di Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota,
36. Terbatasnya design dan model keluarga yang memiliki program khusus kependudukan, KB, dan pembinaan keluarga berkualitas.

### **C. Peluang**

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

2. Peraturan Daerah tentang RPJMP Provinsi Jambi tahun 2025-2045,
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen memanfaatkan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah,
5. Provinsi Jambi selama periode 2025-2050 memiliki trend peningkatan kualitas penduduk melalui penurunan IMR dan kematian ibu melahirkan cukup signifikan,
6. Provinsi Jambi selama periode 2025-2050 memiliki trend peningkatan kualitas penduduk melalui penurunan prevalensi stunting cukup signifikan,
7. Provinsi Jambi selama periode 2025-2050 memiliki trend peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan jenjang pendidikan penduduk cukup tinggi,
8. Laju pertumbuhan pendapatan perkapita Penduduk Provinsi Jambi terjadi peningkatan signifikan selama periode 2025-2050,
9. Memiliki Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) lebih baik dan cenderung meningkat selama periode 2025-2050,
10. Penduduk Provinsi Jambi telah memperoleh Bonus Demografi pada tahun 2035. Artinya, Provinsi Jambi telah memasuki Tahap 4 dan tergolong pada Bonus Demografi Lanjut.

#### **D. Ancaman**

1. Masih tingginya disparitas usia kawin pertama kelompok penduduk usia subur antar kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Jambi;
2. Terdapat peningkatan cukup signifikan pertumbuhan penduduk kelompok lansia di Provinsi Jambi pada periode 2040-2050,
3. Terdapat trend penurunan Sex Ratio (SR) penduduk Provinsi Jambi pada periode 2040-2050. Artinya, terjadi pergeseran jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan pada periode tersebut. Dengan kata lain, terjadi pengurangan jumlah penduduk Perempuan akibat adanya peningkatan kualitas sumberdaya dan akses migrasi keluar daerah lebih tinggi,

4. Terdapat trend peningkatan *Dependency Ratio* penduduk Provinsi Jambi pada periode 2040-2050. Artinya, selama periode tersebut terjadi peningkatan beban ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk belum dan tidak produktif,
5. Masih tingginya tingkat disparitas prevalensi **stunting** antar kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Jambi;
6. Masih rendahnya tingkat kesetaraan gender pada setiap kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Jambi;
7. Masih rendahnya persentase pencapaian akses sanitasi layak, rumah layak huni, dan air bersih layak di Provinsi Jambi;
8. Terdapat trend peningkatan ketimpangan kepadatan penduduk antar wilayah desa dan Kota di Provinsi Jambi, selama periode 2025-2050,
9. Masih terbatas dan belum optimalnya pengelolaan data kependudukan secara terintegrasi melalui system digital di Provinsi Jambi.

Berdasarkan analisis SWOT terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam Pembangunan kependudukan di Provinsi Jambi, maka prioritas utama program berdasarkan analisis SWOT yang perlu dilaksanakan sebagai berikut:

1. Advokasi program pengendalian kuantitas penduduk terhadap pemangku kepentingan dan kebijakan melalui sosialisasi, seminar, media elektronik, media cetak, leaflet, poster, iklan, layanan masyarakat, billboard dan media promosi lainnya;
2. Memberikan penghargaan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada pemangku kepentingan dan kebijakan;
3. Menyusun pedoman strategi operasional dan kebijakan 5 Pilar program kependudukan di Provinsi Jambi;
4. Pemetaan sasaran penggarapan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dan pemetaan jumlah penduduk di wilayah dan sasaran khusus;

5. Program pembangunan kependudukan dalam pembentukan keluarga harmonis dan sejahtera terutama keluarga muda yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui program konseling pranikah dan pascanikah,
6. Program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna mempercepat peningkatan kesetaraan gender di Provinsi Jambi. Upaya-upaya ini meliputi investasi pendidikan dan kesehatan, partisipasi ekonomi perempuan, serta advokasi untuk mengatasi ketimpangan gender dalam akses dan kesempatan jabatan disektor public dan politik,
7. Melakukan pemberdayaan ekonomi lokal kepada pelaku usaha local dalam rangka mendorong investasi, dan mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Perlu memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan. Melalui adopsi inovasi teknologi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan.
8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja terdidik dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualitas angkatan kerja sesuai dengan tuntutan pasar kerja berbasis teknologi digital.
9. Pembangunan faslitas kesehatan bagi penduduk lansia, dan pengembangan program pemberdayaan dalam keberlangsungan hidup lansia terutama kelompok khusus,
10. Membuat sistem pencatatan pelaporan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap perencanaan kependudukan;
11. Menyusun standar operasional cakupan pembinaan pengelola program di lini lapangan terhadap jumlah pasangan usia subur, peserta KB aktif dan kelompok kegiatan.
12. Sosialisasi dan promosi serta memberikan pemahaman pentingnya program kependudukan dan KB bagi kelangsungan program pembangunan daerah.

### **BAB III**

#### **PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN**

Proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan dan pelestarian kesejahteraan masyarakat. Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang menghitung jumlah penduduk yang dijangka akan ada di masa yang akan datang, serta struktur umur penduduk. Kondisi ideal kependudukan adalah situasi yang diinginkan dalam hal kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan masyarakat.

Proyeksi ini tidak hanya mencakup aspek kuantitatif dari jumlah penduduk, tetapi juga komposisi penduduk, yang meliputi usia, distribusi geografis, dan karakteristik lain yang vital dalam pengambilan keputusan kebijakan. Adapun output proyeksi tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan berbagai bidang yang vital bagi kesejahteraan masyarakat, seperti ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Dengan memahami dan merencanakan berdasarkan komposisi penduduk yang dinamis, pemerintah dapat lebih efektif dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya mengatasi masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran tetapi juga mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, output dari proyeksi tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor yang vital bagi kesejahteraan masyarakat, menciptakan kondisi yang diinginkan untuk masyarakat yang lebih berdaya dan berkelanjutan.

##### **3.1. Proyeksi Jumlah dan Komposisi Umur Penduduk**

Proyeksi ini berlandaskan pada kondisi ideal dari parameter demografi yang ditargetkan, yaitu pada tahun 2050, Total Fertility Rate (TFR) diperkirakan mencapai 2,01, Infant Mortality Rate (IMR) menurun ke 8,65 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dan net migrasi sebesar -0,48. TFR diharapkan berada pada angka 2,01, yang mengindikasikan bahwa rata-rata wanita diharapkan memiliki sekitar dua anak, mencerminkan kondisi stabil pertumbuhan penduduk, dimana angka tersebut memungkinkan pergantian generasi tanpa menyebabkan fluktuasi signifikan pada jumlah penduduk. Selanjutnya, diharapkan

terjadi penurunan IMR menjadi 8,65, menunjukkan peningkatan kualitas kesehatan dan aksesibilitas layanan medis. Terakhir, proyeksi ini juga memperhitungkan net migrasi -0,48, yang menunjukkan kemungkinan lebih banyak individu yang meninggalkan wilayah ini dibanding yang datang, berpotensi mempengaruhi komposisi penduduk dan dinamika ekonomi.

Tabel 3.1. memberikan perincian proyeksi jumlah, komposisi umur dan seks ratio penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2050.

**Tabel 3. 1.** Proyeksi Jumlah, Jenis Kelamin dan Komposisi Umur Penduduk Periode 2020-2050

<b>Parameter</b>	<b>2020 (Baseline)</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>	<b>2050</b>
Laki-laki/Male	1 805,17	1 914,25	2 008,50	2 087,26	2 151,48	2 201,41	2 237,45
Perempuan/Female	1 733,64	1 854,23	1 964,37	2 062,26	2 147,41	2 218,59	2 274,69
Total	3 538,81	3 768,48	3 972,87	4 149,53	4 298,89	4 420,00	4 512,14
Sex Ratio Laki/Perm *100	104,13	103,24	102,25	101,21	100,19	99,23	98,36
Komposisi Umur (%)							
0-14	26,22	25,11	23,95	22,91	21,73	20,87	20,29
15-64	69,15	68,86	68,35	67,61	66,87	65,89	64,96
65+	4,63	6,03	7,70	9,48	11,40	13,24	14,75
Dependency Ratio	44,61	45,23	46,30	47,91	49,54	51,77	53,94
Dependency Muda (0-14/15-64) hasil akan menurun	37,92	36,47	35,04	33,89	32,5	31,67	31,23
Dependency Tua (65+/15-64) hasil akan meningkat	6,69	8,76	11,27	14,02	17,05	20,09	22,71

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Penurunan sex ratio dalam suatu populasi dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor pertama adalah perbaikan layanan kesehatan yang cenderung lebih menguntungkan wanita dibandingkan laki-laki, mengakibatkan peningkatan kesejahteraan dan harapan hidup wanita. Faktor kedua berkaitan dengan dinamika migrasi. Net migrasi yang negatif, di mana laki-laki lebih banyak bermigrasi dibandingkan dengan perempuan, secara signifikan menurunkan sex ratio di daerah asal. Perpindahan ini tidak hanya mempengaruhi komposisi demografis tetapi juga berdampak pada struktur sosial dan ekonomi daerah yang terpengaruh.

Proyeksi demografis hingga tahun 2050 untuk Provinsi Jambi menunjukkan tren pertumbuhan populasi yang berkelanjutan dan transisi demografis menuju penuaan penduduk. Diperkirakan populasi akan bertumbuh dari 3.538,81 ribu orang di tahun 2020 menjadi 4.512,14 ribu orang di tahun 2050, menandai peningkatan yang stabil. Namun, komposisi umur penduduk mengalami pergeseran signifikan: proporsi penduduk muda (usia 0-14 tahun) menurun dari 26,22% menjadi 20,29%, sementara proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) meningkat secara mencolok dari 4,63% menjadi 14,75%. Penurunan proporsi penduduk muda menggambarkan penurunan tingkat fertilitas, yang dipengaruhi oleh perubahan preferensi keluarga, peningkatan pendidikan, dan akses yang lebih luas terhadap layanan keluarga berencana. Sementara peningkatan proporsi kelompok usia 65+ tahun menunjukkan peningkatan harapan hidup dan Transisi Ke Masyarakat Yang Menua.

Penuaan Populasi Ini Membutuhkan Penyesuaian Kebijakan Publik Dalam Berbagai Sektor, Terutama Layanan Kesehatan, Program Pensiun, Dan Layanan Sosial. Pada Tahun 2040, Diperkirakan Proporsi Penduduk Lansia Berusia 65 Tahun Ke Atas Di Provinsi Jambi Akan Mencapai 10%, Atau Sekitar 1,14 Juta Orang, Menandai Perubahan Demografis Penting. Ini Menunjukkan Bahwa Di Masa Depan, Proporsi Usia Produktif Akan Menanggung Beban Ekonomi Yang Lebih Besar Dari Kelompok Usia Yang Tidak Produktif, Termasuk Kelompok Tua, Dibandingkan Dengan Kelompok Usia Yang Belum Produktif. Tren Ini Menekankan Pentingnya Perencanaan Layanan Kesehatan Yang

Spesifik, Program Pensiun Yang Memadai, Dan Kebijakan Sosial Yang Terintegrasi Untuk Mendukung Kualitas Hidup Yang Tinggi Bagi Populasi Usia Lanjut.

Menghadapi Tantangan Terkait Penuaan Populasi Memerlukan kebijakan yang proaktif dan terintegrasi untuk mengelola perubahan komposisi umur ini. Memperkuat sistem kesehatan, menyediakan layanan sosial yang memadai, dan memastikan ketersediaan program pensiun yang memadai adalah langkah-langkah krusial untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk tua di masa depan. Kebutuhan akan layanan kesehatan yang diperluas dan terjangkau menjadi kritis, serta dukungan bagi lansia yang membutuhkan asisten di rumah atau dalam fasilitas perawatan khusus. Ini menyoroti kebutuhan untuk mempersiapkan infrastruktur sosial dan ekonomi yang dapat mendukung peningkatan jumlah penduduk lanjut usia, memastikan bahwa fasilitas dan sumber daya yang cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan ini.

### 3.2. Proyeksi Tingkat Fertilitas Penduduk

Perubahan demografis, khususnya penurunan tingkat fertilitas, memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan reproduksi dan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kebijakan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, kebijakan yang efektif perlu meliputi pengembangan program dukungan keluarga, peningkatan akses ke layanan kesehatan reproduksi, dan pendidikan komprehensif tentang perencanaan keluarga. Memahami dan merespons dinamika demografis ini secara proaktif adalah kunci untuk menjaga keseimbangan demografis dan memastikan keberlanjutan sosial dan ekonomi. Implementasi kebijakan yang berhasil akan sangat bergantung pada kerjasama antar sektor serta ketersediaan data yang akurat untuk informasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan.

**Tabel 3. 2.** Proyeksi Parameter Jumlah Penduduk

<b>Parameter</b>	<b>2020</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>	<b>2050</b>
Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,23	2,17	2,13	2,08	2,05	2,01
Crude Birth Rate (CBR)	18,79	17,34	16,06	15,11	14,42	14,01	13,63
Eo Laki-laki/ <i>Male</i>	71,19	71,63	71,82	72,47	72,87	73,06	73,15
Eo Perempuan/ <i>Femal</i> <i>e</i>	75,15	76,34	77,00	77,94	78,53	78,84	79,00
Eo L+P/ <i>M+F</i>	73,13	73,94	74,36	75,15	75,64	75,89	76,02

*Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024*

Tabel 3.2, menyajikan proyeksi parameter jumlah penduduk yang mencakup Total Fertility Rate (TFR), Crude Birth Rate (CBR), serta harapan hidup untuk laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi dari tahun 2020 hingga 2050. Data ini mengungkapkan beberapa tren penting dalam dinamika demografis Provinsi Jambi.

Pertama, terdapat tren penurunan dalam TFR dari 2,28 pada tahun 2020 menjadi 2,01 pada tahun 2050. Penurunan ini mencerminkan dampak dari peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, perluasan program keluarga berencana, serta perbaikan dalam pendapatan dan status sosioekonomi yang mempengaruhi keputusan keluarga dalam perencanaan jumlah anak. Sejalan dengan penurunan TFR, CBR juga diperkirakan menurun dari 18,79 pada tahun 2020 menjadi 13,63 pada tahun 2050, menunjukkan laju pertumbuhan populasi yang lebih lambat dan transisi demografis menuju pola keluarga yang lebih kecil.

Kedua, harapan hidup pada kelahiran untuk laki-laki dan perempuan terus meningkat. Untuk laki-laki, proyeksi harapan hidup meningkat dari 71,19 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,15 tahun pada tahun 2050, sementara untuk perempuan, diperkirakan meningkat dari 75,15 tahun menjadi 79,00 tahun dalam periode yang sama. Peningkatan ini diharapkan sebagai hasil dari perbaikan layanan kesehatan, penurunan angka kematian bayi dan anak, serta adopsi gaya hidup yang lebih sehat. Peningkatan harapan hidup ini

berkontribusi pada penurunan TFR, karena umur yang lebih panjang sering kali berkorelasi dengan keinginan untuk memiliki anak lebih sedikit.

Ketiga, kombinasi antara TFR yang lebih rendah dan peningkatan harapan hidup akan memicu perubahan signifikan dalam struktur usia penduduk. Provinsi Jambi mungkin akan mengalami penuaan populasi dalam jangka panjang, sebuah kondisi yang memerlukan perencanaan kebijakan yang matang. Kebijakan tersebut harus mempersiapkan layanan kesehatan dan sosial yang sesuai, serta program dukungan untuk populasi usia kerja dan lansia, untuk menghadapi perubahan demografis ini secara efektif.

### 3.3. Proyeksi Tingkat Mortalitas

Analisis proyeksi tingkat mortalitas di Provinsi Jambi untuk periode 2025 hingga 2050, seperti disajikan dalam Tabel 3.3 dari BPS Provinsi Jambi tahun 2024, menyoroti beberapa aspek penting terkait dengan kesehatan dan demografi penduduk. Penurunan signifikan pada Tingkat Mortalitas Bayi (IMR) untuk kedua jenis kelamin—dari 20,73 per 1000 kelahiran hidup menjadi 9,84 untuk laki-laki, dan dari 14,69 menjadi 7,40 untuk perempuan—menunjukkan kemajuan dalam kesehatan ibu dan anak. Ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan, vaksinasi yang lebih meluas, dan edukasi kesehatan yang lebih efektif, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan neonatal dan maternal.

Di sisi lain, terdapat peningkatan Tingkat Kematian Kasar (CDR) dari 4,76 pada tahun 2020 menjadi 9,74 pada tahun 2050, dan jumlah kematian yang meningkat dari 16,85 ribu menjadi 43,93 ribu, menandakan tantangan yang dihadapi akibat dinamika demografis, khususnya penuaan populasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek kesehatan, penuaan populasi dapat meningkatkan beban penyakit kronis dan kondisi terkait usia, memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan layanan kesehatan dan sosial.

Analisis proyeksi tingkat mortalitas di Provinsi Jambi untuk periode 2025 hingga 2050, seperti disajikan dalam Tabel 3.3 dari BPS Provinsi Jambi tahun 2024, menyoroti beberapa aspek penting terkait

dengan kesehatan dan demografi penduduk. Penurunan signifikan pada Tingkat Mortalitas Bayi (IMR) untuk kedua jenis kelamin—dari 20,73 per 1000 kelahiran hidup menjadi 9,84 untuk laki-laki, dan dari 14,69 menjadi 7,40 untuk perempuan—menunjukkan kemajuan dalam kesehatan ibu dan anak. Ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan, vaksinasi yang lebih meluas, dan edukasi kesehatan yang lebih efektif, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan neonatal dan maternal.

Di sisi lain, terdapat peningkatan Tingkat Kematian Kasar (CDR) dari 4,76 pada tahun 2020 menjadi 9,74 pada tahun 2050, dan jumlah kematian yang meningkat dari 16,85 ribu menjadi 43,93 ribu, menandakan tantangan yang dihadapi akibat dinamika demografis, khususnya penuaan populasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek kesehatan, penuaan populasi dapat meningkatkan beban penyakit kronis dan kondisi terkait usia, memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan layanan kesehatan dan sosial.

**Tabel 3.3.** Proyeksi Tingkat Mortalitas

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
IMR Laki-laki/ <i>Male</i>	20,73	16,92	14,95	12,07	10,81	10,17	9,84
IMR Perempuan/ <i>Female</i>	14,69	12,09	10,74	8,82	8,02	7,61	7,40
IMR L+P/ <i>M+F</i>	17,79	14,57	12,90	10,48	9,45	8,92	8,65
CDR	4,76	5,26	6,05	6,76	7,67	8,70	9,74
Jumlah Kematian/ <i>Number of Deaths</i> (000)	16,85	19,82	24,04	28,05	32,97	38,46	43,93

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Harapan hidup, baik untuk laki-laki maupun perempuan, diperkirakan meningkat—dari 71,19 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,15 tahun untuk laki-laki, dan dari 75,15 tahun menjadi 79,00 tahun

untuk perempuan pada tahun 2050—menunjukkan kemajuan dalam kesehatan publik dan aksesibilitas serta kualitas layanan kesehatan. Ini mungkin didorong oleh inovasi dalam pengobatan, peningkatan nutrisi, dan kebijakan kesehatan masyarakat yang efektif. Proyeksi juga menunjukkan bahwa jumlah lansia diperkirakan akan mencapai tiga kali lipat dari jumlah saat ini pada tahun 2050, menandai pergeseran demografis yang memerlukan perencanaan matang dan penyesuaian kebijakan, terutama dalam sektor kesehatan, pensiun, dan dukungan sosial, untuk memastikan kesejahteraan lansia di masa depan.

Dengan mempertimbangkan penurunan IMR dan peningkatan CDR serta jumlah kematian akibat penuaan populasi, penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di sektor kesehatan untuk mengadaptasi dan meningkatkan strategi kesehatan publik. Fokus pada pencegahan penyakit kronis, penguatan sistem perawatan kesehatan primer, dan memastikan akses universal ke layanan kesehatan preventif dan kuratif, serta meningkatkan kualitas hidup orang lanjut usia melalui program kesehatan dan sosial yang komprehensif, akan menjadi kunci dalam mengelola konsekuensi dari penuaan populasi dan memastikan kesejahteraan semua warga Provinsi Jambi.

Di sisi lain, Tingkat Mortalitas Bayi (IMR) untuk kedua kelamin menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode yang sama, dengan IMR laki-laki menurun dari 20,73 per 1000 kelahiran hidup menjadi 9,84, dan IMR perempuan menurun dari 14,69 menjadi 7,40. Penurunan ini merupakan indikator penting dari peningkatan kesehatan ibu dan anak, menandakan keberhasilan upaya-upaya dalam menangani masalah kesehatan neonatal dan maternal, serta meningkatkan cakupan imunisasi dan layanan kesehatan anak.

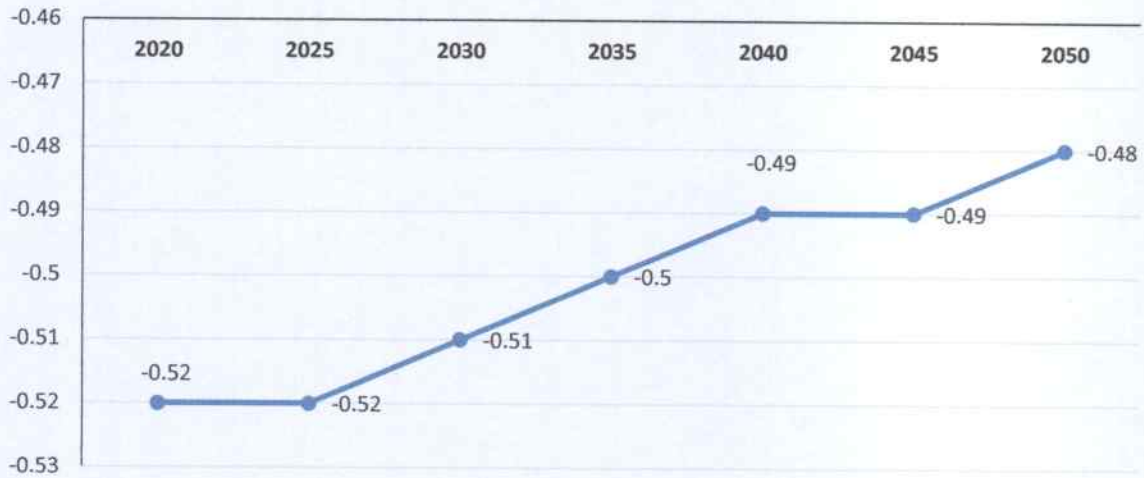
Namun, terdapat peningkatan dalam Tingkat Kematian Kasar (CDR) dari 4,76 pada tahun 2020 menjadi 9,74 pada tahun 2050. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek kesehatan, Provinsi Jambi menghadapi tantangan dari penuaan populasi. Penuaan populasi dapat menyebabkan peningkatan beban penyakit kronis dan kondisi terkait usia, yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan layanan kesehatan dan sosial.

Jumlah kematian, yang juga meningkat dari 16,85 ribu pada tahun 2020 menjadi 43,93 ribu pada tahun 2050, lebih lanjut menegaskan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi akibat dinamika demografis ini. Peningkatan jumlah kematian ini tidak hanya mencerminkan peningkatan CDR tetapi juga pertumbuhan populasi dan perubahan komposisi umur populasi. Dengan meningkatnya proporsi populasi lanjut usia, ada kebutuhan yang meningkat untuk layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usia ini.

Menghadapi tantangan tersebut, penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di sektor kesehatan untuk mengadaptasi dan meningkatkan strategi kesehatan publik. Ini termasuk fokus pada pencegahan penyakit kronis, memperkuat sistem perawatan kesehatan primer, dan memastikan akses universal ke layanan kesehatan preventif dan kuratif. Selain itu, meningkatkan kualitas hidup orang lanjut usia, melalui program kesehatan dan sosial yang komprehensif, akan menjadi kunci dalam mengelola konsekuensi dari penuaan populasi dan memastikan kesejahteraan semua warga Provinsi Jambi.

#### 3.4. Proyeksi Migrasi

Nilai Net Migration Rate (NMR) yang negatif di Provinsi Jambi mencerminkan fenomena migrasi keluar yang lebih signifikan dibandingkan dengan migrasi masuk. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator berbagai tantangan yang dihadapi oleh provinsi, termasuk kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, kesempatan kerja yang terbatas, dan akses yang kurang memadai ke pendidikan atau layanan kesehatan berkualitas. Faktor-faktor ini berpotensi mendorong penduduk Jambi untuk mencari peluang yang lebih baik di luar daerah, termasuk ke luar negeri. Selain itu, kondisi sosial-politik yang labil, masalah lingkungan, atau infrastruktur yang kurang memadai juga dapat menjadi faktor pendorong migrasi keluar.



**Gambar 3. 1 . Net Migration Rate**  
 Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan Gambar 3.1 menunjukkan Berdasarkan Gambar 3.1, tren Net Migration Rate dari tahun 2020 hingga 2050 menunjukkan perbaikan perlahan namun stabil terhadap nilai migrasi negatif. Pada tahun 2020, NMR tercatat sebesar -0,52, yang mengindikasikan bahwa jumlah orang yang meninggalkan provinsi lebih banyak dibandingkan dengan yang datang. Meskipun demikian, seiring waktu, terdapat penurunan kecil namun konsisten pada angka tersebut, menandakan adanya perbaikan bertahap. Antara tahun 2020 hingga 2025, angka tersebut stabil pada -0,52, menunjukkan stagnasi sementara. Namun, dari tahun 2025 hingga 2050, NMR secara bertahap membaik (menjadi kurang negatif) dari -0,51 menjadi -0,48. Meski perubahannya tergolong kecil, hal ini mencerminkan potensi perbaikan dalam aspek-aspek seperti kondisi ekonomi, kebijakan migrasi, atau faktor sosial-politik yang mempengaruhi keputusan untuk migrasi. Pergerakan ini menuju nilai yang kurang negatif menunjukkan upaya dan perubahan yang sedang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi pendatang atau untuk mempertahankan penduduk.

Untuk mengatasi masalah migrasi keluar dan mendorong NMR menjadi lebih positif atau setidaknya lebih seimbang, pemerintah daerah dan stakeholder terkait harus mengidentifikasi dan menanggulangi akar masalah yang mendorong emigrasi. Ini termasuk peningkatan ekonomi lokal melalui investasi di sektor kunci,

pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan akses ke layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dan stabilitas sosial-politik. Dengan strategi komprehensif, kondisi ekonomi Jambi yang membaik diharapkan dapat menarik lebih banyak pendatang. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jambi dan pengaruh globalisasi juga menciptakan peluang kerja yang lebih luas, yang bisa memicu migrasi keluar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara menarik pendatang baru dan mempertahankan penduduk lokal dengan meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi di dalam provinsi.

#### **3.4. Proyeksi Indikator Perencanaan program kesehatan dan keluarga berencana**

Peningkatan tren dalam jumlah Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) menandakan pertumbuhan populasi dalam usia reproduksi yang membawa implikasi signifikan bagi layanan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Kebutuhan untuk mengadaptasi dan meningkatkan layanan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang menjadi krusial, termasuk memperluas akses ke pendidikan reproduksi dan metode kontrasepsi efektif.

Indikator kesehatan reproduksi seperti Age-Specific Fertility Rate (ASFR) dan Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), bersama dengan penggunaan Long-Acting Reversible Contraception (LARC) dan pengukuran 'Unmet Need', menjadi kunci dalam mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan kontraseptif. Efektivitas layanan kontrasepsi tidak hanya mendukung kebebasan individu dalam membuat keputusan kesehatan reproduksi, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan wanita dan pasangan.

**Tabel 3. 4.** Program kesehatan dan keluarga berencana

<b>Indikator</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>	<b>2050</b>
mCPR	66,74	70,21	73,86	77,70	81,73	85,98
MKJP	24,66	38,78	49,64	58,00	64,44	69,40
Unmet Need	8,66	7,46	6,45	5,60	4,88	4,27
MUKP	21,37	21,55	21,72	21,89	22,05	22,21

*Sumber: BKKBN, 2024*

Berdasarkan Tabel 3.4 menunjukkan prevalensi kontrasepsi modern yang tinggi dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan kesejahteraan keluarga, mendukung pengembangan sosioekonomi yang lebih berkelanjutan. Penurunan Unmet Need dari 8,66% menjadi 4,27% menunjukkan peningkatan akses dan penggunaan kontrasepsi yang efektif, menandakan kemajuan menuju pemenuhan kebutuhan kontrasepsi dan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan.

Indikator LARC menunjukkan peningkatan penggunaan dari 24,66% menjadi 69,40%, menandakan preferensi yang meningkat terhadap kontrasepsi berdurasi panjang yang efektif. Ini berpotensi memainkan peran penting dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesehatan reproduksi.

Peningkatan mCPR dan penggunaan LARC mencerminkan keberhasilan program keluarga berencana dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Ini menunjukkan adanya perubahan sikap positif terhadap kontrasepsi modern dan pendidikan kesehatan reproduksi. Penurunan Unmet Need menunjukkan bahwa lebih banyak wanita dan pasangan memiliki akses ke kontrasepsi yang mereka butuhkan, mengurangi jumlah kehamilan yang tidak direncanakan dan mendukung kesejahteraan keluarga. Peningkatan MUKP secara bertahap menandakan kemungkinan perubahan dalam norma sosial dan peningkatan akses ke pendidikan, memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang kapan mereka ingin memulai keluarga.

Strategi untuk masa depan harus terus memfokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi, pendidikan seksual yang komprehensif, dan pemberdayaan wanita untuk membuat keputusan kesehatan reproduksi. Peningkatan investasi dalam layanan kesehatan reproduksi dan program keluarga berencana yang inovatif akan memperkuat upaya ini, memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk merencanakan keluarga sesuai dengan keinginan dan kondisi mereka, dan mendukung pembangunan sosial ekonomi

**BAB IV**  
**VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN**  
**KEPENDUDUKAN DAERAH**

Pencapaian target-target ini dijadwalkan dengan indikator kinerja yang jelas dalam jangka waktu 2025 hingga 2050, mengukur kemajuan secara berkala untuk memastikan bahwa daerah tersebut terus bergerak menuju pencapaian visi pembangunan kependudukan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan jangka pendek tetapi juga pada kesejahteraan generasi mendatang.

4.1. Visi Provinsi Jambi

Perencanaan Pembangunan Kependudukan strategis yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung visi RPJPD untuk menciptakan "Jambi yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan." Fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup semua lapisan masyarakat, yang sejalan dengan konsep "Terjaganya penduduk tumbuh seimbang (PTS)". Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung dalam harmoni dengan sumber daya yang tersedia, infrastruktur, dan layanan sosial, sehingga semua warga memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan sosial tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada lingkungan atau struktur sosial.

Langkah-langkah ini juga terkait erat dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan rangkaian target global yang ditetapkan oleh PBB untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. Peningkatan kualitas keluarga, sebagai salah satu aspek dari SDGs, mengacu pada penyediaan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang efisien, dan kesetaraan gender yang lebih besar, serta mengurangi kesenjangan dalam hal akses ke sumber daya dan layanan. Dalam konteks Jambi, ini berarti mengembangkan kebijakan yang mendukung keluarga melalui program kesejahteraan

sosial, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta inisiatif untuk memperkuat kapasitas ekonomi keluarga.

Komitmen pemerintah daerah Jambi untuk melaksanakan kebijakan ini dalam kerangka waktu 2025 hingga 2050 menunjukkan visi jangka panjang yang diharapkan tidak hanya meningkatkan profil ekonomi dan sosial provinsi tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan tersebut. Melalui pendekatan holistik dan inklusif ini, Jambi berusaha menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju dari segi material tetapi juga kokoh dalam nilai-nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian SDGs secara nasional dan global.

Berdasarkan Visi GDPK Nasional dan RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045 maka dirumuskan Visi GDPK Provinsi Jambi 2025-2050 sebagai berikut: Mewujudkan Penduduk Jambi yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Provinsi Jambi yang maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan

#### 4.2. Misi Provinsi Jambi

Untuk menunjang pengembangan berkelanjutan dan integratif, Provinsi Jambi telah merumuskan dua jenis misi dalam dokumen perencanaannya: Misi umum yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJP) dan Misi khusus yang terkait dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Kedua misi ini memiliki tujuan yang sinergis namun fokus pada aspek berbeda dari pembangunan dan kependudukan.

##### 4.2.1. **Misi Provinsi Jambi berdasarkan RPJPD Provinsi Jambi**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJP) Daerah Provinsi Jambi menetapkan beberapa misi yang dirancang untuk mengarahkan pembangunan daerah selama periode waktu tertentu. Misi-misi ini umumnya mencerminkan prioritas strategis pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan lokal dan memanfaatkan potensi regional untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Adapun misi dalam RPJPD Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

3. Mewujudkan Transformasi tata kelola Pemerintah
4. Memantapkan Ketenteraman dan ketertiban Umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
5. Memantapkan ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Transformasi Penyediaan Sarana Prasarana Daerah
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

#### 4.2.2. **Misi Provinsi Jambi Secara Khusus terkait GDPK**

Untuk khusus Misi Provinsi Jambi yang terkait dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) bertujuan untuk memastikan bahwa kependudukan dan pembangunan di daerah tersebut berjalan secara sinergis, efisien, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa misi yang mungkin tercakup dalam GDPK tersebut:

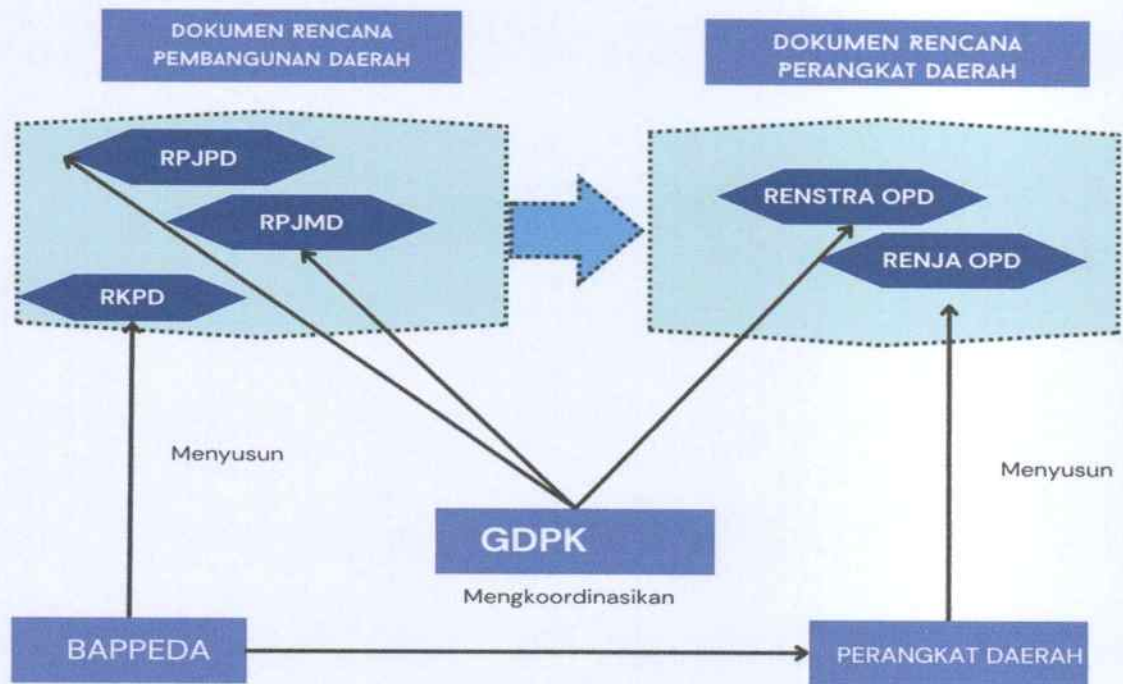
1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral Pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan Provinsi Jambi ke dalam kebijakan pembangunan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan hidup
2. Mendorong tercapainya jejaring (*networking*) dan sinkronisasi kebijakan antar pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta pemerintah pusat dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.
3. Memfasilitasi perkembangan kependudukan provinsi jambi kearah penduduk tumbuh seimbang, struktur dan pesebaran penduduk dengan lingkungan hidup baik daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya
4. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara singergis antar wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, yaman, cepat dan terjangkau.
5. Membangun potensi dan sinergi pelaku kependudukan pada level individu, keluarga dan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang Sejahtera, sehat, maju, dan harmonis, serta yang

- berkeadilan dan berkesetaraan gender yang mampu merencanakan sumberdaya keluarga dan jumlah anak yang ideal
6. Mewujudkan migrasi tenaga kerja Nasional dan Internasional secara terarah, tertib dan terlindungi
  7. Membuka partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan dalam tatakelola kependudukan berbasis digitalisasi dengan system informasi dan data kependudukan yang transparan dan akuntabel.
  8. Membangun kesadaran, sikap dan kebijakan bagi kesamaan hak dan kewajiban antar kelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, demi tercapainya Provinsi Jambi yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan
  9. Membangun pencapaian keluarga berkualitas dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)

Penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) menjadi sangat urgennya untuk memastikan pembangunan kependudukan di Indonesia terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 153 Tahun 2014 pada 17 Oktober 2014, pemerintah menegaskan pentingnya memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola dan mengarahkan pembangunan kependudukan di tingkat nasional dan daerah. Inisiatif ini mencerminkan kesadaran dan respons terhadap dinamika kependudukan serta tantangan dan peluang yang timbul dari kondisi demografis Indonesia.

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan dengan penyusunan dan implementasi GDPK yang efektif, pemerintah berusaha untuk mengatasi permasalahan demografis, memanfaatkan potensi kependudukan, dan mencapai tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa Indonesia dapat mengoptimalkan aset demografisnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Dokumen GDPK yang memberikan visi jangka Panjang 25 Tahun, kemudian dijabarkan dalam RPJMD atau RPKMD untuk periode

5 tahunan, yang selanjutnya diuraikan dalam RKPD setiap tahun, dan akhirnya diterapkan dalam Renstra dan Renja OPD untuk operasionalisasi pada tingkat organisasi perangkat daerah.



**Gambar 4. 1.** Keterkaitan Dokumen GDPK, dan Dokumen Daerah lainnya

Berikut urgensi penyusunan dokumen GDPK Provinsi Jambi:

1. Mengintegrasikan Kependudukan dalam Pembangunan  
GDPK memungkinkan integrasi isu kependudukan dalam semua aspek pembangunan, memastikan bahwa pertumbuhan penduduk, distribusi, dan komposisi demografis diperhitungkan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.
2. Pengelolaan Sumber Daya dan Kapasitas Daerah  
Dokumen ini membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya secara lebih efektif, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan spesifik daerah berdasarkan kondisi kependudukannya.
3. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan  
GDPK bertujuan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup, pengurangan ketimpangan, dan pengelolaan lingkungan yang baik.

#### 4. Menanggapi Dinamika Demografis

Indonesia menghadapi berbagai tantangan demografis, seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, perubahan struktur umur, dan mobilitas penduduk. GDPK menyediakan kerangka kerja untuk menanggapi tantangan ini secara strategis.

#### 5. Memanfaatkan Bonus Demografi

Dengan perencanaan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi yang merupakan kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan yang tidak produktif, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini Provinsi Jambi telah memasuki bonus demografi lanjut sehingga hal ini merupakan peluang dan kekuatan untuk pembangunan yang akan lebih maju kedepannya.

#### 6. Sinergi Pembangunan Nasional dan Daerah

GDPK memfasilitasi koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan implementasi strategi pembangunan kependudukan, memastikan keselarasan tujuan dan optimalisasi hasil pembangunan.

### 4.3. **Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah**

Isu Strategis GDPK 5 pilar merupakan gambaran singkat tentang lima pilar pembangunan kependudukan yang mencakup pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas penduduk, dan pengembangan sistem data dan informasi kependudukan.



**Gambar 4. 2.** Tantangan GDPK Provinsi Jambi 2025-2050

Provinsi Jambi menghadapi tantangan signifikan dalam pertumbuhan Peningkatan Data Kependudukan (GDPK) menjelang tahun 2025 hingga 2050. Dengan pendekatan multi-sektoral dan inklusif ini, Provinsi Jambi dapat mengatasi tantangan GDPK dengan lebih efektif dan mengarah pada pencapaian tujuan yang berkelanjutan sesuai dengan SDGs dan penduduk tumbuh seimbang (PTS). Secara lebih detail dapat dibahas beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Provinsi Jambi selama Periode 2025-2050:

#### **A. Pengendalian Kuantitas Penduduk**

##### **1. Fertilitas Lebih Tinggi dibandingkan Nasional**

Fertilitas di provinsi ini lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2.28, yang lebih besar dari target nasional sebesar 2,1. Ini berarti akan terjadi pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi. Terdapat dua kabupaten dalam kategori siaga, yaitu Kabupaten Sarolangun dengan TFR 2,64 dan Kabupaten Tebo dengan TFR 2,45. Dibandingkan dengan TFR nasional yang sebesar 2,18, TFR Provinsi Jambi lebih tinggi, dan berada dalam kategori waspada,. Selain itu, sex ratio di provinsi ini adalah 98,36, yang berarti untuk setiap 100 perempuan, terdapat sekitar 98,36 laki-laki, sehingga terdapat lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki dalam populasi

## **2. Disparitas Usia Kawin Pertama Kabupaten/Kota**

Disparitas usia pernikahan pertama antarkabupaten/kota di Provinsi Jambi masih terjadi. Saat ini, usia kawin pertama di Provinsi Jambi rata-rata adalah 20,21 tahun, yang berada dalam kategori waspada karena belum mencapai angka normal antara 21 dan 23 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh delapan kabupaten yang masih dalam status siaga, yaitu Kabupaten Kerinci dengan usia 19,31 tahun, Kabupaten Merangin 19,42 tahun,, Kabupaten Sarolangun 19,66 tahun, Kabupaten Batanghari 19,97 tahun,, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 19,88, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 19,95, Kabupaten Bungo 19,53 tahun, dan Kabupaten Tebo 19,59 tahun. Sementara itu, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, dengan usia kawin pertama masing-masing 20,39 tahun dan 23,68 tahun, masih berstatus waspada. Hanya Kota Sungai Penuh yang berhasil mencapai target dengan usia kawin pertama yang ideal. Dibandingkan dengan capaian nasional, Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan dan mendekati target indikator tersebut.

## **3. Rendahnya Kepersertaan MKJP**

Rendahnya tingkat kepesertaan dalam program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menyebabkan hanya satu wilayah di Provinsi Jambi yang mencapai target nasional, yaitu Kota Sungai Penuh dengan persentase 36,20%. Sementara itu, delapan kabupaten dan satu kota lainnya masih berada di bawah target, antara lain: Kabupaten Merangin dengan 17,23%, Kabupaten Sarolangun 17,98%, Kabupaten Batanghari 17,11%, Kabupaten Muaro Jambi 11,18%, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 11,67%, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 14,26%, Kabupaten Bungo 15,23%, Kabupaten Tebo 15,91%, dan Kota Jambi 17,63%. Kabupaten Kerinci, yang mencatat 28,32%, berada dalam status waspada. Secara keseluruhan, Provinsi Jambi dikategorikan dalam status siaga karena kepesertaan yang masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 22,2%.

#### **4. Belum Tercapainya Target Unmet-Need**

Target Unmet-Need Provinsi Jambi sebesar 9,18 belum mencapai target nasional yang kurang dari 7,5. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Unmet-Need nasional yang bernilai 11,50 pada tahun 2023, Provinsi Jambi menunjukkan performa yang lebih baik dengan target capaian 9,13, walaupun masih berada dalam kategori waspada. Dari 11 kabupaten/kota, ada satu kabupaten dan satu kota yang telah memenuhi target nasional. Di tingkat kabupaten/kota, terdapat empat kabupaten di Provinsi Jambi yang masuk dalam kategori siaga, yaitu Kabupaten Sarolangun dengan 10,89, Kabupaten Muaro Jambi 12,67, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 14,65, dan Kota Jambi 11,52. Sementara itu, empat kabupaten lainnya berada dalam kategori waspada, yaitu Kabupaten Batanghari dengan 7,66, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 7,84, Kabupaten Bungo juga 7,84, dan Kabupaten Tebo 8,67."

#### **5. Pesatnya Pertumbuhan Lansia**

Berdasarkan proyeksi TFR, di tahun 2040, penduduk Provinsi Jambi diperkirakan akan mencapai 4.298,89 ribu jiwa, dengan peningkatan proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) yang lebih besar dibandingkan dengan usia muda. Pada tahun 2040, rasio ketergantungan usia tua diperkirakan sebesar 17,04 persen, artinya dari setiap 100 orang usia kerja, sekitar 17,04 lansia akan membutuhkan dukungan ekonomi seperti pensiun, perawatan kesehatan, atau bantuan sosial lainnya. Jumlah ini akan meningkat menjadi 22,71 persen di tahun 2050. Di sisi lain, tren rasio ketergantungan usia muda diperkirakan menurun menjadi 31,23 persen di tahun 2050, yang berarti 31 dari setiap 100 orang dewasa yang bekerja akan bertanggung jawab menyediakan kebutuhan ekonomi bagi anak-anak dan remaja, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2050, penduduk diperkirakan bertambah menjadi 4.512,14 ribu jiwa. Proporsi penduduk lansia di tahun 2040 diperkirakan mencapai 11,40 persen dari total populasi, menandai Provinsi Jambi sebagai daerah dengan populasi tua yang signifikan. Rasio ini memiliki

implikasi penting dalam perencanaan alokasi sumber daya dan layanan publik, termasuk sekolah dan fasilitas kesehatan.

## **B.Peningkatan Kualitas Penduduk**

### **1. Disparitas Prevalensi Stunting Di Kabupaten/Kota Cukup Tinggi**

Kualitas penduduk, khususnya dalam mengatasi prevalensi stunting, menjadi fokus utama di Provinsi Jambi. Berdasarkan data SIPERINDU, Provinsi Jambi mencatat prevalensi stunting sebesar 3,15, yang sesuai dengan target nasional di bawah 14. Ini menunjukkan bahwa capaian Provinsi Jambi lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional yang cenderung tinggi, yaitu 21,5, dalam kategori siaga. Namun, terdapat disparitas yang signifikan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Empat kabupaten dan satu kota berada dalam kategori siaga, sementara empat kabupaten lainnya dalam kategori waspada. Upaya untuk menurunkan prevalensi stunting perlu ditingkatkan, termasuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan ibu dan anak, mengoptimalkan fungsi Posyandu, serta menyediakan bantuan vitamin dan makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita

### **2. Disparitas Pendidikan Antar Wilayah**

Tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Jambi untuk usia 13-15 tahun adalah 96,01 persen, namun masih di bawah capaian nasional Indonesia sebesar 98,10 persen. Target indikator nasional untuk kelompok usia ini adalah 100 persen. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi meliputi mempermudah akses ke fasilitas pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Untuk kelompok usia 16-18 tahun, baik Provinsi Jambi maupun Indonesia berada dalam kategori waspada, dengan capaian masing-masing sebesar 72,46 persen, yang masih di bawah target nasional di atas 80 persen. Sementara itu, tingkat partisipasi sekolah untuk usia 7-12 tahun di Provinsi Jambi adalah 99,49 persen dan di Indonesia 99,16 persen, tetapi kedua capaian tersebut masih di bawah target nasional 100 persen.

Mengingat tantangan pada ketiga kategori usia tersebut, pemerintah perlu memfokuskan upaya pada mempermudah akses ke fasilitas pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, terutama di tingkat Sekolah Dasar, untuk mencapai target partisipasi sekolah yang ditetapkan. Perubahan ini memastikan bahwa data dan persentase yang disajikan konsisten dan mudah dipahami, serta menekankan upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target partisipasi sekolah nasional.

### **3. Pemanfaatan Bonus Demografi**

Saat ini, Provinsi Jambi telah memasuki Tahap 4 Bonus Demografi Lanjut, sejalan dengan capaian Indonesia secara keseluruhan. Namun, capaian bonus demografi di tingkat kabupaten/kota masih berada pada tahap Bonus Demografi Sedang Berjalan. Untuk mencapai Tahap Bonus Demografi Lanjut, pemerintah perlu mengimplementasikan strategi komprehensif yang melibatkan sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebijakan sosial. Langkah-langkah khusus termasuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan fokus pada peningkatan akses ke pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, pengembangan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta penyediaan beasiswa dan insentif untuk studi di bidang kritis. Di sektor kesehatan, perlu ada peningkatan melalui program preventif dan promotif, penambahan fasilitas kesehatan, serta pengembangan program kesehatan reproduksi. Dalam ketenagakerjaan, kebijakan harus ditujukan untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan berkelanjutan, yang mencakup penciptaan lapangan kerja melalui investasi di sektor baru, reformasi peraturan tenaga kerja, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung efisiensi industri. Strategi ekonomi harus difokuskan pada peningkatan iklim investasi, dukungan untuk UMKM dan industri lokal, serta pendorongan terhadap inovasi dan riset. Sistem jaminan sosial juga perlu diperkuat untuk melindungi masyarakat yang rentan, termasuk program pensiun, asuransi kesehatan, dan bantuan sosial. Pemanfaatan bonus demografi harus diintegrasikan

dengan kebijakan ekonomi dan sosial yang cerdas untuk memastikan bahwa fase ini dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan ekonomi yang berkelanjutan

#### **4. Ketimpangan Gender**

Berdasarkan data sex ratio sebesar 98,36 persen, di Provinsi Jambi setiap 100 perempuan dari 98,36 persen laki-laki, yang menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Jambi berada dalam kategori Siaga dengan skor 67,86 persen, artinya sekitar 32 persen dari potensi penuh pemberdayaan gender belum tercapai. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesetaraan gender, terutama dalam hal kesempatan kerja yang setara, representasi politik, dan akses pendidikan tinggi bagi perempuan. Lima wilayah masih berada dalam kategori awas, yaitu Kabupaten Merangin 58,51 persen, Kabupaten Sarolangun 58,68 persen, Kabupaten Bungo 58,68 persen, Kabupaten Tebo 49,67 persen, dan Kota Sungai Penuh 53,40 persen. Empat wilayah lainnya termasuk dalam kategori siaga, yaitu Kabupaten Kerinci 60,26 persen, Kabupaten Muaro Jambi 63,70 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 68,98 persen, dan Kota Jambi 68,60 persen. Pencapaian pemberdayaan yang sangat rendah ini, jauh di bawah target RPJMN dan capaian nasional, mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai strategi guna meningkatkan pemberdayaan gender. Ini termasuk pengesahan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, seperti peraturan anti-diskriminasi dan hak reproduksi perempuan. Pemerintah juga berupaya melalui program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada perempuan guna meningkatkan keterampilan mereka, tidak hanya untuk mengurangi kesenjangan gender tetapi juga untuk memastikan kesetaraan peluang dalam semua aspek kehidupan.

#### **5. Kemiskinan Ekstrem**

Saat ini, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi adalah 7,6 persen, yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan

nasional Indonesia sebesar 9,36 persen. Meskipun kedua tingkat tersebut berada dalam kategori waspada, Provinsi Jambi menunjukkan performa yang lebih baik. Dari perspektif Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, semua wilayah saat ini berada dalam kategori waspada, menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih jauh dari target indikator nasional sebesar 0 persen. Di tingkat lokal, dua wilayah berada dalam kategori siaga, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tingkat kemiskinan 9,79 persen dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan 10,85 persen. Sementara itu, lima wilayah lainnya berada dalam kategori waspada, yaitu Kabupaten Kerinci 7,54 persen, Kabupaten Merangin 8,90 persen, Kabupaten Sarolangun 8,54 persen, Kabupaten Batanghari (9,45 persen), dan Kota Jambi 8,24 persen. Namun, ada empat wilayah yang telah mencapai tingkat kemiskinan di bawah 7 persen, yaitu Kabupaten Muaro Jambi (4,43 persen), Kabupaten Bungo 5,29 persen, Kabupaten Tebo 6,46 persen, dan Kota Sungai Penuh 3,00 persen. Mengingat pencapaian pemberdayaan yang belum optimal dan masih di bawah target RPJMN dan capaian nasional, pemerintah Provinsi Jambi perlu meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan serta memperkuat stabilitas ekonomi dan iklim investasi."

### **C. Pembangunan Keluarga**

#### **1. Belum Tercapainya Target Sanitasi Layak Dan Rumah Layak Huni**

Saat ini, Provinsi Jambi belum mencapai target nasional untuk sanitasi dan perumahan yang layak. Meskipun tingkat akses sanitasi layak di provinsi ini mencapai 83,04 persen dan berada dalam kategori waspada, angka tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Kerinci hanya memiliki akses sanitasi layak sebesar 68,98 persen, yang memasukkannya dalam kategori awas karena angka tersebut di bawah 70 persen. Selain itu, terdapat tiga kabupaten yang berada dalam kategori siaga, yaitu Kabupaten Sarolangun dengan 79,79 persen, Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dengan 77,87 persen, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan 74,96 persen. Adapun Kabupaten Merangin mencatat 81 persen, Kabupaten Batanghari 82,86 persen, Kabupaten Muaro Jambi 85,66 persen, Kabupaten Bungo 83,86 persen, dan Kabupaten Tebo 80,69 persen dalam hal akses sanitasi layak.

## **2. Air Minum Layak Masih Rendah Keterjangkauannya Di Provinsi Jambi**

Saat ini, Provinsi Jambi belum mencapai target RPJMN 2020-2024 dan performanya lebih buruk dibandingkan dengan capaian nasional. Provinsi ini mencatat capaian sebesar 80,02 persen dalam kategori siaga, yang masih di bawah capaian nasional sebesar 91,72 persen yang tergolong dalam kategori waspada, dengan target capaian nasional yang ditetapkan sebesar 100 persen. Di tingkat kabupaten/kota, enam wilayah berada dalam kategori awas karena capaiannya di bawah 80 persen, yaitu Kabupaten Kerinci (79,25), Kabupaten Merangin (55,90), Kabupaten Sarolangun (71,44), Kabupaten Muaro Jambi (73,00), Kabupaten Bungo (76,02), dan Kabupaten Tebo (74,76). Ada juga dua wilayah dalam kategori siaga, yaitu Kabupaten Batanghari (82,60) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (86,91). Selain itu, tiga wilayah dalam kategori waspada adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (92,04), Kota Jambi (98,41), dan Kota Sungai Penuh 90,74 persen. Mengingat rendahnya keterjangkauan air minum layak yang masih di bawah target RPJMN dan capaian nasional, pemerintah Provinsi Jambi sedang memperkuat program penyediaan air minum reguler dan pendampingan Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Upaya lain termasuk pengembangan inovasi dan teknologi pengolahan air bersih, serta peningkatan penggunaan sanitasi layak dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)."

## **3. Keterjangkauan Jaminan Kesehatan Masih Rendah**

Saat ini, keterjangkauan jaminan kesehatan di Provinsi Jambi masih rendah, hanya sekitar 55,86%, dan berada dalam kategori

awas karena indikatornya kurang dari 70%. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 72,38%, yang masuk kategori siaga, tetapi masih di bawah target indikator nasional sebesar 98%. Delapan kabupaten di Provinsi Jambi berada di bawah status awas karena tingkat keterjangkauan mereka di bawah 70%, yaitu Kabupaten Kerinci (44,61), Kabupaten Merangin (44,85), Kabupaten Sarolangun (51,79), Kabupaten Muaro Jambi (55,12), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (47,49), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (43,41), Kabupaten Bungo (51,84), dan Kabupaten Tebo (44,88). Sementara itu, Kabupaten Batanghari (74,94), Kota Jambi (76,63), dan Kota Sungai Penuh (77,86) berada dalam kategori siaga. Menghadapi tantangan keterjangkauan jaminan kesehatan di bawah target RPJMN dan capaian nasional, pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah-langkah seperti melakukan sosialisasi intensif mengenai jaminan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas hingga tenaga kesehatan, memastikan aksesibilitas yang baik dalam penggunaan jaminan kesehatan, dan memperkuat akurasi data sasaran peserta jaminan Kesehatan.

#### **4. Tingginya Angka Perceraian**

Tingginya angka perceraian di Provinsi Jambi sangat mencolok, yang terlihat dari peningkatan kasus cerai talak dan cerai gugat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, terdapat 1.329 kasus cerai talak dan 4.136 kasus cerai gugat. Mengingat angka perceraian masih di bawah target RPJMN dan capaian nasional, pemerintah Provinsi Jambi telah mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan layanan konseling pra-nikah dan pasca-nikah untuk membantu pasangan memahami dan mengatasi tantangan dalam pernikahan. Selain itu, program edukasi masyarakat mengenai pentingnya komunikasi yang efektif dan pemahaman bersama dalam keluarga juga diperkuat. Pemerintah juga melaksanakan program pembinaan keluarga yang menekankan pengelolaan keuangan yang baik, pengasuhan anak, dan kesehatan mental. Kerja sama dengan organisasi masyarakat dan

keagamaan ditingkatkan untuk mendukung pasangan dan memperkuat nilai-nilai keluarga. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan mempromosikan keharmonisan keluarga di Provinsi Jambi.

#### **D. Pesebaran Dan Pengarahan Mobilitas Penduduk**

##### **1. Tingkat Kepadatan Kota Jambi Tergolong Tinggi**

Salah satu tantangan demografis yang dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Kota Jambi, yang luasnya hanya 0,35 persen dari total luas provinsi, menanggung beban yang besar dengan 17,08 persen dari total penduduk provinsi pada tahun 2020. Tingkat kepadatan penduduk di kota ini mencapai 3.517,06 jiwa per kilometer persegi, menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam distribusi penduduk

##### **2. Adanya Ketimpangan wilayah di Perkotaan dan Pedesaan**

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah meningkatnya ketimpangan regional, yang diukur dengan indeks Williamson, serta ketimpangan antar golongan masyarakat, yang terlihat dari tren naiknya rasio Gini. Ketimpangan ini lebih tinggi di area perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Di sisi lain, urbanisasi dari desa ke kota juga meningkat, yang berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin di area perkotaan. Tantangan utama dalam mengarahkan mobilitas penduduk adalah mengelola urbanisasi yang cepat dan tidak terkendali, serta meminimalkan dampaknya terhadap infrastruktur, layanan publik, dan lingkungan. Terdapat ketidakseimbangan antara perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang juga perlu diperhatikan. Selain itu, kurangnya infrastruktur transportasi, terutama di daerah terisolasi atau terpencil, menjadi tantangan utama lainnya

##### **3. Disparitas Migrasi Risen Netto Antar Kabupaten/Kota Cukup Tinggi**

Kesenjangan migrasi netto antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi cukup signifikan, dengan Kota Sungai Penuh mencatat

angka migrasi netto tertinggi yaitu 2,63, sedangkan Kota Jambi dan Kabupaten Merangin memiliki angka terendah, yaitu -1,46. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan pembangunan serta perbedaan potensi yang besar antara berbagai daerah di provinsi tersebut

## **E. Penguatan Tata Kelola Administrasi**

- 1. Cakupan Akta Kelahiran Belum Mencapai Target**Target nasional untuk pencapaian cakupan akta kelahiran ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan data dari Siperindu BKKBN, Provinsi Jambi mencapai 95,06%, yang berada dalam kategori waspada ( $80 \leq \text{capaian} \leq 100$ ) dan lebih baik dari capaian nasional yang sebesar 91,79% dalam kategori yang sama. Namun, Provinsi Jambi masih belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor penyebab yang dapat mempengaruhi pencapaian target cakupan akta kelahiran meliputi: Pertama, aksesibilitas layanan pencatatan sipil yang mungkin sulit di beberapa wilayah terpencil. Kedua, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran masih rendah. Ketiga, tantangan geografis membuat proses pencatatan sipil menjadi lebih kompleks dan menantang. Untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran, pemerintah telah melakukan beberapa inisiatif, termasuk pemberian akta kelahiran secara massal di jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak yang bersekolah memiliki akta kelahiran. Pemerintah juga telah mengimplementasikan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) untuk memudahkan proses pencatatan dan identifikasi anak. Kegagalan mencapai target cakupan akta kelahiran dapat memiliki dampak signifikan, termasuk kesulitan dalam mengakses layanan publik dan pendidikan. Anak-anak tanpa akta kelahiran juga berisiko tinggi mengalami eksploitasi dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, mencapai target cakupan akta kelahiran sangat penting

## **2. Belum Terintegrasi Data Kependudukan**

Belum terintegrasinya data kependudukan merupakan kondisi di mana data dari berbagai lembaga atau instansi pemerintah belum terkonsolidasi dalam satu sistem terpadu. Kondisi ini sering disebabkan oleh ego sektoral di berbagai kementerian atau lembaga, di mana setiap entitas mempertahankan basis data tersendiri. Sebagai contoh, Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) mengelola data kependudukan dengan fokus pada aspek kemiskinan, sedangkan Kementerian Pertanian memiliki database yang berkaitan dengan klasifikasi pertanian. Badan Pusat Statistik pun memiliki set data yang berbeda dari lembaga lain. Akibatnya, perbedaan data antarlembaga ini menyebabkan kesulitan dalam koordinasi dan efektivitas pengawasan, termasuk dalam pengawasan terhadap orang asing. Ketidaksesuaian data ini juga menimbulkan masalah dalam penyaluran bantuan sosial dan kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap saat Pemilihan Umum. Oleh karena itu, integrasi data administrasi kependudukan sangat mendesak, memerlukan analisis mendalam dan evaluasi regulasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga untuk mengatasi masalah ini

## **3. Masih Belum Optimal Dalam Mengelola Data**

Optimalisasi pengelolaan data kependudukan adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data kependudukan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data tersebut akurat, terkini, dan mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkannya, termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, dan organisasi lainnya. Dengan demikian, data kependudukan dapat menjadi dasar yang solid dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Optimalisasi ini melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan infrastruktur fisik, termasuk pembangunan lebih banyak kantor administrasi kependudukan di daerah yang kekurangan fasilitas tersebut. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil. Ketiga,

penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk digitalisasi proses pencatatan dan pengelolaan data, yang sudah dimulai di beberapa desa. Misalnya, desa-desa tersebut menggunakan anggaran belanja untuk menyediakan layanan administrasi kependudukan, memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen penting. Diharapkan, dengan optimalisasi pengelolaan data kependudukan, dapat mendukung efektivitas kebijakan dan program pemerintah serta memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu terpenuhi. Akurasi dan kebaruan data kependudukan juga penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan publik yang mereka butuhkan

#### **4. Kepemilikan Dokumen Adminduk bayi Lahir Belum Punya Dokumen**

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran, sangat penting, termasuk untuk bayi. Dokumen ini adalah bukti resmi yang mengakui identitas dan kewarganegaraan seorang individu. Namun, masih banyak bayi yang tidak memiliki dokumen ini karena beberapa alasan. Faktor pertama adalah kurangnya kesadaran di kalangan orang tua tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan untuk bayi mereka. Kedua, aksesibilitas; di daerah terpencil, orang tua mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pencatatan sipil. Ketiga, proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu sering kali menjadi penghalang bagi orang tua untuk mengurus dokumen tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil. Kedua, meningkatkan akses ke layanan pencatatan sipil, terutama di daerah terpencil, sangat krusial. Ketiga, proses birokrasi untuk mendapatkan dokumen harus disederhanakan. Dengan cara ini, diharapkan setiap bayi dapat memiliki dokumen administrasi kependudukan sejak lahir, yang penting untuk mengakses berbagai layanan publik di masa depan

## BAB V

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan Pembangunan Kependudukan Daerah Provinsi Jambi difokuskan pada lima pilar utama: Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Pengembangan Database Kependudukan.

#### 5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Tantangan-tantangan yang dihadapi Provinsi Jambi dalam GDPK 2025-2050 mencakup fertilitas yang relatif tinggi, disparitas tinggi terkait usia kawin pertama antara kabupaten/kota, rendahnya kepesertaan MKJP, belum tercapainya target unmeet-need dan pesatnya pertumbuhan lansia. Oleh karenanya, dalam rangka mencapai visi pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan inklusif, Provinsi Jambi mengadopsi pendekatan holistik dan berkesinambungan dalam pengendalian kuantitas penduduk. Kebijakan dan strategi ini dirancang untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk dengan pengembangan sumber daya dan peningkatan kualitas hidup, melalui dua komponen utama: pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

##### 5.1.1. Pengaturan Fertilitas

Pengaturan fertilitas dirancang untuk mendukung pasangan suami istri dalam mengambil keputusan yang terinformasi terkait dengan perencanaan keluarga, dengan tujuan untuk:

1. **Usia Ideal Perkawinan dan Melahirkan:** Mengadvokasi usia perkawinan dan usia ideal melahirkan berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksi, kesiapan ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Ini termasuk kampanye kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kematangan fisik dan psikologis sebelum memasuki pernikahan dan kehamilan.
2. **Jarak Ideal Melahirkan:** Mempromosikan jarak kelahiran yang optimal untuk kesehatan ibu dan anak, memastikan waktu pemulihan bagi ibu dan perhatian yang memadai bagi anak. Program

ini melibatkan penyuluhan dan akses ke metode kontrasepsi yang sesuai.

3. **Jumlah Ideal Anak:** Mendorong kesadaran tentang manfaat memiliki jumlah anak yang dapat ditanggung oleh keluarga dari segi ekonomi dan kesehatan, serta memungkinkan investasi yang lebih baik pada pendidikan dan kesejahteraan setiap anak.

Langkah-langkah tersebut didukung oleh:

- **Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi, Edukasi, dan Komunikasi (KIE):** Menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses tentang perencanaan keluarga dan kontrasepsi, khususnya di daerah terpencil.
- **Larangan Pemaksaan Pelayanan KB:** Menegakkan prinsip hak asasi manusia dalam program KB, memastikan semua layanan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan keinginan pasangan.
- **Pelayanan Kontrasepsi:** Menyesuaikan pelayanan dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan.
- **Insentif dan Fasilitas:** Memberikan insentif dan fasilitas tambahan, seperti subsidi kontrasepsi dan akses ke layanan kesehatan reproduksi gratis, untuk meringankan beban finansial keluarga dan meningkatkan partisipasi dalam program keluarga berencana.

### 5.1.2. Penurunan Mortalitas

Kebijakan penurunan mortalitas bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, melalui upaya:

1. **Fokus pada Maternal dan Neonatal Health:** Meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk ibu hamil, melahirkan, dan pasca melahirkan, serta kesehatan bayi dan anak. Ini termasuk pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan komplikasi kehamilan dan kelahiran.
2. **Kesamaan Hak Reproduksi:** Memastikan bahwa baik suami maupun istri memiliki akses yang sama terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi, mendukung pembuatan keputusan bersama dalam hal perencanaan keluarga.

3. **Pencegahan dan Pengurangan Risiko:** Mengimplementasikan program yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesakitan dan kematian yang terkait dengan kehamilan dan kelahiran, termasuk nutrisi ibu hamil, imunisasi, dan sanitasi.
4. **Partisipasi Aktif Keluarga dan Masyarakat:** Mendorong dukungan dan partisipasi aktif dari keluarga dan masyarakat dalam kesehatan reproduksi, termasuk pendidikan kesehatan dan dukungan emosional bagi ibu hamil dan pasca melahirkan.

### 5.1.3. Strategi Pengendalian Kuantitas

Strategi pengendalian kuantitas penduduk di Provinsi Jambi memerlukan pendekatan yang inovatif, adaptif, dan berfokus pada kebutuhan serta preferensi masyarakat, termasuk. Strategi pengendalian kuantitas penduduk yang Provinsi Jambi sebagai berikut:

#### 1. Integrasi Program KB

Integrasi program KB ke dalam program pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi diarahkan untuk menciptakan sinergi dan memastikan bahwa kebijakan KB tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari upaya pembangunan yang lebih luas. Hal ini mencakup integrasi program KB dengan inisiatif pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan kesetaraan gender. Contohnya, program pemberdayaan perempuan dapat dikombinasikan dengan edukasi KB untuk meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan kontrasepsi.

#### 2. Desentralisasi Program KB

Desentralisasi program KB dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- **Penguatan Kelembagaan:** Memperkuat kapasitas institusi BKKBN dan institusi daerah lainnya dengan tupoksi pelayanan KB, melalui penyediaan sumber daya.
- **Pemberdayaan SDM:** Mengembangkan kapasitas SDM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
- **Komitmen Politik:** Membangun dan memperkuat komitmen politik pada semua tingkatan pemerintahan untuk mendukung

pelaksanaan program KB. Hal ini bisa melalui advokasi dan sosialisasi manfaat program KB untuk pembangunan daerah.

- **Infrastruktur:** Meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas kesehatan dan logistik, untuk memastikan pelayanan KB yang efektif dan efisien.
- **Otoritas Operasional:** Mendelegasikan otoritas operasional kepada kabupaten/kota untuk mengembangkan dan melaksanakan program KB sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

### 3. Kemitraan Program KB

Kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional menjadi kunci untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program KB. Strategi ini melibatkan:

- **Penguatan Kolaborasi:** Menciptakan platform kolaborasi untuk pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan best practices antarpemangku kepentingan.
- **Keterlibatan Sektor Swasta:** Menggali potensi keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan, inovasi, dan penyediaan layanan KB.
- **Sinergi dengan Lembaga Internasional:** Membangun kerja sama dengan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan teknis, pembiayaan, dan akses ke praktek terbaik global.

### 4. Fokus pada Penduduk Miskin

Memastikan bahwa program KB mencapai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan melalui:

- **Subsidi Layanan:** Menyediakan subsidi untuk layanan kesehatan reproduksi dan KB kepada masyarakat miskin, guna memastikan akses yang setara.
- **Pendekatan Berbasis Komunitas:** Menggunakan pendekatan yang berakar pada komunitas untuk menyebarkan informasi dan layanan KB, memanfaatkan struktur dan dinamika sosial yang ada.

## **5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk**

Tantangan-tantangan peningkatan kualitas penduduk dalam GDPK Provinsi Jambi 2025 – 2050 mencakup disparitas prevalensi stunting antar kabupaten/kota yang cukup tinggi, disparitas pendidikan penduduk antar kabupaten/kota, ketidaksesuaian kesempatan kerja dengan keterampilan SDM yang tersedia, perbedaan bonus demografi antar kabupaten/kota, ketimpangan gender yang masih tinggi, serta kemiskinan ekstrim. Oleh karenanya, peningkatan kualitas penduduk melalui kebijakan dan strategi yang komprehensif mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yang dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, terdidik, dan terintegrasi ke dalam struktur ekonomi yang inklusif. Upaya ini termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pelayanan kesehatan dasar yang merata, serta pengembangan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing ekonomi penduduk.

### **5.2.1. Kebijakan Dimensi Kesehatan**

1. ***Universal Health Coverage:*** Meluaskan cakupan asuransi kesehatan untuk semua penduduk, memastikan akses tanpa hambatan ke layanan kesehatan esensial termasuk pelayanan antenatal, imunisasi, dan kesehatan reproduksi, khususnya di wilayah terpencil dan bagi kelompok rentan. Ini juga meliputi pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai dan pelatihan tenaga kesehatan yang kompeten.
2. ***Program Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan:*** Mencakup vaksinasi, edukasi publik tentang gaya hidup sehat, dan aksesibilitas air bersih dan sanitasi untuk membangun masyarakat yang sehat dan produktif..
3. ***Peningkatan Nutrisi Masyarakat:*** Mengimplementasikan kebijakan untuk memperbaiki status gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak.

### **5.2.2. Kebijakan Dimensi Pendidikan**

1. ***Akses Pendidikan Untuk Semua:*** Membangun dan memperkuat infrastruktur pendidikan di seluruh tingkatan, memperluas akses

ke pendidikan berkualitas, dengan fokus pada pengurangan kesenjangan gender dan penyediaan untuk kelompok marginal. Ini mencakup pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai, pengadaan teknologi pembelajaran terkini, dan pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

2. **Peningkatan Kualitas Pendidikan:** Meningkatkan standar kualitas pendidikan melalui investasi pada pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan perbaikan infrastruktur pendidikan, termasuk penerapan metode pengajaran yang inklusif dan berorientasi pada siswa.
3. **Pendidikan dan Pelatihan Vokasional:** Mendorong pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk teknik pertanian modern, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pemasaran dan bisnis agrikultur, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian dan sektor lainnya.

#### **5.2.3. Kebijakan Dimensi Ekonomi**

1. **Penciptaan Lapangan Kerja:** Merancang kebijakan ekonomi dan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah dan memiliki potensi pertumbuhan tinggi.
2. **Pengurangan Pengangguran:** Mengimplementasikan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran, termasuk melalui program pelatihan kerja dan pendidikan kewirausahaan.
3. **Pemberdayaan Ekonomi Perempuan:** Memperkenalkan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, termasuk melalui akses yang lebih baik ke sumber daya, pelatihan, dan pasar.

#### **5.2.4. Strategi Pengendalian Kualitas**

Berdasarkan kebijakan peningkatan kualitas penduduk yang telah dirumuskan, strategi yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut meliputi:

### 1. Implementasi Universal Health Coverage (UHC):

- **Peningkatan Fasilitas:** Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan kurang terlayani.
- **Edukasi Masyarakat:** Melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya asuransi kesehatan dan bagaimana mengaksesnya.

### 2. Program Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan:

- **Kampanye Edukasi:** Melaksanakan kampanye edukasi tentang gaya hidup sehat secara nasional yang mencakup nutrisi, aktivitas fisik, dan pencegahan penyakit.
- **Akses Air Bersih:** Menyediakan akses air bersih dan fasilitas sanitasi, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas.
- **Vaksinasi:** Mengimplementasikan program vaksinasi yang luas dan mudah diakses untuk semua lapisan masyarakat.

### 3. Peningkatan Nutrisi Masyarakat:

- **Program Suplementasi:** Meluncurkan program suplementasi gizi untuk kelompok rentan.
- **Edukasi Gizi:** Menyelenggarakan program edukasi gizi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi.

### 4. Akses Pendidikan untuk Semua:

- **Infrastruktur Pendidikan:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan untuk menjangkau daerah terpencil dan marginal.
- **Beasiswa:** Menyediakan beasiswa untuk kelompok rentan dan marginal, dengan fokus khusus pada perempuan dan minoritas.

### 5. Peningkatan Kualitas Pendidikan:

- **Pelatihan Guru:** Mengadakan program pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru.
- **Kurikulum:** Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan pasar kerja.

#### 6. **Pendidikan dan Pelatihan Vokasional:**

- **Link and Match:** Menciptakan hubungan antara lembaga pendidikan vokasional dengan industri untuk memastikan keterampilan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- **Inkubator Bisnis:** Mendirikan inkubator bisnis di institusi pendidikan untuk mendorong kewirausahaan di kalangan siswa.

#### 7. **Penciptaan Lapangan Kerja:**

- **Investasi Strategis:** Mendorong investasi di sektor-sektor unggulan dan berpotensi tinggi untuk penciptaan lapangan kerja.
- **Zona Ekonomi dan Bisnis:** Mengembangkan Zona Ekonomi dan Bisnis untuk menarik investor dan menciptakan lapangan kerja.

#### 8. **Pengurangan Pengangguran:**

- **Program Pelatihan Kerja:** Melaksanakan program pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan employability masyarakat.
- **Wirausaha:** Mendorong kewirausahaan melalui akses ke modal, pelatihan, dan dukungan bisnis.

#### 9. **Pemberdayaan Ekonomi Perempuan:**

- **Akses Modal:** Memudahkan akses modal untuk perempuan melalui program kredit mikro dan bantuan start-up.
- **Pelatihan Keterampilan:** Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan dan pengembangan bisnis khusus untuk perempuan.

### 5.3. **Pembangunan Keluarga**

Tantangan-tantangan yang dihadapi Provinsi Jambi terkait dengan pembangunan keluarga mencakup belum tercapainya target sanitasi layak dan rumah layak huni, masih rendahnya keterjangkauan air minum layak, masih rendahnya keterjangkauan jaminan kesehatan dan tingginya tingkat perceraian. Oleh karenanya strategi dan tindakan yang komprehensif perlu dirancang dan diimplementasikan untuk

mengatasi tantangan-tantangan tersebut dalam GDPK Provinsi Jambi 2025-2050.

### **5.3.1. Kebijakan Pembangunan Keluarga**

Kebijakan pembangunan keluarga mencakup lima dimensi, diperkaya dengan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif dalam meningkatkan kesadaran akan peran serta tanggung jawab anggota keluarga untuk menciptakan unit keluarga yang sehat dan harmonis. Ini termasuk:

- 1. Dimensi Spiritualitas:** Mendorong pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya melalui pendidikan etika, moral, dan sosial budaya tetapi juga dengan mengintegrasikan pendidikan nilai agama dan moral dalam kurikulum sekolah serta program pendidikan informal dan nonformal di komunitas. Ini mendukung pengaktifan peran masjid, gereja, pura, vihara, dan lembaga keagamaan lain dalam pembinaan keluarga yang bertakwa, serta mengembangkan program keluarga sakinah atau serupa yang menekankan pada nilai-nilai keharmonisan, kedamaian, dan keberkahan keluarga.
- 2. Dimensi Legalitas Perkawinan:** Menegakkan norma perkawinan yang sah secara hukum agama dan negara, termasuk peningkatan akses terhadap layanan konseling perkawinan dan penguatan regulasi perkawinan. Ini termasuk sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perkawinan yang sah dan program konseling pranikah serta pasca nikah untuk mempersiapkan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
- 3. Dimensi Kesejahteraan dan Kesehatan:** Pembangunan keluarga yang harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri melalui program ketahanan keluarga yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Ini termasuk pengembangan perilaku hidup sehat, pendidikan pengasuhan anak, dan pengembangan ketahanan pangan keluarga, sejalan dengan peningkatan kesehatan dan gizi serta akses ke layanan kesehatan yang lebih baik.
- 4. Dimensi Kontribusi Sosial:** Memfasilitasi pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dengan peningkatan kapasitas keluarga

dalam berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai nasionalisme.

**5. Dimensi Pengelolaan Sumber Daya:** Mempromosikan kemampuan keluarga dalam merencanakan dan mengelola sumber daya secara efisien dan efektif, termasuk pendidikan manajemen keluarga dan promosi pengelolaan keuangan keluarga, mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi khususnya partisipasi aktif perempuan di sektor ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap kredit usaha mikro.

### **5.3.2. Strategi Pembangunan Keluarga**

Strategi ini mencakup penyuluhan keluarga terstruktur di setiap Kabupaten/Kota, layanan dukungan bagi keluarga yang mengalami konflik atau masalah rumah tangga, dan pendidikan parenting yang komprehensif. Pendekatan ini didukung oleh kerja sama dengan lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan program yang praktis dan aplikatif, serta memperhatikan peningkatan kesehatan, gizi, akses perumahan yang layak, serta memperkuat nilai-nilai keluarga melalui pengenalan budaya gotong royong dan kebersamaan, menciptakan generasi yang terdidik dan sehat yang tumbuh dalam komunitas yang kokoh dan terintegrasi.

#### **1. Membangun Keluarga yang Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**

- **Pendidikan dan Pembinaan Nilai Agama:** Mengintegrasikan pendidikan nilai agama dan moral dalam kurikulum sekolah serta melalui program pendidikan informal dan nonformal di komunitas.
- **Penguatan Peran Lembaga Keagamaan:** Mengaktifkan peran masjid, gereja, pura, vihara, dan lembaga keagamaan lain dalam pembinaan keluarga yang bertakwa.
- **Program Keluarga Sakinah:** Mengembangkan program keluarga sakinah atau serupa di semua agama yang menekankan pada nilai-nilai keharmonisan, kedamaian, dan keberkahan keluarga.

## **2. Membangun Iklim Berkeluarga Berdasarkan Perkawinan yang Sah**

- **Sosialisasi dan Edukasi:** Menyelenggarakan sosialisasi mengenai pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan negara kepada masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan komunitas.
- **Pelayanan Konseling Perkawinan:** Meningkatkan akses terhadap layanan konseling perkawinan bagi calon pengantin dan keluarga.

## **3. Membangun Keluarga Harmonis, Sejahtera, Sehat, Maju, dan Mandiri**

- **Program Ketahanan Keluarga:** Mengembangkan dan menjalankan program ketahanan keluarga yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan keluarga.
- **Pengembangan Perilaku Hidup Sehat:** Melaksanakan program edukasi dan promosi kesehatan keluarga yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan.
- **Pendidikan Pengasuhan Anak:** Menyediakan akses terhadap sumber daya dan pelatihan bagi orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak yang berkarakter.
- **Pengembangan Ketahanan Pangan Keluarga:** Mendorong keluarga untuk memanfaatkan pekarangan dan sumber daya lokal untuk ketahanan pangan keluarga.

## **4. Membangun Keluarga yang Berwawasan Nasional dan Berkontribusi kepada Masyarakat, Bangsa, dan Negara**

- **Pendidikan Kewarganegaraan:** Mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai nasionalisme dalam program pendidikan keluarga.
- **Peningkatan Kapasitas Keluarga:** Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas keluarga dalam berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
- **Pemilihan Keluarga Pionir:** Mengidentifikasi dan mempromosikan keluarga-keluarga pionir sebagai model atau

contoh yang dapat menginspirasi keluarga lain dalam berkontribusi kepada masyarakat dan negara.

## **5. Membangun Keluarga yang Mampu Merencanakan Sumber Daya Keluarga**

- **Pendidikan Manajemen Keluarga:** Menyelenggarakan program pendidikan dan workshop tentang manajemen sumber daya keluarga, termasuk keuangan, pengasuhan anak, dan kesehatan keluarga.
- **Promosi Pengelolaan Keuangan Keluarga:** Mengembangkan dan menyebarkan materi edukasi tentang pengelolaan keuangan keluarga, termasuk tabungan, investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang.

### **5.4. Penataan Persebaran dan Mobilitas**

Tantangan-tantangan yang dihadapi Provinsi Jambi terkait dengan persebaran mobilitas penduduk adalah distribusi penduduk yang tidak merata antar kabupaten/kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di perkotaan, tenaga kerja ilegal ke luar negeri dan masih belum optimalnya perlindungan tenaga kerja keluar negeri. Oleh karenanya diperlukan strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah distribusi penduduk dan mobilitas tenaga kerja, yang diarahkan untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan sosial-ekonomi antar wilayah di Provinsi Jambi.

#### **5.4.1. Kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk**

1. **Pengarahan Mobilitas Penduduk:** Mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dengan mengarahkan mobilitas penduduk yang mendukung dinamika pembangunan lokal. Ini mencakup pengembangan infrastruktur di daerah perdesaan seperti pembangunan jalan raya dan penyediaan transportasi umum yang efisien, yang merupakan strategi penting untuk mengurangi tekanan migrasi ke kota-kota besar, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka peluang baru untuk usaha kecil dan menengah.
2. **Pengelolaan Urbanisasi:** Mengarahkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui pengelolaan urbanisasi yang terencana

dan inklusif, dengan menekankan pada peningkatan akses terhadap transportasi publik yang terjangkau dan efisien. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memudahkan akses tenaga kerja, bahan baku, serta distribusi produk..

3. **Pencegahan IDPs (*Internally Displaced Persons*):** Mencegah faktor-faktor penyebab terjadinya IDPs melalui strategi preventif dan mitigasi risiko, dengan merujuk pada penyebab terjadinya mobilitas penduduk dan menurunkan “tensi” kegiatan ekonomi pada level tertentu..
4. **Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri:** Memperkuat sistem perlindungan untuk tenaga kerja Jambi yang bekerja di luar negeri, termasuk peningkatan akses ke informasi, pelatihan pra-keberangkatan, dan bantuan hukum. Kerjasama dengan negara tujuan untuk memastikan hak-hak pekerja dihormati dan dilindungi adalah kunci..

#### 5.4.2. Strategi Pengarahan Mobilitas Penduduk

1. **Keserasian Lingkungan:** Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui penilaian dampak lingkungan yang komprehensif pada setiap proyek pembangunan. Ini termasuk mendorong persebaran penduduk secara optimal berdasarkan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial..
2. **Kontrol Kuantitas Penduduk:** Mengendalikan kuantitas penduduk di area tertentu untuk menghindari overpopulasi melalui kebijakan zonasi dan perencanaan ruang. Ini melibatkan penataan penyebaran penduduk melalui kerjasama antar kabupaten/kota.
3. **Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru:** Memfokuskan investasi dan pengembangan infrastruktur pada pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Kota Jambi, termasuk peningkatan akses terhadap transportasi publik yang efisien antar wilayah.
4. **Pengembangan Infrastruktur:** Memperkuat infrastruktur permukiman, peningkatan daya saing wilayah baru, peningkatan

kualitas lingkungan, dan penyediaan pangan bagi masyarakat, termasuk pembangunan jalan raya dan penyediaan transportasi umum yang efisien. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi tekanan migrasi ke kota, memperkuat konektivitas antar daerah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memudahkan akses tenaga kerja, bahan baku, serta distribusi produk.

### **5.5. Pengembangan Database Kependudukan**

Tantangan-tantangan yang dihadapi Provinsi terkait dengan database kependudukan adalah cakupan akte kelahiran yang belum mencapai target, belum terintegrasinya data kependudukan dan belum optimalnya pengelolaan data kependudukan. Oleh karenanya perlu diterapkan kebijakan strategi yang komprehensif dan inovatif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dalam rangka pengembangan database kependudukan yang lebih akurat, terintegrasi, dan efisien.

#### **5.5.1. Kebijakan Pengembangan Database Kependudukan**

Kebijakan umum dalam pengembangan database kependudukan menitikberatkan pada penciptaan database yang akurat, dapat dipercaya, dan integratif. Ini melibatkan pengumpulan data melalui berbagai metode, termasuk sensus penduduk, registrasi vital, serta survei, untuk memastikan bahwa database kependudukan dikelola dengan baik, termasuk keamanan data dan perlindungan privasi individu. Prinsip-prinsip utama yang mendukung kebijakan ini mencakup::

1. **Pengembangan Sistem yang Integratif:** Memastikan sistem database kependudukan terintegrasi dengan sistem lainnya, termasuk lintas sektor dengan Dukcapil sebagai pengelola big data kependudukan, memudahkan akses bagi pemangku kepentingan, dan mendukung Decision Support System (DSS).
2. **Penguatan Kapasitas SDM:** Melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kapasitas SDM untuk pengelolaan dan analisis data, sejalan dengan kebutuhan akan political will yang kuat dan pembangunan ekosistem digital yang inklusif.

3. **Infrastruktur yang Memadai:** Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan aman, termasuk pemanfaatan artificial intelligence untuk mendukung pengelolaan database yang efisien..
4. **Sistem Kelembagaan yang Kuat:** Pengembangan sistem kelembagaan yang efisien dalam pengelolaan database, termasuk pembaharuan data secara berkala untuk memastikan akurasi dan kebaruan informasi.

#### **5.5.2. Strategi Pengembangan Database Kependudukan**

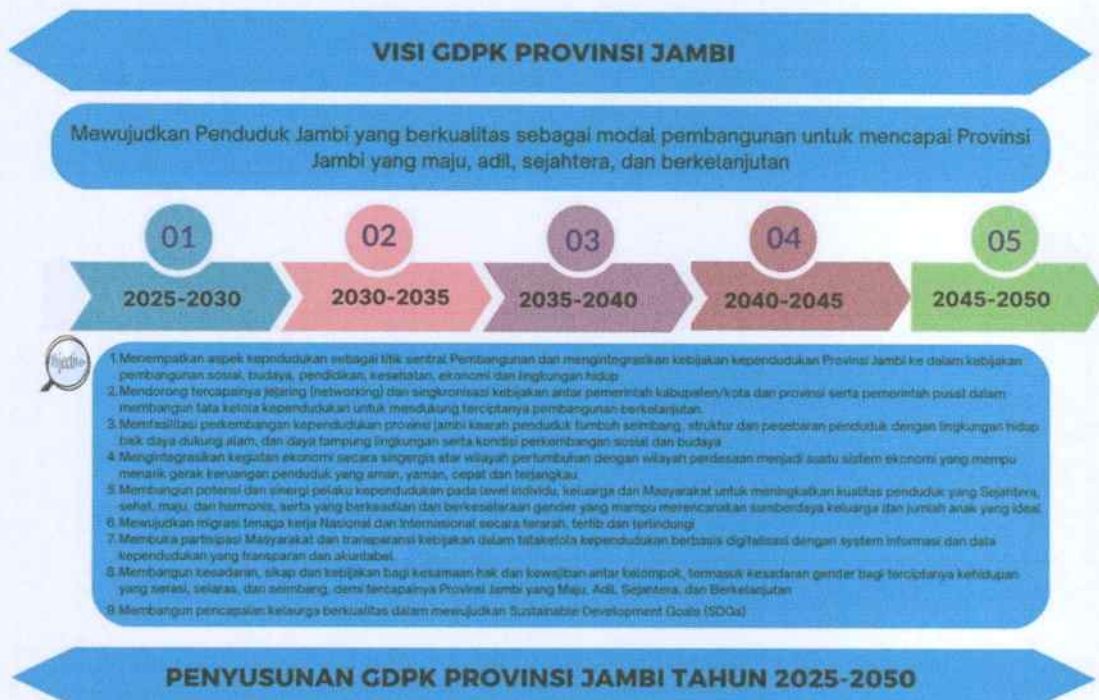
Strategi pembangunan database kependudukan bertujuan untuk menciptakan sistem informasi kependudukan yang andal, akurat, dan terpercaya. Sistem ini akan mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah serta meningkatkan efisiensi layanan publik dan interaksi dengan dunia bisnis. Implementasi strategi ini memerlukan kerjasama lintas sektoral, investasi dalam teknologi informasi, dan komitmen untuk penguatan kapasitas SDM.

1. **Pemantapan Layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK):** Fokus pada pemantapan layanan SAK antar instansi pemerintah (G2G), kepada masyarakat (G2C), dan dunia bisnis (G2B). Ini termasuk penyempurnaan fitur SIAK sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006.
2. **Integrasi Database dengan Data Lain:** Mengembangkan sistem yang terhubung dengan data dari berbagai lembaga, memudahkan akses bagi pemangku kepentingan.
3. **Integrasi DSS:** Mengembangkan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS yang terintegratif, memfasilitasi pengambilan keputusan dan penanganan permasalahan secara cepat dan efektif.

## BAB VI

### PETA JALAN (ROAD MAP)

Peta Jalan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Jambi untuk periode 2025-2050 telah terintegrasi secara strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan strategis dalam pembangunan daerah jangka panjang. Secara khusus, GDPK menitikberatkan pada aspek kependudukan sebagai komponen kritical dalam perencanaan ini, menyediakan panduan yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kependudukan di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut meliputi Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Pengembangan Database Kependudukan. Tujuan-tujuan ini mencakup pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas hidup, pengurangan ketimpangan sosial, penguatan demografi produktif, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak kependudukan. Oleh karena itu, Peta Jalan GDPK Provinsi Jambi periode 2025-2050 selaras dengan visi dan misi GDPK Provinsi Jambi, seperti ditunjukkan pada Gambar 6.1.



**Gambar 6.1.** Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar

Integrasi visi dan misi GDPK Provinsi Jambi periode 2025-2050 dengan dokumen RPJPD Provinsi Jambi periode 2025-2045 menunjukkan komitmen Provinsi Jambi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan pengurangan ketimpangan sosial. GDPK memfasilitasi perencanaan sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah dan menyusun strategi untuk pelestarian lingkungan serta budaya yang berkelanjutan. Dengan demikian, GDPK tidak hanya memperkuat fondasi kependudukan di Provinsi Jambi tetapi juga mendukung pencapaian visi dan misi RPJPD, menjadikan Jambi provinsi yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi dari Grand Design selama 5 tahun dalam periode 25 tahun, menjadi *living document* yang ditetapkan oleh Kepala Daerah di Provinsi Jambi. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengadaptasi dinamika penyelenggaraan pemerintahan, menjadi pedoman untuk mewujudkan GDPK lima pilar sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Dalam konteks RPJPD, RPJPM, dan RPJMN, GDPK menyediakan arahan yang lebih spesifik untuk mencapai target-target pembangunan kependudukan, menjadikannya instrumen penting dalam menyelaraskan implementasi kebijakan pembangunan kependudukan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional yang lebih luas.

#### **6.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk**

Roadmap Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan 5 Pilar, yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk yang diharapkan, merupakan konsep strategis yang dibangun oleh pemerintah atau organisasi untuk mengatur pertumbuhan populasi secara efektif, selaras dengan tujuan dan kebutuhan spesifik. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk mencapai Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang (PPS) dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs). Pentingnya kerja sama serta koordinasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat ditekankan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan inovatif dan program-

program yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, roadmap ini dirancang untuk berjalan secara sistematis dan terstruktur, memastikan bahwa target-target spesifik dapat diidentifikasi untuk setiap periode. Ini juga menetapkan kebijakan, strategi, dan program yang harus dijalankan. Di bawah ini adalah Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk periode 2025-2050, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.1.

**Tabel 6. 1.** Roadmap Total Penduduk, Dependency Rasio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk

<b>Indikator</b>	<b>2020</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>	<b>2050</b>
Total Penduduk (000)	3.538,81	3.768,48	3.972,87	4.149,53	4.298,89	4.420,00	4.512,14
Dependency Ratio (%)	44,61	45,23	46,30	47,91	49,54	51,77	53,94
Laju Pertumbuhan Penduduk / Tahun (%)	1,34	1,20	1,08	0,96	0,86	0,77	0,69

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan Tabel 6.1, yang menyoroti tren pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 hingga 2050, diperkirakan jumlah penduduk akan meningkat dari 3.538,81 ribu jiwa menjadi 4.512,14 ribu jiwa. Hal ini menekankan pentingnya perencanaan strategis dan kebijakan proaktif dalam mendukung Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Keberhasilan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk mencerminkan potensi untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia, fundamental dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs), khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan keberlanjutan lingkungan. Investasi dalam infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan tidak hanya mendukung pertumbuhan penduduk yang terkontrol, tetapi juga

membantu memperkuat fondasi untuk pengembangan sosial dan ekonomi yang inklusif.

Kebijakan yang dirumuskan untuk mendukung PTS dan SDGs berkontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas hidup, memberikan akses yang lebih luas ke layanan dasar dan memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung dalam kerangka yang berkelanjutan dan mendukung kemajuan sosial secara lebih luas.

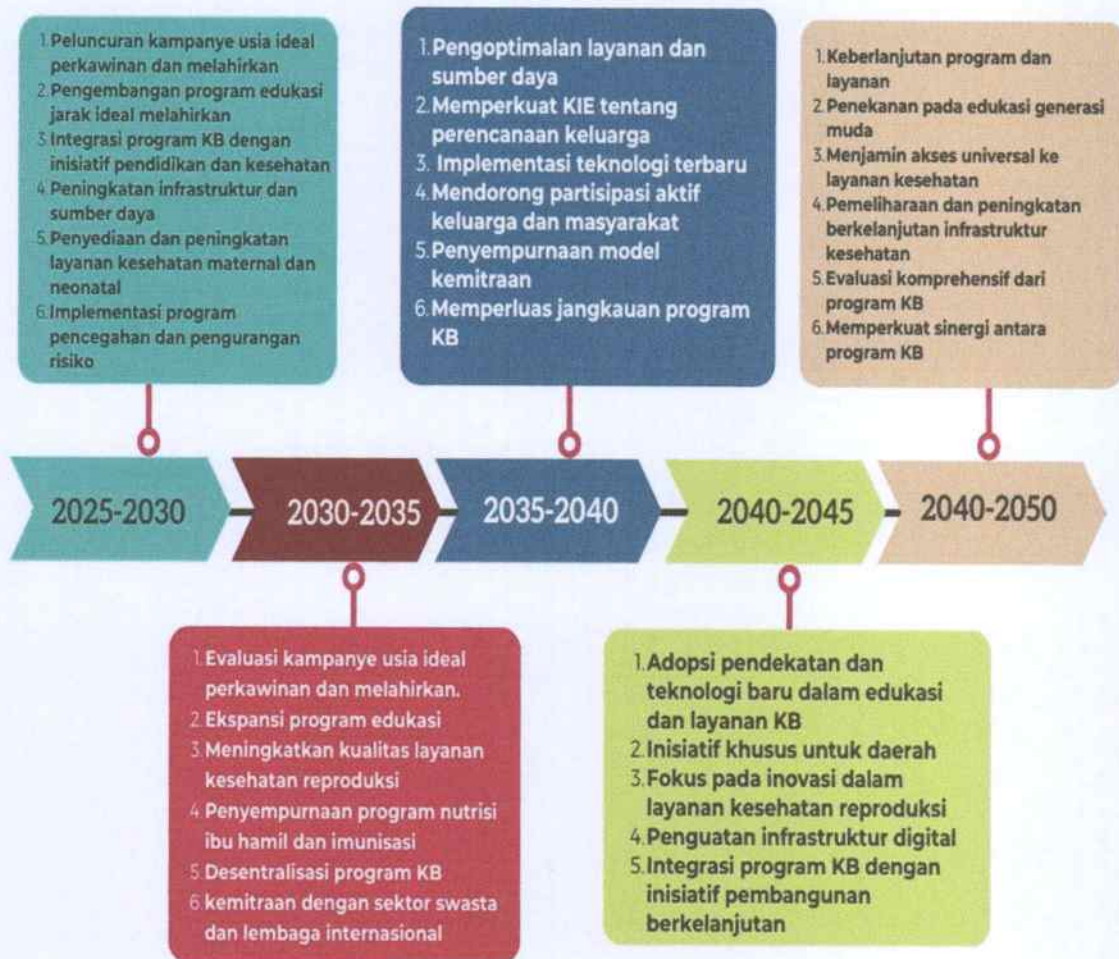
Tabel 6.1 juga menggambarkan peningkatan Rasio Ketergantungan, dari 44,61% pada tahun 2020 menjadi 53,94% pada tahun 2050. Kenaikan ini menunjukkan perubahan dalam dinamika demografis yang berpotensi membebani ekonomi bagi penduduk usia produktif. Rasio yang lebih tinggi menandakan adanya peningkatan proporsi penduduk non-produktif, yaitu anak-anak dan lansia yang bergantung pada populasi usia produktif (15-64 tahun), menciptakan tekanan pada sumber daya ekonomi. Hal ini memerlukan formulasi strategi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta menjamin bahwa infrastruktur pendukung dan layanan sosial dapat mengakomodasi perubahan demografis ini.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk per tahun, dari 1,34% pada tahun 2020 menjadi 0,69% pada tahun 2050, menandakan pergeseran demografis signifikan, yang mencerminkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dan penurunan tingkat kelahiran. Perubahan ini mempengaruhi banyak aspek sosial dan ekonomi, termasuk kebutuhan tenaga kerja dan beban pada sistem kesehatan. Mengelola laju pertumbuhan penduduk agar tetap stabil dan seimbang memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya dan layanan dengan lebih efektif, meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, dan keamanan ekonomi yang lebih besar.

Penurunan konsisten dalam jumlah kelahiran, sebagaimana ditunjukkan dalam proyeksi kelahiran dari tahun 2025 hingga 2050, merupakan indikator penting dalam konteks PTS. Konsep ini bertujuan untuk mencapai populasi yang tidak hanya berkelanjutan dari segi jumlah tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup. Ini berhubungan langsung dengan SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan

yang Baik dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), yang menekankan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah strategi kunci yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan populasi dalam upaya mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia. Ini erat kaitannya dengan konsep PPS dan mendukung pencapaian SDGs. Dengan mengendalikan kuantitas penduduk, pemerintah dapat merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan yang memastikan akses yang adil dan merata ke layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengendalian kuantitas penduduk tidak hanya berkaitan dengan jumlah tetapi juga tentang memperkuat struktur sosial dan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Program-program yang sejalan dengan ini dapat dilihat pada Gambar 6.2.



**Gambar 6. 2.** Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

### 6.1.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2025-2030

Program-program pengendalian kuantitas penduduk pada periode ini mencakup:

- Peluncuran kampanye besar-besaran tentang usia ideal perkawinan dan melahirkan.
- Pengembangan program edukasi tentang jarak ideal melahirkan dan jumlah ideal anak, dengan penekanan pada akses ke metode kontrasepsi yang sesuai.
- Integrasi program KB dengan inisiatif pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan infrastruktur dan sumber daya untuk pelayanan KB.
- Penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan maternal dan neonatal di seluruh Provinsi Jambi.
- Implementasi program pencegahan dan pengurangan risiko yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan kesehatan reproduksi, pengelolaan program kesehatan reproduksi, serta pengawasan dan evaluasi program-program terkait.
2. Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program keluarga berencana, termasuk program-program penyuluhan dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.
3. Dinas Sosial terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab atas program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terlibat dalam perumusan kebijakan, perencanaan strategis, serta alokasi anggaran untuk program-program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika  
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kampanye penyuluhan melalui media massa dan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
7. Dinas Pendidikan terlibat dalam penyelenggaraan program-program pendidikan seksual di sekolah-sekolah untuk remaja serta menyediakan pendidikan tentang kesehatan reproduksi.
8. Dinas Lingkungan Hidup terlibat dalam pengelolaan lingkungan yang mendukung kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta pengawasan terhadap dampak lingkungan terhadap kesehatan reproduksi.

### **6.1.2. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2030-2035**

Program-program pengendalian kuantitas penduduk pada periode ini mencakup:

- Evaluasi dan penyesuaian kampanye usia ideal perkawinan dan melahirkan.
- Ekspansi program edukasi untuk mencakup area yang lebih luas dengan akses yang lebih merata.
- Meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi dengan fokus pada kesetaraan akses.
- Penyempurnaan program nutrisi ibu hamil dan imunisasi.
- Desentralisasi program KB, memberikan otoritas lebih besar kepada kabupaten/kota.
- Meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga internasional.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Kesehatan

Bertanggung jawab atas penyediaan layanan kesehatan reproduksi, pelatihan tenaga medis, pengembangan program kesehatan reproduksi, dan pemantauan kualitas layanan kesehatan.

2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)

Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan implementasi program keluarga berencana serta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi di tingkat lokal.

3. Dinas Pendidikan

Terlibat dalam pengembangan kurikulum pendidikan seksual komprehensif di sekolah-sekolah dan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan remaja.

4. Dinas Sosial

Bertanggung jawab atas program pemberdayaan masyarakat, termasuk program-program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang ditujukan kepada kelompok rentan.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  
Bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan perencanaan strategis pembangunan daerah, termasuk kebijakan terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)  
Terlibat dalam upaya memfasilitasi dialog dan partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika  
Terlibat dalam kampanye-kampanye media sosial dan penggunaan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi kepada masyarakat, khususnya remaja.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Bertanggung jawab atas program-program pemberdayaan perempuan, termasuk edukasi tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan.
9. Dinas Lingkungan Hidup  
Terlibat dalam program-program kesehatan lingkungan yang mendukung kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

### **6.1.3. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2035-2040**

Program-program pengendalian kuantitas penduduk pada periode ini mencakup:

- Pengoptimalan layanan dan sumber daya berdasarkan evaluasi dan feedback masyarakat.
- Memperkuat KIE tentang perencanaan keluarga.
- Implementasi teknologi terbaru dalam layanan kesehatan maternal dan neonatal.
- Mendorong partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam dukungan kesehatan reproduksi.
- Penyempurnaan model kemitraan, mengidentifikasi dan memanfaatkan sinergi baru.

- Memperluas jangkauan program KB untuk mencapai kelompok masyarakat yang lebih luas dan beragam.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Kesehatan

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga, serta koordinasi program-program kesehatan terkait.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Terlibat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan strategis di bidang kesehatan, termasuk program-program inovatif berbasis digital.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Berperan dalam memfasilitasi kerjasama antarlembaga dan antarlembaga, serta dalam mendukung program-program kesehatan reproduksi yang melibatkan kerjasama antarlembaga.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika

Bertugas menyelenggarakan program-program digital dan media massa terkait kesehatan reproduksi serta kerjasama antarlembaga.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Terlibat dalam upaya penyelenggaraan layanan kesehatan reproduksi di masa darurat dan pengelolaan bencana yang berpotensi mempengaruhi kesehatan reproduksi.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bertanggung jawab atas program-program pemberdayaan perempuan terkait kesehatan reproduksi dan perlindungan anak, serta kerjasama antarlembaga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terlibat dalam program-program pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

#### 8. Dinas Kominfo dan Persandian

Bertugas dalam menyebarkan informasi dan edukasi mengenai program-program kesehatan reproduksi melalui media sosial dan platform digital, serta memfasilitasi kerjasama antarlembaga dalam hal tersebut.

#### **6.1.4. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2040-2045**

Program-program pengendalian kuantitas penduduk pada periode ini mencakup:

- Adopsi pendekatan dan teknologi baru dalam edukasi dan layanan KB.
- Inisiatif khusus untuk daerah dengan tantangan unik (misalnya, daerah dengan fertilitas tinggi atau akses rendah ke layanan KB).
- Fokus pada inovasi dalam layanan kesehatan reproduksi, termasuk penggunaan AI dan telemedisin.
- Penguatan infrastruktur digital untuk mendukung program KB.
- Integrasi program KB dengan inisiatif pembangunan berkelanjutan lainnya.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

##### 1. Dinas Kesehatan

Bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pengelolaan, dan pelaksanaan program-program kesehatan reproduksi serta evaluasi program.

##### 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Terlibat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan strategis terkait pengembangan program-program kesehatan reproduksi.

##### 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Berperan dalam memfasilitasi kerjasama antarlembaga dalam pengembangan kebijakan dan program-program kesehatan reproduksi.

##### 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bertugas dalam memperkuat program-program edukasi dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam konteks kesehatan reproduksi.

5. Badan Komunikasi dan Informatika  
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kampanye penyuluhan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi melalui media dan platform digital.
6. Dinas Pendidikan  
Terlibat dalam penyelenggaraan program pendidikan kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah serta pelatihan guru dan tenaga pendidik.
7. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan  
Berperan dalam program pengembangan tenaga kesehatan dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi masyarakat.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbangda)  
Melakukan penelitian dan pengembangan terkait evaluasi program dan pengembangan kebijakan baru di bidang kesehatan reproduksi.

#### **6.1.5. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2045-2050**

Program-program pengendalian kuantitas penduduk pada periode ini mencakup:

- Memastikan keberlanjutan program dan layanan yang telah dikembangkan.
- Penekanan pada edukasi generasi muda tentang perencanaan keluarga.
- Menjamin akses universal ke layanan kesehatan reproduksi berkualitas.
- Pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan infrastruktur kesehatan.
- Evaluasi komprehensif dari program KB dan pengaturan ulang strategi berdasarkan hasil.
- Memperkuat sinergi antara program KB dengan tujuan pembangunan Provinsi Jambi.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Kesehatan

- Bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program-program kesehatan reproduksi, serta pembangunan infrastruktur kesehatan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Terlibat dalam penyusunan rencana strategis baru di bidang kesehatan dan pembangunan infrastruktur kesehatan.
  3. Dinas Komunikasi dan Informatika  
Bertugas dalam penyusunan strategi sosialisasi dan advokasi melalui media dan platform digital.
  4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbangda)  
Melakukan penelitian dan pengembangan terkait kebutuhan masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan infrastruktur kesehatan.
  5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Bertanggung jawab atas pembangunan fisik infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan reproduksi.
  6. Dinas Sosial  
Berperan dalam memberikan dukungan sosial kepada masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan pembangunan infrastruktur kesehatan.
  7. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Terlibat dalam pengelolaan lingkungan yang berdampak pada kesehatan reproduksi, serta dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang ramah lingkungan.
  8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Melakukan program-program edukasi dan pemberdayaan perempuan terkait kesehatan reproduksi dan pembangunan infrastruktur kesehatan.

## **6.2. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk**

Roadmap Data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Periode 2025 - 2050, yang dibagi dalam tiga skenario (pesimis, moderat dan optimis), memberikan insight tentang ekspektasi durasi pendidikan formal yang diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Dengan asumsi

umum bahwa pendidikan seseorang berakhir pada usia 25 tahun, RLS mencerminkan total tahun pendidikan formal yang ditempuh oleh individu hingga usia tersebut, tanpa memperhitungkan kemungkinan pengulangan tahun oleh siswa. Fokus pada peningkatan RLS menunjukkan upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas dan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh penduduk, termasuk laki-laki, yang sering kali menjadi pusat perhatian dalam kebijakan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mereka mendapatkan keahlian dan pendidikan yang memadai untuk bersaing dalam pasar kerja.

**Tabel 6. 2.** Perkiraan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Tahun	Skenario		
	Pesimis	Moderat	Optimis
2025	9,25	9,25	9,25
2030	9,81	9,87	9,94
2035	10,40	10,54	10,68
2040	11,03	11,25	11,47
2045	11,98	12,01	12,03
2050	12,41	12,81	13,23

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Tabel 6.2 mengilustrasikan perkiraan skenario pesimis, RLS meningkat dari 9,25 tahun pada Tahun 2025 menjadi 12,41 tahun pada Tahun 2050, mengindikasikan pertumbuhan yang bertahap meskipun mungkin terbatas oleh faktor-faktor seperti anggaran yang minimal. Skenario moderat menunjukkan perkembangan yang lebih realistis, dengan RLS naik dari 9,25 tahun menjadi 12,81 tahun, yang mencerminkan perbaikan yang konsisten dalam kualitas dan akses pendidikan. Terakhir, skenario optimis memberikan pandangan dengan RLS mencapai 13,23 tahun pada Tahun 2050, menggambarkan potensi hasil maksimal dari investasi signifikan dan kebijakan progresif dalam pendidikan. Data ini sangat penting bagi pembuat kebijakan dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan standar pendidikan dan menghasilkan dampak sosial ekonomi yang positif di masa depan.

Peningkatan RLS tidak hanya mencerminkan peningkatan partisipasi dalam pendidikan formal tetapi juga mencapai pencapaian

pendidikan yang lebih tinggi, memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk peningkatan kesadaran kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, dan partisipasi ekonomi yang lebih baik. Ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs), khususnya SDG 4 yang menargetkan pendidikan berkualitas bagi semua dan SDG 5 yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Peningkatan akses ke pendidikan berkualitas dapat memberikan wawasan lebih luas kepada wanita dan pasangan tentang pilihan kesehatan reproduksi, mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kemajuan dalam RLS mencerminkan upaya yang dilakukan untuk mencapai pendidikan yang lebih inklusif dan komprehensif, mendukung kesetaraan gender, dan memberikan peluang lebih banyak bagi perempuan dalam tenaga kerja, keputusan keluarga yang lebih baik, dan partisipasi yang lebih luas dalam masyarakat. Ini penting tidak hanya untuk pengembangan kapasitas intelektual dan profesional generasi muda, tetapi juga untuk peningkatan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi sosial secara keseluruhan.

Selanjutnya, Proyeksi Harapan Lama Bersekolah (HLS) dari tahun 2025 hingga 2050, yang ditampilkan dalam Tabel 6.3, menggambarkan peningkatan signifikan dalam durasi pendidikan formal yang diharapkan diselesaikan oleh anak-anak di Provinsi Jambi. Ini mengindikasikan keefektifan kebijakan pendidikan yang inklusif, yang tidak hanya memperluas akses ke pendidikan dasar dan menengah tetapi juga memastikan peluang yang lebih besar bagi anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

**Tabel 6. 3.** Perkiraan Harapan Lama Bersekolah (HLS)

Tahun	Skenario		
	Pesimis	Moderat	Optimis
2025	13,31	13,31	13,31
2030	13,62	13,66	13,70
2035	13,95	14,02	14,09
2040	14,28	14,39	14,50
2045	14,75	14,77	14,78
2050	14,96	15,15	15,35

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6.3 menjelaskan bahwa Harapan Lama Bersekolah (HLS) Periode 2025 - 2050 menampilkan perkiraan berdasarkan tiga skenario yang berbeda: pesimis, moderat, dan optimis. Pada skenario pesimis, HLS meningkat secara bertahap dari 13,31 tahun pada Tahun 2025 menjadi 14,96 tahun pada Tahun 2050, menunjukkan perkembangan pendidikan yang terbatas. Dalam skenario moderat, HLS dimulai pada angka yang sama pada Tahun 2025 tetapi naik menjadi 15,15 tahun pada Tahun 2050, menggambarkan peningkatan yang lebih stabil dan realistis. Sementara itu, skenario optimis mencerminkan kondisi ideal dengan HLS yang berkembang dari 13,31 tahun menjadi 15,35 tahun, menandakan kemungkinan besar terjadinya peningkatan signifikan dalam pendidikan dan kebijakan pendukung. Tabel 6.3 ini membantu pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam merencanakan strategi pendidikan yang efektif, memastikan bahwa perkiraan masa depan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih baik.

Kenaikan HLS mencerminkan efektivitas kebijakan pendidikan yang mungkin meliputi peningkatan akses ke pendidikan, perbaikan kualitas pengajaran, dan perluasan infrastruktur pendidikan. Ini menegaskan komitmen kuat terhadap pengembangan sumber daya manusia, yang memperkuat fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*), khususnya SDG 4 yang mengadvokasi pendidikan inklusif dan

berkualitas bagi semua. Peningkatan dalam HLS membuka jalan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, mempersiapkan dengan lebih efektif untuk menghadapi tantangan masa depan dan membuka peluang kerja yang lebih baik serta partisipasi yang lebih luas dalam masyarakat. Kemajuan yang signifikan di sektor pendidikan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi dan keberhasilan pendidikan bagi perempuan, telah mencerminkan dampak positif dari berbagai inisiatif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Ini penting untuk memperluas peluang pendidikan bagi perempuan, yang merupakan langkah krusial menuju pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender secara global.

Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya mengadaptasi strategi kebijakan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang berubah, serta komitmen terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi semua siswa. Ini menekankan bagaimana kebijakan yang dirancang dengan baik dan terfokus dapat membuka lebih banyak peluang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang merupakan fondasi untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Data perkiraan Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) dari Periode 2025 - 2050, disajikan dalam skenario moderat dan sudah diperhitungkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Analisis ini penting untuk memahami dinamika kesehatan populasi dan proyeksi beban yang akan dihadapi oleh sistem kesehatan di masa mendatang. Skenario ini dibuat berdasarkan faktor-faktor kunci seperti kemajuan dalam perawatan medis, perubahan kebijakan kesehatan publik, dan peningkatan kondisi sosial-ekonomi yang semua berkontribusi terhadap perpanjangan umur.

**Tabel 6. 4.** Angka Harapan Hidup 2025-2050

Tahun	Proyeksi		
	EO Laki-Laki	EO Perempuan	EO Laki-Laki + Perempuan
2025	71,63	76,34	73,94
2030	71,82	77,00	74,36
2035	72,47	77,94	75,15
2040	72,87	78,53	75,64
2045	73,06	78,84	75,89
2050	73,15	79,00	76,02

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan Tabel 6.4 menjelaskan bahwa proyeksi angka harapan hidup Periode 2025-2050, dengan kategori yang terbagi menjadi laki-laki, perempuan, dan gabungan keduanya. Dimulai pada Tahun 2025, harapan hidup laki-laki adalah 71,63 tahun dan diperkirakan meningkat secara bertahap hingga 73,15 tahun pada Tahun 2050. Untuk perempuan, angka ini dimulai dari 76,34 tahun dan naik ke 79,00 tahun pada tahun yang sama, mengindikasikan tren positif yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Gabungan kedua gender menunjukkan peningkatan dari 73,94 tahun menjadi 76,02 tahun. Proyeksi ini memberikan wawasan penting bagi perencanaan kebijakan kesehatan, mengindikasikan kebutuhan untuk peningkatan layanan dan infrastruktur kesehatan yang bertujuan memperpanjang umur produktif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini juga mempengaruhi berbagai aspek sosial dan ekonomi, termasuk manajemen tenaga kerja dan program pensiun, menyoroti pentingnya adaptasi kebijakan untuk mengakomodasi populasi yang semakin menua.

Peningkatan AHH dari tahun ke tahun menunjukkan efektivitas kebijakan kesehatan yang diimplementasikan, termasuk penerapan program vaksinasi yang lebih luas, inisiatif pencegahan penyakit kronis, dan peningkatan infrastruktur serta teknologi kesehatan. Kenaikan dalam AHH ini juga menyoroti kebutuhan untuk memperkuat sistem kesehatan dalam menghadapi penyakit terkait usia, meningkatkan kapasitas perawatan jangka panjang, dan mengintegrasikan inovasi

teknologi kesehatan. Efektifnya pengelolaan kenaikan harapan hidup membutuhkan kerja sama antar berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat. Ini memastikan bahwa individu dapat menikmati kehidupan yang lebih panjang dan sehat dalam masyarakat yang adaptif dan inklusif, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan metode perhitungan PDRB Per Kapita harga berlaku menggunakan metode linear diperoleh Pada Tahun 2025, terdapat variasi dalam PDRB Per Kapita antara skenario, dengan estimasi sedikit meningkat dari skenario Rendah ke Tinggi, yang mencerminkan dinamika ekonomi yang berbeda. Kenaikan signifikan terlihat menjelang Tahun 2030 di semua skenario, menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mungkin karena peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan investasi dalam teknologi atau infrastruktur.

**Tabel 6. 5.** Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rp Juta )  
Periode 2025-2050

Tahun	Skenario		
	Pesimis	Moderat	Optimis
2025	78,64	78,83	79,02
2030	190.48	197.60	194.71
2035	302.32	316.36	310.40
2040	414.16	435.13	426.09
2045	526.00	553.89	541.78
2050	637.84	672.66	657.47

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6.5 menjelaskan bahwa proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Periode 2025-2050 dalam tiga skenario yang berbeda: pesimis, moderat, dan optimis. Pada Tahun 2025, semua skenario hampir serupa dengan nilai PDRB per kapita yang berkisar antara Rp 78,64 juta hingga Rp 79,02 juta. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan antara skenario menjadi lebih signifikan. Pada skenario pesimis, PDRB per kapita meningkat menjadi

Rp 637,84 juta pada Tahun 2050, sedangkan pada skenario moderat, angkanya mencapai Rp 672,66 juta, dan pada skenario optimis berada di Rp 657,47 juta. Kenaikan ini mencerminkan perkiraan pertumbuhan ekonomi regional yang berbeda, bergantung pada berbagai faktor seperti investasi, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi global. Data ini penting untuk merencanakan pembangunan ekonomi regional dan untuk membantu pembuat kebijakan dalam menyiapkan strategi yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang diperkirakan di masa depan.

Perencanaan dan implementasi program-program ekonomi dan sosial yang direncanakan akan mempertimbangkan tren demografis, kebutuhan sosial ekonomi, dan perubahan lingkungan yang mungkin terjadi. Ini merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi dan menyikapi tantangan serta peluang di masa depan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



**Gambar 6. 3.** Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

Program-program peningkatan kualitas penduduk, yang direncanakan dalam Periode 2025-2050, membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan kemajuan teknologi, perubahan demografis, dan tantangan lingkungan global. Ini menekankan perlunya adaptabilitas dan pemikiran jangka panjang dalam pengembangan strategi yang komprehensif. Untuk implementasi yang efektif, kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan,

dan masyarakat menjadi esensial. Strategi yang diusung mencakup peningkatan kualitas dan layanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan, serta peningkatan profesionalisme guru dan inovasi dalam metode pembelajaran.

Selain itu, strategi ini menyoroti pentingnya budaya sekolah dan kebiasaan membaca untuk membangun minat belajar dan pengetahuan siswa. Pendidikan vokasi, kewirausahaan, dan pengembangan karakter juga dianggap sebagai komponen kunci dalam mempersiapkan siswa untuk memasuki pasar kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan kemandirian. Pengakuan akan pentingnya peningkatan pendidikan sebagai kunci kemajuan ekonomi dan sosial menandakan komitmen untuk membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan global dengan keahlian dan etos kerja yang relevan di abad ke-21.

Dalam konteks ini, *grand design* peningkatan kualitas penduduk mencakup berbagai inisiatif yang diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran penting dalam pengendalian kuantitas penduduk, meliputi aspek fertilitas, mortalitas, serta mobilitas dan persebaran penduduk. Untuk tujuan ini, roadmap atau peta jalan yang disusun setiap lima tahun akan mengevaluasi kemajuan terhadap sasaran yang ditetapkan dan menyesuaikan kebijakan, strategi, dan program sesuai dengan kebutuhan.

Intervensi di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terintegrasi dalam roadmap ini, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, roadmap tidak hanya bertujuan untuk berjalan secara sistematis dan terencana, tetapi juga mengakui pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mempersiapkan Indonesia dalam membangun generasi yang tangguh di masa depan.

#### **6.2.1. Peningkatan Kualitas Penduduk 2025-2030**

Program-program pengendalian kualitas penduduk pada periode ini mencakup:

- Implementasi *Universal Health Coverage* (UHC) secara bertahap, dimulai dengan daerah terpencil dan rentan.

- Peluncuran kampanye edukasi nasional tentang gaya hidup sehat, nutrisi, dan pentingnya vaksinasi.
- Pembangunan dan pembaruan infrastruktur pendidikan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas.
- Peluncuran program pelatihan guru dan pengembangan kurikulum yang responsif.
- Pengembangan dan implementasi kebijakan ekonomi yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja di sektor unggulan.
- Peluncuran program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan *employability* penduduk.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Pendidikan

Bertanggung jawab atas pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, termasuk peningkatan infrastruktur pendidikan dan pelatihan tenaga pengajar.

2. Dinas Kesehatan

Mengelola layanan kesehatan publik, termasuk pengembangan infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan implementasi program kesehatan reproduksi.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berperan dalam pembangunan dan renovasi infrastruktur fisik untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan.

4. Dinas Lingkungan Hidup

Mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan terkait pekerjaan hijau, termasuk pelatihan, inkubasi usaha, dan kampanye kesadaran lingkungan.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

Berperan dalam pengembangan dan penerapan digitalisasi layanan, termasuk layanan kesehatan reproduksi melalui aplikasi mobile dan platform digital lainnya.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Berperan dalam perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

7. Dinas Sosial

Dapat terlibat dalam aspek sosialisasi dan dukungan kepada masyarakat terkait program-program yang dijalankan, terutama dalam aspek keterampilan dan pekerjaan hijau.

8. Dinas Tenaga Kerja

Berperan dalam pelatihan keterampilan kerja, termasuk untuk pekerjaan hijau, dan mendukung penciptaan lapangan kerja baru.

9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor hijau dan teknologi kesehatan.

**6.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk 2030-2035**

Program-program pengendalian kualitas penduduk pada periode ini mencakup:

- Ekspansi cakupan UHC ke seluruh wilayah Provinsi Jambi.
- Peningkatan dan penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang kompeten di semua daerah.
- Penguatan dan ekspansi akses pendidikan berkualitas, dengan penekanan pada kesetaraan gender dan kelompok marginal.
- Pengembangan dan implementasi program pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan pasar kerja.
- Penguatan dan ekspansi penciptaan lapangan kerja melalui investasi strategis dan pengembangan Zona Ekonomi.
- Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses modal dan pelatihan keterampilan.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Lingkungan Hidup

Berperan dalam program adaptasi perubahan iklim, terutama dalam aspek penghijauan, pengelolaan sampah, dan rehabilitasi ekosistem.

2. Dinas Pendidikan

Bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi sistem pendidikan berbasis kompetensi, termasuk pengembangan kurikulum dan pelatihan guru.

3. Dinas Kesehatan  
Mengkoordinasikan inisiatif kesehatan mental komunitas, termasuk penyediaan layanan kesehatan mental dan program edukasi kesehatan mental.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
Terlibat dalam program adaptasi perubahan iklim, khususnya dalam aspek pengurangan risiko bencana dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana.
5. Dinas Sosial  
Dapat terlibat dalam inisiatif kesehatan mental komunitas, memberikan dukungan sosial dan mengkoordinasikan program bantuan untuk individu dan keluarga yang terdampak masalah kesehatan mental.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Berperan dalam pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  
Mendukung digitalisasi layanan kesehatan mental dan pendidikan berbasis kompetensi, serta menyebarkan informasi terkait adaptasi perubahan iklim.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Berperan dalam perencanaan dan koordinasi antar OPD untuk mendukung implementasi program-program tersebut secara terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah.
9. Dinas Tenaga Kerja  
Dapat terlibat dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan hijau dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

### **6.2.3. Peningkatan Kualitas Penduduk 2035-2040**

Program-program pengendalian kualitas penduduk pada periode ini mencakup:

- Diversifikasi program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, termasuk peningkatan nutrisi masyarakat.
- Penyempurnaan dan optimasi sistem UHC berdasarkan evaluasi dan feedback.

- Peningkatan kualitas pendidikan melalui inovasi pendidikan dan teknologi pembelajaran.
- Ekspansi dan diversifikasi pendidikan dan pelatihan vokasional, termasuk melalui inkubator bisnis.
- Diversifikasi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor baru dan penguatan sektor unggulan.
- Peningkatan program pengurangan pengangguran dengan fokus pada kewirausahaan dan inovasi.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  
Bertanggung jawab untuk pengembangan infrastruktur TI dan sistem informasi untuk smart governance dan layanan publik digital.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam sektor ekonomi untuk menciptakan smart economy.
3. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan  
Mengimplementasikan solusi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan (smart living).
4. Dinas Lingkungan Hidup  
Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi (smart environment).
5. Dinas Pendidikan  
Mengkoordinasikan pengembangan dan penyelenggaraan program pendidikan untuk semua usia, termasuk pengembangan platform pembelajaran online.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Berperan dalam pengembangan program pelatihan vokasi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Mengintegrasikan program pendidikan lifelong learning dalam perencanaan pembangunan daerah.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
Bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi kegiatan penanganan bencana, termasuk pelatihan, simulasi, dan pengembangan sistem peringatan dini.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Mengembangkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan merencanakan tata ruang yang meminimalkan risiko bencana.
10. Dinas Sosial  
Menyediakan dukungan sosial dan rehabilitasi untuk korban bencana.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Memainkan peran kunci dalam perencanaan dan koordinasi antar OPD untuk mendukung implementasi program-program terintegrasi.
12. Dinas Keuangan  
Mengelola pendanaan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.
13. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  
Dapat terlibat dalam penegakan peraturan daerah yang mendukung implementasi program kota cerdas.

#### **6.2.4. Peningkatan Kualitas Penduduk 2040-2045**

Program-program pengendalian kualitas penduduk pada periode ini mencakup:

- Implementasi teknologi terkini dalam layanan kesehatan dan promosi gaya hidup sehat.
- Penguatan sistem kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses air bersih dan sanitasi.
- Integrasi teknologi canggih dalam sistem pendidikan, termasuk pembelajaran virtual dan augmented reality.
- Penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan.
- Peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dan kelompok marginal melalui inovasi dan teknologi.
- Pengembangan ekosistem kewirausahaan yang kuat dan berkelanjutan.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Lingkungan Hidup  
Bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, pengembangan program daur ulang, dan inisiatif ekonomi sirkular.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Mendukung pengembangan industri daur ulang dan ekonomi sirkular melalui kebijakan dan insentif.
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  
Mendorong dan mendukung UKM dalam berpartisipasi dalam ekonomi sirkular.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Melakukan perencanaan dan koordinasi antar sektor terkait program ekonomi sirkular.
5. Dinas Kesehatan  
Memimpin implementasi dan koordinasi program kesehatan genetik, termasuk layanan konseling dan penelitian.
6. Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas  
Menyediakan layanan kesehatan genetik dan konseling bagi masyarakat.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes):  
Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang genetik dan bioteknologi kesehatan.
8. Dinas Pendidikan  
Terlibat dalam edukasi dan peningkatan kesadaran tentang kesehatan genetik di sekolah-sekolah.
9. Dinas Pendidikan  
Mengintegrasikan kecakapan digital ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  
Mendukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan pelatihan digital.
11. Dinas Tenaga Kerja  
Menyelenggarakan program pelatihan kecakapan digital untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja.

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mendukung implementasi pendidikan dan pelatihan digital di tingkat komunitas dan desa.

**6.2.5. Peningkatan Kualitas Penduduk 2045-2050**

Program-program pengendalian kualitas penduduk pada periode ini mencakup:

- Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UHC dan penyesuaian berdasarkan hasil.
- Peningkatan dan penyesuaian strategi pencegahan penyakit dan promosi kesehatan berdasarkan tren kesehatan terkini.
- Evaluasi sistem pendidikan dan penyesuaian infrastruktur dan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masa depan.
- Penguatan hubungan antara pendidikan vokasional dan industri untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas.
- Evaluasi dan penyesuaian kebijakan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja untuk memastikan kesesuaian dengan dinamika pasar.
- Penyesuaian program pemberdayaan ekonomi untuk menanggapi tantangan dan peluang baru.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Sosial

Bertanggung jawab atas program-program yang mendukung kesejahteraan sosial lansia, termasuk kegiatan sosial dan bantuan langsung.

2. Dinas Kesehatan

Mengelola program kesehatan preventif dan layanan kesehatan khusus untuk lansia.

3. Dinas Perhubungan

Memastikan transportasi umum dan infrastruktur pendukungnya ramah lansia.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terlibat dalam perancangan dan pembangunan fasilitas publik yang aksesibel dan ramah bagi lansia.

5. Dinas Pendidikan  
Mengimplementasikan teknologi AI dalam sistem pendidikan dan pengembangan kurikulum.
6. Dinas Kesehatan  
Mengintegrasikan AI dalam sistem layanan kesehatan, termasuk diagnostik dan manajemen penyakit.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  
Menyediakan infrastruktur TI dan dukungan teknis untuk implementasi AI.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan  
Berperan dalam riset dan pengembangan teknologi AI yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan dan kesehatan.
9. Dinas Pemuda dan Olahraga  
Menyelenggarakan program dukungan untuk pemuda, termasuk inovasi dan kewirausahaan.
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  
Memberikan bantuan dan dukungan untuk pengembangan usaha pemuda, termasuk akses ke pembiayaan.
11. Dinas Pendidikan  
Mendukung pengembangan keterampilan dan pendidikan kewirausahaan bagi pemuda.
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Mendukung inovasi produk dan jasa yang dikembangkan oleh pemuda, termasuk melalui pameran dan promosi.

### **6.3. Roadmap Pembangunan Keluarga**

Dalam rangka Pembangunan Keluarga, penetapan target melalui indikator yang jelas dan terukur selama Periode 2025-2050 mencerminkan komitmen terhadap penguatan struktur keluarga dalam masyarakat. Integrasi indikator-indikator ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung, di mana keluarga dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan sosial dan ekonomi nasional. Program dan kebijakan yang dirancang untuk mendukung pencapaian indikator-indikator ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup keluarga individu tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

**Tabel 6. 6.** Roadmap Pembangunan Keluarga

<b>Indikator</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>	<b>2050</b>
Membangun kualitas keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada ketuhanan yang maha esa	75%	85%	90%	95%	98%	100%
Membangun keluarga Sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah anak ideal dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan gender	70%	85%	90%	95%	98%	100%
Membangun keluarga yang berketahanan sosial, memiliki perencanaan sumberdaya keluarga, berwawasan nasional dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara	80%	85%	90%	95%	98%	100%

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Indikator utama dalam roadmap ini mencakup:

1. **Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan ketakwaan:** Ini menargetkan peningkatan dari 75% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2050, menekankan pembentukan keluarga yang stabil secara hukum dan kaya nilai spiritual.
2. **Pembangunan keluarga sejahtera, sehat, maju, dan mandiri:** Target ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera secara ekonomi, sehat fisik dan mental, maju dalam pendidikan dan sumber daya, dengan kesetaraan gender dan keadilan sosial sebagai pilar utama. Target bergerak dari 70% pada tahun 2025 hingga mencapai 100% pada tahun 2050.

3. **Pembangunan keluarga yang berketahanan sosial dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara:** Ini memfokuskan pada pengembangan keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya, wawasan nasional, dan kemampuan untuk berkontribusi secara aktif pada pembangunan masyarakat. Target menunjukkan peningkatan bertahap dari 80% pada tahun 2025 hingga 100% pada tahun 2050.

Kebijakan dan program yang mendukung pencapaian indikator-indikator ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas keluarga dalam beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial ekonomi. Melalui penanaman nilai, etika, dan pengalaman yang berharga, setiap keluarga diharapkan dapat membentuk ikatan unik yang menyatukan generasi dalam mozaik sosial yang kaya.

Selain itu, kerangka keamanan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan menjamin bahwa perlindungan dan dukungan dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan, beradaptasi dengan perubahan kondisi dan tantangan baru. Ini memastikan bahwa setiap keluarga dapat mencapai kesejahteraan dan berkontribusi bagi kebaikan masyarakat yang lebih luas, mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, grand design pembangunan keluarga berkualitas ini merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk membangun generasi yang siap menghadapi tantangan global dengan memperkuat fondasi keluarga, memelihara nilai-nilai etis dan spiritual, dan mendukung kemajuan ekonomi dan sosial nasional.

Dalam kerangka pembangunan keluarga untuk periode 2025-2050, langkah strategis telah ditetapkan untuk mengatasi isu krusial yang dihadapi oleh masyarakat, meliputi indeks pembangunan keluarga (iBangga), indeks pemerataan gender (IPG), tingkat perceraian (cerai talak dan cerai gugat), serta meningkatnya proporsi penduduk lansia dan miskin. Pendekatan terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Adapun secara rinci Proyeksi iBangga, IPG, Angka Perceraian, dan

Persentase Lansia yang diprediksi dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Jambi Periode 2025-2050 dapat dilihat pada Tabel 6.7.

**Tabel 6. 7.** Proyeksi iBangga, IPG, Angka Perceraian, dan Persentase Lansia

Indikator	2025	2030	2035	2040	2045	2050
iBangga	64,3	68,7	73,1	77,6	82,0	86,4
IPG	69,0	71,1	73,3	75,4	77,6	79,7
Angka Perceraian (Cerai Talak)	1.894,7	2.846,3	3.791,7	4.733,1	5.671,6	6.607,7
Angka Perceraian (Cerai Gugat)	5.679,7	8.560,8	11.220,2	13.741,7	16.160,8	18.494,0
Persentase Penduduk Lansia	4,63	6,03	7,70	9,48	11,40	13,24

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6.7 menunjukkan beberapa analisis misalnya indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Provinsi Jambi, yang mengukur ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga melalui 17 variabel, berfungsi sebagai alat penting dalam strategi pembangunan sosial regional. Dengan target yang telah ditetapkan meningkat dari 64,3 pada Tahun 2025 hingga 86,4 pada Tahun 2050, iBangga mencerminkan sebuah komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan standar hidup keluarga dengan cara yang menyeluruh. Peningkatan nilai ini mengindikasikan keberhasilan berbagai program yang telah diterapkan, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga tetapi juga memperkuat ketentraman dan kebahagiaan mereka. Strategi yang dilakukan melibatkan serangkaian intervensi yang mendukung pengembangan ekonomi keluarga sekaligus menguatkan ikatan sosial dan menyediakan dukungan emosional, yang secara keseluruhan

berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Data indeks pembangunan gender (IPG) yang menunjukkan peningkatan bertahap dari 69,0 pada Tahun 2025 menjadi 79,7 pada Tahun 2050 menggambarkan kemajuan signifikan dalam upaya mengurangi kesenjangan gender di berbagai sektor masyarakat. Peningkatan nilai IPG setiap tahunnya mencerminkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses dan kesempatan bagi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Kenaikan ini tidak hanya mengindikasikan peningkatan kualitas hidup perempuan tetapi juga menunjukkan peningkatan kesadaran dan dukungan sosial terhadap kesetaraan gender. Diharapkan bahwa pada Tahun 2050, dengan pencapaian IPG yang mendekati 80, kesenjangan gender akan semakin tereduksi, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi pada pengembangan bangsa.

Selanjutnya, angka perceraian yang terbagi menjadi cerai talak dan cerai gugat menunjukkan peningkatan yang mencolok selama Periode 2025-2050, angka cerai talak, yang dimulai dari 1.894,7 pada Tahun 2025, diantisipasi meningkat hingga 6.607,7, sedangkan cerai gugat yang awalnya 5.679,7 pada Tahun 2025 diperkirakan akan melonjak hingga 18.494,0 pada Tahun 2050. Peningkatan ini tidak hanya mengindikasikan perubahan dalam dinamika sosial dan keluarga, tetapi juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk intervensi kebijakan dan pendukung sosial yang lebih kuat untuk meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, perubahan nilai-nilai sosial, dan akses terbatas ke layanan mediasi dan konseling mungkin berkontribusi pada tren perceraian ini, menggarisbawahi pentingnya penelitian lebih lanjut dan strategi yang ditargetkan untuk menangani masalah ini dan mendukung kestabilan keluarga.

Data tentang Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan yang substansial dari 7,8% pada tahun saat

ini hingga diperkirakan mencapai 33,3% pada Tahun 2050. Peningkatan ini menggambarkan transisi demografis yang signifikan di mana proporsi penduduk lansia terus meningkat seiring berjalannya waktu. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan peningkatan harapan hidup tetapi juga perubahan dalam struktur umur populasi yang membawa tantangan dan kebutuhan baru bagi sistem kesehatan, kebijakan pensiun, dan layanan sosial di Provinsi Jambi.

Selain itu, peningkatan jumlah lansia mempengaruhi pasar tenaga kerja, dengan pensiunnya sejumlah besar pekerja yang memerlukan strategi untuk menggantikan tenaga kerja ini serta mengadaptasi kebijakan pensiun dan keamanan sosial untuk mendukung populasi yang tidak lagi bekerja. Infrastruktur dan layanan publik juga harus direvisi untuk menjadi lebih ramah lansia, termasuk perumahan yang dapat diakses, transportasi publik yang aman dan nyaman, dan akses yang lebih baik ke layanan rekreasi dan sosial yang meningkatkan kualitas hidup dan keterlibatan sosial lansia. Adapun secara rinci PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, gini rasio, stunting dan angka kematian bayi yang diprediksi dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Jambi Periode 2025-2050 dapat dilihat pada Tabel 6.8.

**Tabel 6. 8.** Perkiraan PDRB Perkapita

Tahun	Skenario		
	Pesimis	Moderat	Optimis
2025	78,83	78,83	78,83
2030	121,47	127,17	133,08
2035	187,19	205,15	224,65
2040	288,45	330,95	379,24
2045	526,00	533,89	541,78
2050	684,94	861,28	1080,75

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6.8 menggambarkan proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita untuk Periode 2025-2050, dalam tiga skenario yang berbeda: pesimis, moderat, dan optimis. Pada

Tahun 2025, ketiga skenario memulai dengan nilai yang sama, yaitu Rp 78,83 juta, namun divergensi terjadi seiring berjalannya waktu. Pada skenario pesimis, PDRB per kapita tumbuh menjadi Rp 684,94 juta pada Tahun 2050, menunjukkan pertumbuhan yang stabil namun lebih terbatas.

Skenario moderat, yang lebih seimbang, memperkirakan PDRB per kapita mencapai Rp 861,28 juta pada tahun yang sama, mencerminkan kondisi ekonomi yang mendukung. Sementara itu, skenario optimis menunjukkan pertumbuhan paling signifikan, dengan PDRB per kapita mencapai Rp 1.080,75 juta, menandakan kondisi ideal dengan dukungan penuh terhadap pertumbuhan ekonomi yang pesat. Data ini sangat berguna bagi para pembuat kebijakan dan investor dalam merencanakan strategi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi regional yang beragam ini.

Berdasarkan Tabel 6.9 menunjukkan perkiraan tingkat kemiskinan dari Periode 2025-2050, berdasarkan tiga skenario berbeda: pesimis, moderat, dan optimis. Setiap skenario memulai dengan tingkat kemiskinan yang sama pada Tahun 2025 sebesar 7,49%. Namun, progresi tiap skenario berbeda. Dalam skenario pesimis, tingkat kemiskinan menurun secara bertahap ke 4,23% pada Tahun 2050, mencerminkan kondisi ekonomi yang berjuang untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan.

**Tabel 6. 9.** Perkiraan Tingkat kemiskinan

Tahun	Sekenario		
	Pesimis	Moderat	Optimis
2025	7,49	7,49	7,49
2030	6,68	6,59	6,51
2035	5,95	5,80	5,66
2040	5,31	5,11	4,92
2045	5,50	4,50	3,50
2050	4,23	3,96	3,71

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Pada skenario moderat menunjukkan penurunan yang lebih cepat dan mencapai 3,96% pada Tahun 2050, menandakan kemajuan

ekonomi yang lebih stabil dan kebijakan yang efektif. Pada skenario optimis, tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 3,71% pada Tahun 2050, mengindikasikan kondisi ideal dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan intervensi kebijakan yang sangat berhasil dalam mengatasi kemiskinan. Data ini memberikan gambaran penting bagi pembuat kebijakan untuk mengarahkan upaya dan sumber daya guna mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih substansial dalam berbagai skenario ekonomi dan sosial.

**Tabel 6. 10.** Perkiraan Tingkat pengangguran

Tahun	Skenario		
	Pesimis	Moderat	Optimis
2025	4,32	4,32	4,32
2030	3,79	3,73	3,68
2035	3,32	3,22	3,13
2040	2,91	2,78	2,66
2045	2,31	2,41	2,50
2050	2,24	2,08	1,93

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6.10 menunjukkan perkiraan tingkat pengangguran dari Periode 2025 hingga 2050, yang dibagi dalam tiga skenario berbeda: pesimis, moderat, dan optimis. Setiap skenario dimulai dengan tingkat pengangguran yang sama pada tahun 2025, yaitu 4,32%. Dalam skenario pesimis, tingkat pengangguran menurun perlahan menjadi 2,24% pada tahun 2050, mengindikasikan kondisi ekonomi yang mengalami kesulitan dalam menciptakan peluang kerja. Skenario moderat menunjukkan penurunan yang lebih cepat hingga mencapai 2,08% pada tahun yang sama, menggambarkan ekonomi yang lebih sehat dengan kebijakan yang efektif dalam mengurangi pengangguran. Pada skenario optimis, tingkat pengangguran turun secara signifikan menjadi 1,93% pada tahun 2050, mencerminkan kondisi ekonomi yang ideal dengan pertumbuhan yang kuat dan kebijakan yang sangat mendukung dalam menciptakan banyak pekerjaan baru. Proyeksi ini sangat bermanfaat untuk para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dalam merencanakan strategi yang tepat

untuk mengatasi pengangguran dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

**Tabel 6. 11.** Perkiraan Gini Ratio

Tahun	Skenario		
	Pesimis	Moderat	Optimis
2025	0,339	0,339	0,339
2030	0,334	0,334	0,333
2035	0,329	0,328	0,327
2040	0,325	0,323	0,322
2045	0,326	0,318	0,310
2050	0,315	0,313	0,310

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6.11 menunjukkan menunjukkan perkiraan Gini Ratio Periode 2025-2050 dalam tiga skenario yang berbeda: pesimis, moderat, dan optimis. Gini Ratio, yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, dimulai pada nilai 0,339 untuk semua skenario pada Tahun 2025. Dalam skenario pesimis, terjadi penurunan moderat menjadi 0,315 pada Tahun 2050, menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, ketimpangan relatif tetap tinggi. Skenario moderat memperlihatkan penurunan lebih lanjut menjadi 0,313, mencerminkan efek dari kebijakan yang mungkin lebih fokus pada pengurangan ketimpangan. Skenario optimis menawarkan penurunan paling signifikan hingga 0,310, menandakan implementasi kebijakan yang sangat efektif dalam menangani ketimpangan pendapatan. Data ini penting bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan merencanakan intervensi yang dapat lebih efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara dan mengurangi disparitas ekonomi.

**Tabel 6. 12.** Perkiraan Stunting

Tahun	Skenario		
	Pesimis	Moderat	Optimis
2025	13,500	13,500	13,500
2030	10,802	10,532	10,266
2035	8,644	8,216	7,807
2040	6,917	6,409	5,937
2045	5,535	5,000	4,515
2050	4,429	3,901	3,433

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6.12 menunjukkan prevalensi stunting Periode 2025-2050, dengan tiga skenario berbeda: pesimis, moderat, dan optimis. Stunting, yang mengindikasikan tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata untuk usia karena malnutrisi kronis, dimulai pada tingkat yang sama yaitu 13,500% di semua skenario pada Tahun 2025. Pada skenario pesimis, tingkat ini menurun menjadi 4,429% pada Tahun 2050, menunjukkan perbaikan lambat dan berkelanjutan. Skenario moderat melihat penurunan yang lebih signifikan menjadi 3,901%, mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program kesehatan yang lebih efektif. Skenario optimis memproyeksikan penurunan paling drastis menjadi 3,433%, yang menandakan keadaan ideal di mana intervensi kesehatan dan nutrisi diterapkan dengan sangat sukses. Proyeksi ini sangat penting untuk pemangku kepentingan dalam perencanaan kebijakan kesehatan publik, menunjukkan kebutuhan untuk intervensi yang bertarget dan berkelanjutan dalam memerangi masalah malnutrisi dan meningkatkan kesehatan anak secara umum. Informasi ini juga mendukung pembuatan strategi yang efektif untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan generasi mendatang.

**Tabel 6. 13.** Perkiraan Angka Kematian Bayi

Tahun	Skenario		
	Pesimis	Moderat	Optimis
2025	107,000	107,000	107,000
2030	68,923	65,473	62,163
2035	44,395	40,062	36,114
2040	28,597	24,514	20,981
2045	18,420	15,000	12,189
2050	11,865	9,178	7,081

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6.13 menunjukkan perkiraan angka kematian bayi dari Periode 2025-2050 dalam tiga skenario yang berbeda: pesimis, moderat, dan optimis. Angka ini diukur sebagai jumlah kematian bayi per 100,000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2025, semua skenario memulai dengan angka kematian yang sama yaitu 107,000. Dalam skenario pesimis, angka tersebut menurun menjadi 11,865 pada Tahun 2050, menunjukkan perbaikan bertahap namun masih ada banyak tantangan yang menghambat penurunan lebih cepat. Skenario moderat mengindikasikan penurunan lebih signifikan hingga 9,178, menandakan keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan dan perbaikan infrastruktur kesehatan. Terakhir, skenario optimis menunjukkan penurunan paling drastis hingga 7,081 pada Tahun 2050, mencerminkan kondisi ideal di mana intervensi kesehatan yang efektif dan peningkatan akses ke layanan kesehatan telah berhasil mengurangi angka kematian bayi secara signifikan. Proyeksi ini sangat penting bagi pembuat kebijakan dan profesional kesehatan dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi untuk menurunkan angka kematian bayi, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan prenatal dan neonatal. Ini juga menekankan pentingnya melanjutkan investasi dalam kesehatan publik dan reformasi sosial untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik bagi bayi di masa mendatang

Program kerja spesifik untuk Periode 2025-2050 di Provinsi Jambi memerlukan informasi yang sangat detail dan spesifik, yang mungkin tidak tersedia langsung tanpa melakukan riset dan analisis mendalam berdasarkan data lokal terkini. Roadmap Pembangunan Keluarga yang bisa diadaptasi dan diperinci oleh pihak terkait di Provinsi Jambi untuk mencapai pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dapat dilihat pada Gambar 6.4.



**Gambar 6. 4.** Roadmap Pembangunan Keluarga Berkualitas

Berdasarkan Gambar 6.4 menunjukkan bahwa pengendalian kualitas penduduk di Provinsi Jambi memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dalam Roadmap pembangunan keluarga berkualitas. Dengan fase yang terstruktur mulai dari 2025 hingga 2050, strategi yang diusulkan menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, aksesibilitas layanan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan penggunaan teknologi. Program-program kunci mencakup peningkatan layanan kesehatan reproduksi, edukasi dan pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mengendalikan jumlah penduduk tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Indikator utama yang dipakai untuk menilai kemajuan dalam pembangunan keluarga di Indonesia, mencerminkan upaya negara untuk mendukung kehidupan keluarga yang berkualitas. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) memberikan sebuah gambaran menyeluruh tentang kesejahteraan rumah tangga, sementara median usia perkawinan pertama dan angka perceraian menyoroti dinamika sosial dan kesehatan reproduksi masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menegaskan komitmen terhadap kesetaraan gender, dan persentase keluarga yang melibatkan anak-anak dan remaja dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) menunjukkan investasi pada masa depan generasi muda. Lebih lanjut, prevalensi stunting menjadi indikator penting untuk mengukur kesehatan dan gizi anak-anak.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), yang terdiri dari tiga dimensi utama: ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan, memberikan kerangka kerja untuk mengukur kemajuan pembangunan keluarga secara komprehensif. Dimensi ketentraman mencakup keamanan fisik dan psikologis, stabilitas ekonomi, dan harmoni dalam hubungan keluarga. Sementara itu, dimensi kemandirian mencakup tingkat pendapatan, akses terhadap pendidikan, dan kemampuan untuk mengelola kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Terakhir, dimensi kebahagiaan mencerminkan kepuasan hidup dan kesejahteraan emosional keluarga. Hasil dari iBangga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan keluarga ke dalam kategori tangguh, berkembang, atau rentan, memberikan pandangan yang mendalam tentang status pembangunan keluarga dan area mana yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kesejahterannya.

Roadmap ini diharapkan dapat membantu Provinsi Jambi dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Adaptasi dan fleksibilitas dalam pelaksanaan program sesuai dengan perkembangan dan tantangan baru sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang.

### **6.3.1. Roadmap Pembangunan Keluarga 2025-2030**

Program-program pembangunan keluarga berkualitas pada periode ini mencakup:

- Peluncuran program pendidikan nilai agama dan moral dalam kurikulum sekolah serta program pendidikan informal dan nonformal di komunitas.
- Aktivasi peran lembaga keagamaan dalam pembinaan keluarga.
- Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan negara.
- Peningkatan akses terhadap layanan konseling perkawinan.
- Implementasi program ketahanan keluarga dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan keluarga.
- Pengembangan program edukasi perilaku hidup sehat.
- Integrasi pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai nasionalisme dalam program pendidikan keluarga.
- Pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam berkontribusi kepada masyarakat.
- Peluncuran program pendidikan manajemen keluarga.
- Promosi pengelolaan keuangan keluarga.

Untuk implementasi program-program yang berkaitan dengan pengembangan program kesadaran keluarga, integrasi layanan kesehatan reproduksi, serta edukasi dan pelatihan keterampilan, berikut adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait:

1. Dinas Pendidikan

Berperan dalam mengintegrasikan materi kesadaran keluarga ke dalam kurikulum sekolah dan program pendidikan non-formal.

2. Dinas Sosial

Mengkoordinasikan program dukungan keluarga dan kesejahteraan sosial, termasuk edukasi keluarga.

3. Dinas Kesehatan

Terlibat dalam aspek kesehatan keluarga dari program ini, termasuk kesehatan reproduksi dan nutrisi.

4. Dinas Kesehatan  
Pusat dari implementasi ini, mengelola layanan kesehatan reproduksi, termasuk fasilitas, pelatihan tenaga kesehatan, dan edukasi pasien.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi  
Terlibat dalam penyediaan informasi dan layanan kontrasepsi, serta edukasi keluarga berencana.
6. Dinas Tenaga Kerja: Memimpin dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan penempatan kerja, serta koordinasi dengan sektor industri.
7. Dinas Pendidikan: Terlibat dalam pengembangan kurikulum pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan pendidikan keterampilan dalam sistem pendidikan formal.
8. Dinas Koperasi dan UKM: Mendukung pelatihan kewirausahaan dan pengembangan bisnis untuk memperkuat ekonomi lokal.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  
Mendukung kampanye informasi dan edukasi masyarakat melalui media dan teknologi informasi.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Berperan dalam perencanaan dan koordinasi antarsektoral untuk integrasi dan efektivitas program.

### **6.3.2. Roadmap Pembangunan Keluarga 2030-2035**

Program-program pembangunan keluarga berkualitas pada periode ini mencakup:

- Ekspansi program keluarga sakinah atau serupa di semua agama.
- Pengembangan inisiatif inter-religius untuk mendukung pembangunan keluarga yang harmonis.
- Penyuluhan keluarga terstruktur di setiap Kabupaten/Kota mengenai legalitas perkawinan.
- Pengembangan program konseling pranikah dan pasca nikah.
- Peningkatan akses ke layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan pengasuhan anak.
- Pengembangan ketahanan pangan keluarga melalui inisiatif lokal.

- Pengembangan program pendidikan kewarganegaraan yang lebih komprehensif.
- Promosi gotong royong dan kebersamaan dalam komunitas.
- Penguatan inisiatif pemberdayaan ekonomi keluarga, termasuk pelatihan kewirausahaan.
- Pengembangan materi edukasi tentang investasi dan perencanaan keuangan.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Pendidikan  
Bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, serta pelatihan untuk tenaga pengajar.
2. Dinas Kesehatan  
Mengelola pengembangan infrastruktur kesehatan dan pelatihan untuk tenaga kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Terlibat dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:  
Memimpin program pemberdayaan perempuan dan memastikan integrasi gender dalam kebijakan dan program pembangunan.
6. Dinas Sosial: Mendukung program sosial yang menargetkan perempuan, termasuk akses ke layanan sosial dan bantuan.
7. Dinas Tenaga Kerja: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pendidikan non-formal yang ditujukan untuk perempuan.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  
Mendukung pengembangan UMKM, termasuk akses ke pelatihan, pembiayaan, dan pasar.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Promosi dan pengembangan industri lokal serta pemasaran produk lokal.

10. Dinas Pariwisata

Pengembangan potensi wisata lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

11. Dinas Pertanian

Mendukung pengembangan sektor pertanian, termasuk teknologi pertanian, akses pasar, dan peningkatan produksi.

**6.3.3. Roadmap Pembangunan Keluarga 2035-2040**

Program-program pembangunan keluarga berkualitas pada periode ini mencakup:

- Evaluasi dan penyesuaian program berdasarkan *feedback* dan hasil.
- Peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.
- Peningkatan fokus pada keluarga rentan dan marginal.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Pendidikan: Mengelola dan mendukung integrasi teknologi dalam sistem pendidikan, termasuk pengembangan platform e-learning dan pelatihan guru.
2. Dinas Kesehatan: Bertanggung jawab atas integrasi teknologi dalam layanan kesehatan, seperti pengembangan aplikasi telemedicine dan pelatihan tenaga kesehatan.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo): Mendukung infrastruktur TI dan konektivitas untuk pendidikan dan layanan kesehatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda): Perencanaan dan koordinasi antar sektor untuk integrasi teknologi.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi: Pusat dari inovasi dan implementasi program keluarga berencana, termasuk penggunaan teknologi baru.
6. Dinas Kesehatan  
Melaksanakan program keluarga berencana di fasilitas kesehatan dan melatih tenaga kesehatan.

7. Dinas Sosial

Mendukung aspek sosial program keluarga berencana, termasuk edukasi dan advokasi masyarakat.

8. Dinas Lingkungan Hidup

Mengelola dan mengembangkan program-program yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

9. Dinas Pendidikan

Mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam kurikulum sekolah.

10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Terlibat dalam program konservasi, reforestasi, dan pengelolaan hutan dan perkebunan secara berkelanjutan.

11. Dinas Pertanian

Mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam.

#### **6.3.4. Roadmap Pembangunan Keluarga 2040-2045**

Program-program pembangunan keluarga berkualitas pada periode ini mencakup:

- Pengintegrasian teknologi dalam program pembangunan keluarga, termasuk pendidikan online dan platform dukungan keluarga.
- Diversifikasi program untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi keluarga di berbagai daerah.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Mengelola dan mendukung program untuk meningkatkan produksi pangan dan ketahanan pangan.

2. Dinas Sumber Daya Air atau Dinas Pekerjaan Umum

Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air, termasuk irigasi dan penyediaan air bersih.

3. Dinas Lingkungan Hidup  
Terlibat dalam program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan konservasi untuk mendukung ketahanan air.
4. Dinas Kesehatan  
Memimpin dalam pengembangan dan penyediaan layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan publik dan komunitas.
5. Dinas Sosial  
Mendukung program kesehatan mental melalui layanan sosial dan program dukungan bagi individu dan keluarga yang terdampak masalah kesehatan mental.
6. Badan Narkotika Nasional Daerah (BNNP)  
Terlibat dalam aspek pencegahan dan rehabilitasi terkait penyalahgunaan substansi yang berkaitan dengan kesehatan mental.
7. Dinas Lingkungan Hidup  
Memainkan peran utama dalam implementasi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk pengelolaan hutan dan konservasi.
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Terlibat dalam program reforestasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mitigasi.
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Berperan dalam pengembangan dan promosi penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Koordinasi perencanaan dan integrasi program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### **6.3.5. Roadmap Pembangunan Keluarga 2045-2050**

Program-program pembangunan keluarga berkualitas pada periode ini mencakup:

- Menjamin keberlanjutan semua program dan inisiatif yang berhasil.

- Mempromosikan dan membagikan praktik terbaik pembangunan keluarga pada skala yang lebih luas.
- Fokus pada pembangunan legasi keluarga yang kuat, berkelanjutan, dan berkontribusi pada masyarakat.

Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Berperan dalam evaluasi dan perencanaan program pembangunan, termasuk melakukan adaptasi berdasarkan hasil evaluasi.
2. Inspektorat  
Befungsi untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, termasuk aspek efektivitas dan akuntabilitas.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas komunitas, termasuk pelatihan dan pendampingan bagi pengembangan komunitas dan inisiatif lokal.
4. Dinas Sosial  
Mendukung program-program yang meningkatkan kapasitas sosial komunitas, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan kelompok rentan.
5. Dinas Pendidikan  
Terlibat dalam pengembangan dan penyelenggaraan program edukatif untuk keluarga, termasuk pendidikan parenting dan literasi.
6. Dinas Kesehatan  
Memberikan dukungan dalam aspek kesehatan keluarga, termasuk kesehatan reproduksi, imunisasi, dan nutrisi.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Befokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk advokasi untuk model keluarga berkualitas.
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi/Kabupaten

Spesifik untuk program keluarga berencana, termasuk pendidikan seksual dan reproduksi yang sehat.

9. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

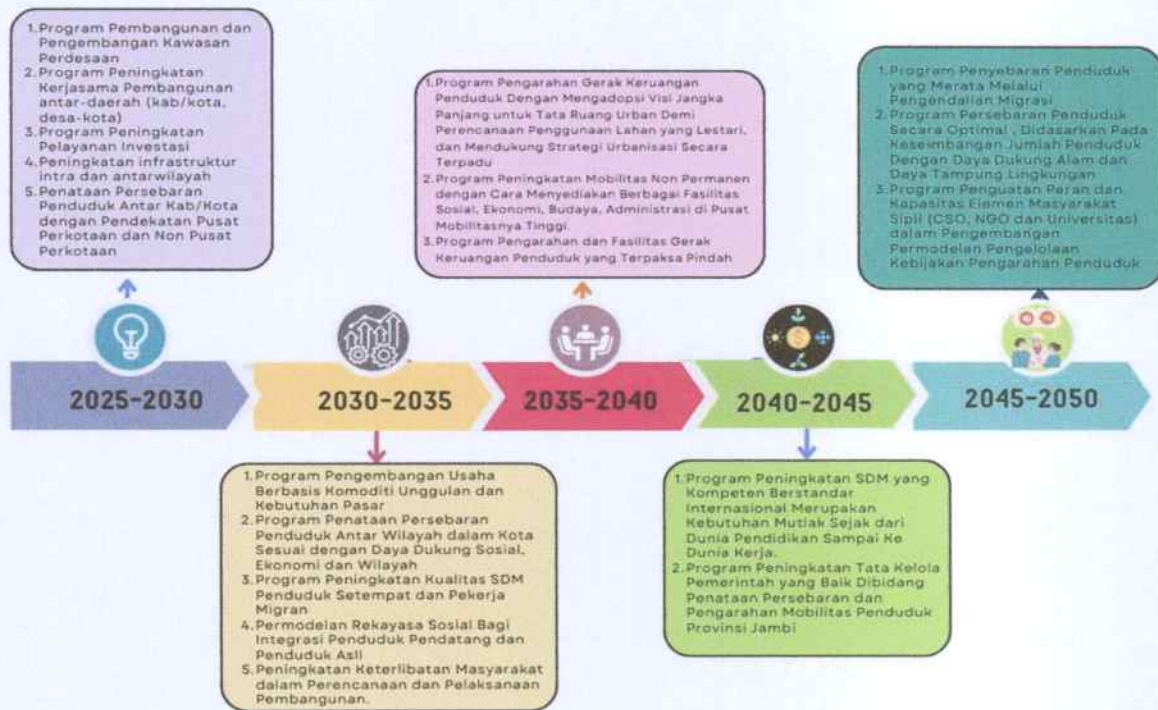
Mendukung diseminasi informasi dan edukasi publik melalui media dan teknologi informasi.

10. Dinas Lingkungan Hidup

Berperan dalam program-program yang terkait dengan lingkungan hidup sebagai bagian dari model keluarga berkualitas yang berkelanjutan.

**6.4. Roadmap Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk**

Roadmap Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk adalah langkah krusial untuk berbagai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, penataan persebaran penduduk yang efektif memungkinkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lebih efisien. Hal ini mencegah overpopulasi di beberapa daerah sambil memastikan keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas sumber daya setiap daerah. Kedua, pemahaman yang mendalam tentang persebaran dan mobilitas penduduk memfasilitasi perencanaan infrastruktur yang tepat, termasuk perumahan, transportasi, dan fasilitas publik lainnya. Dengan demikian, infrastruktur dapat dibangun di lokasi yang paling membutuhkan dan menjadi aksesibel bagi sebanyak mungkin orang. Ketiga, penataan yang baik mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Ini termasuk memastikan akses yang merata ke layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan peluang kerja di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Keempat, penataan persebaran penduduk yang adil dan merata berpotensi mengurangi konflik sosial. Ini bisa dicapai dengan mengurangi ketimpangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah kaya dan miskin, mencegah timbulnya disparitas sosial yang dapat memicu konflik.



**Gambar 6. 5.** Roadmap Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Roadmap Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk tidak hanya mendukung pengelolaan sumber daya dan infrastruktur yang lebih baik tetapi juga membantu mempromosikan kesetaraan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada upaya mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Adapun program-program kegiatannya dijelaskan sebagai berikut:

#### **6.4.1. Penataan Persebaran dan Pengarahannya Mobilitas Penduduk 2025-2030**

Pengembangan program-program yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan menjadi sistem produksi pertanian, Peningkatan Kerjasama Pembangunan antar-daerah (kab/kota, desa-kota), Peningkatan pelayanan investasi, Peningkatan infrastruktur intra dan antarwilayah, Penataan persebaran penduduk antar kab/kota dengan pendekatan pusat perkotaan dan non pusat perkotaan.

##### **A. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Menjadi Sistem Produksi Pertanian.**

Membangun dan mengembangkan kawasan perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dapat mendorong dan meningkatkan mobilitas dan minat generasi muda kesektor pertanian di pedesaan,

arus investasi, teknologi dan barang modal juga akan masuk keperdesaab. Adapun program-program yang berkaitan:

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan sentra produksi pertanian modern di daerah perdesaan dengan sentuhan teknologi.

2. Pengembangan Sistem Produksi Pertanian Modern

Melaksanakan pengembangan program sistem produksi pertanian.

**B. Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan antar-daerah (kab/kota, desa-kota),**

Melakukan Kerjasama Pembangunan antar daerah, melalui program-program.

1. Kerjasama Pembangunan antar daerah

Memperkuat konektivitas antar daerah melalui Pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian lainnya..

2. Melaksanakan Cross-Cutting Program

Mengembangkan program silang berdasarkan potensi masing-masing daerah.

**C. Program Peningkatan Pelayanan Investasi**

Pembangunan daerah terutama bidang infrastruktur sangat membutuhkan investasi, baik dari dalam (PMDN) maupun luar negeri (PMA). Adapun program yang dilakukan untuk meningkatkan investasi antara lain adalah:

1. Pengembangan System Perizinan yang cepat, mudah dan murah

Membangun system pelayanan pada perizinan yang terintegrasi dengan semua sektor, sehingga lebih cepat, murah dan mudah..

2. Peningkatan pelayanan

Melatih tenaga pelayanan investasi yang kompeten, cerdas dan trampil sehingga dapat menjalankan system yang menggunakan teknologi informasi yang maju dan canggih.

**D. Peningkatan infrastruktur intra dan antarwilayah**

Untuk mengatur mobilitas penduduk, maka Pembangunan infrastruktur terutama jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya

harus dibangun didalam suatu wilayah maupun antar wilayah, terutama wilayah yang belum berkembang. Program seperti ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi arus urbanisasi dari daerah yang kurang berkembang ke kota. Adapun program yang dapat dilakukan untuk peningkatan infrastruktur tersebut antara lain:

1. Pembangunan pusat pertumbuhan baru di pedesaan ataupun daerah yang belum berkembang.
2. Meningkatkan daya saing wilayah yang baru dengan infrastuktur yang baik.

#### **E. Penataan Persebaran Penduduk Antar Kab/Kota dengan Pendekatan Pusat Perkotaan dan Non Pusat Perkotaan.**

Persebaran penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih belum merata, Dimana penduduk masih terkonsentrasi di Kota Jambi dan sekitarnya, sedangkan daya dukung wilayah dan lingkungan sudah maksimal. Berkenaan dengan hal tersebut, maka program-program yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Pembangunan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, kesehatan dan Pendidikan di beberapa daerah yang potensi menjadi tujuan mobilitas penduduk.
2. Mengurangi mobilitas penduduk ke Kota yang sudah padat seperti Kota Jambi dengan Pembangunan dan penataan wilayah penyangga, sehingga penyebaran penduduk menjadi lebih merata.
3. Program transmigrasi penduduk dari wilayah yang padat ke daerah yang masih kurang sehingga terjadi distribusi penduduk yang lebih merata sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan menjadi sistem produksi pertanian, Peningkatan Kerjasama Pembangunan antar-daerah (kab/kota, desa-kota), Peningkatan pelayanan investasi, Peningkatan infrastruktur intra dan antarwilayah, Penataan persebaran penduduk antar kab/kota dengan pendekatan pusat perkotaan dan non pusat perkotaan, terdapat beberapa

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting. Berikut ini adalah beberapa OPD yang terlibat:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Berperan dalam desain, perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  
Berperan dalam pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan raya, jembatan, fasilitas ekonomi, fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan pemukiman yang layak.
3. Dinas Pendidikan  
Bertanggung jawab atas pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang baik, merata dan berkualitas di daerah, termasuk peningkatan infrastruktur pendidikan dan pelatihan tenaga pengajar.
4. Dinas Kesehatan  
Melakukan pelayanan kesehatan public yang baik dan merata, termasuk pengembangan infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan implementasi program kesehatan reproduksi.
5. Dinas Lingkungan Hidup  
Mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan terkait pekerjaan hijau, termasuk pelatihan, inkubasi usaha, dan kampanye kesadaran lingkungan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  
Berperan dalam pengembangan dan penerapan digitalisasi layanan, termasuk layanan kesehatan reproduksi melalui aplikasi mobile dan platform digital lainnya.
7. Dinas Sosial  
Dapat terlibat dalam aspek sosialisasi dan dukungan kepada masyarakat terkait program-program yang dijalankan, terutama dalam aspek keterampilan dan pekerjaan hijau.
8. Dinas Tenaga Kerja

Berperan dalam pelatihan keterampilan kerja, termasuk untuk pekerjaan hijau, dan mendukung penciptaan lapangan kerja baru.

9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor hijau dan teknologi kesehatan.

**6.4.2. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2030-2035.**

Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk tahun 2030-2035 untuk Provinsi Jambi difokuskan pada program Pengembangan usaha berbasis komoditi unggulan dan kebutuhan pasar, Penataan persebaran penduduk antar wilayah dalam kota sesuai dengan daya dukung sosial, ekonomi dan wilayah, Peningkatan kualitas SDM penduduk setempat dan pekerja migran, Permodelan rekayasa sosial bagi integrasi penduduk pendatang dan penduduk asli, Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

**A. Program Pengembangan Usaha Berbasis Komoditi Unggulan dan Kebutuhan Pasar.**

Membangun dan mengembangkan kawasan perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dapat mendorong dan meningkatkan mobilitas dan minat generasi muda kesektor pertanian di pedesaan, arus investasi, teknologi dan barang modal juga akan masuk keperdesaab. Adapun program-program yang berkaitan:

1. Pengembangan usaha berbasis komoditi unggulan dan kebutuhan pasar

Setiap kabupaten/Kota di Provinsi Jambi diharapkan mempunyai program unggulan daerah yang berbasis pada kebutuhan pasar.

2. Peningkatan SDM Petani dan Wirausaha Unggul

Melaksanakan pengembangan SDM yang berbasis pada ketrampilan dan kompetensi.

## **B. Program Penataan Persebaran Penduduk Antar Wilayah dalam Kota Sesuai dengan Daya Dukung Sosial, Ekonomi dan Wilayah.**

Melakukan Pembangunan antar wilayah dalam kota, melalui program-program.

1. Pembangunan perkotaan yang memperhatikan kebutuhan dan peluang kerja penduduk  
Memperkuat konektivitas antar daerah melalui Pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian lainnya..
2. Pembangunan daerah hinterland kota atau daerah pinggiran kota  
Mengembangkan wilayah pinggiran kota untuk dapat mendukung ekonomi penduduk.

## **C. Program Peningkatan Kualitas SDM Penduduk Setempat dan Pekerja Migran**

Pembangunan daerah membutuhkan kualitas SDM terutama penduduk setempat dan pekerja migran agar dapat diberdayakan. Adapun program yang dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM antara lain adalah:

1. Pelaksanaan pelatihan dan magang bagi SDM setempat  
Melakukan pelatihan secara regular bagi penduduk setempat.
2. Peningkatan peralatan pelatihan  
Mengadakan peralatan untuk melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar.

## **D. Permodelan Rekayasa Sosial Bagi Integrasi Penduduk Pendetang dan Penduduk Asli**

Untuk meningkatkan inegrasi penduduk pendatang dan penduduk asli, perlu dilakukan program sosialisasi dan rekayasa sosial. Adapun program yang dapat dilakukan untuk permodelan rakayasa sosial tersebut antara lain:

1. Peningkatan sosialisasi dan asimilasi antara penduduk pendatang dan penduduk asli.
2. Meningkatkan toleransi dan kebersamaan .

### **E. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.**

Berkenaan dengan program peningkatan keterlibatan masyarakat tersebut, maka program-program yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kabupaten /Kota serta Provinsi.
2. Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan Pembangunan.
3. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan perencanaan

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk tahun 2030-2035 untuk Provinsi Jambi difokuskan pada program Pengembangan usaha berbasis komoditi unggulan dan kebutuhan pasar, Penataan persebaran penduduk antar wilayah dalam kota sesuai dengan daya dukung sosial, ekonomi dan wilayah, Peningkatan kualitas SDM penduduk setempat dan pekerja migran, Permodelan rekayasa sosial bagi integrasi penduduk pendatang dan penduduk asli, Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting. Berikut ini adalah beberapa OPD yang terlibat:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Berperan dalam desain, perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program-program Pembangunan.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  
Berperan dalam mengeksekusi pembangunan infrastruktur fisik untuk fasilitas yang dibutuhkan.
3. Dinas Pendidikan  
Bertanggung jawab atas pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan
4. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  
Berperan dalam pengembangan dan penerapan digitalisasi layanan, untuk wirausaha.

5. Dinas Tenaga Kerja

Berperan dalam pelatihan keterampilan kerja, termasuk untuk pekerja migran dan penduduk setempat dalam mendukung penciptaan lapangan kerja baru.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor potensi.

**6.4.3. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2035-2040.**

Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk tahun 2035-2040 untuk Provinsi Jambi difokuskan pada program Pengarahan gerak keruangan penduduk dengan mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang Lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu, Peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, administrasi di pusat mobilitasnya tinggi; Pengarahan dan fasilitas gerak keruangan penduduk yang terpaksa pindah.

**A. Program Pengarahan Gerak Keruangan Penduduk Dengan Mengadopsi Visi Jangka Panjang untuk Tata Ruang Urban Demi Perencanaan Penggunaan Lahan yang Lestari, dan Mendukung Strategi Urbanisasi Secara Terpadu.**

Adapun program-program yang berkaitan antara lain:

1. Pembangunan Kawasan yang sesuai dengan tata ruang  
Pembangunan sentra produksi, sentra bisnis dengan sentuhan teknologi. Dan ramah lingkungan
2. Membangun Sektor pertanian yang Lestari dan hijau.  
Melaksanakan pengembangan program pertanian yang hijau dan Lestari.

**B. Program Peningkatan Mobilitas Non Permanen dengan Cara Menyediakan Berbagai Fasilitas Sosial, Ekonomi, Budaya, Administrasi di Pusat Mobilitasnya Tinggi.**

Melakukan peningkatan mobilitas non permanen, melalui program-program.

1. Pembangunan fasilitas sosial, ekonomi, Kesehatan dan pendidikan  
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di pusat mobilitas tinggi.
2. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru didaerah yang potensi  
Pembangunan Kawasan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang potensi.

### **C. Program Pengarahan dan Fasilitas Gerak Keruangan Penduduk yang Terpaksa Pindah.**

Adapun program yang dilakukan untuk meningkatkan investasi antara lain adalah:

1. Pengembangan Fasilitas yang murah, cepat, mudah dan terjangkau
2. Peningkatan pelayanan bagi penduduk yang harus pindah.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan Pengarahan gerak keruangan penduduk dengan mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang Lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu, Peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, administrasi di pusat mobilitasnya tinggi; Pengarahan dan fasilitas gerak keruangan penduduk yang terpaksa pindah, terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting. Berikut ini adalah beberapa OPD yang terlibat:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Berperan dalam perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan, dan tata ruang wilayah.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  
Berperan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.
3. Dinas Pendidikan  
Bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
4. Dinas Kesehatan  
Melakukan pelayanan kesehatan public yang baik dan merata.

5. Dinas Lingkungan Hidup  
Mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan terkait kampanye kesadaran lingkungan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  
Berperan dalam pengembangan dan penerapan digitalisasi layanan, untuk UMKM.
7. Dinas Sosial  
Dapat terlibat dalam aspek sosialisasi dan dukungan kepada penduduk yang harus pindah.
8. Dinas Tenaga Kerja  
Berperan dalam pelatihan keterampilan dan kompetensi penduduk yang bekerja
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Mendukung pengembangan UMKM dalam rangka pemerataan penduduk

#### **6.4.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2040-2045.**

Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk tahun 2040-2045 untuk Provinsi Jambi difokuskan pada program Peningkatan SDM yg kompeten berstandar internasional merupakan kebutuhan mutlak sejak dari dunia Pendidikan sampai ke dunia kerja. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dibidang penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk Provinsi Jambi.

##### **A. Program Peningkatan SDM yang Kompeten Berstandar Internasional Merupakan Kebutuhan Mutlak Sejak dari Dunia Pendidikan Sampai Ke Dunia Kerja.**

Adapun program-program yang berkaitan antara lain:

1. Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pelatihan yang Berstandar Internasional  
Pembangunan tempat pelatihan ini dapat kerjsama dengan Balai Latihan Kerja Nasional atau Swasta yang bersertifikasi internasional.
2. Pengembangan SDM Pelatih yang Berstandar Internasional  
Melaksanakan pengembangan program pelatihan .

## **B. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Dibidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Provinsi Jambi.**

Melakukan Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baikantar daerah, melalui program-program.

1. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintah di Bidang Penataan dan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.

Memperkuat Bidang Pendataan Dinas Dukcapil, peningkatan system dan SDM dibidang kependudukan.

2. Program sertifikasi ISO tata Kelola pemerintah dibidang penataan, persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan Peningkatan SDM yg kompeten berstandar internasional merupakan kebutuhan mutlak sejak dari dunia Pendidikan sampai ke dunia kerja. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dibidang penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk Provinsi Jambi, terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting. Berikut ini adalah beberapa OPD yang terlibat:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Berperan dalam perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk di bidang kependudukan.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Berperan dalam pembangunan infrastruktur fisik seperti fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan pemukiman yang layak.

3. Dinas Pendidikan

Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelatihan dan tenaga pengelola.

4. Dinas Kesehatan

Melakukan pelayanan kesehatan masyarakat yang baik dan merata, termasuk implementasi program kesehatan reproduksi.

5. Dinas Lingkungan Hidup

Mengkoordinasikan dan mendukung dan kampanye kesadaran lingkungan.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  
Berperan dalam pengembangan dan penerapan digitalisasi layanan, dan informasi kependudukan yang akurat.
7. Dinas Sosial  
Dukungan kepada masyarakat terkait program-program yang migrasi dari daerah padat ke daerah yang jarang.
8. Dinas Tenaga Kerja  
Berperan dalam peningkatan kompetensi pelatih dan tenaga kerja.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Mendukung pengembangan UMKM bagi penduduk yang kurang mampu dan meningkatkan potensi dan kemampuan wirausahanya.

#### **6.4.5. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 2045-2050.**

Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk tahun 2045-2050 untuk Provinsi Jambi difokuskan pada program penyebaran penduduk yang merata dengan menyeimbangkan pengendalian migrasi. Persebaran penduduk secara optimal, didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Penguatan peran dan kapasitas elemen Masyarakat sipil (CSO, NGO dan Universitas) dalam pengembangan permodelan pengelolaan kebijakan pengarahannya penduduk.

##### **A. Program Penyebaran Penduduk yang Merata Melalui Pengendalian Migrasi.**

Adapun program Penyebaran Penduduk yang Merata Melalui Pengendalian Migrasi, antara lain:

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kawasan pertumbuhan baru yang potensi  
Pembangunan sentra produksi pertanian dan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang strategis
2. Pengembangan konektivitas antar daerah  
Melaksanakan pengembangan jalan dan infrastruktur daerah

3. Pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan penduduk secara merata.

**B. Program Persebaran Penduduk Secara Optimal , Didasarkan Pada Keseimbangan Jumlah Penduduk Dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan.**

Adapun program-program Pembangunan yang dilakukan antara lain.

1. Kerjasama Pembangunan Antar daerah dalam Mendukung Persebaran Penduduk  
Memperkuat kerjasama antar daerah melalui Pembangunan fasilitas pendukung persebaran penduduk.
2. Mengarahkan Persebaran Penduduk secara Optimal  
Mengembangkan program persebaran atau migrasi yang permanent diperlukan pemerintah secara kontinu.

**C. Program Penguatan Peran dan Kapasitas Elemen Masyarakat Sipil (CSO, NGO dan Universitas) dalam Pengembangan Permodelan Pengelolaan Kebijakan Pengarahan Penduduk.**

Adapun program yang dilakukan untuk penguatan CSO, NGO dan Universitas antara lain adalah:

1. Program Peningkatan Kerjasama Kemitraan Antara Pemerintah dengan CSO, NGO dan Universitas.  
Membangun Kerjasama yang baik saling menguntungkan untuk membangun kemitraan yang berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan peranserta dalam pengarahannya kependudukan.
2. Peningkatan Pelatihan dan Pertukaran Data  
Mitra CSO, NGO dan Universitas dapat dilibatkan dalam pelatihan dan pertukaran data untuk membangun system kependudukan yang baik..

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan program penyebaran penduduk yang merata dengan menyeimbangkan pengendalian migrasi. Persebaran penduduk secara optimal , didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Penguatan peran dan kapasitas elemen Masyarakat sipil (CSO, NGO dan

Universitas) dalam pengembangan permodelan pengelolaan kebijakan pengarahannya penduduk, terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting. Berikut ini adalah beberapa OPD yang terlibat:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Berperan dalam perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program pembangunan, termasuk di bidang kerjasama dengan NGO dan Universitas.
2. Dinas Pendidikan  
Bertanggung jawab atas pengembangan dan kerjasama dengan NGO dan universitas dibidang Pendidikan dan pelatihan.
3. Dinas Kesehatan  
Melakukan pelayanan kesehatan termasuk kerjasama dengan CSO, NGO dan Universitas dibidang kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan implementasi program kesehatan reproduksi.
4. Dinas Lingkungan Hidup  
Ikut mengkampanyekan Bersama stakeholderlaninya dalam kampanye kesadaran lingkungan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  
Berperan promosi dan pembuatan system Kerjasama yang digital.
6. Dinas Sosial  
Mendukung masyarakat terkait program-program yang dijalankan, terutama dalam program migrasi perpindahan karena terpaksa, bencana alam atau yang lain.
7. Dinas Tenaga Kerja  
Berperan dalam pelatihan penduduk untuk peningkatan ketrampilan dan mendukung penciptaan lapangan kerja baru.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Mendukung pengembangan UKM di sektor yang basis di Provinsi Jambi..

#### **6.5. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan**

Roadmap Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan adalah sebuah rencana strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan. Penataan Data dan

Informasi Kependudukan melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data demografis dan statistik penduduk dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang komposisi, distribusi, dan tren penduduk. Pemahaman ini kemudian dapat digunakan untuk merencanakan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan. Sementara itu, Administrasi Kependudukan merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data kependudukan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya tentang jumlah penduduk, karakteristik demografis, serta kebutuhan dan potensi penduduk. Administrasi kependudukan melibatkan berbagai proses seperti pendaftaran penduduk, pencatatan kelahiran dan kematian, penerbitan dokumen kependudukan, serta pengumpulan dan analisis data demografis. Roadmap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dan informasi kependudukan dikelola dengan cara yang efisien dan efektif, dan bahwa administrasi kependudukan dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Pentingnya Roadmap ini tidak dapat diabaikan. Dengan memiliki data kependudukan yang akurat dan terkini, pemerintah dapat melakukan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, serta menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, administrasi kependudukan juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, administrasi kependudukan juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses administrasi kependudukan. Oleh karena itu, Roadmap ini juga harus mencakup strategi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses ini.



**Gambar 6. 6.** Roadmap Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

### 6.5.1. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan 2025-2030

Program-program Pengembangan Database Kependudukan dan Administrasi Kependudukan pada periode ini mencakup:

- Implementasi sistem database kependudukan terintegrasi dengan sistem lain, termasuk lintas sektor.
- Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) antar instansi pemerintah, kepada masyarakat, dan dunia bisnis.
- Peluncuran program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisis data kependudukan.
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan aman untuk mendukung pengelolaan database.

### 6.5.2. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan 2030-2035

Program-program Pengembangan Database Kependudukan dan Administrasi Kependudukan pada periode ini mencakup:

- Ekspansi dan penyempurnaan fitur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
- Pengembangan ekosistem digital yang inklusif melalui pelatihan lanjutan dan pendidikan yang berkualitas.
- Integrasi teknologi canggih seperti artificial intelligence dalam sistem database untuk otomatisasi dan analisis data yang lebih efisien.

### **6.5.3. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan 2035-2040**

Program-program Pengembangan Database Kependudukan dan Administrasi Kependudukan pada periode ini mencakup:

- Implementasi sistem keamanan data yang canggih untuk melindungi privasi individu dan integritas data.
- Integrasi database kependudukan dengan sistem Dukcapil sebagai big data kependudukan.
- Penguatan kapasitas SDM untuk pengelolaan keamanan data dan privasi individu.

### **6.5.4. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan 2040-2045**

Program-program Pengembangan Database Kependudukan dan Administrasi Kependudukan pada periode ini mencakup:

- Pemeliharaan dan evaluasi berkala sistem database kependudukan untuk memastikan keberlanjutan dan keakuratan data.
- Pengembangan program pembaharuan kapasitas SDM berkelanjutan untuk menjaga kualitas pengelolaan database.
- Pembaharuan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

#### **6.5.5. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi kependudukan 2045-2050**

Program-program Pengembangan Database Kependudukan dan Administrasi Kependudukan pada periode ini mencakup:

- Evaluasi menyeluruh dan adaptasi sistem database kependudukan terhadap perubahan sosial-ekonomi dan teknologi.
- Adaptasi dan pembaharuan program pelatihan SDM sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masa depan.
- Penyesuaian infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung inovasi dan layanan publik di masa depan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1. Kesimpulan**

Pembangunan kependudukan di Provinsi Jambi menunjukkan trend positif pada setiap pilar. Hal ini ditandai oleh adanya peningkatan dan perbaikan pada setiap parameter kependudukan. Namun demikian, masih ditemui beberapa tantangan demografis, misalnya tingkat pertumbuhan penduduk masih relative tinggi, diikuti angka kelahiran terus meningkat, dan adanya masalah *unmet need* KB. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Jambi merancang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang mengintegrasikan lima pilar utama: (1) Pengendalian kuantitas penduduk; (2) Peningkatan kualitas penduduk; (3) Pembangunan keluarga berkualitas; (4) Penataan persebaran dan mobilitas penduduk; dan (5) Penataan data, informasi kependudukan dan administrasi kependudukan.

Melalui data dasar penduduk SP 2020, diperoleh jumlah dan komposisi penduduk Provinsi Jambi berada kondisi ***penduduk muda (ekspansif)***. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan usia pada setiap kelompok umur. Relatif tingginya pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi menjadi tantangan utama dalam pengembangan pembangunan kependudukan berikutnya. Meskipun demikian, melalui penduduk muda diperoleh peluang bonus demografi terbuka lebar sehingga Provinsi Jambi dapat memanfaatkannya dengan strategi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti adanya program investasi SDM dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan.

Data lain dari SP 2020, TFR yang tinggi, penggunaan alat kontrasepsi rendah, dan adanya disparitas diantara kabupaten/kota sehingga perencanaan keluarga dan akses terhadap kontrasepsi dalam peningkatan kesadaran kelompok masyarakat akan pentingnya program pembangunan kependudukan menjadi kunci. Program penanganan kesehatan reproduksi menjadi penting untuk mengurangi angka kelahiran remaja dan meningkatkan perencanaan keluarga sehingga pada akhirnya akan membantu mencapai peningkatan

kualitas penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara keberlanjutan.

Cepatnya terjadi perubahan waktu sehingga parameter kependudukan ikut mengalami *perubahan*. Hasil proyeksi penduduk menekankan pentingnya memproyeksikan jumlah penduduk masa depan dan struktur umur untuk perencanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ideal kependudukan menggambarkan situasi yang diinginkan dalam distribusi dan komposisi penduduk, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan pengembangan masyarakat. Melalui proyeksi penduduk 2025-2050, Provinsi Jambi menghadapi tantangan demografis seperti tingkat fertilitas tinggi, disparitas usia kawin pertama, rendahnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan belum tercapainya target Unmet-Need, tingginya *Dependency ratio*, adanya disparitas Indeks Kesetaraan Gender (IKG). Program utama diperlukan yaitu peningkatan kualitas keluarga dengan fokus pada program kesejahteraan sosial, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta inisiatif untuk memperkuat kapasitas ekonomi keluarga guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Program lain, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui akses pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan dasar, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Berikut, adanya pembangunan keluarga berfokus pada menciptakan unit keluarga yang sehat dan harmonis, dengan memperhatikan dimensi spiritualitas, legalitas perkawinan, kesejahteraan, kontribusi sosial, dan pengelolaan sumber daya. Program lain tak kalah penting, mengarahkan kebijakan dan strategi untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi antar wilayah, termasuk pengelolaan mobilitas penduduk dan urbanisasi. Selain itu, penciptaan database kependudukan yang akurat, terintegrasi berbasis digital, dan efisien mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan layanan publik.

Berpijak dari kondisi data situasi dan proyeksi penduduk maka dibangun *roadmap* GDPK Provinsi Jambi periode 2025-2050 terhadap lima pilar pembangunan kependudukan meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan

mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengembangan database kependudukan. Melalui *roadmap* ini diharapkan mencapai target yang telah ditentukan yaitu pertumbuhan penduduk yang seimbang dalam tataran pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Strategi dan program yang diusung termasuk kampanye usia ideal perkawinan, edukasi kontrasepsi, integrasi program KB, dan peningkatan layanan kesehatan reproduksi.

## **7.2.Saran**

Berdasarkan kajian analisis pada pada isu strategis dan kebijakan serta *Road Map* GDPK Provinsi Jambi Tahun 2025-2050, maka disusun beberapa rekomendasi masing-masing pilar sebagai berikut:

### **1. Rekomendasi berdasarkan isu dan tantangan terkait pengendalian kuantitas penduduk Provinsi Jambi tahun 2025-2050:**

- a. Peningkatan koordinasi antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat melalui *Cross Cutting Program* baik melalui kegiatan maupun dari sisi anggaran sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- b. Peningkatan kebijakan melalui sosialisasi, seminar, media elektronik, media cetak, leaflet, poster, iklan, layanan masyarakat, billboard dan media promosi lainnya untuk peningkatan pemahaman, pengetahuan terutama bagi kaum milineal untuk mengurangi pernikahan usia dini dan kepersertaan MKJP.
- c. Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menjadi sangat prioritas dilakukan mulai tahun 2025.
- d. Pembangunan kebutuhan untuk penduduk diatas 60 tahun harus menjadi prioritas kedepan, karena mulai tahun 2040 proporsi jumlah penduduk usia 60 tahun sudah diatas 10 persen dan akan terus meningkat.
- e. Untuk mengurangi tingginya unmeed need, maka rekomendasi program layanan kesehatan reproduksi gratis di fasilitas-fasilitas kesehatan tertentu, di mana masyarakat dapat mengakses

kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi lainnya tanpa biaya.

**2. Rekomendasi berdasarkan isu dan tantangan terkait peningkatan kualitas penduduk Provinsi Jambi tahun 2025-2050:**

- a. Program penurunan stunting melalui kerjasama semua stakeholder dengan leading sektor BKKBN RI harus terus terus ditingkatkan karena jumlah prevalensi stunting cenderung berfluktuasi dan meningkat di beberapa daerah, karena sangat terkait dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.
- b. Disparitas Pendidikan antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi juga relative tinggi, maka Rekomendasi terhadap isu ini kedepan adalah Pembangunan fasilitas Pendidikan yang merata disertai dengan ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas, peralatan dan fasilitas lainnya melalui skema alokasi anggaran pendidikan yang memprioritaskan daerah yang tingkat pendidikannya masih rendah.
- c. Bonus demografi belum termanfaatkan secara maksimal di Kabupaten/Kota maupun di Tingkat Provinsi, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kualitas Angkatan kerja dan rendahnya kesempatan kerja. Berkenaan dengan itu Rekomendasi Pembangunan Balai Latihan Kerja yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di setiap Kabupaten/Kota dan dapat bekerjasama dengan Perusahaan yang ada di daerah masing-masing melalui CSR Perusahaan tersebut.
- d. Untuk dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Jambi, maka Rekomendasi yang diajukan adalah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perempuan melalui OPD yang terkait serta Program Pendampingan bagi Perempuan dan anak-anak di Lembaga Per masyarakatan serta orientasi kepada kesetaraan sosial untuk wanita melalui GESI (*Gender Equality Social Inclusion*).
- e. Untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim di kabupaten/kota dan Provinsi Jambi, direkomendasikan program prioritas

pemberdayaan masyarakat miskin langsung kesasaran melalui program lintas sektor, atau dapat juga melalui program transmigrasi bagi Masyarakat miskin ekstrim diperkotaan.

**3. Rekomendasi berdasarkan isu dan tantangan terkait Pembangunan Keluarga Provinsi Jambi tahun 2025-2050:**

- a. Pemanfaatan hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi harus dioptimalkan , sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan Pembangunan yang berorientasi kepada penduduk. Oleh karena itu direkomendasikan agar Pemerintah pusat melalui Kementerian dalam negeri ataupun Bappenas dan menginstruksikan Kepala Daerah dan Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menindaklanjutinya.
- b. Kemajuan teknologi, komunikasi dan informatika berdampak pada perkembangan media sosial, internet dan yang lainnya yang padagilirannya dapat merubah pola dan prilaku Masyarakat dalam keluarga. Rekomendasi yang dapat disampaikan disini perlunya Pemerintah melalui Lembaga yang berwenang untuk menyaring konten-konten yang negative, game-game online yang dapat merusak anak-anak, konten provokatif, hoak dan judi online yang ada di media sosial yang tidak sesuai dengan budaya kita.
- c. Rendahnya pola hidup sehat, kami rekomendasikan agar sosialisasi Pola Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) secara massif harus terus ditingkatkan sosialisasinya kemasyarakat melalui semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten/Kota dan Provinsi Jambi. Pembangunan fasilitas Kesehatan seperti MCK didaerah-daerah aliran Sungai atau daerah terpencil menjadi skala prioritas kedepan.
- d. Untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi tingginya angka perceraian di Provinsi Jambi, maka Rekomendasi perlu peningkatan program penyuluhan keluarga dan menyediakan dukungan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Penguatan nilai-nilai moral dan spiritual serta penyediaan layanan konseling

pranikah dan pasca nikah dapat membantu memperkuat struktur keluarga dan mengurangi potensi konflik rumah tangga.

**4. Rekomendasi berdasarkan isu dan tantangan terkait Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Jambi tahun 2025-2050:**

- a. Ketiadaan program distribusi penduduk, selama ini Pemerintah Provinsi Jambi belum ada program yang mengalokasikan penduduk yang padat disuatu daerah kedaerah lainnya, kecuali program pemerintah pusat yang memindahkan penduduk yang berada di TNKS Kabupaten Kerinci pada tahun 1990. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi perlu membuat program distribusi penduduk dari daerah padat perkotaan yang sangat rentan miskin untuk ditransmigrasikan ke daerah yang kurang penduduk di wilayah Provinsi Jambi lainnya.
- b. Isu perubahan pola migrasi dan pesatnya proses urbanisasi di Provinsi Jambi, Berkenaan dengan isu tersebut, maka Rekomendasinya Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam mengarahkan mobilitas penduduk, perlu fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan menjadi system produksi pertanian untuk menciptakan lapangan kerja lokal dan meminimalkan tekanan migrasi ke kota-kota besar di Provinsi Jambi. Insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi di daerah pedesaan dan peningkatan akses terhadap transportasi publik yang efisien juga dapat membantu mengurangi mobilitas penduduk antar wilayah.
- c. Meningkatnya mobilitas non permanen di Provinsi Jambi, berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun konektivitas melalui Pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga dapat mendorong kemajuan daerah yang dituju.
- d. Penduduk belum optimum, distribusi penduduk di Provinsi Jambi masih belum merata, karena Kota Jambi yang luasnya hasnya 0,32

persen total luas Provinsi Jambi didiami oleh hamper 17 persen dari total penduduk Provinsi Jambi. Berkenaan dengan hal tersebut, rekomendasi Pembangunan Kawasan Pertumbuhan kedaerah hinterland atau daerah strategis lainya dan memiliki potensi sumberdaya alam atau dengan letak yang strategis.

**5. Rekomendasi berdasarkan isu dan tantangan terkait Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Jambi tahun 2025-2050:**

- a. Belum terintegrasinya data kependudukan di Provinsi Jambi, berkaitan dengan isu tersebut maka Rekomendasi yang diajukan adalah melakukan validasi data kependudukan, melakukan sinkronisasi dan membangun system pendudukan yang terintegrasi dengan semua stakeholder di Provinsi Jambi.
- b. Kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan belum berdasarkan data yang akurat dan relevan, rekomendasi yang diajukan adalah melakukan program penyelarasan database kependudukan Provinsi Jambi dengan menggunakan sistem pengumpulan data yang terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan analisis data, sehingga Pembangunan yang dilaksanakan sudah menggunakan satu data yang valid dan reliabel.
- c. Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan belum maksimal, Rekomendasi yang diajukan adalah peningkatan sosialisasi pentingnya data kependudukan kepada semua lapisan Masyarakat, kemudian mengkaikat dokumen kependudukan kepada semua sektor seperti perizinan, sektor Pendidikan, sektor usaha, sektor bantuan sosial, sektor pelayanan Kesehatan dan sektor lainnya.

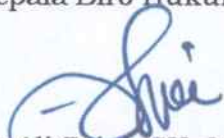
**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

*Z*.Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zamri, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. (2012). Introduction to economic growth. *Journal of Economic Theory*, 147(2), 545–550. <https://doi.org/10.1016/j.jet.2012.01.023>
- Adriani, D., & Yustini, T. (2021). Anticipating the demographic bonus from the perspective of human capital in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(6), 141–152. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i6.1377>
- Andikaputra, A. (2022). Analisis potensi ekonomi dan kependudukan Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 439–450. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.16428>
- BKKBN, Provinsi Jambi.(2024). Data Keluarga Berkualitas, IBangga, Siga BKKBN, SDKI Provinsi Jambi Data Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Provinsi Jambi.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The demographic dividend: a new perspective on the economic consequences of population change. *PsycEXTRA Dataset*. <https://doi.org/10.1037/e526392012-001>
- Boone, Louis E Kurtz, David L. (2008). *Pengantar Bisnis Kontemporer*. Buku I. Salemba. Jakarta.
- BPS Provinsi Jambi. (2024). Data Susenas, SUPAS Jambi Dalam Angka 2020, Susenas SUPAS Jambi Dalam Angka 2015-2022, Sakernas Provinsi Jambi, data Kependudukan, kesehatan dan ekonomi, diakses dari <https://jambi.bps.go.id/>, Tanggal 18 Februari 2024
- BPS. (2024). Data Susenas, data Kependudukan, kesehatan dan ekonomi, diakses dari <https://www.bps.go.id/id>, Tanggal 18 Februari 2024
- David, Fred R. (2004). *Manajemen Strategis : Konsep – Konsep, Alih Bahasa : Kresno Santoso*. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Deffinika, I., Putra, A. K., Insani, N., Islam, M. N., Attamimi, M. R., & Mukti, A. B. K. (2020). Implementation of Population Education and Reproduction Health in Supporting Population Alert Schools in Malang Regency. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(2), 54.
- DP3AP2 Provinsi Jambi Statistik Rutin. (2024). Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, anak, Provinsi
- Hadi, L., & Frinaldi, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Kependudukan. *Journal of Public Administration Studies*, 1, 333–345.
- Hubalillah, H., Badaruddin, B., & Kusmanto, H. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Bus Samsat Keliling Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Medan Selatan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 11(1), 372–384. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5662>

- Huda, B. (2018). Sistem Informasi Data Penduduk Berbasis Android Dan Web Monitoring Studi Kasus Pemerintah Kota Karawang (Penelitian dilakukan di Kab. Karawang). *Buana Ilmu*, 3(1), 62–69. <https://doi.org/10.36805/bi.v3i1.456>
- Janah, E. N., Ritongah, I., & Nurhayati, N. (2021). Optimization of superior esq and hr On the preparation of demographic bonus In the era of the industrial revolution 4.0. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 15–23. <https://doi.org/10.21107/dinar.v8i2.11026>
- Jauch, Lawrence R. & Glueck William F. (2001). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan (Edisi Pertama)*, Erlangga, Jakarta.
- Kabul, L. M. (2019). Manajemen Pembangunan Kependudukan: Koreksi Terhadap Teori Malthus. *Ganec Swara*, 13(2), 317. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.98>
- Komarudi, D., Isnaini, I., & Hartono, B. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 240–251. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1190>
- Mau, M., Tahara, T., Munizu, M., Yusniar, Y., & Marsudi, M. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan. *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.46891/kainawa.1.2019.87-99>
- Mukri, S. G. (2018). Menyongsong bonus demografi indonesia. 'Adalah, 2(6). <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i6.8223>
- Nulhaqim, S. A., Deliarnoor, N. A., & Putri, T. A. (2023). “Validasi Data Kependudukan” Apps as A Representation of Sustainable Public Governance. *Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram*, 11(1), 85. <https://doi.org/10.33394/j-ps.v11i1.6592>
- Pearce, J. A. II, dan Robinson, R. B., Jr., (2003). *Cases in Strategic Management*, 4th edition, IL: Richard D. Irwin, Inc: Chicago.
- Prasetyo, A., & Gartika, D. (2022). Strategic Planning Analysis of Grand Design of Population Development. *Economics Development Analysis Journal*, 10(4), 484–497. <https://doi.org/10.15294/edaj.v10i4.45594>
- Raharto, A. (2020). Penanggulangan Covid-19 Dalam Kerangka Teori Kependudukan Malthus. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2902, 1. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.583>
- Rangkuti, Freddy. (2015). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Salim, L. (2020). Integration and synchronization of population policies through grand design population development in indonesia.

- Medico-Legal Update, 20(4), 301-306.  
<https://doi.org/10.37506/mlu.v20i4.1817>
- Sari, I. P., & Frinaldi, A. (2022). Systematic Literature Review: Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(4), 271-277.
- Septiani, E., Setyowati, D. L., & Atmaja, H. T. (2022). Pengembangan EduKependudukan digital di sekolah siaga kependudukan untuk mewujudkan sustainable development goals (SDGs). *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 8(2), 156-170.  
<https://doi.org/10.22219/jinop.v8i2.22296>
- Sutisna, N. (2006). *Enam Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan*. Urban and Regional Development Institute dan Yayasan Sugijanto Soegijoko. Jakarta
- SiPerindu. (2024). *Data Indikator Kependudukan*, Diakses dari <https://siperindu.online/>, Tanggal 18 Februari 2024
- Thompson. (2008). *The Economic of Banking 2nd Edition*. John Wiley. New York.
- Wolf, Douglas A. and Amirkhanyan, Anna A., (2010), *Demographic Change and Its Public Sector Consequences*, *Public Administration Review*, Willey-Blackwell.